LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

2024 *AUDITED*

MEI 2025

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

2024 *AUDITED*

MEI 2025

Kata Pengantar

Dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dengan status telah diperiksa (*Audited*), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024.

APBN TA 2024 masih dihadapkan pada berbagai macam peristiwa yang memunculkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap perekonomian global. Ketidakpastian yang dipicu dengan masih berlangsungnya konflik geopolitik dan pergerakan harga pangan akibat dampak El Nino, peningkatan harga minyak hingga penurunan harga batu bara internasional. Kondisi ini berdampak pada masih terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas pangan, yang menimbulkan tekanan perekonomian domestik di negara berkembang termasuk Indonesia. Di tengah seluruh tantangan tersebut, APBN TA 2024 juga harus dipastikan dapat menyelesaikan seluruh agenda pembangunan yang telah dirancang antara lain program peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, APBN telah berperan aktif sebagai *shock absorber* dalam meredam dampak gejolak perekonomian global melalui kebijakan yang waspada, antisipatif, dan responsif dengan tetap fokus pada pengendalian inflasi, pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga efektivitas belanja dalam menunjang peningkatan produktivitas dan inklusivitas perekonomian. Pemerintah juga terus melanjutkan proses konsolidasi dan reformasi fiskal dalam rangka menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah dan panjang.

Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPP Tahun 2024 terdiri dari tujuh komponen, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan. Di samping itu, LKPP Tahun 2024 juga dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara demi transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik di masa yang akan datang. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan sepanjang tahun 2024, antara lain:

a. melanjutkan penyempurnaan proses integrasi pelaporan kinerja ke dalam pelaporan keuangan untuk dapat meningkatkan akurasi capaian keluaran dari setiap kegiatan APBN;
b. menyempurnakan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi, terutama dengan menerbitkan PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran dan PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama;

c. secara konsisten melakukan pembinaan pengelolaan keuangan kepada seluruh kementerian/lembaga agar kualitas pertanggungjawaban anggaran di tingkat kementerian/lembaga bisa semakin baik; dan
d. menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya, agar dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan dan tidak menjadi temuan berulang di masa yang akan datang.

Di samping semua pencapaian yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2024, Pemerintah tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif, sehingga LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin berkualitas. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyajikan LKPP secara andal sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 *(Audited)* yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2024 *(Audited)* ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPP Tahun 2024 (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

OPINI

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Pusat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi APBN, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 33.b/LHP/XV/05/2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 19 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi APBN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	Realisasi s.d 31 Desember TA 2024 (*Audited*)			Realisasi s.d 31 Desember TA 2023 (*Audited*)
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	**2.802,46**	**2.850,60**	**101,72**	**2.783,93**
Belanja Negara:	**3.343,49**	**3.359,76**	**100,49**	**3.121,22**
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.485,90	2.496,22	100,42	2.239,79
II. Transfer ke Daerah	857,59	863,54	100,69	881,43
Surplus (Defisit) Anggaran	**(541,03)**	**(509,16)**	**94,11**	**(337,29)**
Pembiayaan Neto	**541,03**	**554,89**	**102,56**	**356,66**
SiLPA (SiKPA)		**45,73**		**19,37**

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Berikut merupakan ringkasan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
A	**SAL awal**	**459,50**	**478,96**
B	**Penggunaan SAL**	**(56,38)**	**(35,00)**
C	**SiLPA/SiKPA**	**45,73**	**19,38**
D	**Penyesuaian SAL**	**8,69**	**(3,84)**
E	**SAL akhir (A + B + C + D)**	**457,54**	**459,50**

3. NERACA

Berikut merupakan ringkasan Neraca per 31 Desember 2024.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Aset		
Aset Lancar	906,11	894,41
Investasi Jangka Panjang	4.391,55	4.077,23
Aset Tetap	7.149,82	6.964,27
Properti Investasi	110,54	104,37
Piutang Jangka Panjang	48,62	49,19
Aset Lainnya	1.085,72	983,33
Total Aset	**13.692,36**	**13.072,80**
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	1.328,52	1.092,26
Kewajiban Jangka Panjang	8.940,49	8.444,42
Total Kewajiban	**10.269,01**	**9.536,68**
Ekuitas	**3.423,35**	**3.536,12**
Total Kewajiban dan Ekuitas	**13.692,36**	**13.072,80**

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No	Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1	Pendapatan Operasional	3.115,26	3.083,37
2	Beban Operasional	3.353,60	3.111,67
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(238,34)	(28,30)
4	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22,68	59,92
5	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
6	**Surplus/(Defisit) LO**	**(215,66)**	**31,62**

5. LAPORAN ARUS KAS

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Saldo Awal Kas	**606,01**	**536,44**
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(154,15)	(34,79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(414,40)	(391,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	614,28	445,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	24,39	88,76
Kenaikan (Penurunan) Kas	**70,12**	**108,14**
Penggunaan SAL	**(56,38)**	(35,00)
Koreksi Pembukuan	9,26	(3,57)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penggunaan SAL dan Koreksi Pembukuan	**23,00**	**69,57**
Saldo Akhir Kas	**629,01**	**606,01**
Saldo Kas Pemerintah Lainnya	**(199,34)**	**(175,30)**
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**429,67**	**430,71**

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 secara ringkas disajikan sebagai berikut.

(Rp Triliun)

No.	Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1	**Ekuitas Awal**	**3.536,14**	**3.404,89**
2	Surplus/Defisit LO	(215,66)	31,63
3	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/ Mengurangi Ekuitas	102,87	99,62
4	Transaksi Antar Entitas	-	-
5	**Kenaikan/Penurunan Ekuitas**	**(112,79)**	**131,25**
6	**Ekuitas Akhir**	**3.423,35**	**3.536,14**

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPP Tahun 2024 (*Audited*) memuat informasi antara lain sebagai berikut.

a. Informasi mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
LKPP merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan terdiri dari 86 LKKL dengan total 19.128 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 789 entitas akuntansi yang tersebar di 10 satuan kerja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

b. Kebijakan Fiskal

Pada tahun 2024, Kebijakan Fiskal APBN diarahkan untuk "**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" dengan mempertimbangkan dinamika ketidakpastian global serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2022-2024.

c. Ekonomi Makro
Berikut merupakan ringkasan realisasi asumsi dasar makro ekonomi sampai dengan 31 Desember 2024.

(dalam persen, y-on-y)

Indikator	Asumsi APBN 2024	Capaian 2024	Capaian 2023
Pertumbuhan Ekonomi (persen, y-on-y)	5,2	5,03	5,05
Inflasi (persen, *y-on-y*)	2,8	1,57	2,61
Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun (persen)	6,7	6,78	6,63
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	15.000	15.847	15.255
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	82	78,14	78,43
Lifting Minyak *(*ribu barel per hari*)*	635	579,66	605,50
Lifting Gas Bumi *(*ribu barel setara minyak per hari*)*	1.033	1.016,71	1.006,40

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), Badan Pusat Statistik (2025), Bank Indonesia (2025), Kementerian ESDM (2025)

d. Ikhtisar hasil pencapaian target keuangan berupa penjelasan mengenai hasil pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari kinerja pendapatan dan kinerja belanja APBN.

e. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan LKPP Tahun 2024 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Selain itu, CaLK juga memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

DAFTAR ISI

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iv

HALAMAN OPINI v

RINGKASAN EKSEKUTIF vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GRAFIK xii

I. LAPORAN REALISASI APBN 1

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4

III. NERACA 5

IV. LAPORAN OPERASIONAL 8

V. LAPORAN ARUS KAS 10

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 13

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 14

A.PENJELASAN UMUM 14

A.1. INFORMASI ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI 14

A.2. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024 16

A.3. EKONOMI MAKRO 19

A.3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 21

A.3.2. INDIKATOR EKONOMI MAKRO 29

A.3.3. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 35

A.4. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN 40

A.5. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 52

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 53

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 73

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 73

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 74

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 101

C.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL 120

D.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 125

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 125

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA 126

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA 179

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 196

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL 196

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL 196

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA 217

F.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 218

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 218

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 220

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 238

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan APBN Tahun 2024 dan 2023 18

Tabel 2 Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023 21

Tabel 3 Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023 29

Tabel 4 Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2024 dan 2023 30

Tabel 5 Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Januari–Desember 2024 34

Tabel 6 Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 35

Tabel 7 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2024 dan 2023 41

Tabel 8 Realisasi Belanja Negara Tahun 2024 dan 2023 45

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023 Menurut Fungsi 47

Tabel 10 Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 dan 2023 48

Tabel 11 Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2024 dan 2023 50

Tabel 12 Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023 51

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2015 – 2024 20

Grafik 2 Inflasi Negara Mitra Dagang Tahun 2024 20

Grafik 3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 21

Grafik 4 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran 22

Grafik 5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha 23

Grafik 6 Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB 24

Grafik 7 Perkembangan Tingkat Inflasi 2022 – 2024 25

Grafik 8 Perkembangan Tingkat Inflasi Januari–Desember 2024 Menurut Kelompok Komponen 26

Grafik 9 Perkembangan *Yield* Hasil Lelang SUN 10 Tahun 26

Grafik 10 **T**ren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2024 27

Grafik 11 Perkembangan Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia 2023 dan 2024 28

Grafik 12 Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 28

Grafik 13 Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2020–2024 29

Grafik 14 Perkembangan Cadangan Devisa Tahun 2023 dan 2024 31

Grafik 15 BI-Rate dan Operasi Moneter Tahun 2023–2024 31

Grafik 16 Perkembangan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tahun 2023 – 2024 32

Grafik 17 Perkembangan Bank Indonesia *Rate* tahun 2023–2024 33

Grafik 18 Tren Laju IHSG (end of period) Tahun 2023 dan 2024 33

Grafik 19 Indikator Kinerja Perbankan Umum 2023 – 2024 34

Grafik 20 Perkembangan Total Kredit dan DPK Perbankan 2023 - 2024 35

Grafik 21 Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2020–Agustus 2024 36

Grafik 22 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2020–September 2024 36

Grafik 23 Perkembangan Rasio Gini Maret 2020–September 2024 37

Grafik 24 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020–2024 38

Grafik 25 Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan 2020–2024 39

Grafik 26 Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2024 43

Grafik 27 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja 46

Grafik 28 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah Tahun 2020 – 2024 73

Grafik 29 Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 – 2024 73

Grafik 30 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 74

Grafik 31 Komposisi K/L Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2024 82

Grafik 32 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2024 83

Grafik 33 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 87

Grafik 34 Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2020 s.d Tahun 2024 196

Grafik 35 Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional 197

Grafik 36 Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2024 197

Grafik 37 Komposisi Beban Operasional Tahun 2024 204

Grafik 38 Komposisi Beban Transfer ke Daerah Tahun 2024 211

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	TA 2024 (*Audited*)			TA 2023 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Pendapatan Perpajakan	**B.2.1.1**	**2.218.401.100.000.000**	**2.231.839.822.879.833**	**100,61%**	**2.154.208.219.467.830**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	2.146.466.840.000.000	2.157.982.145.917.601	100,54%	2.089.718.285.003.417
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	71.934.260.000.000	73.857.676.962.232	102,67%	64.489.934.464.413
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**549.137.450.331.000**	**584.378.057.583.276**	**106,42%**	**612.537.298.582.643**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	235.522.497.376.000	228.928.767.532.781	97,20%	254.203.031.073.614
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	B.2.1.2.2	85.845.465.000.000	86.384.593.538.563	100,63%	82.058.743.373.870
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	B.2.1.2.3	80.430.963.536.000	104.716.732.371.421	130,19%	95.860.392.158.963
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.4	147.338.524.419.000	164.347.964.140.511	111,54%	180.415.131.976.196
III. Pendapatan Hibah	**B.2.1.3**	**34.923.600.000.000**	**34.387.363.715.756**	**98,46%**	**17.184.158.879.725**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		**2.802.462.150.331.000**	**2.850.605.244.178.865**	**101,72%**	**2.783.929.676.930.198**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**2.485.902.580.516.000**	**2.496.223.901.585.884**	**100,42%**	**2.239.786.701.499.164**
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	484.430.934.181.000	464.859.258.914.201	95,96%	412.711.324.466.564
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	406.983.772.758.000	523.368.042.639.998	128,60%	432.714.969.865.127
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	247.474.230.827.000	355.511.133.723.811	143,66%	303.041.293.068.751
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	497.319.602.591.000	488.426.422.143.817	98,21%	439.882.584.341.259
5. Belanja Subsidi	B.2.2.1.5	285.971.979.124.000	292.692.594.096.846	102,35%	269.592.086.053.747
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	6.579.656.000	278.430.938.953	4231,69%	219.140.718.777
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	157.302.981.407.000	154.949.830.442.829	98,50%	156.601.633.832.214
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	406.412.499.972.000	216.138.188.685.429	53,18%	225.023.669.152.725
II. Transfer ke Daerah	**B.2.2.2**	**857.591.741.378.000**	**863.542.806.482.364**	**100,69%**	**881.430.544.208.454**
1. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	143.099.927.456.000	153.174.562.784.262	107,04%	205.666.564.020.630
2. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	427.699.303.543.000	429.210.611.278.998	100,35%	398.029.628.594.542
3. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	188.101.019.444.000	183.538.473.113.006	97,57%	181.357.561.783.241
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55%	50.334.741.347.305
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	133.764.611.642.000	130.441.233.738.467	97,52%	128.081.946.376.309

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	TA 2024 (*Audited*)			TA 2023 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
c. Hibah kepada Daerah	B.2.2.2.3.3	513.943.967.000	2.207.162.260.694	429,46%	2.940.874.059.627
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100,00%	17.241.263.570.000
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	1.372.725.809.224
6. Dana Desa	B.2.2.2.6	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	69.856.768.617.317
7. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52%	7.906.031.813.500
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)		**3.343.494.321.894.000**	**3.359.766.708.068.248**	**100,49%**	**3.121.217.245.707.618**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(541.032.171.563.000)**	**(509.161.463.889.383)**	**94,11%**	**(337.287.568.777.420)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	**B.2.4.1**	**528.758.369.161.000**	**462.577.425.084.416**	**87,48%**	**275.463.701.706.796**
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	B.2.4.1.1	151.381.000.000.000	56.419.615.865.000	37,27%	37.225.200.000.000
2. Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	(4.171.912.452.000)	(4.242.437.773.274)	101,69%	(1.905.999.112.657)
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.3	3.921.260.000.000	4.023.538.398.833	102,61%	6.374.398.495.969
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.4	649.230.000.000	1.400.109.062.740	215,66%	1.097.737.606.166
5. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.5	554.655.048.027.000	450.733.252.420.187	81,26%	308.193.788.405.962
a. Penerimaan Surat Berharga Negara		-	1.075.437.376.773.300	-	848.108.055.742.428
b. Pengeluaran Surat Berharga Negara		-	624.704.124.353.113	-	539.914.267.336.466
6. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	(636.230.414.000)	15.019.471.247.141	-2360,70%	14.558.368.405.525
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.258.429.586.000	20.122.653.359.752	617,56%	17.504.129.527.679
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		3.894.660.000.000	5.103.182.112.611	131,03%	2.945.761.122.154
7. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.7	(151.216.040.000.000)	(44.332.592.681.665)	29,32%	(69.897.795.440.654)
8. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.8	(823.986.000.000)	(1.458.986.000.000)	177,06%	(330.511.505.000)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	TA 2024 (*Audited*)			TA 2023 (*Audited*)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9	(25.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	60,00%	(20.000.000.000.000)
10. Pembiayaan Lain-lain	B.2.4.1.10		15.454.545.454		148.514.851.485
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**12.273.802.402.000**	**92.311.154.268.612**	**752,10%**	**81.200.046.007.725**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	97.751.162.402.000	179.765.350.519.789	183,90%	162.650.352.798.218
a. Penarikan Pinjaman Tunai	B.2.4.2.1.1	60.000.000.000.000	60.028.929.576.507	100,05%	82.990.780.840.684
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.751.162.402.000	119.736.420.943.282	317,17%	79.659.571.957.534
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.2	(85.477.360.000.000)	(87.454.196.251.177)	102,31%	(81.450.306.790.493)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**541.032.171.563.000**	**554.888.579.353.028**	**102,56%**	**356.663.747.714.521**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D + C)	**B.2.5**		**45.727.115.463.645**		**19.376.178.937.101**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	**C.1**	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**C.2**	**(56.381.000.000.000)**	**(35.000.000.000.000)**
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**C.3**	**45.727.115.463.645**	**19.376.178.937.101**
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		**448.843.987.534.343**	**463.333.335.256.502**
D. Penyesuaian SAL			
Penyesuaian Pembukuan	C.4	9.293.355.123.095	(3.548.034.701.030)
Penyesuaian Lain-lain	C.5	(594.067.608.219)	(287.428.484.774)
Total Penyesuaian SAL		**8.699.287.514.876**	**(3.835.463.185.804)**
E. Saldo Anggaran Lebih Akhir (A + B + C + D)	**C.6**	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

NERACA

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 *(Audited)*	31 Desember 2023 *(Audited)*
ASET	**D.2.1**		
Aset Lancar	**D.2.1.1**		
Kas dan Setara Kas:	D.2.1.1.1		
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1.1	180.923.940.557.096	149.595.370.820.262
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.1.2	169.108.412.005.997	193.240.328.220.314
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.1.3	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.1.4	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas dalam Transito	D.2.1.1.1.5	2.750.411.765	4.930.665.723
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.1.6	230.036.155.068	197.710.858.794
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.1.1.1.7	14.763.197.575	318.602.129.457
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.1.8	13.413.383.992.003	21.596.978.800.469
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.1.9	55.341.664.409.102	57.124.640.159.483
Jumlah Kas dan Setara Kas		**429.668.592.676.299**	**430.715.095.759.788**
Uang Muka Rekening Khusus	D.2.1.1.2	47.984.869.011	44.479.546.335
Investasi Jangka Pendek	D.2.1.1.3	41.604.232.972.240	35.230.294.868.007
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	D.2.1.1.4	6.094.076.708.176	9.638.827.128.108
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	D.2.1.1.5	33.545.755.681.226	19.541.282.967.950
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.6	15.016.056.040.236	15.268.713.521.615
Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.7		
Piutang Perpajakan	D.2.1.1.7.1	116.122.193.803.295	117.416.962.637.093
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.7.2	362.283.604.412.936	346.336.409.911.621
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.1.7.3	4.973.296.910	6.303.880.875
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.1.7.4	47.927.723.868	51.329.053.281
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.7.5	21.286.136.965.214	20.910.716.095.280
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.7.6	7.877.977.149.129	7.658.986.809.661
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.2.1.1.7.7	6.030.989.502.636	5.226.516.523.383
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D.2.1.1.7.8	601.641.690.434	439.971.307.053
Piutang PFK	D.2.1.1.7.9	-	109.652.841
Jumlah Piutang Jangka Pendek (Bruto)		514.255.444.544.422	498.047.305.871.088
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	D.2.1.1.7.10	(339.500.221.300.289)	(318.262.010.449.930)
Jumlah Piutang Jangka Pendek (Bersih)		174.755.223.244.133	179.785.295.421.158
Persediaan	D.2.1.1.8	205.383.693.515.885	204.183.149.868.940
Jumlah Aset Lancar		**906.115.615.707.206**	**894.407.139.081.901**
Investasi Jangka Panjang	**D.2.1.2**		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	D.2.1.2.1		
Dana Bergulir	D.2.1.2.1.1	16.831.926.939.422	19.553.196.920.303
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.1.2	(1.404.183.720.277)	(1.562.930.032.200)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		15.427.743.219.145	17.990.266.888.103
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.1.3	269.364.784.080.765	280.412.334.935.034
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya diragukan Realisasinya	D.2.1.2.1.4	(974.366.095.513)	(945.649.215.159)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)		268.390.417.985.252	279.466.685.719.875
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		283.818.161.204.397	297.456.952.607.978
Investasi Jangka Panjang Permanen	D.2.1.2.2		
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.2.1	3.317.709.229.098.828	3.093.225.298.186.938
Investasi Permanen BLU	D.2.1.2.2.2	8.053.004.500	8.053.004.500
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.2.3	790.019.190.222.637	686.539.843.221.699
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		4.107.736.472.325.965	3.779.773.194.413.137
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**4.391.554.633.530.362**	**4.077.230.147.021.115**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 *(Audited)*	31 Desember 2023 *(Audited)*
Aset Tetap	**D.2.1.3**		
Tanah	D.2.1.3.1	4.440.708.614.330.710	4.428.281.859.414.984
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	1.047.706.500.749.303	933.675.927.241.240
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	520.656.941.799.388	474.213.237.924.935
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.219.031.657.528.366	1.138.237.638.193.193
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	54.507.515.237.225	54.932.081.546.750
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	292.828.848.722.880	246.569.189.414.353
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.468.661.001.712.742)	(1.319.486.078.936.377)
Aset Konsesi Jasa	D.2.1.3.7	1.142.764.539.602.862	1.088.210.735.514.398
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		(99.723.585.840.503)	(80.340.569.263.966)
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		**8.718.204.617.970.734**	**8.364.120.669.249.853**
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.8	(1.568.384.587.553.245)	(1.399.826.648.200.343)
Jumlah Aset Tetap (Bersih)		**7.149.820.030.417.489**	**6.964.294.021.049.510**
Properti Investasi	**D.2.1.4**		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	167.441.790.385.915	160.506.675.838.552
Jumlah Properti Investasi (Bruto)		**167.441.790.385.915**	**160.506.675.838.552**
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(56.903.685.457.928)	(56.132.925.175.972)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)		**110.538.104.927.987**	**104.373.750.662.580**
Piutang Jangka Panjang	**D.2.1.5**		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.1.5.1	67.788.724.997	78.839.430.596
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	D.2.1.5.2	312.123.674.481	310.437.056.539
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.3	48.201.737.216.319	48.644.267.627.749
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.4	4.603.555.525.470	4.576.224.167.487
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		**53.185.205.141.267**	**53.609.768.282.371**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.5	(4.566.738.210.270)	(4.421.514.439.573)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		**48.618.466.930.997**	**49.188.253.842.798**
Aset Lainnya	**D.2.1.6**		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.2.1.6.1	49.801.920.221.767	49.875.449.199.365
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.2	83.281.083.305.526	71.168.490.628.320
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.2.1.6.3	2.043.967.654.510	1.241.448.631.883
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.4	492.213.916.370.469	451.183.897.393.302
Dana Cadangan Penjaminan	D.2.1.6.5	13.675.145.505.000	12.216.159.505.000
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	D.2.1.6.6	747.738.900.000	613.442.550.000
Dana Kelolaan BLU	D.2.1.6.7	53.287.731.646.004	16.047.968.379.573
Dana Jangka Panjang	D.2.1.6.8	28.528.648.017.150	36.015.899.438.036
Aset Lain-lain	D.2.1.6.9	755.180.684.209.603	696.199.863.151.665
Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya	D.2.1.6.10	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		**1.510.052.983.101.380**	**1.364.417.385.162.997**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.2.1.6.11	(424.333.983.105.192)	(381.090.728.971.707)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		**1.085.718.999.996.188**	**983.326.656.191.290**
JUMLAH ASET		**13.692.365.851.510.229**	**13.072.819.967.849.194**
KEWAJIBAN	**D.2.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	**D.2.2.1**		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	169.505.587.248.935	191.809.032.711.121
Utang Bunga	D.2.2.1.3	118.250.088.626.967	112.693.785.312.937
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	19.445.038.835.881	25.207.352.917.324
Utang Transfer	D.2.2.1.5	97.460.927.735.555	52.187.965.129.846
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	786.695.375.102.677	638.953.070.948.495
Unamortized Discount		(885.329.385.000)	(368.630.075.000)
Unamortized Premium		265.185.148.000	440.320.180.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 *(Audited)*	31 Desember 2023 *(Audited)*
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.2.1.7	62.418.300.000.000	31.412.000.000.000
Unamortized Discount		(1.566.657.675.000)	(467.650.585.000)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.2.1.8	63.620.122.728.245	27.965.899.727.133
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.9	8.791.568.189.681	7.476.388.964.347
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.10	111.122.213.990	403.617.716.901
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.2.1.11	91.787.396.199	4.661.192.664
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**1.328.524.056.593.660**	**1.092.254.611.766.819**
Kewajiban Jangka Panjang	**D.2.2.2**		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	D.2.2.2.1		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.1.1	44.273.286.260.921	31.552.061.212.395
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1.2	6.890.023.998.123.707	6.563.241.522.670.168
Unamortized Discount		(49.634.944.892.000)	(49.942.041.191.000)
Unamortized Premium		42.720.368.963.000	44.567.904.657.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.1.3	86.273.473.974.300	39.891.869.021.700
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.1.4	31.042.846.841.712	25.871.215.355.337
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.1.5	344.461.288.264.152	313.375.462.067.170
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.1.6	530.768.330.796	560.625.887.734
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		**7.389.691.085.866.588**	**6.969.118.619.680.504**
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	D.2.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.2.1	943.345.582.337.528	886.277.290.731.920
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.2.2	27.335.416.515	26.579.390.708
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		**943.372.917.754.043**	**886.303.870.122.628**
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3		
Kewajiban Konsesi Jasa	D.2.2.2.3.1	607.430.198.027.586	589.002.419.926.666
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa		**607.430.198.027.586**	**589.002.419.926.666**
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**8.940.494.201.648.217**	**8.444.424.909.729.798**
JUMLAH KEWAJIBAN		**10.269.018.258.241.877**	**9.536.679.521.496.617**
EKUITAS	**D.2.3**	**3.423.347.593.268.352**	**3.536.140.446.352.577**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**13.692.365.851.510.229**	**13.072.819.967.849.194**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL	**E.2.1**				
PENDAPATAN OPERASIONAL	**E.2.1.1**				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	**E.2.1.1.1**				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	1.038.768.057.988.153	1.056.264.876.071.451	(17.496.818.083.298)	(1,66)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	E.2.1.1.1.2	811.437.285.482.573	749.872.917.946.326	61.564.367.536.247	8,21
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	33.329.636.622.280	35.111.968.220.488	(1.782.331.598.208)	(5,08)
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	224.896.521.710.713	218.828.516.227.555	6.068.005.483.158	2,77
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	11.995.165.095.884	9.962.359.820.249	2.032.805.275.635	20,40
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	53.376.144.254.078	50.951.896.485.742	2.424.247.768.336	4,76
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	20.676.989.831.040	13.814.253.622.480	6.862.736.208.560	49,68
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**2.194.479.800.984.721**	**2.134.806.788.394.291**	**59.673.012.590.430**	**2,80**
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	**E.2.1.1.2**				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	256.629.229.940.936	280.285.831.628.760	(23.656.601.687.824)	(8,44)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	E.2.1.1.2.2	2.254.798.245	4.529.734	2.250.268.511	49677,72
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.3	101.023.954.431.534	97.370.883.293.667	3.653.071.137.867	3,75
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.4	518.919.237.599.918	544.060.110.601.954	(25.140.873.002.036)	(4,62)
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		**876.574.676.770.633**	**921.716.830.054.115**	**(45.142.153.283.482)**	**(4,90)**
PENDAPATAN HIBAH	**E.2.1.1.3**				
Pendapatan Hibah		44.204.483.636.605	26.849.886.477.341	17.354.597.159.264	64,64
Jumlah Pendapatan Hibah		**44.204.483.636.605**	**26.849.886.477.341**	**17.354.597.159.264**	**64,64**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**3.115.258.961.391.959**	**3.083.373.504.925.747**	**31.885.456.466.212**	**1,03**
BEBAN OPERASIONAL	**E.2.1.2**				
Beban Pegawai	**E.2.1.2.1**	476.500.700.049.411	430.426.321.089.044	46.074.378.960.367	10,70
Beban Persediaan	**E.2.1.2.2**	44.883.665.149.185	44.418.157.818.790	465.507.330.395	1,05
Beban Barang dan Jasa	**E.2.1.2.3**	285.139.851.823.393	225.619.161.434.819	59.520.690.388.574	26,38
Beban Pemeliharaan	**E.2.1.2.4**	45.486.795.081.937	36.518.876.440.164	8.967.918.641.773	24,56
Beban Perjalanan Dinas	**E.2.1.2.5**	55.492.575.872.049	49.900.388.208.994	5.592.187.663.055	11,21
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	**E.2.1.2.6**	84.334.448.261.243	58.308.588.088.465	26.025.860.172.778	44,63
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	**E.2.1.2.7**	524.147.192.364.375	489.648.053.202.050	34.499.139.162.325	7,05
Beban Subsidi	**E.2.1.2.8**	265.510.751.678.440	242.021.207.563.568	23.489.544.114.872	9,71
Beban Hibah	**E.2.1.2.9**	278.430.938.953	219.140.718.777	59.290.220.176	27,06
Beban Bantuan Sosial	**E.2.1.2.10**	155.975.985.991.008	156.341.091.530.982	(365.105.539.974)	(0,23)
Beban Transfer ke Daerah	**E.2.1.2.11**	902.646.703.693.172	881.390.373.057.804	21.256.330.635.368	2,41

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)	Jumlah	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.12	217.330.170.896.748	209.244.320.645.414	8.085.850.251.334	3,86
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.13	33.297.587.421.879	1.928.970.209.539	31.368.617.212.340	1626,18
Beban Lain-lain	E.2.1.2.14	262.572.090.481.077	285.685.389.969.788	(23.113.299.488.711)	(8,09)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**3.353.596.949.702.870**	**3.111.670.039.978.198**	**241.926.909.724.672**	**7,77**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(238.337.988.310.911)**	**(28.296.535.052.451)**	**(210.041.453.258.460)**	**742,29**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset	E.2.2.1.1	482.781.785.082	548.935.351.301	(66.153.566.219)	(12,05)
Beban Pelepasan Aset	E.2.2.1.2	12.810.560.442.129	17.859.492.754.620	(5.048.932.312.491)	(28,27)
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset		**(12.327.778.657.047)**	**(17.310.557.403.319)**	**4.982.778.746.272**	**(28,78)**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	30.359.000.000	105.211.500.000	(74.852.500.000)	(71,14)
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	160.319.500.000	536.653.910.900	(376.334.410.900)	(70,13)
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		**(129.960.500.000)**	**(431.442.410.900)**	**301.481.910.900**	**(69,88)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	144.444.056.555.641	112.221.090.431.627	32.222.966.124.014	28,71
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	109.307.618.750.906	34.556.389.755.094	74.751.228.995.812	216,32
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**35.136.437.804.735**	**77.664.700.676.533**	**(42.528.262.871.798)**	**(54,76)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**22.678.698.647.688**	**59.922.700.862.314**	**(37.244.002.214.626)**	**(62,15)**
SURPLUS/(DEFISIT) LO		**(215.659.289.663.223)**	**31.626.165.809.863**	**(247.285.455.473.086)**	**(781,90)**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.2.1**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.1.1**		
Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1.1		
Pendapatan Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1.1	1.061.940.526.200.605	1.061.234.020.639.596
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.1.2	828.436.302.857.826	763.632.668.212.526
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.1.3	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958
Pendapatan Cukai	F.2.1.1.1.4	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725
Pendapatan Pajak Lainnya	F.2.1.1.1.5	8.742.804.515.348	9.729.790.060.612
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.1.6	73.857.676.962.232	64.489.934.464.413
Total Penerimaan Perpajakan		**2.231.839.822.879.833**	**2.154.208.219.467.830**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	F.2.1.1.2		
Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.1.2.1	228.928.767.532.781	254.203.031.073.614
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	F.2.1.1.2.2	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	F.2.1.1.2.3	163.848.513.738.956	179.868.171.315.795
Pendapatan Badan Layanan Umum	F.2.1.1.2.4	104.716.732.371.421	95.860.392.158.963
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak		**583.878.607.181.721**	**611.990.337.922.242**
Penerimaan Hibah	F.2.1.1.3	34.387.363.715.756	17.184.158.879.725
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**2.850.105.793.777.310**	**2.783.382.716.269.797**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.1.2**		
Belanja Pegawai	F.2.1.2.1	464.859.258.914.201	412.711.324.466.564
Belanja Barang dan Jasa	F.2.1.2.2	523.368.042.639.998	432.714.969.865.127
Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.2.3	488.426.422.143.817	439.882.584.341.259
Belanja Subsidi	F.2.1.2.4	292.692.594.096.846	269.592.086.053.747
Belanja Hibah	F.2.1.2.5	278.430.938.953	219.140.718.777
Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.2.6	154.949.830.442.829	156.601.633.832.214
Belanja Lain-Lain	F.2.1.2.7	216.138.188.685.429	225.023.669.152.725
Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.2.8	54.241.430.203.000	63.845.997.623.000
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.2.9	93.845.576.439.722	135.944.555.602.100
Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.2.10	5.087.556.141.540	5.876.010.795.530
Dana Alokasi Umum	F.2.1.2.11	429.210.611.278.998	398.029.628.594.542
Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.2.12	50.890.077.113.845	50.334.741.347.305
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal	F.2.1.2.13	26.693.231.531.500	26.520.021.192.724
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.2.14	130.441.233.738.467	128.081.946.376.309
Dana Desa	F.2.1.2.15	70.925.927.774.598	69.856.768.617.317
Hibah Kepada Daerah	F.2.1.2.16	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**3.004.255.574.344.437**	**2.818.175.952.638.867**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**(154.149.780.567.127)**	**(34.793.236.369.070)**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2.2**		
I. Arus Kas Masuk	F.2.2.1		
Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1.1	499.450.401.555	546.960.660.401
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.1.2	1.400.109.062.740	1.097.737.606.166
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.1.3	3.268.707.260.033	359.653.415.387
Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.1.4	19.619.717.681.824	26.441.256.275.225
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**24.787.984.406.152**	**28.445.607.957.179**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.2.2**		
Belanja Modal	F.2.2.2.1	355.511.133.723.811	303.041.293.068.751
Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.2.2	15.000.000.000.000	20.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.2.3	-	2.225.200.000.000
Penyertaan Modal Negara	F.2.2.2.4	42.149.731.758.522	41.421.985.992.266
Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.2.5	26.530.271.865.000	53.382.030.644.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**439.191.137.347.333**	**420.070.509.705.017**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		**(414.403.152.941.181)**	**(391.624.901.747.838)**
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**F.2.3**		
I. Arus Kas Masuk	**F.2.3.1**		
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1.1	1.151.979.645.998.052	902.837.385.270.107
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.1.2	179.765.350.519.789	162.650.352.798.218
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.1.3	4.023.538.398.833	6.374.398.495.969
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.3.1.4	15.454.545.454	148.514.851.485
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**1.335.783.989.462.128**	**1.072.010.651.415.779**
II. Arus Kas Keluar	**F.2.3.2**		
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.2.1	629.807.306.465.724	542.860.028.458.620
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2.2	87.454.196.251.177	81.450.306.790.493
Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	F.2.3.2.3	4.242.437.773.274	1.905.999.112.657
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		**721.503.940.490.175**	**626.216.334.361.770**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		**614.280.048.971.953**	**445.794.317.054.009**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**F.2.4**		
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	F.2.4.1	(215.134.088.039)	620.329.866.094
Transito (Neto)	F.2.4.2	1.581.530.989.101	14.112.089.380.009
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.4.3	23.022.929.532.814	74.033.583.845.555
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.4.4	2.179.402.806	(4.129.878.872)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**24.391.505.836.682**	**88.761.873.212.786**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		**70.118.621.300.327**	**108.138.052.149.887**
Penggunaan SAL		(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan		9.263.322.996.240	(3.566.936.515.283)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	**F.1.2**	**23.000.944.296.567**	**69.571.115.634.604**
SALDO AWAL KAS	**F.1.1**	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**
SALDO AKHIR KAS		**629.015.216.812.398**	**606.014.272.515.831**
Kas di Bendahara Pengeluaran		230.036.155.068	197.710.858.794
Kas di Bendahara Penerimaan		14.763.197.575	318.602.129.457
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan		2.861.271.218.467	7.604.425.582.862
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(41.604.232.972.240)	(35.230.294.868.007)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(27.381.369.416)	(38.643.493.231)
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(160.823.830.777.318)	(148.155.907.631.641)
Kas Transito (Kiriman Uang)		2.750.411.765	4.930.665.723
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	**F.1.3**	**429.668.592.676.299**	**430.715.095.759.788**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

Uraian	Catatan	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
EKUITAS AWAL	**G.1**	**3.536.140.446.352.577**	**3.404.893.056.498.959**
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**G.2**	**(215.659.289.663.223)**	**31.626.165.809.863**
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**G.3**		
Penyesuaian SiLPA	G.3.1	2.074.667.959.503	1.498.554.940.209
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.2	7.101.832.764.823	5.454.942.591.117
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.3	38.417.972.696.012	56.981.718.247.281
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.3.4	2.997.241.878.759	2.146.315.181.897
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	G.3.5	1.437.380.985.498	229.322.791.975
Koreksi Lainnya	G.3.6	50.837.340.294.403	33.310.370.291.276
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		**102.866.436.578.998**	**99.621.224.043.755**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**G.4**	**-**	**-**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**G.5**	**(112.792.853.084.225)**	**131.247.389.853.618**
EKUITAS AKHIR	**G.6**	**3.423.347.593.268.352**	**3.536.140.446.352.577**

Jakarta, 19 Mei 2025
a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
AUDITED 2024

A. PENJELASAN UMUM

A.1. INFORMASI ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 merupakan laporan konsolidasian yang disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat, terdiri dari 86 LKKL dengan total 19.128 entitas akuntansi dan 1 LKBUN dengan total 789 entitas akuntansi yang tersebar di 10 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 - Penyajian Laporan Keuangan, entitas pelaporan didefinisikan sebagai unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi didefinisikan sebagai unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBN hanya dibedakan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Dengan demikian, proses konsolidasi secara berjenjang dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan tertinggi (Pemerintah Pusat) telah mencakup seluruh entitas baik lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga negara, badan, dan lembaga/badan lain yang dalam menjalankan kegiatannya menggunakan dana APBN.

Sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang.

Dalam konteks pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan memiliki tiga peran, yaitu:

1. Sebagai pengelola fiskal untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP),
2. Sebagai Bendahara Umum Negara yang menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan
3. Sebagai Pengguna Anggaran kementerian yang menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Pada tahun 2024, terdapat dua Kementerian/ Lembaga baru yang terkonsolidasi dalam LKPP yaitu Badan Karantina Indonesia dan Badan Gizi Nasional.

Badan Karantina Indonesia didirikan tanggal 20 Juli 2023, dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia yang merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia merupakan Badan Karantina Pertanian yang ada di bawah Kementerian Pertanian sesuai Perpres Nomor 45 Tahun 2015. Namun melalui Perpres 45 Tahun 2023 Badan Karantina Pertanian dipisahkan dari susunan organisasi Kementerian Pertanian dan berubah menjadi Badan Karantina Indonesia, yang merupakan sebuah Lembaga setingkat K/L yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan memiliki Bagian Anggaran tersendiri (BA 127). Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BA 128) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Perpres ini mengatur tentang tugas dan fungsi kerawanan gizi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yang berada di bawah Badan Pangan Nasional menjadi dialihkan ke Badan Gizi Nasional.

Daftar entitas pelaporan tingkat K/L dan BUN selaku pengguna anggaran atau kuasa BUN dan jumlah entitas akuntansi untuk setiap K/L dan BUN dapat dilihat pada **Lampiran 1.A.**

Pembentukan Kabinet Merah Putih

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran dan Aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 bagi K/L yang mengalami perubahan, meliputi perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, dan K/L yang baru dibentuk.

K/L yang terdampak, menyusun Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Menteri/Pimpinan Lembaga pada K/L yang mengalami perubahan nomenklatur, menyusun LK dan menandatangani pernyataan tanggung jawab LK atas Bagian Anggaran (BA) DIPA TA 2024 yang mengalami perubahan nomenklatur;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga Pengampu pada K/L yang mengalami pemisahan yang menggunakan mekanisme penggunaan DIPA TA 2024 menyusun LK dan menandatangani pernyataan tanggung jawab LK atas BA DIPA TA 2024;
c. Menteri/Pimpinan Lembaga pada K/L yang mengalami pemisahan yang menggunakan mekanisme pemisahan DIPA TA 2024 menyusun LK dan menandatangani pernyataan tanggung jawab LK atas BA masing-masing;
d. Menteri/Pimpinan Lembaga yang menerima penggabungan menyusun LK dan menandatangani pernyataan tanggung jawab LK atas BA DIPA TA 2024 untuk BA K/L yang digabungkan dan BA K/L yang menerima penggabungan; dan
e. Menteri/Pimpinan Lembaga yang baru dibentuk menyusun LK dan menandatangani pernyataan tanggung jawab LK Tahun 2024 untuk BA-nya.

Dengan demikian, K/L yang mengalami perubahan nomenklatur menyusun LKKL Tahun 2024 dengan menggunakan nomenklatur lama sesuai DIPA TA 2024. Sementara itu, terhadap K/L yang mengalami pemisahan, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 November 2024 Hal Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan dan S-449/MK.2/2024 Tanggal 12 Desember 2024 Hal Penyesuaian Penunjukan Kementerian/Lembaga Pengampu pada Kementerian/Lembaga yang Mengalami Perubahan dengan matriks sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 1.B**.

Informasi keberlanjutan tusi K/L yang mengalami perubahan/pemisahan/penggabungan

Tugas dan fungsi K/L pada Kabinet Merah Putih secara detail diatur di dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing K/L sesuai dengan susunan kementerian yang disebutkan dalam Peraturan Presiden 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Pengungkapan data belanja K/L Pengampu untuk membiayai K/L hasil pemisahan

Pengungkapan Belanja K/L Pengampu untuk membiayai K/L hasil pemisahan dilakukan pada masing-masing Laporan Keuangan K/L yang mengalami pemisahan yang antara lain digunakan untuk mendanai:

1) Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga dan Wakil Menteri/Pimpinan Lembaga untuk K/L hasil pemisahan; dan
2) Program/kegiatan yang relevan dan/atau sesuai dengan pelaksanaan tusi K/L hasil pemisahan.

Secara ringkas, pengaturan pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset dalam masa transisi untuk TA 2024 dan TA 2025 bagi K/L yang mengalami perubahan berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Informasi penggunaan aset dalam rangka penyelenggaraan tusi K/L

Penggunaan aset negara (BMN) untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan dengan mengutamakan BMN eksisting sesuai kondisi organisasi: K/L dengan perubahan nomenklatur memakai BMN dari K/L lama; K/L hasil pemisahan memakai BMN K/L pengampu; K/L hasil penggabungan memakai BMN dari K/L yang digabung; dan K/L baru memakai BMN dari Kementerian Sekretariat Negara atau K/L yang ditunjuk.

Jika aset yang tersedia tidak mencukupi, pemenuhan dilakukan melalui penggunaan bersama, pengalihan status, pemanfaatan BMN Pengelola Barang, atau pinjam pakai barang milik daerah, sesuai standar barang dan kebutuhan. Bila cara-cara tersebut tidak memadai, pemenuhan dilakukan melalui pengadaan dengan prioritas sewa dan tetap mengacu pada dokumen perencanaan kebutuhan, kecuali untuk kebutuhan baru TA 2024 serta kebutuhan TA 2025–2026 bagi K/L hasil pemisahan atau yang baru dibentuk.

b) Pengalihan status penggunaan BMN dilaksanakan setelah pemeriksaan atas LKKL dan LKPP tahun 2024 selesai dilakukan

Pengalihan status penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga akibat perubahan organisasi dilakukan setelah audit atas laporan keuangan TA 2024 selesai, kecuali untuk entitas hasil pemisahan, penggabungan, atau pembentukan baru yang telah memiliki Bagian Anggaran dan melakukan pengalihan penuh terhadap satuan kerja. Proses ini memerlukan persetujuan Pengelola Barang, dengan pengecualian tertentu seperti transfer pembukuan, perjanjian antar K/L hingga semester I 2025, serah terima renovasi, dan mekanisme likuidasi.

Jika belum ada penetapan status penggunaan, dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pengguna Barang. Persetujuan oleh Pengelola Barang harus diterbitkan dalam 5 hari kerja

setelah dokumen lengkap. Dalam kondisi khusus seperti masa kerja sama, asuransi, sengketa, atau proses persetujuan pengelolaan, tanggung jawab atas BMN dialihkan kepada penerima, dan jika proses persetujuan belum selesai hingga likuidasi, pengalihan dilakukan setelah pembatalan permohonan persetujuan sebelumnya.

c) Likuidasi dan penyelesaian aset dan kewajiban K/L yang mengalami pemisahan dan penggabungan

Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan organisasi tertentu dapat dilikuidasi dengan menyelesaikan aset dan kewajibannya, namun proses likuidasi ini hanya dapat dilakukan setelah Laporan Keuangan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2024 selesai diaudit. Kriteria dan tata cara pelaksanaan likuidasi tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga.

d) Kewenangan penetapan tarif atas jenis PNBP dan persetujuan penggunaan dana PNBP untuk kebutuhan penganggaran tahun 2025

Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan, atau penggabungan tetap memiliki kewenangan memungut PNBP sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap menggunakan jenis dan tarif PNBP berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum perubahan organisasi, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1.C.**

Menteri atau Pimpinan Lembaga wajib mengusulkan dasar hukum baru untuk menggantikan ketentuan lama paling lambat enam bulan setelah peraturan ini diundangkan. Persetujuan penggunaan dana PNBP tetap berlaku hingga 31 Desember 2024, dan untuk TA 2025, persetujuan yang lama tetap berlaku hingga ditetapkannya persetujuan baru, kecuali untuk K/L bukan penghasil yang persetujuannya dinyatakan tidak berlaku. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan K/L terkait guna mempercepat penerbitan persetujuan penggunaan dana PNBP yang baru.

e) Informasi terkait penyesuaian alokasi anggaran tahun 2025

Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengalami perubahan melakukan pembahasan bersama untuk memetakan dan menyesuaikan program, kegiatan, serta anggaran berdasarkan Renja, RKA K/L, dan SOTK sesuai pagu TA 2025.

Hasil pembahasan disampaikan kepada DPR melalui alat kelengkapan terkait untuk mendapat persetujuan, yang setelah disetujui dan ditelaah akan menjadi bagian dari daftar hasil penelaahan RKA K/L sebagai dasar penyusunan Perpres tentang rincian APBN.

Berdasarkan RKA K/L dan Perpres tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA TA 2025 sesuai ketentuan, dan Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran menyelesaikan persetujuan DIPA paling lambat minggu pertama Desember 2024. Setelah DIPA ditetapkan, RKA K/L dapat direviu oleh aparat pengawasan intern K/L dengan penyelesaian sebelum 1 Januari 2025.

f) Informasi terkait Penyesuaian K/L teknis yang terlibat dalam pengelolaan TKD tahun 2025

Penyesuaian Kementerian/Lembaga teknis yang terlibat dalam pengelolaan transfer ke daerah TA 2024 dan TA 2025 secara rinci tercantum dalam **Lampiran 1.D.**

g) Persetujuan kontrak tahun jamak yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pada KL yang mengalami pemisahan tetap berlaku sampai dengan berakhimya persetujuan kontrak tahun jamak, beserta perubahan pagu kontrak tahun jamak

Persetujuan kontrak tahun jamak yang telah ditetapkan sebelum perubahan organisasi tetap berlaku hingga masa berlakunya berakhir, termasuk kontrak turunannya. Jika terdapat perubahan pagu atau jangka waktu kontrak setelah organisasi berubah, persetujuan kontrak tahun jamak diberikan oleh pejabat berwenang sesuai dengan struktur baru. Penetapannya dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Menteri Keuangan berdasarkan jenis perubahan: nomenklatur, pemisahan, atau penggabungan, dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan anggaran yang digunakan pada tahun anggaran berjalan.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2024

Sepanjang tahun 2024, Indonesia masih dihadapi oleh ketidakpastian stabilitas ekonomi. Situasi ekonomi global yang dinamis masih menjadi tantangan terhadap stabilitas perekonomian global. Ketegangan geopolitik Timur Tengah dan kondisi politik internal di berbagai negara memberikan tantangan nyata bagi tren perekonomian dunia dan stabilitas perekonomian negara lain. Isu

perdagangan antara dua negara dengan perekonomian terkuat di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi memicu perang dagang baru yang berpengaruh terhadap rantai pasok global dan standar hidup konsumen di berbagai negara, terutama negara berkembang. APBN TA 2024 dirancang untuk merespons dinamika perekonomian secara efektif, mengantisipasi prospek perekonomian global, dan mendukung agenda pembangunan nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global. Sebagai penopang perekonomian, APBN diprioritaskan untuk pengalokasian Belanja Pemerintah dan Transfer Daerah untuk Pemulihan Perekonomian.

Dampak perekonomian global seperti fluktuasi harga komoditas menjadi fokus acuan dalam mempertahankan stabilitas perekonomian nasional. Dalam merespons dampak perekonomian nasional terhadap kinerja APBN, kebijakan-kebijakan yang diambil dirancang responsif, antisipatif, dan suportif terhadap berbagai dinamika dan tantangan dalam rangka pembangunan nasional. APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. Peningkatan kinerja perekonomian perlu didorong melalui reformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika ketidakpastian global serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2022-2024. Sejalan dengan tema RKP 2024, kebijakan fiskal pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kebijakan-kebijakan disusun untuk mendukung percepatan reformasi fiskal secara holistik.

Berdasarkan tema dan berbagai *concern* di atas, strategi kebijakan fiskal diarahkan dalam dua langkah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan pada pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, dan peningkatan investasi. Strategi kedua ditempuh melalui strategi jangka panjang dan menengah. Strategi jangka menengah dan panjang akan diterapkan dengan pendekatan lebih komprehensif. Fokus utama dari strategi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, dorongan terhadap aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam, penguatan reformasi kelembagaan dan penyederhanaan regulasi, akselerasi ekonomi hijau. Untuk mendukung upaya percepatan transformasi ekonomi ini, reformasi fiskal yang menyeluruh harus dilaksanakan dengan konsisten, mencakup berbagai aspek penting seperti pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya dapat pulih dengan relatif lebih cepat dari dampak pandemi Covid-19. Pemerintah harus menjaga momentum pascakrisis pandemi Covid-19 untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang diimbangi dengan reformasi fiskal guna mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat. Upaya pemerintah dalam menjaga kontinuitas konsolidasi fiskal tahun 2024 dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, serta pembiayaan yang mendorong pembiayaan yang *prudent*, kreatif, inovatif, dan *sustainable.* Konsolidasi fiskal harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu peran penting APBN dalam melaksanakan fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam perekonomian.

Strategi untuk mengoptimalkan pendapatan negara dilakukan dengan menjaga iklim investasi meskipun menghadapi ketidakpastian global. Untuk menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak pada tahun 2024, kebijakan perpajakan difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan dan memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) guna meningkatkan rasio perpajakan. Di sisi lain, kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui perbaikan kebijakan, pengelolaan, dan peningkatan nilai tambah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi.

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja (*spending better*) untuk mendukung penguatan reformasi struktural dan antisipasi terhadap ketidakpastian global, kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut: (1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas

pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial; serta (4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Strategi pembiayaan anggaran dalam rangka menutup defisit ditekankan untuk menjaga pembiayaan utang dalam batas aman dan *manageable* serta mengoptimalkan pembiayaan nonutang. Pemerintah senantiasa mengarahkan kebijakan pembiayaan agar pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* dan fleksibel dengan memperhatikan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan serta melakukan pinjaman utang yang selektif sesuai dengan arah kebijakan dalam rangka mendorong penyediaan infrastruktur dan alih teknologi. Selain itu, kebijakan pembiayaan nonutang dioptimalkan dengan: (1) melakukan pembiayaan investasi yang efektif dalam mendukung transformasi ekonomi; (2) pemberdayaan BLU, BUMN, *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicles* (SMV); serta (3) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global dan didukung oleh bauran kebijakan yang dirancang pemerintah, pembangunan nasional yang akan dicapai diharapkan dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan serta memberikan dampak atas perbaikan indikator kesejahteraan sosial pada tahun 2024. Indikator tersebut meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,0-5,7 persen, penurunan tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada kisaran 0,374-0,377, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,99-74,02. Apabila dibandingkan dengan target indikator ekonomi tahun 2023, target indikator ekonomi tahun 2024 mencerminkan optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif.

Pada awalnya, Kebijakan Fiskal Tahun 2024 dituangkan ke dalam konteks pengelolaan keuangan negara melalui penetapan APBN TA 2024 dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 yang kemudian didetailkan ke dalam Perpres 76 Tahun 2023. Rincian APBN TA 2024 di dalam Perpres tersebut kemudian diubah melalui Perpres Nomor 206 Tahun 2024. Berdasarkan Perpres Nomor 206 Tahun 2024 ditetapkan bahwa pagu anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.802,46 triliun, anggaran Belanja Negara sebesar Rp3.343,49 triliun yang terdiri dari Rp2.485,90 triliun Belanja Pemerintah Pusat dan Rp857,59 triliun Transfer ke Daerah. Defisit APBN TA 2024 ditargetkan sebesar Rp541,03 triliun, yang akan ditutup melalui Pembiayaan Anggaran sebesar Rp541,03 triliun. Atas penetapan APBN TA 2024 tersebut, diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen. Postur APBN TA 2024 berdasarkan Perpres 206 Tahun 2024 disandingkan dengan postur APBN TA 2023 berdasarkan Perpres 75 Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1
Ringkasan APBN Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN 2024 (Perpres No.206/2024	APBN 2024 (UU No.19 Tahun 2023)	APBN 2023 (Perpres No. 75/2023)	% Angka Naik/ Turun*
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**2.802,46**	**2.802,29**	**2.637,25**	**6,26**
1. Pendapatan Negara	2.767,54	2.801,86	2.634,15	5,06
Penerimaan Perpajakan	2.218,40	2.309,86	2.118,35	4,72
Penerimaan Negara Bukan Pajak	549,14	492,00	515,80	6,46
2. Penerimaan Hibah	34,92	0,43	3,1	1026,45
B. Belanja Negara	**3.343,49**	**3.325,12**	**3.117,18**	**7,26**
1. Belanja Pemerintah Pusat	2.485,90	2.467,53	2.302,46	7,97
2. Transfer ke Daerah	857,59	857,59	814,72	5,26
C. Surplus/(Defisit) Keseimbangan Primer	**(43,71)**	**(25,51)**	**(38,53)**	**13,46**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A - B)	**(541,03)**	**(522,83)**	**(479,93)**	**12,73**
% Surplus/(Defisit) Anggaran Terhadap PDB	(2,37)	(2,29)	(2,27)	4,41
E. Pembiayaan Anggaran	**541,03**	**522,83**	**479,93**	**12,73**
I. Pembiayaan Utang	566,29	648,09	421,21	34,44
II. Pembiayaan Investasi	(176,22)	(176,22)	(175,95)	0,15
III. Pemberian Pinjaman	(0,25)	(0,25)	5,28	(104,48)
IV. Kewajiban Penjaminan	(0,82)	(0,82)	(0,33)	148,48
V. Pembiayaan Lainnya	152,03	52,03	229,72	(33,82)

**) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan. Persentase atas APBN 2024 (Perpres Nomor 206 Tahun 2024) terhadap APBN 2023 (Perpres Nomor 75 Tahun 2023).*

A.3. EKONOMI MAKRO

Sepanjang tahun 2024, perekonomian global menunjukkan resiliensi di tengah kondisi global yang dinamis. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang masih intensif tetap menjadi pemicu risiko ketidakpastian global. Penurunan inflasi global terus berlanjut, meskipun beberapa negara mengalami kenaikan inflasi. Inflasi global yang moderat mendorong pertumbuhan pendapatan riil rumah tangga dan pengeluaran, meskipun kepercayaan konsumen di banyak negara belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Dinamika politik di berbagai negara turut mendorong risiko terhadap stabilitas perekonomian global. Salah satunya, kemenangan Donald John Trump sebagai Presiden AS memberikan sentimen positif pada pasar saham AS, namun berpotensi meningkatkan risiko terhadap pasar negara berkembang. Kondisi tersebut menurunkan harapan pasar karena kekhawatiran kebijakan proteksionisme yang memperlambat penurunan inflasi di AS, sehingga *The Fed* terus mempertahankan kebijakan *higher for longer* untuk menghindari inflasi berkepanjangan. Di sisi lain, ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok terkait isu perdagangan, teknologi, dan keamanan nasional juga menciptakan ketidakpastian global. Kebijakan proteksionisme yang agresif berdampak pada disrupsi perdagangan internasional yang semakin tinggi. Kondisi ini memicu perang dagang baru yang mengganggu rantai pasok global hingga menurunkan standar hidup konsumen di berbagai negara, terutama negara berkembang.

Aktivitas Manufaktur Global mengalami kontraksi di akhir tahun 2024, di angka 49,6, yang merupakan penurunan dalam lima bulan berturut-turut. Produksi manufaktur beberapa negara mengalami stagnan pada kuartal terakhir 2024. India mencatat ekspansi *output* tertinggi, sementara Prancis, Jerman, dan AS mengalami penurunan tajam. Sementara itu, aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan pertumbuhan sektor untuk pertama kali setelah mengalami kontraksi sejak Juni 2024, di level 51,2 pada Desember 2024, yang sebelumnya 49,6 pada November 2024. Angka ini merupakan level tertinggi sejak Mei 2024 yang didorong oleh kenaikan produksi dan permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun internasional seiring dengan meningkatnya aktivitas menjelang Hari Libur Nasional Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, beberapa negara ASEAN dengan ekonomi berbasis manufaktur, seperti Vietnam dan Malaysia berada di zona kontraksi, masing-masing di level 49,8 dan 48,6.

Harga komoditas global cenderung melemah di akhir tahun 2024. Pada komoditas energi, tren harga minyak mentah melemah meskipun OPEC memperpanjang kebijakan *supply cut* dan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang terus menguat. Harga komoditas batu bara juga melemah akibat rendahnya permintaan global dan harga listrik di Eropa. Di sisi lain, harga komoditas pangan *Crude Palm Oil* menguat dipicu oleh kenaikan permintaan global dari India, Eropa, dan Amerika Utara serta kekhawatiran berkurangnya pasokan akibat perubahan iklim. Sementara itu, harga komoditas beras melemah sejak pertengahan tahun pasca kebijakan pembatasan ekspor beras yang dicabut oleh India. Pada komoditas tambang, tren harga tembaga dan nikel masih melemah seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai konsumen terbesar logam tambang tersebut.

Ketidakpastian dan eskalasi tantangan semakin menekan perekonomian global, seiring dengan tingginya volatilitas harga komoditas. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasinya pada Desember 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 3,2 persen (*yoy*) pada 2024 dan naik ke 3,3 persen (*yoy*) pada tahun 2025. Bank Dunia pada bulan Januari 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,7 persen (*yoy*) pada tahun 2024 dan akan di tingkat yang sama pada tahun 2025. Dengan kondisi perekonomian yang masih dihadapkan pada tekanan ketidakpastian, *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Januari 2025 menyatakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 pada kisaran 3,2 persen (*yoy*), sama dengan proyeksinya pada WEO Oktober 2024. Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1 persen (*yoy*), WEO April 2024 sebesar 3,2 persen (*yoy*), WEO Juli 2024 sebesar 3,2 persen (*yoy*), dan WEO Oktober 2024 sebesar 3,2 persen (*yoy*). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi global 2015-2024 dapat dilihat pada **Grafik 1**.

Grafik 1
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Global 2015 – 2024

(dalam persen, *yoy*)

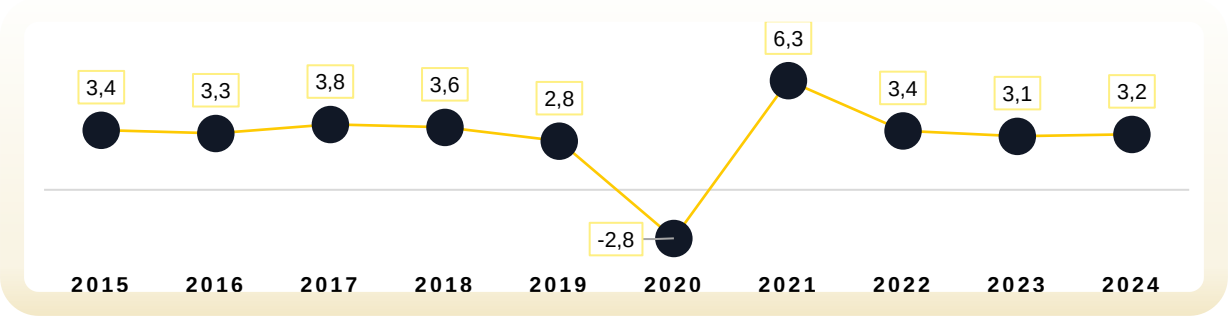

Sumber: IMF-WEO Januari 2025

Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia tahun 2024 menunjukkan kinerja yang beragam. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4.8 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,2 persen (*yoy*). Amerika Serikat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,8 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,9 persen (*yoy*). Pertumbuhan ekonomi Zona Eropa sebesar 0,8 persen (*yoy*), lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 0,4 persen (*yoy*). Pada tahun 2024, perekonomian negara-negara di kawasan ASEAN menunjukkan resiliensi, yang tumbuh sebesar 4,5 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 4,0 persen (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (*yoy*), dibandingkan tahun sebelumnya tumbuh 1,5 persen (*yoy*).

Pada tahun 2024, tingkat inflasi menunjukkan tren moderasi di sejumlah negara. Dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian global yang berpotensi pada ketidakstabilan keuangan yang terus diwaspadai. WEO Januari 2025 mengestimasikan inflasi global pada level 5,7 persen (*yoy*). Inflasi beberapa negara hingga Desember 2024 terlihat pada **Grafik 2.**

Grafik 2
Inflasi Negara Mitra Dagang Tahun 2024

(dalam persen, *yoy*)

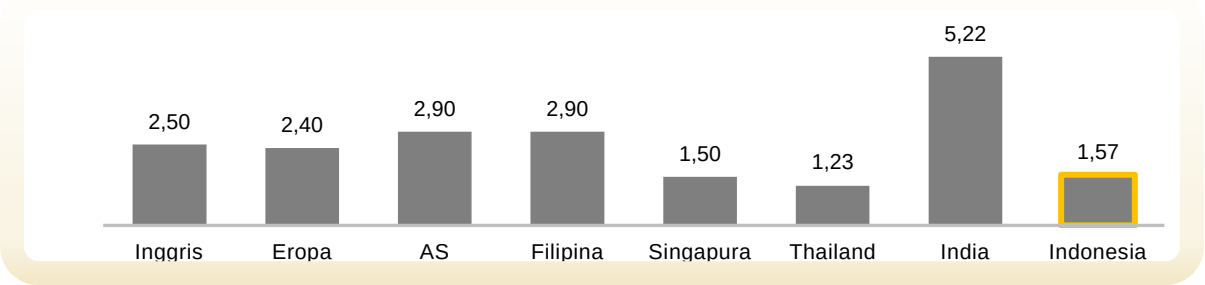

Sumber: *Trading Economics*, 2025

Di tengah kondisi pasar tenaga kerja dan volatilitas harga komoditas yang dipengaruhi tensi geopolitik dan dampak perubahan iklim, tingkat inflasi global tahun 2024 berhasil menunjukkan penurunan. Tingkat inflasi global pada tahun 2024 sebesar 5,7 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 6,8 persen (*yoy*). Tingkat inflasi di sejumlah negara menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh penurunan harga energi dan pelonggaran pasar tenaga kerja, yang menciptakan potensi stabilitas dalam perekonomian global serta kebijakan moneter yang lebih fleksibel. Namun demikian, sejumlah Bank Sentral tetap mempertahankan kebijakan *higher for longer* untuk memastikan penurunan inflasi berlangsung secara konsisten. Di negara maju, tingkat inflasi pada tahun 2024 turun mencapai 2,6 persen (*yoy*), yang sebelumnya sebesar 4,6 persen (*yoy*) pada tahun 2023. Sementara itu, di negara berkembang tingkat inflasi pada tahun 2024 turun mencapai 7,8 persen (*yoy*), dari yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 8,1 persen (*yoy*).

A.3.1. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023

(dalam persen, yoy)

Indikator	2024		Realisasi Tahun 2023
	Asumsi APBN	Realisasi Tahun 2024	
Pertumbuhan Ekonomi (persen, *yoy*)	5,2	5,03	5,05
Inflasi (persen, *yoy*)	2,8	1,57	2,61
Tingkat Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun (persen)	6,7	6,78	6,63
Nilai Tukar (rupiah per dolar AS)	15.000	15.847	15.255
Harga Minyak Mentah Indonesia (dolar AS per barel)	82	78,14	78,43
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	579,66	605,50
Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.016,71	1.006,40

Sumber: Kementerian Keuangan (2024), Badan Pusat Statistik (2025), Bank Indonesia (2025), Kementerian ESDM (2025)

A.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah dinamika ekonomi global. Perekonomian Indonesia mampu mencatat pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 5,03 persen (*yoy*). Keberhasilan dalam mempertahankan laju pertumbuhan ditopang oleh aktivitas konsumsi dan investasi yang semakin kuat. Strategi pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN dan kebijakan strategis dalam merespons tantangan ekonomi secara cepat dan efektif turut menjaga resiliensi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2024 tercatat sebesar 5,02 persen (*yoy*) yang menunjukkan keberlanjutan kinerja positif dari triwulan-triwulan sebelumnya. Secara triwulanan di 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen (*yoy*), 5,05 persen (*yoy*) di Triwulan II, dan 4,95 persen (*yoy*) di Triwulan III. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan asumsi APBN, yaitu 5,20 persen (*yoy*). Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya, Indonesia berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap kuat.

Grafik 3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

(dalam persen, *yoy*)

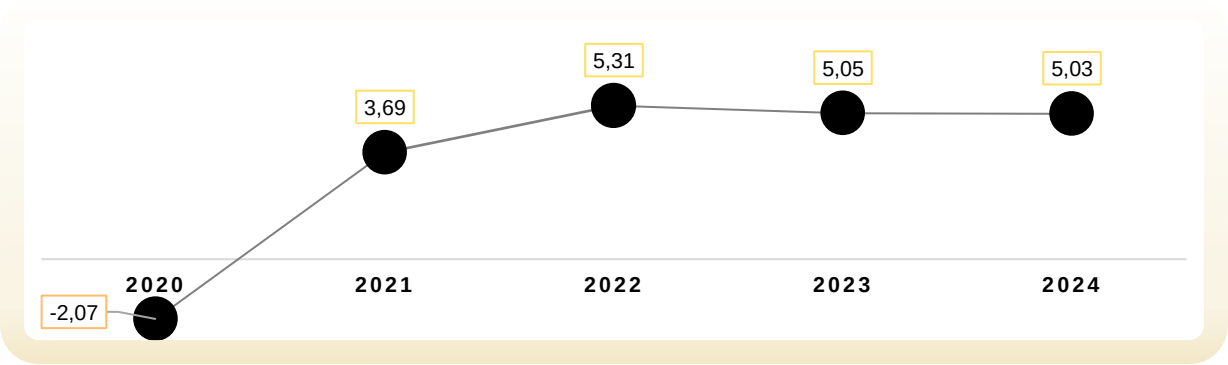

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, seluruh komponen menunjukan pertumbuhan positif pada akhir tahun 2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dengan kontribusi 54,04 persen, tumbuh 4,94 persen (*yoy*) pada tahun 2024 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 yaitu 4,82 persen (*yoy*). Konsumsi Rumah Tangga berhasil tumbuh positif didorong oleh inflasi yang relatif terkendali serta peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja sektor pariwisata yang berdampak pada peningkatan Restoran dan Hotel serta jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara. Selain itu, kebijakan APBN dalam mempertahankan daya beli masyarakat melalui belanja bantuan sosial serta penguatan distribusi pasokan pangan mampu menjaga stabilitas harga. Aktivitas sosial ekonomi

masyarakat yang semakin menguat, tercermin pada kinerja Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) pada tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 12,48 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta berbagai acara olahraga.

Grafik 4
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Pengeluaran

(dalam persen, *yoy*)

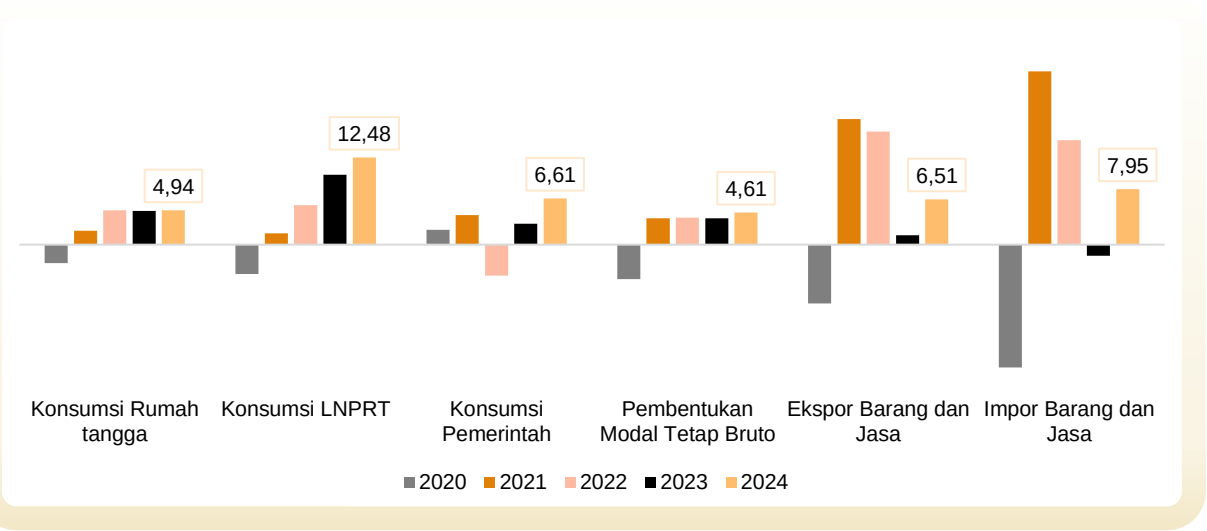

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Konsumsi Pemerintah tahun 2024 tumbuh positif seiring dengan optimalisasi peran APBN dalam menjaga perekonomian nasional. Kinerja Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 6,61 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,02 persen (*yoy*). Kinerja baik tersebut tercermin dari peran belanja negara yang semakin optimal sebagai *shock absorber* dalam menahan efek guncangan ekonomi global. Realisasi belanja negara memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian, baik terhadap aktivitas dunia usaha maupun konsumsi masyarakat. Belanja negara juga turut menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga daya beli masyarakat tetap kuat.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang juga menjadi penyumbang utama PDB menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,61 persen (*yoy*) pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,76 persen (*yoy*). Pertumbuhan PMTB menunjukkan konsistensi perbaikan dalam kurun empat tahun terakhir. Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang tumbuh 20,82 persen, lebih dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan PMTB utamanya ditopang oleh pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta, salah satunya kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan konstruksi lainnya. Selain itu, peningkatan belanja modal yang dialokasikan untuk berbagai sektor produktif juga menjadi pendorong investasi. Pertumbuhan impor barang modal, seperti mesin, peralatan, dan teknologi penunjang, berperan penting dalam mendorong kelangsungan proyek-proyek strategis tersebut.

Kinerja Ekspor Barang dan Jasa mampu tumbuh sebesar 6,51 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,34 persen (*yoy*). Pertumbuhan Ekspor Barang yang tumbuh sebesar 5,81 persen (*yoy*), ditopang oleh pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas sebesar 6,13 persen (*yoy*) dan Ekspor Barang Migas sebesar 2,38 persen (*yoy*). Pertumbuhan Ekspor Barang didorong oleh peningkatan nilai dan volume komoditas, antara lain mesin atau peralatan listrik, dan nikel. Komoditas yang mengalami peningkatan volume ekspor di antaranya bahan bakar mineral, besi dan baja, serta migas. Sementara itu, Ekspor Jasa tumbuh sebesar 14,2 persen (*yoy*) didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Kinerja pertumbuhan ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional relatif kuat di tengah ketidakpastian global. Impor Barang dan Jasa menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 7,95 persen (*yoy*) pada tahun 2024. Impor Barang mampu tumbuh sebesar 8,15 persen (*yoy*). Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh impor Barang Nonmigas yang tumbuh 9,01 persen (*yoy*), terutama untuk bahan baku yang mendukung aktivitas sektor manufaktur dan Impor Barang Migas sebesar 3,58 persen (*yoy*). Sementara itu, Impor Jasa tumbuh 6,67 persen (*yoy*), didorong oleh peningkatan jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi di seluruh lapangan usaha pada tahun 2024 melanjutkan tren positif. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor penyumbang tertinggi ketiga terhadap PDB nasional yang tumbuh sebesar 0,67 persen (*yoy*). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,31 persen (*yoy*). Pelemahan kinerja Sektor Pertanian disebabkan oleh penurunan produksi padi dan kelapa sawit akibat perubahan iklim yang berpengaruh terhadap pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan yang mengalami kontraksi sebesar 0,21 persen (*yoy*). Di sisi lain, Subsektor Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan masing-masing tumbuh positif sebesar 0,85 persen (*yoy*) dan 0,67 persen (*yoy*). Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu juga mengalami kontraksi sebesar 2,06 persen (*yoy*). Sementara itu, Subsektor Perikanan tumbuh positif sebesar 0,68 persen (*yoy*).

Grafik 5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha

(dalam persen, *yoy*)

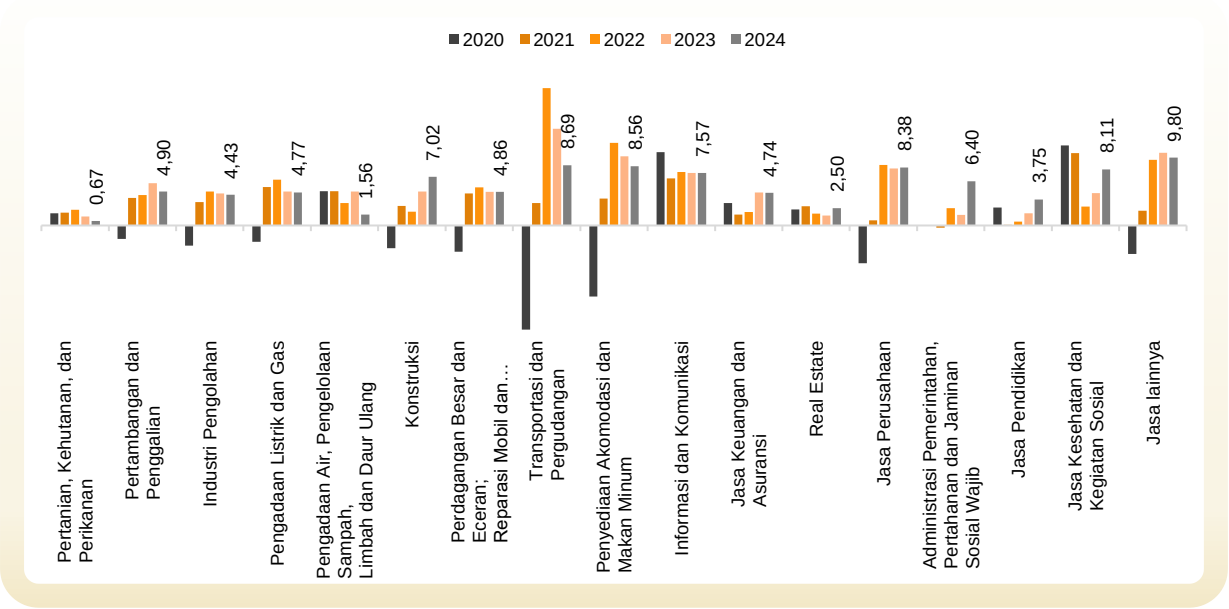

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sektor Pertambangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,90 persen (*yoy*) pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,12 persen (*yoy*). Subsektor Pertambangan Bijih Logam merupakan penyumbang terbesar terhadap sektor ini, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 8,30 persen (*yoy*), seiring peningkatan permintaan domestik dan luar negeri. Subsektor Batubara dan Lignit serta Penggalian Lainnya tumbuh positif masing-masing sebesar 6,82 persen (*yoy*) dan 6,27 persen (*yoy*). Di sisi lain, Subsektor Minyak, Gas dan Panas Bumi mengalami kontraksi sebesar 0,78 persen (*yoy*), seiring dengan penurunan produktivitas sumur-sumur minyak yang masih berlanjut.

Industri Pengolahan merupakan sektor sebagai penyumbang tertinggi terhadap PDB nasional yang tumbuh sebesar 4,43 persen (*yoy*), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,64 persen (*yoy*). Kinerja sektor ini didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri, yang tercermin dari pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman sebesar 5,90 persen (*yoy*). Selain itu, Industri Logam Dasar serta Industri Barang Logam tumbuh masing-masing tumbuh sebesar 13,34 persen (*yoy*) dan 6,16 persen (*yoy*), sejalan dengan permintaan luar negeri untuk besi dan baja, barang logam, komponen elektronik, dan peralatan listrik. Di sisi lain, Sektor Konstruksi dan *Real Estate* mampu tumbuh masing-masing 7,02 persen (*yoy*) dan 2,50 persen (*yoy*) pada tahun 2024, sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan aktivitas konstruksi lainnya.

Sejalan dengan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor juga tumbuh positif sebesar 4,86 persen (*yoy*) sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan perdagangan barang domestik dan impor, sehingga mampu mendorong Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mencapai 5,95 persen (*yoy*). Sementara itu, Subsektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen *(yoy).*

Seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh sebesar 8,69 persen (*yoy*) pada tahun 2024.

Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang pada moda transportasi sejalan dengan libur HBKN Natal dan Tahun Baru. Subsektor Angkutan Rel mampu tumbuh 18,61 persen (*yoy*) ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh, Lintas Raya Terpadu/*Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Angkutan Darat dan Angkutan Udara masing-masing mampu tumbuh 9,89 persen (*yoy*) dan 6,75 persen (*yoy*). Di sisi lain, Subsektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Pos dan Kurir mampu tumbuh 9,37 persen (*yoy*).

Sejalan dengan pertumbuhan Sektor Transportasi, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga tumbuh positif 8,56 persen (*yoy*) pada tahun 2024. Penyelenggaraan *event* nasional dan internasional yang meningkatkan arus wisatawan baik dari domestik maupun mancanegara turut mendorong kinerja sektor tersebut. Hal ini tercermin dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 masing-masing tumbuh sebesar 23,65 persen (*yoy*) dan 19,05 persen (*yoy*). Selain itu, Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPKH) Bintang tumbuh 52,63 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri pariwisata yang semakin kuat.

Secara spasial, perekonomian seluruh wilayah tumbuh positif sepanjang tahun 2024 dengan sumber pertumbuhan yang beragam. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah wilayah Maluku dan Papua sebesar 7,81 persen (*yoy*) dan wilayah Sulawesi sebesar 6,18 persen (*yoy*), yang didorong oleh kebijakan hilirisasi mineral yang diterapkan oleh Pemerintah. Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,52 persen (*yoy*), sejalan dengan pertumbuhan Sektor Konstruksi adanya pembangunan proyek IKN. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 5,04 persen (*yoy*), didorong oleh Sektor Pariwisata dan Pertambangan. Sementara itu, wilayah Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan nasional masing-masing sebesar 4,92 persen (*yoy*) dan 4,45 persen (*yoy*). Meskipun demikian, pertumbuhan pada kedua wilayah tersebut didorong oleh Sektor Manufaktur yang tumbuh relatif stabil.

Grafik 6
Aspek Spasial Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDB

(dalam persen, yoy)

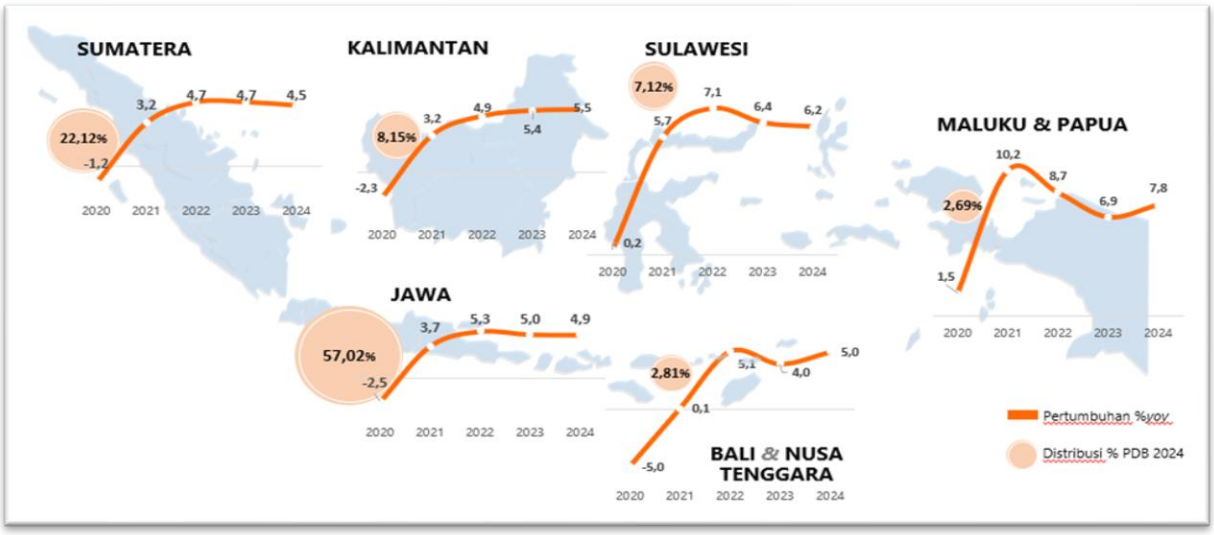

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada akhir tahun 2024, kondisi ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang stabil. Namun, Pemerintah tetap waspada terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul yang dapat berpotensi terhadap pelaksanaan APBN. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas makro dan memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

A.3.1.2. Inflasi

Di tengah risiko fluktuasi harga, stabilitas inflasi yang terjaga menjadi indikator utama kekuatan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mengoptimalkan daya beli masyarakat berperan penting untuk meredam dampak gejolak harga. Dengan inflasi yang terkendali, ekonomi dapat mempertahankan momentum pertumbuhannya, meskipun ada tekanan eksternal. Tingkat inflasi nasional tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,61 persen (*yoy*). Penurunan laju inflasi didorong oleh terjaganya inflasi inti (*core inflation*), harga yang diatur pemerintah (*administered price*), dan inflasi pangan bergejolak (*volatile food)*. Tren perkembangan inflasi dapat dilihat pada **Grafik 7**.

Grafik 7
Perkembangan Tingkat Inflasi 2022 – 2024

(dalam persen, *yoy)*

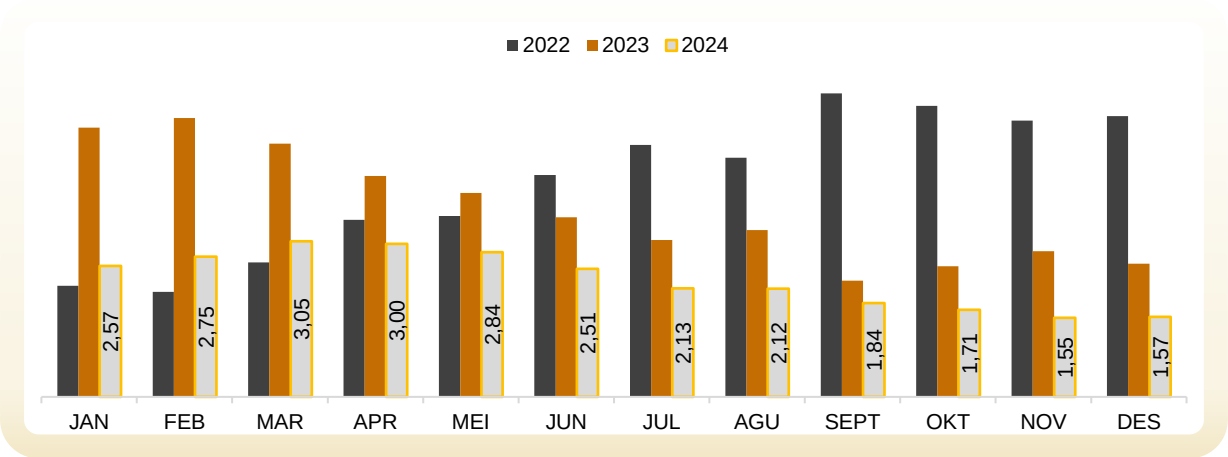

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Inflasi dari komponen inti pada Desember 2024 tercatat sebesar 2,26 persen (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 1,80 persen (*yoy)*. Penguatan inflasi inti didorong oleh peningkatan inflasi pada kelompok, perawatan pribadi, pendidikan, sandang, dan kesehatan.

Inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) pada Desember 2024 mencapai 0,56 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 1,72 persen (*yoy)*. Penurunan ini didorong oleh kebijakan harga energi yang tetap stabil di tengah kondisi geopolitik global yang memengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia. Pemerintah memastikan kebijakan harga energi tetap kondusif untuk mendukung daya beli masyarakat dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negeri.

Tekanan inflasi pangan bergejolak (*volatile food)* pada tahun 2024, tercatat sebesar 0,12 persen (*yoy*), menurun dari Desember 2023 sebesar 6,73 persen (*yoy*). Kondisi ini didorong oleh pergerakan sebagian besar harga pangan yang terus melandai. Penurunan harga pangan tersebut didorong oleh pasokan pangan hortikultura seiring dengan masa panen beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan tomat. Kebijakan stabilisasi harga dan pasokan juga turut mendukung terjaganya harga pangan nasional. Perkembangan tingkat Inflasi menurut kelompok komponen Tahun 2024 dapat dilihat pada **Grafik 8**

.

Grafik 8
Perkembangan Tingkat Inflasi Januari–Desember 2024 Menurut Kelompok Komponen

(dalam persen, *yoy*)

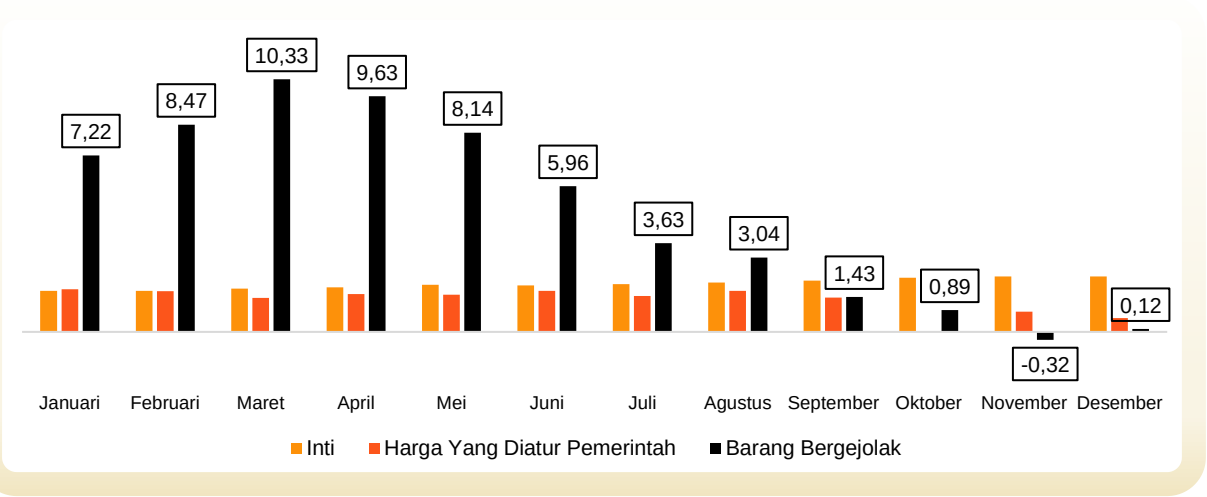

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara keseluruhan, laju inflasi Desember 2024 relatif terkendali. Tingkat inflasi pada tahun 2024 berhasil dipertahankan dalam kisaran sasaran 2,5±1,0 persen. Inflasi yang terkendali tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Upaya pengendalian inflasi dilakukan pemerintah dengan koordinasi kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan pemerintah daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP dan TPID).

A.3.1.3. *Yield* Surat Berharga Negara

Sepanjang tahun 2024, tingkat suku bunga (*yield*) Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun menghasilkan angka yang bervariasi. *Yield* SBN 10 Tahun menunjukkan tren peningkatan di akhir tahun 2024. Setelah berada di *yield* tertinggi pada bulan April sebesar 7,22 persen, yield SBN 10 tahun berlanjut melemah hingga mencapai *yield* terendah sebesar 6,40 di akhir September 2024, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 7,04 di akhir Desember 2024. Setelah pemangkasan suku bunga acuan di AS dan beberapa negara maju lainnya, rata-rata *yield* SBN 10 Tahun pada tahun 2024 mencapai 6,78 persen. Perkembangan *yield* SBN 10 tahun dapat dilihat pada **Grafik 9**.

Grafik 9
Perkembangan Yield Hasil Lelang SUN 10 Tahun

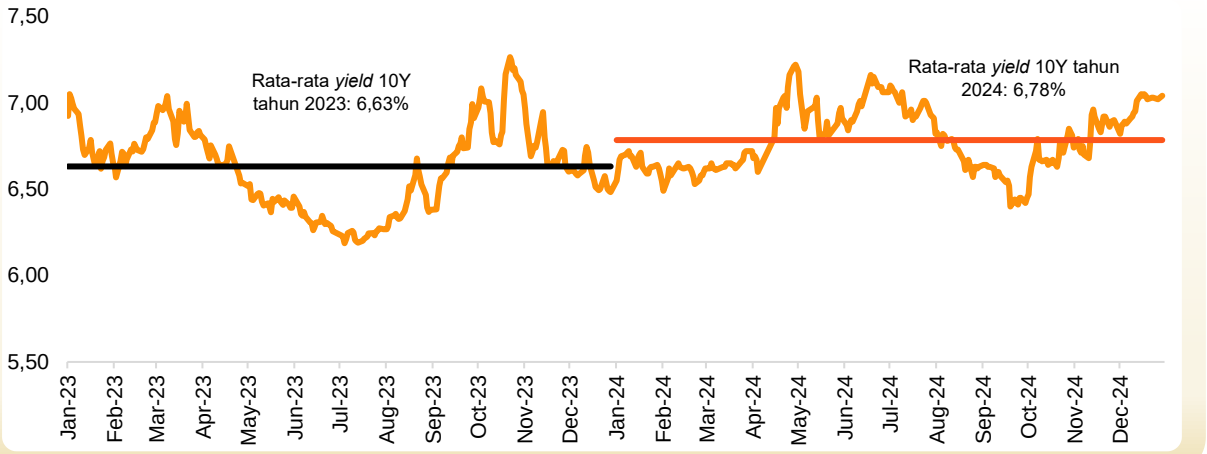

Sumber: Kementerian Keuangan, 2024

Kenaikan *yield* SBN 10 Tahun di akhir tahun mencerminkan respons pasar terhadap dinamika global dan domestik, termasuk penyesuaian ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dan kebijakan fiskal pemerintah. Tren peningkatan *yield* mengindikasikan penyesuaian

risiko oleh investor, terutama terkait ketidakpastian global, seperti fluktuasi suku bunga acuan di Amerika Serikat, pergerakan nilai tukar, dan tensi geopolitik. Secara keseluruhan, rata-rata *yield* SBN 10 Tahun di level 6,78 persen menunjukkan stabilitas fundamental perekonomian Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka menengah. Perkembangan ini menunjukkan peran SBN sebagai instrumen pembiayaan yang efektif, sekaligus sebagai acuan pasar keuangan domestik.

A.3.1.4. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah di akhir tahun 2024. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, nilai tukar rupiah yang mengacu pada Kurs Tengah Transaksi BI mencapai Rp16.162 per dolar AS pada akhir tahun 2024 atau melemah 4,68 persen dibandingkan dengan awal tahun 2024. Nilai tukar rupiah di awal tahun 2024 tercatat pada level Rp15.439 per dolar AS, kemudian melemah dan mencapai depresiasi tertinggi sebesar Rp16.458 per dolar AS pada Juni 2024, dan berlanjut menguat sampai di level paling rendah sebesar Rp15.092 pada September 2024. Nilai tukar rupiah kembali melemah menjelang akhir tahun 2024. Rata-rata nilai tukar rupiah Januari-Desember 2024 tercatat sebesar Rp15.847 per dolar AS. Tren nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada **Grafik 10.**

Grafik 10
Tren Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Tahun 2023 dan 2024

(rupiah per dolar AS)

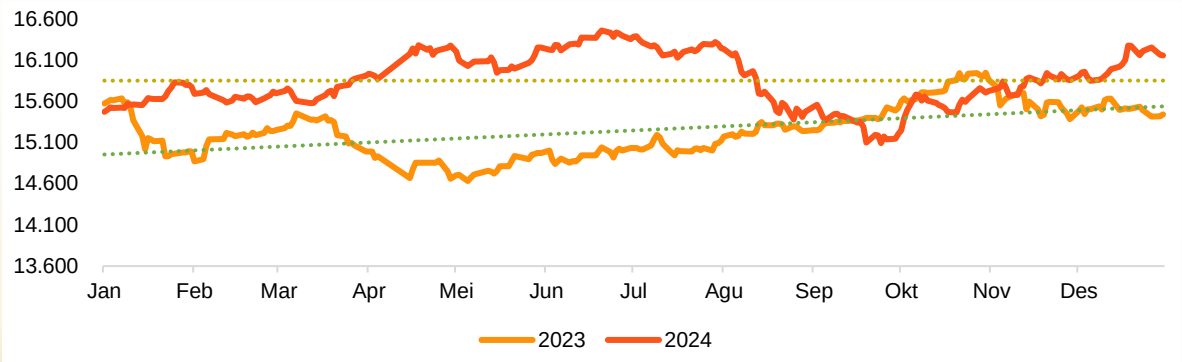

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Fluktuasi nilai tukar dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju, tensi geopolitik, dan peningkatan permintaan dolar AS, termasuk berdampak pada depresiasi di akhir tahun. Meskipun demikian, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2024 menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan untuk keberlanjutan aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia melakukan penurunan BI-*Rate* secara moderat sebesar 25 bps menjadi 6,00 persen. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memitigasi dampak dari risiko global.

A.3.1.5. Harga Minyak Mentah Indonesia/*Indonesia Crude Price* (ICP)

Sepanjang tahun 2024, dinamika harga minyak mentah global dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan geopolitik, kebijakan produksi negara-negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC), serta prospek pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi di negara-negara utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat turut memengaruhi permintaan energi global. Di tengah stagnasi perekonomian global, harga minyak mentah mengalami tren penurunan yang dipengaruhi dari sisi *demand* dan *supply*. Dari sisi *demand*, Tiongkok selaku lokomotif perekonomian dunia yang menjadi konsumen energi terbesar dunia belum pulih permintaannya. *Demand* yang rendah juga diikuti sisi *supply* dimana *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) turut menurunkan produksi minyaknya untuk menjaga semakin turunnya harga minyak mentah dunia. Selain itu, faktor geopolitik juga berpengaruh terhadap pergerakan harga minyak mentah. Pasar cenderung *wait and see* atas ketegangan di timur tengah, khususnya antara Israel-Iran.

Secara umum, harga minyak mentah Indonesia mengalami penurunan setelah menunjukkan tren

kenaikan sejak awal tahun 2024. Harga sempat mencapai level tertinggi pada April 2024 sebesar 87,61 dolar AS per barel yang dipengaruhi oleh beberapa sentimen di antaranya permintaan minyak mentah yang tinggi di tengah ketidakpastian perekonomian global. Harga minyak mentah menurun pada bulan Mei dan Juni, sebelum kembali naik sedikit pada Juli menjadi 82,00 dolar AS per barel, dan akhirnya turun hingga mencapai 71,61 dolar AS per barel pada Desember 2024. Realisasi harga rata-rata harga minyak Indonesia selama periode Januari-Desember 2024 tercatat 78,14 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 78,43 dolar AS per barel. Realisasi harga pada tahun 2024 juga lebih rendah dibandingkan harga yang ditetapkan dalam asumsi APBN 2024 sebesar 82 dolar AS per barel. Perkembangan rata-rata harga minyak mentah Indonesia dapat dilihat pada **Grafik 11**.

Grafik 11
Perkembangan Rata-Rata Harga Minyak Mentah Indonesia 2023 dan 2024

(dolar AS per barel)

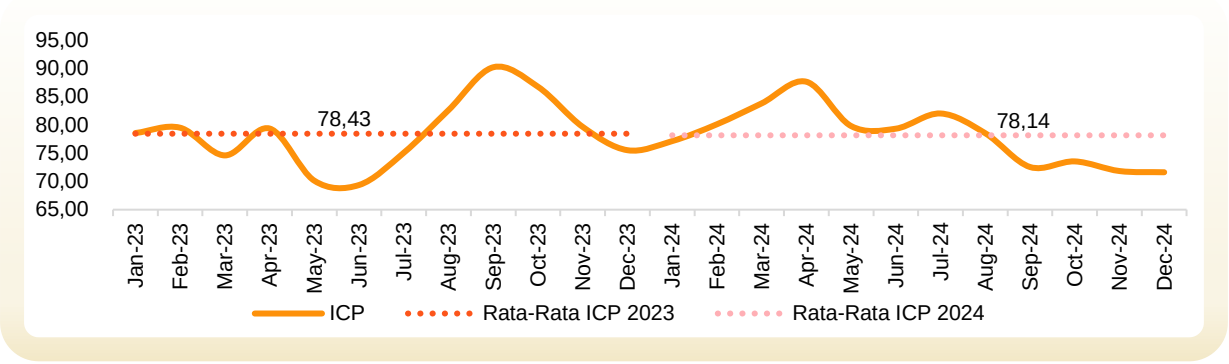

Sumber: Kementerian ESDM, 2025

A.3.1.6. *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi (migas) merupakan volume produksi migas dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. *Lifting* minyak dan gas bumi menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. *Lifting* migas bumi masih dihadapkan dengan tantangan besar, seperti penurunan alami dari sumur produksi dan *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas. Dalam APBN 2024, target *lifting* migas terdiri dari *lifting* minyak sebesar 635 ribu barel minyak per hari (rbph) dan *lifting* gas bumi sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph). Perkembangan *lifting* Minyak dan Gas Bumi dapat dilihat pada **Grafik 12.**

Grafik 12
Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024

(rbph,rbsmph)

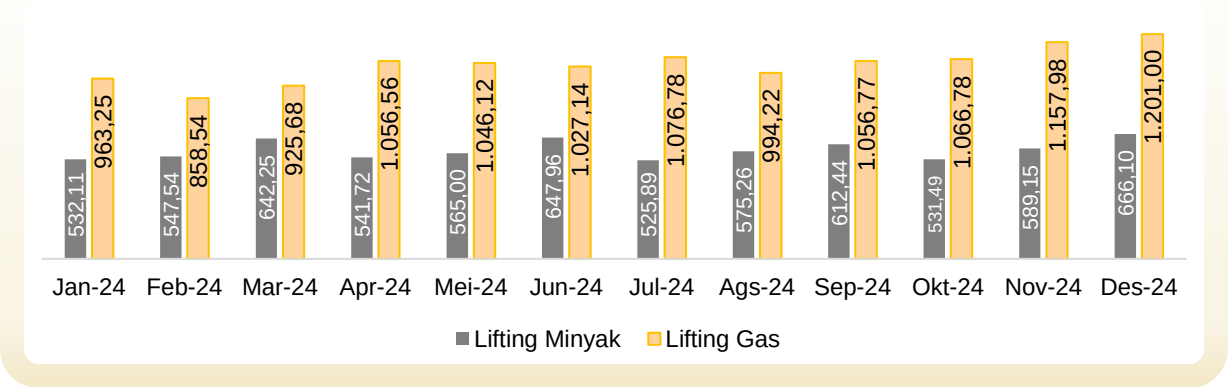

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM, 2025

Pada tahun 2024, realisasi *lifting* minyak mencapai 579,66 rbph atau 91,28 persen dari target APBN 2024. Sementara itu, *lifting* gas bumi tahun 2024 mencapai 1.016,71 rbsmph atau sebesar 98,42 persen dari target APBN 2024. Realisasi *lifting* minyak tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 4,27 persen (*yoy*), dibandingkan dengan tahun 2023. Di sisi lain, realisasi *lifting* gas bumi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen (*yoy*)

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Kendala capaian *lifting* migas yang berada di bawah target APBN 2024, antara lain: (i) penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi yang sudah tua, (ii) adanya *unplanned shutdown* akibat bencana banjir dan kebakaran yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, (iii) pemberlakukan *safety stand down*, serta (iv) penurunan permintaan gas pada awal tahun baik di dalam maupun luar negeri. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut, perlu mengoptimalkan peningkatan produksi hulu migas terus, di antaranya perkembangan *giant fields*, pelaksanaan *enhanced oil recovery*, peningkatan investasi eksplorasi migas, dan penyelenggaraan *carbon captured utilization and storage* (CCUS). Kebijakan eksplorasi hulu migas juga terus diupayakan untuk menemukan sumur-sumur baru sehingga produksi hulu migas dapat terus ditingkatkan.

A.3.2.INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Tabel 3
Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
Ekspor (miliar dolar AS)	261,81	257,68
Impor (miliar dolar AS)	221,89	211,41
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	155,72	146,38
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) – Surplus/(Defisit)	7,20	6,30
Bank Indonesia *Rate* (persen)	6,00	6,00
IHSG *(end of period)*	7.079,90	7.272,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BEI, 2025

A.3.2.1. Ekspor dan Impor

Kinerja ekspor Indonesia tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan di tengah ketidakpastian perekonomian global. Nilai ekspor barang (*fob*) pada tahun 2024 mencapai 261,81 miliar dolar AS, tumbuh 1,60 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ekspor tersebut bersumber dari pertumbuhan ekspor nonmigas dan ekspor migas masing-masing sebesar 1,55 persen (*yoy*) dan 1,10 persen (*yoy*). Ekspor nonmigas tahun 2024 mencapai 245,75 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 93,86 persen terhadap total ekspor. Sementara itu, ekspor migas tahun 2024 mencapai 15,00 miliar dolar AS atau berkontribusi 5,73 persen terhadap total ekspor. Di sisi lain, kinerja impor juga meningkat seiring dengan permintaan dalam negeri yang semakin kuat. Nilai impor (fob) pada tahun 2024 mencapai 221,89 miliar dolar AS, tumbuh 4,95 persen (*yoy*) dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan tersebut bersumber dari pertumbuhan impor nonmigas sebesar 5,00 persen (*yoy)* di tengah impor migas yang mengalami kontraksi sebesar 0,29 persen. Impor nonmigas tahun 2024 mencapai 182,88 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 82,42 persen terhadap total impor. Sementara itu, impor migas tahun 2024 mencapai 34,66 miliar dolar AS atau berkontribusi 15,62 persen terhadap total impor. Perkembangan nilai ekspor, impor, dan neraca perdagangan dapat dilihat pada **Grafik 13.**

Grafik 13
Perkembangan Ekspor, Impor, dan Neraca Perdagangan Tahun 2020–2024

(dalam miliar dolar AS)

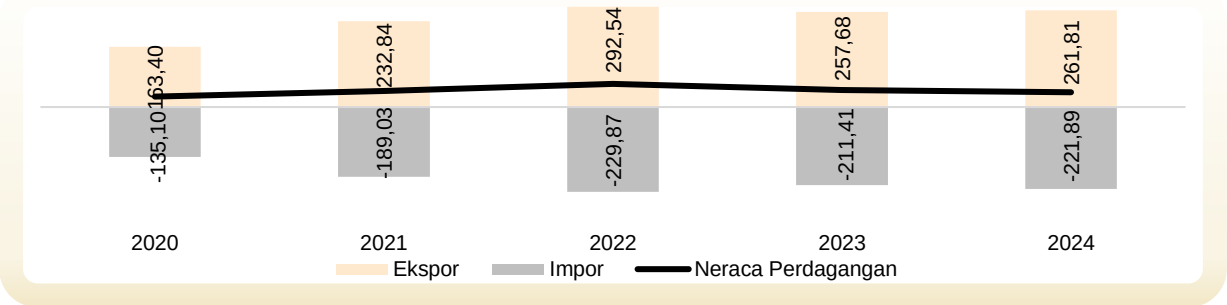

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Kinerja neraca perdagangan Indonesia konsisten mencatat surplus. Meskipun pelemahan ekspor lebih besar dibandingkan pelemahan impor, neraca perdagangan tahun 2024 tetap mencatatkan surplus 39,92 miliar dolar AS. Surplus ini lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2023 sebesar 46,27 miliar dolar AS. Penurunan surplus neraca perdagangan ini lebih lanjut membawa implikasi pada kinerja neraca transaksi berjalan sepanjang tahun 2024.

A.3.2.2. Neraca Pembayaran Indonesia

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada tahun 2024 mencatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar AS, lebih besar dibandingkan surplus pada tahun 2023 sebesar 6,3 miliar dolar AS. Perbaikan NPI terutama ditopang oleh perbaikan signifikan pada kinerja Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) seiring dengan defisit pada Neraca Transaksi Berjalan (NTB). Neraca transaksi berjalan tahun 2024 kembali mencatatkan defisit sebesar 8,9 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB), setelah mencatat defisit sebesar 2,0 miliar dolar AS (0,1 persen dari PDB) pada tahun 2023. Kinerja neraca transaksi berjalan ini didorong oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang serta kenaikan defisit neraca jasa dan pendapatan primer, di tengah surplus pendapatan sekunder yang meningkat. Surplus neraca perdagangan yang menurun disebabkan oleh kenaikan ekspor sejalan dengan kenaikan harga komoditas global dan penurunan permintaan dari negara mitra dagang. Sementara itu, pertumbuhan impor didorong oleh peningkatan permintaan domestik yang terus terjaga seiring dengan periode Hari Libur Nasional Natal dan Tahun Baru yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan nasional ke luar negeri.

Kinerja NTMF menunjukkan perbaikan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pada tahun 2024, kinerja NTMF membaik secara signifikan dengan surplus 16,4 miliar dolar AS, setelah mencatat surplus 9,9 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya. Terjaganya iklim investasi dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia mendorong investasi langsung tetap masuk ke dalam negeri. Selain itu, aliran investasi portofolio juga mencatat kenaikan surplus di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi lainnya mencatat defisit yang lebih rendah sejalan dengan kenaikan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Secara keseluruhan, perkembangan NPI pada tahun 2024 menunjukkan ketahanan sektor eksternal dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global yang tinggi.

Tabel 4
Ringkasan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2024 dan 2023

(dalam miliar dolar AS)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Transaksi Berjalan *(Current Account)*	-8,9	-2,0
Transaksi Modal dan Finansial *(Capital & Financial Account)*	16,4	9,9
Selisih Perhitungan Bersih *(Net Errors & Omission)*	-1,5	0,5
Neraca Keseluruhan *(Overall Balance)*	7,2	6,3

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Kinerja NPI tersebut turut mendorong penguatan posisi cadangan devisa pada Desember 2024 menjadi 155,72 miliar dolar AS dari semula 146,38 miliar dolar AS pada Desember 2023. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama berasal dari penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut tetap memadai karena didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Perkembangan cadangan devisa periode dapat dilihat pada **Grafik 14.**

Grafik 14
Perkembangan Cadangan Devisa Tahun 2023 dan 2024

(dalam miliar dolar AS)

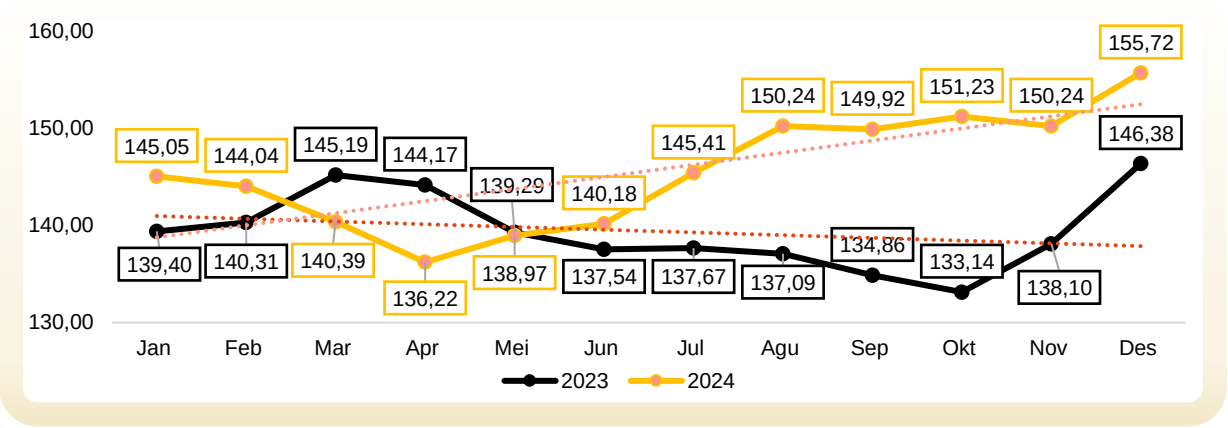

Sumber: *Bank Indonesia, 2025*

A.3.2.3. Perkembangan Kebijakan Moneter

Volatilitas di pasar keuangan sepanjang tahun 2024 turut memengaruhi arah kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga BI-*Rate* sebesar 25 basis poin (bps) pada September 2024, dari 6,25 persen menjadi 6,00 persen. Kebijakan ini mencerminkan upaya BI untuk memberikan stimulus kepada perekonomian dengan tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah agar tetap terkendali. Sejak Oktober 2023, Bank Indonesia mempertahankan BI-*Rate* sebesar 6,00 persen hingga Maret 2024, kemudian meningkat menjadi 6,25 persen sampai dengan Agustus 2024 sebelum turun menjadi 6,00 persen pada September sampai dengan Desember 2024. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah secara kontinu merespons dinamika yang terjadi dalam perekonomian global maupun domestik.

Upaya stabilisasi nilai tukar juga dilakukan oleh Bank Indonesia melalui operasi moneter dengan memengaruhi likuiditas uang beredar di dalam negeri. Pada akhir tahun 2024, operasi moneter Bank Indonesia tercermin dari uang beredar luas (M2) yang tumbuh sebesar 4,40 persen (*yoy*). Pertumbuhan M2 yang relatif stabil mencerminkan likuiditas perekonomian yang memadai untuk mendukung aktivitas bisnis dan konsumsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2024, nilai tukar rupiah tercatat Rp16.162 per dolar AS, atau menguat sebesar 4,68 persen dibandingkan dengan awal tahun 2024.

Grafik 15
BI-Rate dan Operasi Moneter Tahun 2023–2024

(dalam persen, *yoy*)

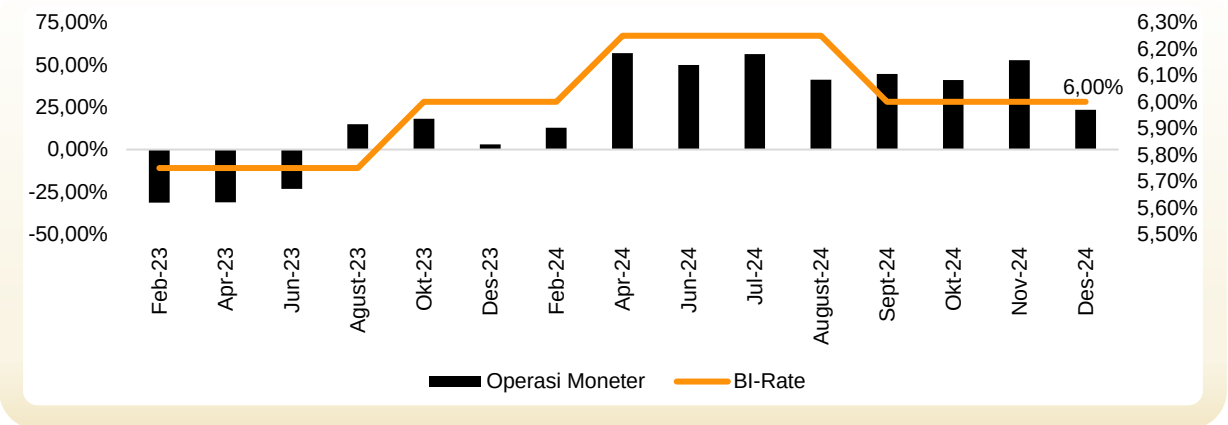

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Langkah pengetatan kebijakan moneter Bank Indonesia sedikit banyak juga memengaruhi uang beredar luas (M2). Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan M2 utamanya didorong oleh *Net Domestic Asset* (NDA). NDA tercatat tumbuh 5,40 persen *(yoy)* yang mencerminkan ekspansi dalam perekonomian domestik. Meski demikian, aliran modal asing relatif terbatas sehingga *Net Foreign*

Asset (NFA) tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan M2. Kondisi ini dipengaruhi oleh volatilitas pasar keuangan global yang membuat investor asing cenderung lebih berhati-hati dan menahan dananya untuk masuk ke *emerging market* seperti Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan adanya tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia dalam menarik aliran modal asing di tengah kondisi global yang tidak pasti. Perkembangan uang beredar dan faktor-faktor yang memengaruhi dapat dilihat pada **Grafik 16**.

Grafik 16
Perkembangan Uang Beredar dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tahun 2023 – 2024
(dalam persen, *yoy*)

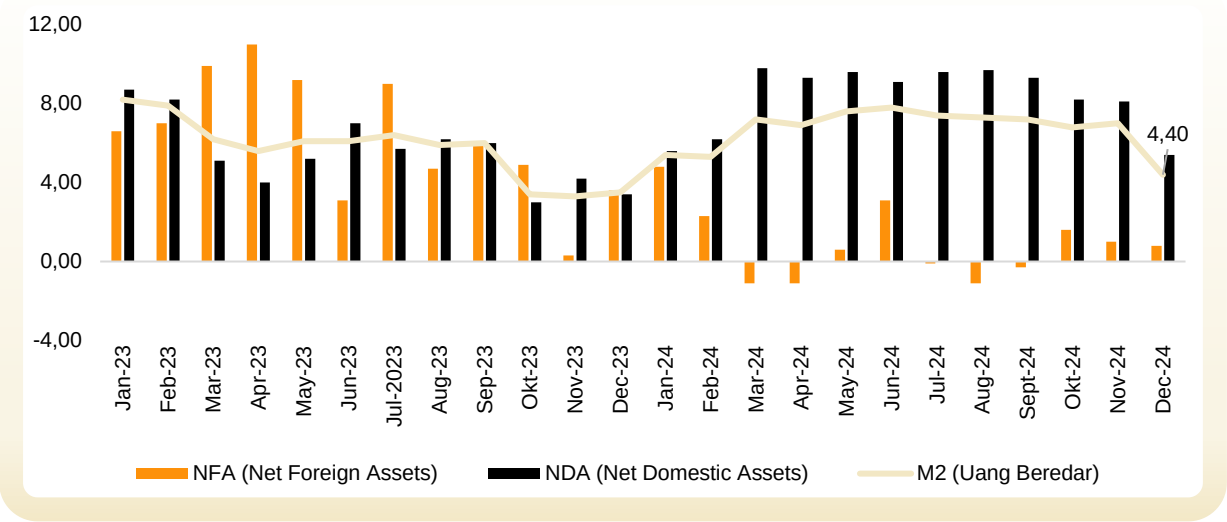

Sumber: Bank Indonesia, 2025

A.3.2.4. Bank Indonesia *Rate*

Keberlanjutan pemulihan ekonomi pada tahun 2024 tidak terlepas dari respons pembauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia telah menempuh bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah dalam mengakselerasi pemulihan di tengah potensi risiko global yang semakin meluas. Sejak Januari 2023, suku bunga acuan atau BI-*Rate* dipertahankan di 5,75 persen sampai dengan September 2023, lalu meningkat menjadi 6,00 persen pada bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024. BI-*Rate* meningkat kembali menjadi 6,25 persen pada bulan April 2024 hingga Agustus 2024, dan pada akhirnya turun menjadi 6,00 persen pada September sampai dengan Desember 2024. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah Januari-Desember 2024 terdepresiasi 3,88 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dari semula Rp15.255 per dolar AS menjadi Rp15.847 per dolar AS.

Keputusan dalam mempertahankan BI-*Rate* 6,00 persen merupakan konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1,0 persen pada tahun 2024 dan 2025. Kebijakan penguatan makroprudensial secara konsisten tetap dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendorong kredit pembayaran perbankan, serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran guna menjaga stabilitas perekonomian di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makroprudensial secara konsisten tetap dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga ketahanan potensi risiko eksternal. Kebijakan penurunan BI-*Rate* menjadi 6,00 persen pada September 2024 juga diikuti dengan diturunkannya suku bunga *Deposit Facility* menjadi 5,25 persen serta suku bunga *Lending Facility* menjadi 6,75 persen. Perkembangan BI-*Rate* Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada **Grafik 17**.

Grafik 17
Perkembangan* Bank Indonesia *Rate tahun 2023–2024

(dalam persen)

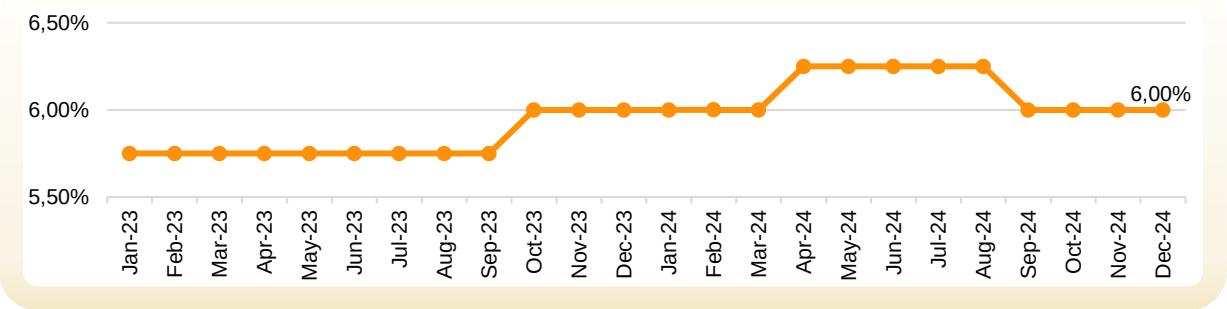

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Dalam memitigasi dampak risiko global, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penguatan kebijakan sistem pembayaran dilakukan melalui (i) stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing dengan fokus transaksi *spot*, *Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF),* dan SBN; (ii) optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI; (iii) penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit per sektor ekonomi; (iv) percepatan digitalisasi sistem pembayaran dengan transaksi QRIS untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital; serta (v) memperluas kerja sama dengan sejumlah Bank Sentral untuk penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT).

A.3.2.5. Indeks Harga Saham Gabungan

Sepanjang tahun 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pergerakan yang cukup dinamis di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. IHSG dibuka dengan posisi 7.323,59, mencatatkan kinerja yang cukup stabil di awal semester pertama. Namun, pada pertengahan tahun bulan Juni, IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam, mencapai level terendah di angka 6.726,92, dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta pengaruh kebijakan moneter negara maju yang cenderung *hawkish*. Meski demikian, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Memasuki bulan Juli hingga September 2024, IHSG kembali menguat secara konsisten, didorong oleh optimisme terhadap prospek ekonomi domestik yang lebih stabil, dengan pencapaian tertingginya di level 7.905,39 pada bulan September. Menjelang akhir tahun, IHSG terus bergerak fluktuatif dan masih berada di angka 7.000. Penguatan ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang lebih baik, meski ketidakpastian global masih menjadi faktor yang terus memengaruhi pergerakan pasar saham domestik. Tren laju IHSG 2023 dan 2024 ditunjukkan pada **Grafik 18**.

Grafik 18
Tren Laju IHSG (end of period) Tahun 2023 dan 2024

(indeks dalam poin)

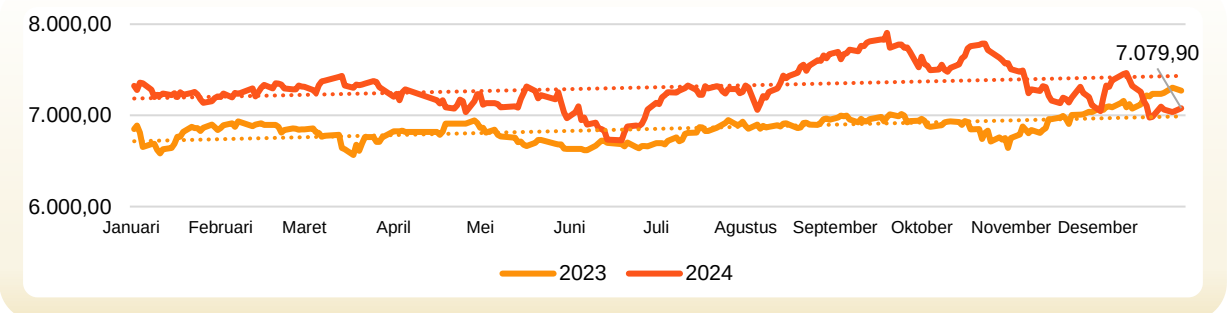

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025

A.3.2.6. Indikator Stabilitas Sistem Keuangan

Sepanjang tahun 2024, kinerja intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan positif dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga sejalan dengan kekuatan sinergi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan/KSSK (Pemerintah, BI, OJK, dan LPS) dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi nasional serta memitigasi

berbagai risiko yang ada. Hal tersebut didukung oleh beberapa indikator, antara lain nilai rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) perbankan pada bulan Desember 2024 yang berada pada level 26,69 persen atau di atas standar minimum, yaitu di atas 8,0 persen. Indikator lainnya adalah rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL) yang tetap terjaga di bawah standar maksimum sebesar 5,0 persen, yaitu 2,08 persen (bruto) pada Desember 2024.

Kinerja perbankan Indonesia tahun 2024 menunjukkan tren positif, tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 10,39 persen *(yoy)* pada Desember 2024. Pertumbuhan kredit ini didorong oleh peningkatan permintaan dari sektor Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit Konsumsi, yang mencerminkan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor ekonomi. Di sisi penawaran, sektor perbankan berhasil menjaga kelancaran penyaluran kredit, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,48 persen *(yoy)* yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit juga dipicu oleh pemulihan ekonomi domestik yang mendorong peningkatan permintaan kredit rumah tangga dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan CAR, NPL, Pertumbuhan Kredit, dan DPK dapat dilihat pada **Tabel 5.**

Tabel 5
Perkembangan Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Januari–Desember 2024

(dalam persen)

Periode	CAR	NPL *(Gross)*	Pertumbuhan Kredit	DPK
Januari	27,52	2,35	11,83	5,80
Februari	27,73	2,35	11,28	5,66
Maret	25,96	2,25	12,40	7,44
April	25,97	2,33	13,09	8,21
Mei	26,17	2,34	12,15	8,63
Juni	26,09	2,26	12,36	8,45
Juli	26,56	2,27	12,40	7,72
Agustus	26,69	2,26	11,40	7,01
September	26,78	2,21	10,85	7,04
Oktober	27,02	2,20	10,92	6,74
November	26,89	2,19	10,79	7,54
Desember	26,69	2,08	10,39	4,48

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 2025

A.3.2.7. Perkembangan Kinerja Sektor Perbankan

Di tengah fluktuasi pasar keuangan global, sektor perbankan sampai dengan akhir tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan profitabilitas yang terjaga baik. Hal ini tercermin dari stabilnya *Net Interest Margin* (NIM) pada level 4,62 persen dan *Return on Asset* (ROA) yang juga stabil di angka 2,69 persen. Sementara itu, permodalan perbankan juga tetap kuat dan meningkat ke level 26,69 persen pada periode yang sama. Di sisi lain, kualitas kredit semakin membaik, tercermin dari penurunan *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* yang tercatat pada level 2,08 persen. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sektor perbankan mampu bertahan dan berkembang meskipun dalam kondisi pasar yang penuh tantangan.

Grafik 19
Indikator Kinerja Perbankan Umum 2023 – 2024

(dalam persen)

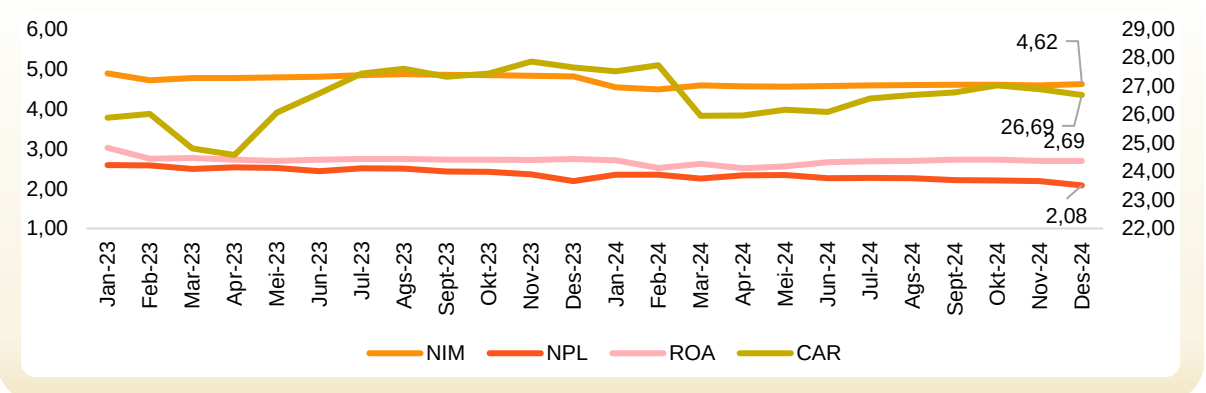

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Dari sisi intermediasi, total kredit perbankan tumbuh 10,39 persen *(yoy)* pada akhir tahun 2024, yang didorong oleh pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 8,35 persen *(yoy)*, 13,62 persen *(yoy)*, dan 10,61 persen *(yoy)*. Sementara itu, dari segi sumber pendanaan perbankan, Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya tumbuh 4,48 persen *(yoy)* pada akhir tahun 2024. Perkembangan ini menyebabkan kenaikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan dari level 88,57 persen pada Desember 2023 ke 89,05 persen pada Desember 2024. Meskipun demikian, level LDR di bawah 90 persen tersebut mengindikasikan bahwa perbankan masih memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam perekonomian lebih lanjut.

Grafik 20
Perkembangan Total Kredit dan DPK Perbankan *2023 - 2024*

(dalam persen)

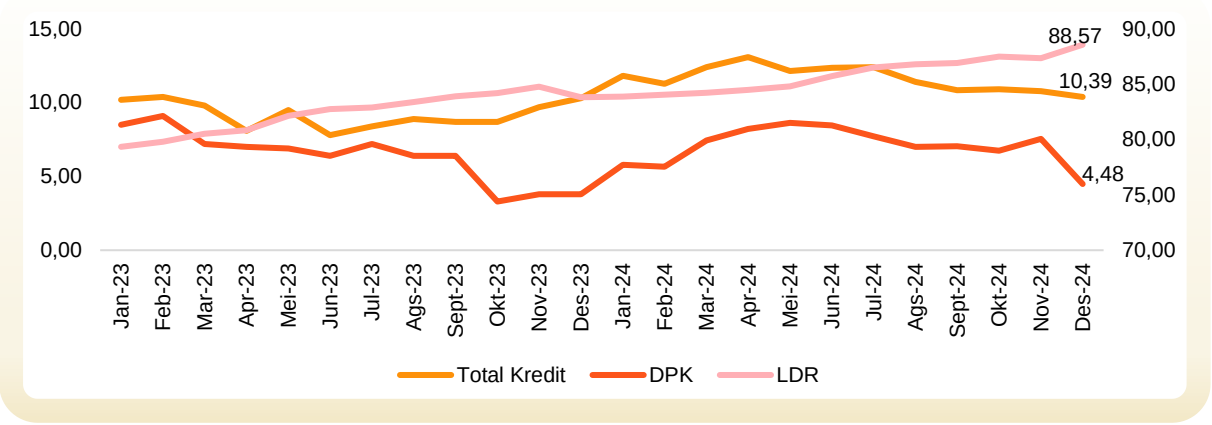

Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, 2025

A.3.3.INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Berikut merupakan ikhtisar indikator kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6
Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 dan 2023

Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2023
TPT (persen)	4,91	5,32
Tingkat Kemiskinan (persen)	8,57 (September)	9,36 (Maret)
Gini Ratio	0,381 (September)	0,388 (Maret)
IPM (data tahunan)	75,02	74,39
Nilai Tukar Petani	119,62	112,46
Nilai Tukar Nelayan	101,76	105,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

A.3.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan ini tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja serta menurunnya tingkat pengangguran dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2024 sebesar 4,91 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibandingkan pada Agustus 2023 yang sebesar 5,32 persen. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik sebanyak 4,79 juta orang dari Agustus 2023.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Dibandingkan Agustus 2023, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,31 juta orang, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,78 juta orang, dan Industri Pengolahan sebesar 0,66 juta orang. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka terlihat pada **Grafik 21**.

Grafik 21
Perkembangan TPT Indonesia Agustus 2020–Agustus 2024

(dalam persen)

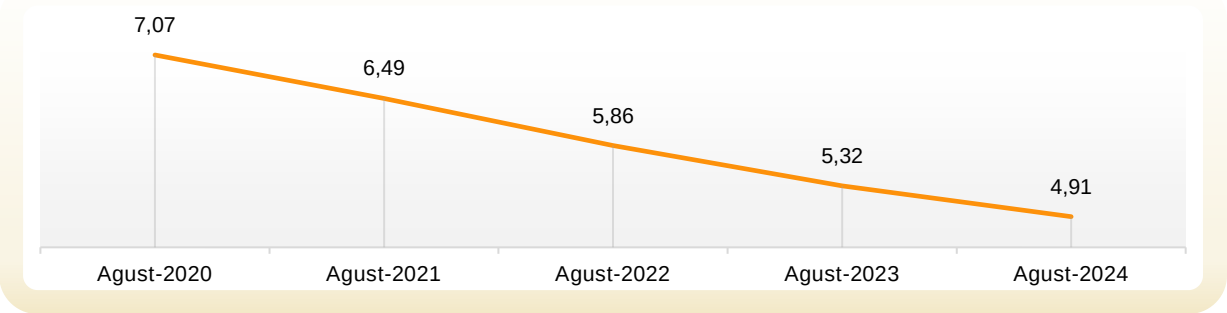

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak Agustus 2020 menunjukkan tren penurunan secara konsisten. Hal tersebut mencerminkan perbaikan kondisi tenaga kerja di Indonesia seiring dengan pemulihan ekonomi. Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan, hal tersebut mencerminkan semakin tingginya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Kenaikan TPAK ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk bekerja maupun mencari pekerjaan. Pemerintah terus mengoptimalkan berbagai kebijakan stimulus guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi secara lebih efektif terhadap kesejahteraan masyarakat.

A.3.3.2. Tingkat Kemiskinan

Ekonomi indonesia yang tumbuh pada Triwulan III 2024 dibandingkan Triwulan I 2024 turut berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan nasional. Pada September 2024, tingkat kemiskinan nasional melanjutkan tren penurunan menjadi 8,57 persen, turun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024, dan turun 0,79 persen poin dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, turun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024, dan turun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023. Penurunan tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, yang didukung dengan efektivitas program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan stabilitas ekonomi yang terjaga. Jika dirinci menurut daerah, jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 11,05 juta orang, menurun sebanyak 0,59 juta orang dari Maret 2024 yang sebanyak 11,64 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sebanyak 13,01 juta orang, menurun sebanyak 0,57 juta orang dari Maret 2024 yang sebanyak 13,58 juta orang.

Grafik 22
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2020–September 2024

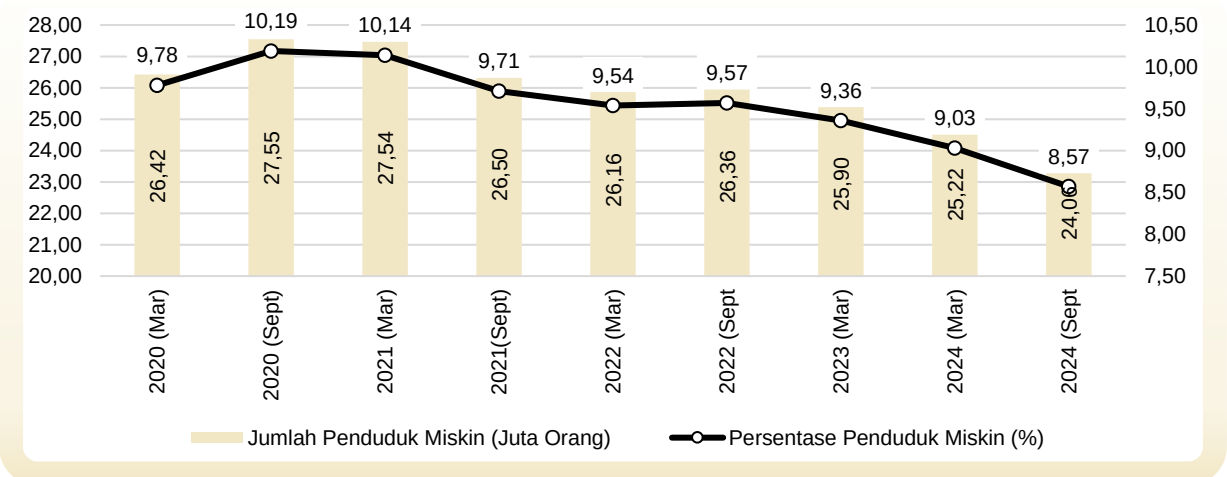

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

A.3.3.3. *Gini Ratio*

Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,381, angka ini meningkat 0,002 poin dibandingkan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379. Jika dilihat berdasarkan daerah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan tercatat 0,402, naik 0,003 poin dari Maret 2024 yang sebesar 0,399. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah pedesaan pada September 2024 tercatat 0,308, naik 0,002 poin dari Maret 2024 yang sebesar 0,306. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Hal ini disebabkan oleh distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,41 persen atau berada di atas 17 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen dan di pedesaan tercatat sebesar 21,39 yang artinya keduanya tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Perkembangan *Gini Ratio* dapat dilihat pada **Grafik 23.**

Grafik 23
Perkembangan Rasio Gini Maret 2020–September 2024

(dalam indeks)

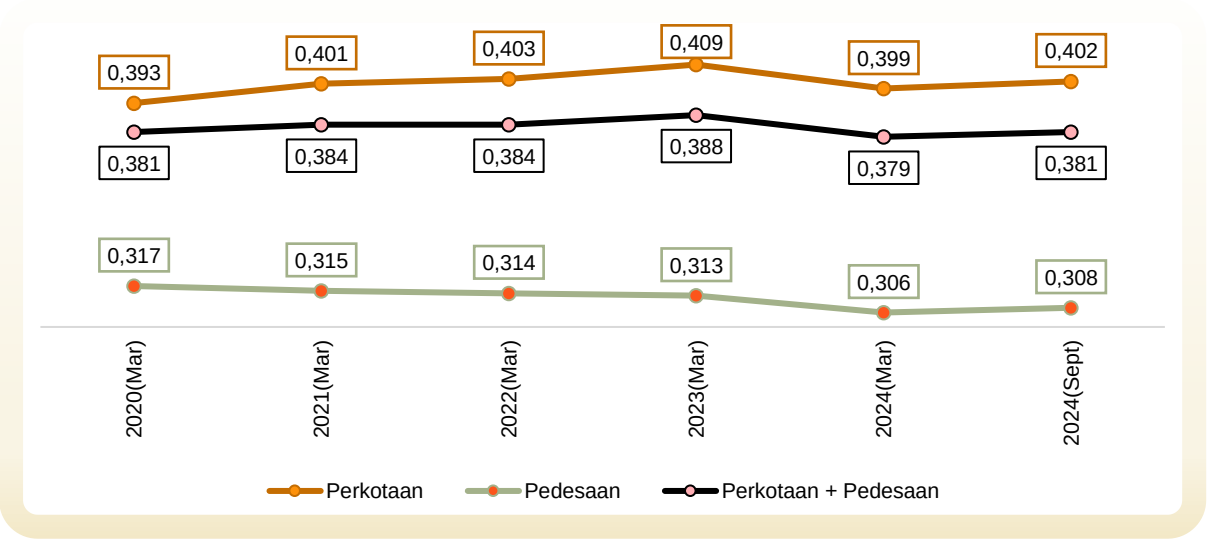

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perkembangan *Gini Ratio* yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menyajikan kondisi bahwa pada Maret 2020 dan September 2020, angka *Gini Ratio* mengalami kenaikan seiring dengan masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya, *Gini Ratio* telah menunjukkan perbaikan sehingga mengalami penurunan pada periode September 2021. Pada Maret 2024, *Gini Ratio* mengalami penurunan bahkan merupakan yang terendah sejak Maret 2018-Maret 2024, Artinya pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 sudah semakin baik, namun pada September 2024 *Gini Ratio* mengalami kenaikan mencapai angka 0,381.

A.3.3.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan tingkat perkembangan manusia. Angka IPM mencerminkan tingkat aksesibilitas masyarakat di suatu wilayah terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Status IPM berkategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) diraih Indonesia pada tahun 2016, setelah sebelumnya berada pada kategori sedang (60 ≤ IPM < 70) seiring dengan pembangunan kualitas manusia di Indonesia yang terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia tahun 2024 menunjukkan IPM berkategori tinggi dengan pertumbuhan yang stabil mencapai 75,02, atau tumbuh 0,63 poin atau 0,85 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 74,39 seperti terlihat pada **Grafik 24**.

Grafik 24
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020–2024

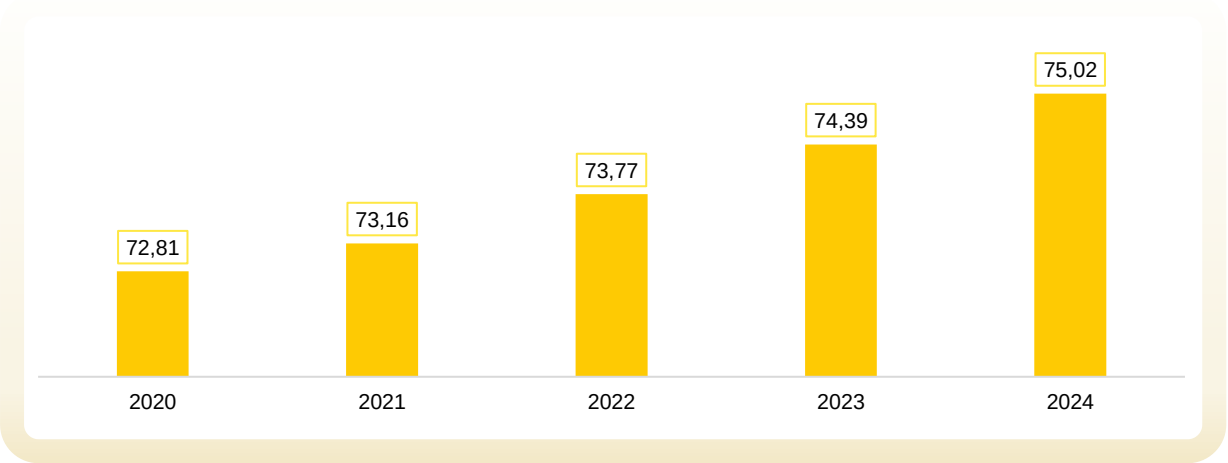

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,75 persen per tahun selama periode 2020–2024. Pertumbuhan IPM pada tahun 2024 didukung oleh seluruh dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan tingkat pengetahuan. Pada aspek kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir terus mengalami peningkatan. Bayi yang lahir pada tahun 2024 diperkirakan memiliki umur harapan hidup mencapai 74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, selama periode 2020–2024, UHH mengalami kenaikan sebesar 0,78 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,26 persen. Khusus pada tahun 2024, pertumbuhan UHH mencapai 0,30 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan pada periode 2020–2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun.

Dalam dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi penduduk berusia tujuh tahun meningkat dari 13,15 tahun pada 2023 menjadi 13,21 tahun pada 2024, bertambah 0,06 tahun. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas juga mengalami kenaikan sebesar 0,08 tahun, dari 8,77 tahun pada 2023 menjadi 8,85 tahun pada 2024. Pada dimensi standar hidup layak, yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan), terjadi peningkatan signifikan. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran ini mencapai 12,34 juta rupiah per tahun, meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A.3.3.5. Nilai Tukar Petani dan Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Indikator pembangunan berupa NTP tercatat konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, NTP tercatat sebesar 101,65 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 119,62 pada tahun 2024. Kenaikan NTP pada Desember 2024 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal, hal ini juga dipengaruhi oleh naiknya NTP di seluruh subsektor pertanian, yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Tanaman Holtikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan. Perkembangan NTP 2024 dapat dilihat pada **Grafik 25.**

Grafik 25
Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan 2020–2024

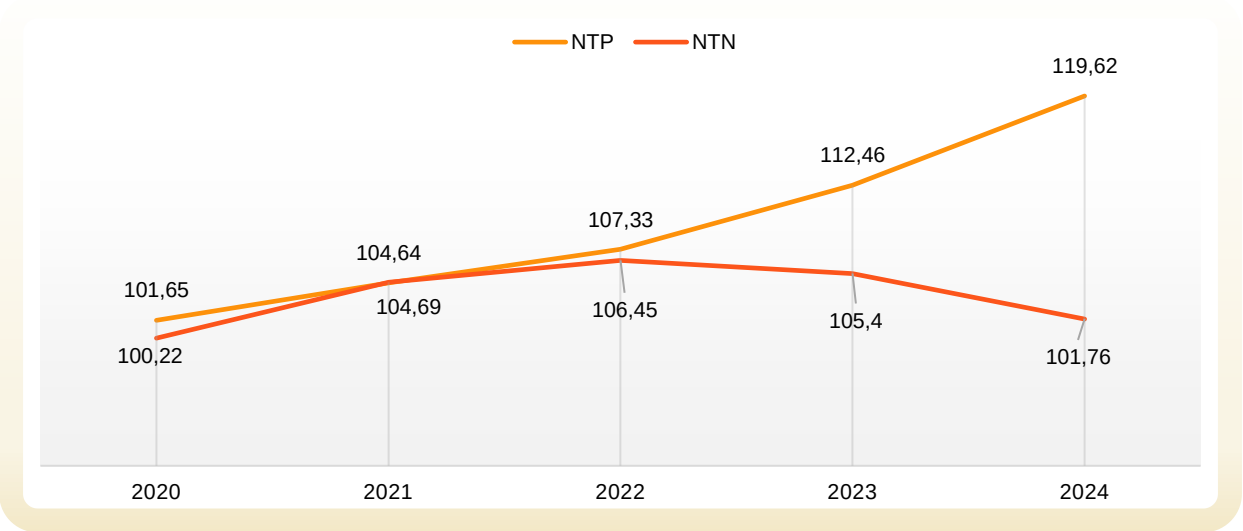

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di sisi lain, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. NTN tercatat lebih rendah dibandingkan Nilai Tukar Petani (NTP) meskipun masih berada dalam kisaran positif. Hal ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para nelayan dari tahun ke tahun, Pada tahun 2020 NTN tercatat mencapai 100,22 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 sampai akhirnya kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 101,76.

Penurunan NTN dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah penurunan indeks harga yang diterima nelayan, yang berarti harga jual hasil tangkapan menurun. Selain itu, kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan, seperti biaya operasional dan kebutuhan konsumsi, juga berkontribusi terhadap penurunan NTN. Perkembangan NTN masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan dalam rentang 107 hingga 110.

A.4. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Kinerja APBN hingga akhir tahun 2024 tetap menunjukkan performa yang sehat, dengan defisit yang terjaga dalam batas yang terkendali. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan APBN yang dilakukan dengan sangat hati-hati, serta bersikap antisipatif, responsif, dan suportif. Dengan gejolak perekonomian global selama tahun 2024 yang berdampak pada perekonomian nasional, APBN menjadi instrumen pengendali ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya keras ini terlihat jelas dari indikator ekonomi makro pada tahun 2024. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,03 persen dibandingkan tahun lalu *(yoy)* setelah sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 4,95 persen pada triwulan III tahun 2024. Keberhasilan ini adalah dampak dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan APBN dalam merespons tantangan ekonomi secara efektif. Dinamika politik berbagai negara di dunia turut memengaruhi upaya pemerintah dalam pelaksanaan APBN. Meskipun demikian, di tengah volatilitas pasar global, penurunan harga komoditas, dan berbagai tekanan eksternal, Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh sektor domestik yang kokoh dan kebijakan fiskal yang efektif. Di sisi lain, penurunan realisasi *lifting* migas turut memengaruhi upaya pemerintah dalam mencapai target Pendapatan Negara. Meskipun volatilitas pasar keuangan global terus memberikan tekanan pada stabilitas pasar keuangan domestik, dampaknya berhasil dikelola dengan baik.

Upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian di tengah tantangan ekonomi global melalui kebijakan yang proaktif dan mendukung tercermin pada pertumbuhan Belanja Negara pada tahun 2024. Pemerintah mempercepat alokasi anggaran dalam APBN untuk mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana konektivitas, serta memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Selain itu, pemerintah juga berupaya meredam dampak ketegangan geopolitik dan menjaga stabilitas harga.

Peningkatan Pendapatan Negara dan Belanja Negara pada Tahun 2024 menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global. Capaian kinerja pelaksanaan APBN tahun 2024 juga tergambarkan pada kondisi fiskal yang masih dalam batas aman, meskipun Belanja Negara dioptimalkan sebagai *shock absorber* dan meningkat sebesar 7,64 persen *(yoy)*, defisit anggaran pada tahun 2024 masih berada di batas aman sebesar Rp509,16 triliun. Persentase defisit anggaran terhadap PDB Nominal tahun 2024 lebih rendah dari yang ditetapkan pada Perpres Nomor 206 tahun 2024, yaitu sebesar 2,37 persen terhadap PDB.

Keseimbangan Primer tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp20,74 triliun, di mana total Pendapatan Negara lebih rendah daripada Belanja Negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan Primer mencerminkan kemampuan pemerintah untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang menggunakan Pendapatan Negara. Sebaliknya, Keseimbangan Primer yang defisit menunjukkan bahwa pemerintah perlu mencari pembiayaan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang. Untuk mencapai Keseimbangan Primer yang positif, pemerintah perlu mendorong peningkatan Pendapatan Negara atau menekan Belanja Negara. Keseimbangan Primer tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Keseimbangan Primer tahun 2024 yang ditetapkan pada Perpres 206 Tahun 2024, yaitu sebesar negatif Rp43,71 triliun. Hal ini menandakan upaya optimalisasi Belanja Negara dilaksanakan dengan memperhitungkan dampak berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia meskipun saat ini Indonesia dihadapkan dengan volatilitas pasar global dan tekanan perekonomian nasional.

Sampai dengan tahun 2024, APBN mengalami defisit sebesar 2,30 persen terhadap PDB tahun 2024. Pada periode yang sama tahun 2023, kinerja APBN menghasilkan defisit sebesar 1,61 persen dari PDB. Defisit APBN pada tahun 2024 disebabkan karena Belanja Negara yang tumbuh kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Apabila melihat posisi Defisit APBN pada tahun 2024 yang mencapai Rp509,16 triliun, Kinerja APBN mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja Negara. Atas defisit tersebut, pemerintah melakukan sejumlah bentuk pembiayaan selama tahun 2024 triliun yang mencapai Rp554,89 triliun (102,56 persen terhadap Pagu). Realisasi pembiayaan ini relatif tinggi dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Pembiayaan tahun 2024 terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp462,58 triliun serta Pembiayaan Luar Negeri (Neto) yang mencapai Rp92,31 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan utang yang dilaksanakan secara hati-hati, fleksibel, dan akuntabel untuk menjaga efisiensi biaya utang (*cost of fund*) dan dengan mempertimbangkan batas aman utang. Lebih besarnya pembiayaan yang direalisasikan dibandingkan dengan defisit anggaran yang ada, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp45,73 triliun, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional lainnya.

A.4.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan dari ketidakpastian perekonomian global. Ketegangan geopolitik dan konflik di Timur Tengah menimbulkan resiko bagi perekonomian Indonesia. Meskipun pada triwulan pertama tahun 2024, ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif dan inflasi terjaga dalam batas yang relatif stabil, ada beberapa faktor yang turut memengaruhi kinerja pendapatan negara. Di antaranya adalah moderasi harga komoditas, penurunan aktivitas perdagangan internasional, dan turunnya produksi minyak serta gas. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tekanan terhadap pendapatan negara. Pendapatan negara memainkan peran krusial dalam mencapai target konsolidasi fiskal dan mendukung APBN agar dapat menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi dengan maksimal. Upaya mobilisasi pendapatan negara merupakan salah satu elemen penting dalam reformasi fiskal yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi dalam perekonomian nasional dan pendapatan negara. Penurunan pendapatan negara tersebut juga dipengaruhi oleh respons kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Upaya pemerintah membuahkan hasil dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Pendapatan negara meningkat signifikan berkat perbaikan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan peningkatan penerimaan dari perpajakan serta PNBP. Kinerja positif berlanjut pada tahun 2022 dipicu oleh perbaikan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan reformasi perpajakan melalui UU HPP. Kinerja Pendapatan Negara pada tahun 2023 kembali mencatatkan pertumbuhan positif. Hal ini sejalan dengan kebijakan pendapatan negara untuk mendukung transformasi ekonomi dan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dengan memastikan implementasi reformasi perpajakan berjalan efektif. Pendapatan Negara pada tahun 2024 tumbuh positif di tengah termoderasinya harga komoditas dan gejolak ekonomi global. Kinerja Pendapatan Negara 2024 menjadi pondasi untuk mendukung berbagai agenda pembangunan tahun berikutnya.

Kebijakan fiskal pemerintah dilakukan dengan hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif. Kinerja Pendapatan Negara secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang perpajakan dan PNBP, serta variasi harga komoditas. Pemerintah berupaya mengoptimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan terus mendorong efektivitas reformasi perpajakan.

Pendapatan Negara pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.850,61 triliun atau 101,72 persen dari target yang telah ditetapkan berdasarkan Perpres 206 Tahun 2024. Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.231,84 triliun, PNBP sebesar Rp584,38 triliun, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp34,39 triliun. Pendapatan Negara mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,40 persen *(yoy)*. Apabila dilihat pertumbuhannya, Pendapatan Perpajakan tumbuh sebesar 3,60 persen *(yoy)*, Pendapatan Hibah tumbuh signifikan sebesar 100,11 persen *(yoy)*, sedangkan PNBP mengalami kontraksi sebesar 4,60 persen *(yoy)*.

Kinerja Pendapatan dan Hibah pada tahun 2024 ditopang dari kinerja Pendapatan Perpajakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurunnya profitabilitas usaha yang berdampak pada penurunan setoran tahunan dan angsuran PPh Badan, peningkatan restitusi, moderasi dan volatilitas harga komoditas. Kinerja PNBP dipengaruhi oleh sedangkan kinerja PNBP dipengaruhi penurunan *lifting* minyak dan gas bumi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan SDA. Kontraksi Pendapatan SDA dipengaruhi oleh kebijakan moderasi Harga Batubara Acuan (HBA). Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan positif akibat peningkatan setoran yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pendapatan Hibah yang meningkat signifikan dipengaruhi dari adanya dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa. Tabel realisasi Pendapatan Negara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	% Angka Naik/ Turun*
I. Pendapatan Perpajakan	**2.231,84**	**2.154,21**	**3,60**
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.157,98	2.089,72	3,27
2. Pendapatan Perdagangan Internasional	73,86	64,49	14,53

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	% Angka Naik/ Turun*
II. PNBP	**584,38**	**612,54**	**(4,60)**
1. Pendapatan SDA	228,93	254,20	(9,94)
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	86,38	82,06	5,27
3. Pendapatan BLU	104,72	95,86	9,24
4. Pendapatan PNBP lainnya	164,35	180,42	(8,91)
III. Penerimaan Hibah	**34,39**	**17,18**	**100,11**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	**2.850,61**	**2.783,93**	**2,40**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan

Kinerja Pendapatan Perpajakan mengalami peningkatan sebesar Rp77,63 triliun atau tumbuh 3,60 persen *(yoy)*. Realisasi ini didominasi oleh Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp2.157,98 triliun, meningkat Rp68,26 triliun atau sebesar 3,27 persen *(yoy)*. Di sisi lain, Pendapatan Perdagangan Internasional terealisasi sebesar Rp73,86 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 14,53 persen *(yoy)* atau sebesar Rp9,37 triliun. Berdasarkan sumbernya, Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Kinerja Pendapatan Perpajakan ditopang oleh realisasi Pendapatan Pajak yang tumbuh 3,41 persen *(yoy)* atau 63,74 triliun menjadi Rp1.931,61 dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang juga mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp13,89 triliun atau 4,85 persen *(yoy)* menjadi Rp300,23 triliun. Realisasi Pendapatan Perpajakan dan Perdagangan Internasional sampai dengan 31 Desember 2024 melampaui target yang telah ditetapkan pada Perpres 206 Tahun 2024 yaitu berturut-turut sebesar 100,54 persen dan 102,67 persen.

Pendapatan Pajak bersumber dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas, PPh Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPh Nonmigas berkontribusi besar atas realisasi Pendapatan Pajak yaitu sebesar Rp988,52 triliun diikuti oleh PPN/PPnBM sebesar Rp827,63 triliun. Komponen PPh Nonmigas dan PPN/PPnBM secara berturut-turut berkontribusi sebesar 51,18 persen dan 42,85 persen terhadap total Pendapatan Pajak. Apabila dirinci secara detail, realisasi Pendapatan PPh Nonmigas ditopang oleh Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final. Ketiga komponen tersebut secara berturut-turut berkontribusi sebesar 33,65 persen, 24,64 persen, dan 14,25 persen terhadap total Pendapatan PPh Nonmigas. Secara keseluruhan, PPh Nonmigas mengalami pertumbuhan 0,53 persen *(yoy)* atau sebesar Rp5,25 triliun setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada triwulan III. Pertumbuhan komponen Pendapatan PPh Nonmigas didorong atas perbaikan kondisi ekonomi, terjaganya gaji dan upah, peningkatan lapangan kerja baru, serta peningkatan aktivitas perdagangan. Pertumbuhan sektor perdagangan serta konsumsi domestik yang stabil mendorong kinerja positif Pendapatan PPN/PPnBM. Realisasi Pendapatan PPN/PPnBM ditopang oleh Pendapatan PPN sebesar Rp808,09 triliun, diikuti oleh Pendapatan PPnBM sebesar Rp19,54 triliun dan PPN/PPnBM yang ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp0,80 triliun. Apabila dilihat berdasarkan persentase, komponen PPN, PPnBM, dan PPN/PPnBM DTP secara berturut-turut berkontribusi sebesar 97,54 persen. 2,36 persen, dan 0,10 persen dari total Pendapatan PPN/PPnBM. Realisasi Pendapatan PPN/PPnBM menunjukan kinerja positif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,49 persen *(yoy)* atau mengalami kenaikan sebesar Rp64,80 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh realisasi Pendapatan PPN yang mengalami kenaikan sebesar Rp70,45 triliun atau 9,55 persen *(yoy)*. Di sisi lain, komponen PPnBM mengalami penurunan sebesar Rp4,35 triliun atau sebesar 18,22 persen *(yoy)* dan PPN/PPnBM DTP mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 61,56 persen *(yoy)* atau sebesar Rp1,29 triliun.

Pendapatan Kepabeanan dan Cukai bersumber dari Pendapatan Cukai sebesar Rp226,37, Bea Masuk sebesar Rp52,97 triliun, dan Bea Keluar sebesar Rp20,89 triliun. Seluruh komponen Pendapatan Kepabeanan dan Cukai mencatatkan realisasi melampaui target yang ditetapkan pada Perpres 206/2024. Secara nominal, Pendapatan Cukai berkontribusi besar terhadap realisasi Pendapatan Kepabeanan dan Cukai yaitu sebesar 75,40 persen dari total Rp300,23 triliun. Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) menjadi kontributor utama atas kinerja Pendapatan Cukai, dengan kontribusi sebesar 95,79 persen dari total Pendapatan Cukai. Sejalan dengan realisasi nominal yang melampaui target, apabila dilihat berdasarkan pertumbuhannya, seluruh komponen Pendapatan Kepabeanan dan Cukai mencatatkan pertumbuhan yang positif. Pendapatan Bea Keluar mencatatkan pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 53,64 persen *(yoy)*. Kinerja ini disebabkan karena adanya kebijakan relaksasi ekspor dan harga CPO yang meningkat di akhir tahun 2024. Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Cukai secara berturut-turut tumbuh sebesar 4,07 persen *(yoy)* dan 2,04 persen *(yoy)*.

Peningkatan Pendapatan Cukai disebabkan karena kenaikan tarif CHT, sementara kinerja Bea Masuk dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah

Grafik 26
Realisasi Penerimaan PNBP Tahun Anggaran 2024

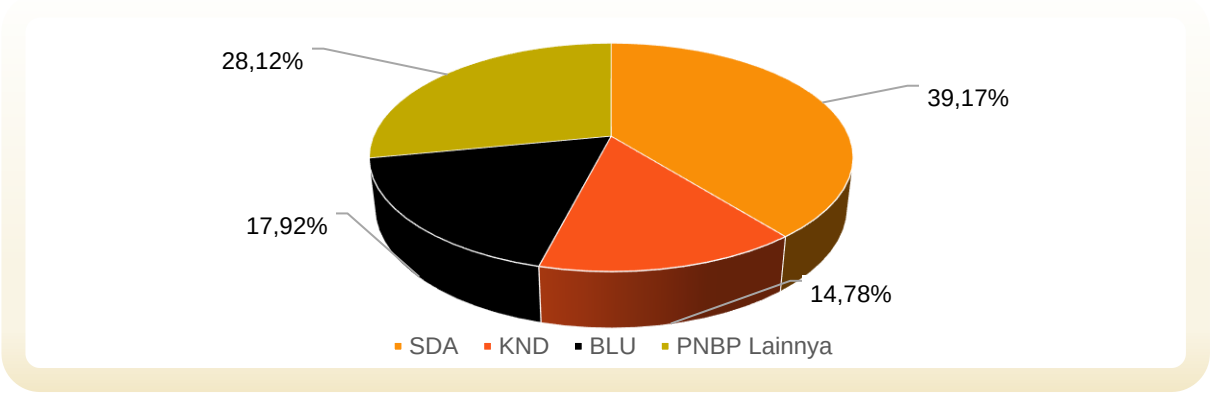

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi PNBP sampai akhir tahun 2024 mencapai Rp584,38 triliun, mengalami kontraksi sebesar Rp28,16 triliun atau sebesar 4,60 persen *(yoy)*. Meskipun mengalami penurunan secara nominal, realisasi PNBP tercatat mencapai 106,42 persen melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian PNBP bersumber dari kenaikan realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Pendapatan Badan Layanan Umum masing-masing sebesar 5,27 persen *(yoy)* dan 9,24 persen *(yoy)*, sedangkan pada capaian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP Lainnya mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 9,94 persen *(yoy)* dan 8,91 persen *(yoy)*. Di tengah gejolak perekonomian global, kinerja positif PNBP umumnya dipengaruhi oleh peningkatan kinerja dan jumlah BLU pada tahun 2024, kinerja BUMN, serta inovasi layanan.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang berdampak pada peningkatan laba bersih BUMN. Kenaikan profit yang diperoleh BUMN mendorong kenaikan rasio pembayaran dividen sehingga meningkatkan jumlah setoran dividen dari BUMN. Perekonomian nasional yang pulih pascapandemi Covid-19 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN. Pendapatan KND mencatatkan realisasi sebesar Rp86,38 triliun atau mencapai 100,63 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen *(yoy)*. Bagian Pemerintah pada Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN di sektor perbankan terealisasi Rp49,59 triliun dan sektor non-Perbankan sebesar Rp35,98 triliun serta bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian Keuangan pada sektor nonperbankan sebesar Rp0,81 triliun.

Pendapatan BLU mencatatkan pertumbuhan positif sebesar Rp8,85 triliun menjadi Rp104,72 triliun. Realisasi ini mencapai 130,19 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Jasa Layanan Umum berkontribusi besar atas realisasi Pendapatan BLU, yaitu sebesar Rp88,43 triliun. Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum terealisasi sebesar Rp0,78 triliun, Hasil Kerja Sama BLU sebesar Rp1,69 triliun, Pendapatan dari Pelayanan BLU dari entitas pusat sebesar Rp0,60 triliun, dan Pendapatan BLU lainnya sebesar Rp13,23 triliun. Peningkatan Pendapatan BLU utamanya dipengaruhi oleh pendapatan nonsawit.

Pendapatan SDA pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp228,93 triliun. Secara nominal, perolehan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25,27 triliun dibandingkan tahun 2023. Capaian Pendapatan SDA berada di bawah target APBN yaitu 97,20 persen. Penurunan realisasi ini disebabkan karena perlambatan Pendapatan SDA Migas maupun Nonmigas. Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi sebesar 4,78 persen *(yoy)*. Kontraksi yang terjadi atas realisasi Pendapatan SDA disebabkan karena penurunan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2024. Penurunan realisasi *lifting* migas ini disebabkan karena melemahnya kualitas fasilitas produksi dan *unplanned shutdown* di beberapa lapangan migas. Pendapatan SDA Nonmigas mengalami penurunan yang signifikan dengan realisasi sebesar Rp118,31 triliun, Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas mengalami kontraksi sebesar 14,29 persen *(yoy)*. Pendapatan SDA Pertambangan Minerba mencatatkan penurunan realisasi sebesar 16,53 persen *(yoy)*. Penurunan Pendapatan SDA Minerba ini disebabkan karena adanya penurunan harga komoditas antara lain penurunan drastis Harga Batubara Acuan (HBA) dan harga mineral acuan nikel.

Berbanding terbalik dengan Pendapatan SDA Migas dan SDA Pertambangan Minerba, Pendapatan SDA Nonminerba mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 18,33 persen *(yoy)*. Komponen Pendapatan Perikanan mencatatkan pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu sebesar 49,45 persen *(yoy)*. Peningkatan kinerja Pendapatan SDA Kehutanan bersumber dari pembayaran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan, pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) yang meningkat signifikan akibat meningkatnya permohonan izin pemanfaatan hutan. Pendapatan SDA Perikanan umumnya dipengaruhi oleh masa transisi pelaksanaan penarikan pascaproduksi sehingga muncul adanya jeda penerimaan. Selain itu, pertumbuhan realisasi atas Pendapatan SDA Perikanan dipengaruhi oleh adanya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk seluruh kapal di tahun 2024 serta kemudahan izin untuk meningkatkan volume produksi kapal.

PNBP lainnya terealisasi sebesar Rp164,35 triliun atau mengalami penurunan sebesar 8,91 persen *(yoy)*. Realisasi PNBP lainnya mencapai 111,54 persen dari jumlah yang dianggarkan. Penurunan penerimaan yang terjadi utamanya dipengaruhi oleh penurunan HBA yang berdampak pada kontraksi Penjualan Hasil Tambang (PHT). PNBP K/L mengalami perlambatan, utamanya disebabkan oleh turunnya PNBP Nonlayanan.

Penerimaan Hibah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp34,39 triliun atau 98,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN. Kinerja positif Penerimaan Hibah tergambar dari pertumbuhan realisasi sebesar 100,11 persen *(yoy)*. Secara lebih rinci, Realisasi Penerimaan Hibah berasal dari Hibah Dalam Negeri sebesar Rp32,25 triliun dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp2,14 triliun. Kenaikan realisasi Pendapatan Hibah utamanya dipengaruhi oleh peningkatan hibah langsung dari pemerintah daerah dalam rangka dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

A.4.2. BELANJA NEGARA

Faktor-faktor ekonomi seperti kondisi politik meliputi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pergerakan tingkat suku bunga, dan peningkatan harga minyak menjadi fokus yang perlu dijadikan perhatian dalam pelaksanaan Belanja Negara. Kondisi tersebut berkorelasi dengan kinerja APBN termasuk peningkatan Belanja Negara. Dalam mewujudkan peningkatan Belanja Negara yang diimbangi dengan peningkatan kualitas Belanja Negara, kebijakan Belanja Negara diarahkan untuk mendukung penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural harus diimbangi dengan reformasi fiskal guna mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal yang berkesinambungan.

Kondisi perekonomian global masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Postur APBN dirancang untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal secara holistik. Pada sisi belanja, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kualitas Belanja Negara demi mewujudkan penguatan reformasi struktural. Oleh karena itu, Kebijakan belanja pada tahun 2024 difokuskan untuk beberapa hal, antara lain: 1) dukungan percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan demi mewujudkan penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data antara lain dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Belanja Negara pada tahun 2024 berperan sebagai *shock absorber* dan *agent of development* untuk melindungi rakyat, menjaga stabilitas perekonomian, serta mendukung berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, ketahanan pangan, serta proyek strategis nasional. Realisasi Belanja Negara sampai Tahun 2024 sebesar Rp3.359,77 triliun atau 100,49 persen dari pagu anggaran tahun 2024 berdasarkan Perpres Nomor 206 Tahun 2024. Secara lebih rinci, Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menjadi penopang utama realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.496,22 triliun dan berkontribusi sebesar 74,30 persen dari total Realisasi Belanja Negara. Belanja TKD terealisasi sebesar Rp863,54 triliun, terealisasi 100,69 persen dari pagu dan mengalami kontraksi sebesar Rp17,89 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Belanja Pemerintah Pusat secara nominal didominasi oleh Belanja Barang yang meningkat 20,95 persen *(yoy)*, Belanja Pegawai yang meningkat sebesar 12,64 persen *(yoy)*, dan peningkatan Belanja Modal sebesar 17,31 persen

(yoy). Peningkatan Belanja Modal dipengaruhi oleh proyek pengembangan infrastruktur. Peningkatan Belanja Barang sebesar dipengaruhi oleh pengadaan dan pemeliharaan BMN dan barang operasional K/L. Realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen *(yoy)*. Hal tersebut dipengaruhi oleh alokasi TKD yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Tabel 8
Realisasi Belanja Negara Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun Rupiah)

	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	% Angka Naik/Turun*
I.	**Belanja Pemerintah Pusat**	**2.496,22**	**2.239,79**	**11,45**
	1. Belanja Pegawai	464,86	412,71	12,64
	2. Belanja Barang Jasa	523,37	432,71	20,95
	3. Belanja Modal	355,51	303,04	17,31
	4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	488,43	439,88	11,04
	5. Subsidi	292,69	269,59	8,57
	6. Belanja Hibah	0,28	0,22	27,06
	7. Bantuan Sosial	154,95	156,60	(1,05)
	8. Belanja Lain-lain	216,14	225,02	(3,95)
II.	**Transfer ke Daerah**	**863,54**	**881,43**	**(2,03)**
	1. Dana Bagi Hasil	153,17	205,67	(25,52)
	2. Dana Alokasi Umum	429,21	398,03	7,83
	3. Dana Alokasi Khusus	183,54	181,36	1,20
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,89	50,33	1,10
	b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,44	128,08	1,84
	c. Hibah Kepada Daerah	2,21	2,94	(24,95)
	4. Dana Otonomi Khusus	18,27	17,24	5,98
	5. Dana Keistimewaan DIY	1,42	1,37	3,44
	6. Dana Desa	70,93	69,86	1,53
	7. Insentif Fiskal	7,00	7,91	(11,44)
Jumlah Belanja Negara		**3.359,77**	**3.121,22**	**7,64**

Sumber: Kementerian Keuangan

*) Jika terdapat perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh perbedaan satuan yang digunakan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp256,44 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 11,45 persen *(yoy)*. Dengan realisasi mencapai 100,42 persen dari pagu, Belanja Pemerintah Pusat sebagai *shock absorber* antara lain digunakan untuk penebalan bansos, dukungan penyelenggaraan pemilu, penyaluran bansos PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, bantuan pangan dampak *El Nino* untuk menjaga daya beli masyarakat, pembangunan sarana konektivitas, pembangunan IKN, serta realisasi subsidi BBM, LPG, listrik, dan pupuk. Realisasi Pemerintah Pusat tahun 2024 mencakup realisasi belanja K/L yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, serta Belanja Bantuan Sosial. Selain itu, terdapat Belanja Non-KL yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, yang mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pembayaran Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan berbagai jenis Belanja Lainnya.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat ditopang oleh komponen belanja dengan nominal terbesar antara lain Belanja Barang sebesar Rp523,37 triliun, Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp488,43 triliun, Belanja Pegawai sebesar Rp464,86 triliun, dan Belanja Modal sebesar Rp355,51 triliun. Secara persentase peningkatan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh Belanja Hibah yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 27,06 persen *(yoy)*, Belanja Barang yang tumbuh sebesar 20,95 persen *(yoy)*, serta Belanja Modal sebesar 17,31 persen *(yoy)*.

Belanja K/L terealisasi sebesar Rp1.324,00 triliun dan realisasi Belanja Non-K/L sebesar Rp1.172,22 triliun. Apabila dirinci menurut kinerja nominal realisasi belanja per masing-masing K/L, maka K/L dengan porsi realisasi tertinggi secara berurutan terhadap total Belanja K/L antara lain adalah Kementerian Pertahanan (14,39 persen), Kementerian PUPR (12,86 persen), Kepolisian Negara Republik Indonesia (10,31 persen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (7,55 persen), Kementerian Kesehatan (7,18 persen), Kementerian Keuangan (6,26 persen), Kementerian Agama (6,08 persen), Kementerian Sosial (5,94 persen), dan Komisi Pemilihan Umum (3,56 persen). Belanja Non-K/L dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang, pembayaran subsidi energi dan pupuk, dan penyaluran bantuan kemasyarakatan.

Grafik 27
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

(dalam triliun Rupiah, %)

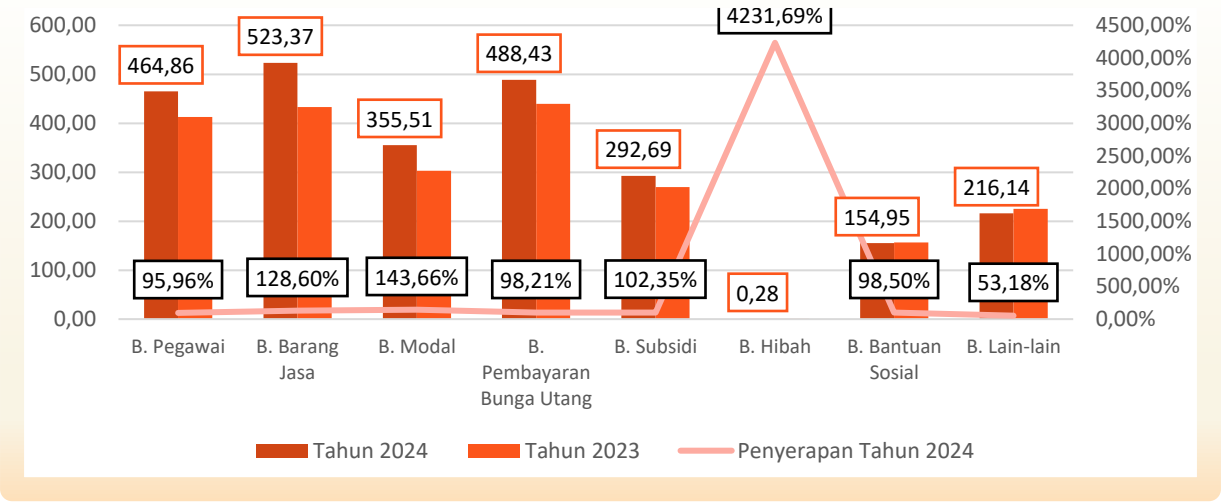

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Belanja Pegawai meningkat 12,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp464,86 triliun. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 95,96 persen direalisasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/POLRI. Selain itu, Belanja Pegawai juga dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban pemerintah terhadap pensiunan sebagai upaya untuk menjaga kesejahteraan.

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 20,95 persen *(yoy)* menjadi Rp523,37 triliun atau 128,60 persen dari pagu. Peningkatan pada tahun 2024 cukup besar apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya utamanya dipengaruhi oleh pembayaran bantuan pangan serta rangkaian kegiatan pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, realisasi Belanja Barang juga dimanfaatkan antara lain untuk (1) pemeliharaan dan pengelolaan BMN, pengadaan dan pemeliharaan alutsista/nonalutsista, dan pelayanan kesehatan oleh Kemenhan, (2) penyaluran BOS oleh Kementerian Agama, (3) peningkatan kapasitas jalan, pemeliharaan sarpras SDA, dan penyelenggaraan pemukiman dan bangunan gedung oleh Kementerian PUPR, (4) pembayaran honorarium Badan Ad hoc, pengadaan perlengkapan Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (5) pembayaran selisih harga biodiesel serta pengelolaan BUMN dan umum oleh Kementerian Keuangan.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp355,51 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,31 persen *(yoy)*. Dengan pencapaian sebesar 143,66 persen dari pagu, Peningkatan kinerja realisasi ini utamanya dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur dan pengadaan alutsista. Peningkatan realisasi ini dipengaruhi oleh pemanfaatan antara lain untuk: (1) pembangunan dan rehabilitasi jembatan, bendungan, jaringan irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bangunan Gedung IKN, dan pengembangan rumah susun oleh Kementerian PUPR, (2) pengadaan peralatan operasional pada beberapa K/L seperti alutsista dan almatsus, serta (3) pembangunan dan pengembangan bandara, jalur kereta api, pelabuhan.

Kinerja Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 mencapai 98,50 persen dari pagu yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi sebesar 1,05 persen *(yoy)* menjadi sebesar Rp154,95 triliun. Belanja Bantuan Sosial dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial antara lain kartu sembako bagi 18,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 12,5 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk 1,02 juta siswa, PBI-JKN/KIS bagi 96,8 juta KPM, PKH bagi 10,0 juta KPM, serta bantuan dengan tujuan penanggulangan bencana serta meningkatkan daya lenting masyarakat yang terdampak bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Realisasi Pembayaran Bunga Utang mengalami peningkatan sebesar Rp48,54 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp488,43 triliun, atau terealisasi 98,21 persen dari pagu. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya utang pada tahun 2024 meliputi di dalamnya adalah peningkatan *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN). Pembayaran Bunga Utang yang terealisasi sebesar

98,21 persen dari pagu dimanfaatkan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri meliputi pembayaran bunga SBN serta pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran bunga utang luar negeri karena adanya utang program dan proyek di tahun 2024.

Belanja Subsidi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp292,69 triliun, atau 102,35 persen dari pagu. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, Belanja Subsidi mengalami pertumbuhan sebesar Rp23,10 triliun atau 8,57 persen *(yoy)*. Belanja Subsidi dimanfaatkan untuk Subsidi Energi sebesar Rp177,62 triliun dan Subsidi Nonenergi sebesar Rp115,08 triliun. Belanja Subsidi Energi direalisasikan untuk: (1) subsidi BBM sebesar Rp21,58 triliun untuk penyaluran subsidi minyak solar dan minyak tanah (2) subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp80,21 triliun untuk penyaluran tabung LPG 3 Kg sebanyak 7,87 juta MT, (3) subsidi listrik mencapai Rp75,82 untuk 68,46 TWh. Realisasi subsidi listrik mencakup pembayaran sebagian kurang bayar subsidi listrik pada tahun 2023. Selanjutnya, realisasi Subsidi Nonenergi meliputi antara lain: (1) penyaluran pupuk bersubsidi mencapai Rp47,39 triliun, (2) Subsidi PSO sebesar Rp7,98 triliun yang umumnya dipengaruhi oleh realisasi PSO PT KAI, (3) Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp50,60 triliun, serta (4) Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah sebesar Rp9,12 triliun yang terdiri atas realisasi belanja subsidi P-DTP reguler, berupa: PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM serta belanja subsidi P-DTP lainnya, berupa: PPN DTP atas Rumah Tapak dan Rumah Susun, PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Belanja Hibah terealisasikan sebesar Rp278,43 miliar atau jauh melampaui alokasi anggaran sebesar 4.231,69 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Hibah mengalami pertumbuhan sebesar 27,06 persen. Realisasi Belanja Hibah tahun 2024 yang melampaui alokasi anggaran dimanfaatkan untuk Belanja Hibah dilakukan kepada Lembaga Pemerintah di Luar Negeri sebesar Rp183,94 miliar, organisasi internasional sebesar Rp94,23 miliar dan pembayaran *banking commision* yang telah terealisasi sebesar Rp261,73 juta yang dimanfaatkan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah.

Belanja Lain-lain tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar 3,95 persen *(yoy)* menjadi Rp216,14 triliun. Atau 53,18 persen dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik dalam rangka pembayaran kewajiban Pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri yang terjangkau masyarakat dan kompensasi atas BBM dan listrik. Selain itu, realisasi Program Pengelolaan Belanja Lainnya sampai dengan tahun 2024 juga dimanfaatkan untuk belanja lainnya yang terprogram, yakni: (1) Bantuan kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari bantuan pendidikan, bantuan keagamaan, dan bantuan kesehatan; (2) Operasional Lembaga yang Belum Mempunyai Bagian Anggaran, yaitu SKK Migas dan Kawasan Bintan dan Karimun; (3) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja yaitu pemberian bantuan biaya pelatihan dan insentif; (4) Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Papua; dan (5) Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023 Menurut Fungsi

(dalam triliun rupiah)

No	Fungsi	Pagu APBN	Realisasi Tahun 2024	
			Rp	%
1	Pelayanan Umum	814,80	895,53	109,91
2	Pertahanan	139,10	190,27	136,79
3	Ketertiban dan Keamanan	192,80	230,13	119,36
4	Ekonomi	671,78	546,20	81,31
5	Lingkungan Hidup	14,13	14,54	102,89
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	41,80	48,10	115,09
7	Kesehatan	97,43	99,35	101,97
8	Pariwisata dan Budaya	3,40	3,90	114,83
9	Agama	11,76	12,74	108,29
10	Pendidikan	228,75	197,18	86,20
11	Perlindungan Sosial	270,15	258,29	95,61
	TOTAL	**2.485,90**	**2.496,22**	**100,42**

Sumber: Kementerian Keuangan

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan ke dalam 11 klasifikasi Fungsi, yaitu: (1) Fungsi Pelayanan Umum, (2) Fungsi Pertahanan, (3) Fungsi Ketertiban dan Keamanan, (4) Fungsi Ekonomi, (5) Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, (7) Fungsi

Kesehatan, (8) Fungsi Pariwisata, (9) Fungsi Agama, (10) Fungsi Pendidikan, dan (11) Fungsi Perlindungan Sosial. Fungsi Pelayanan Umum menjadi penyumbang realisasi belanja terbesar yaitu mencapai Rp895,53 triliun. Realisasi ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, efektif, efisien, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kinerja penyerapan anggaran fungsi pelayanan umum didukung oleh pembayaran gaji dan tunjangan ASN, realisasi pemenuhan beberapa program pelayanan lainnya, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta pembayaran bunga utang. Kinerja penyerapan anggaran tertinggi kedua terealisasi pada Fungsi Ekonomi. Realisasi sebesar Rp546,20 triliun dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai subsidi, termasuk subsidi untuk Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg, subsidi bunga KUR, subsidi pupuk, subsidi PSO untuk perkeretaapian dan angkutan laut, serta kompensasi untuk BBM dan listrik melalui program belanja lainnya. Selain itu, realisasi anggaran pada fungsi ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja K/L yang mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur konektivitas, seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, jalur kereta api, serta pembangunan dan pengembangan bandar udara dan pelabuhan. Fungsi Perlindungan Sosial menjadi realisasi anggaran tertinggi ketiga. Realisasi yang mencapai Rp258,29 triliun direalisasikan untuk berbagai kegiatan seperti penyaluran bantuan PKH, distribusi bantuan pangan melalui Program Kartu Sembako, penyediaan atensi bagi korban bencana dan anak yatim piatu, penyediaan rehabilitasi sosial, serta perlindungan bagi perempuan melalui penguatan lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan.

Tabel 10
Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	% Angka Naik/Turun*
Transfer Ke Daerah	**863,54**	**881,43**	**(2,03)**
1. Dana Bagi Hasil	**153,17**	**205,67**	**(25,52)**
2. Dana Alokasi Umum	**429,21**	**398,03**	**7,83**
3. Dana Alokasi Khusus	**183,54**	**181,36**	**1,20**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,89	50,33	1,10
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,44	128,08	1,84
c. Hibah Kepada Daerah	2,21	2,94	(24,95)
4. Dana Otonomi Khusus	**18,27**	**17,24**	**5,98**
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	**1,42**	**1,37**	**3,44**
6. Dana Desa	**70,93**	**69,86**	**1,53**
7. Insentif Fiskal	**7,00**	**7,91**	**(11,44)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2024, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD terealisasi sebesar Rp863,54 triliun atau sebesar 100,69 persen dari pagu. Realisasi TKD mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,03 persen setelah sebelumnya mengalami tren pertumbuhan pada semester I dan triwulan III tahun 2024. Secara nominal, realisasi TKD ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat signifikan sebesar Rp31,18 triliun. Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Hibah Kepada Daerah mengalami kontraksi yang cukup signifikan yaitu berturut-turut sebesar 25,52 persen dan 24,95 persen.

Realisasi DBH pada tahun 2024 mencapai Rp153,17 triliun atau 107,04 persen dari pagu. Kinerja Realisasi DBH mengalami penurunan sebesar Rp52,49 triliun. Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengalokasian DBH pada tahun 2024 difokuskan untuk: (1) melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT, DBH Dana Reboisasi/DBH DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH Perkebunan Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah; (3) mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk mengatasi eksternalitas negatif serta penguatan sinergi dengan K/L dan daerah; (4) meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Perkebunan Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah; (5) meningkatkan sinergi pengelolaan kas pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan realisasi DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas; dan (6) meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH. Secara lebih rinci, Realisasi DBH terdiri dari DBH

Non SDA sebesar Rp59,33 triliun, DBH SDA sebesar Rp91,02 triliun, dan DBH Lainnya sebesar Rp2,82 triliun. Realisasi DBH tahun 2024 didominasi oleh Belanja DBH Pertambangan Umum sebesar Rp71,11 triliun diikuti dengan Belanja DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp32,73 triliun.

Realisasi DAU merupakan penyaluran dengan kontribusi terbesar atas Realisasi TKD. Dengan realisasi mencapai Rp429,21 triliun, 100,35 persen dari pagu atau mengalami peningkatan 7,83 persen *(yoy)*. Kinerja positif Realisasi Penyaluran DAU disebabkan karena adanya kebijakan pengalokasian DAU untuk Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASND sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan KMK nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Realisasi DAK Fisik pada tahun 2024 mencapai Rp50,89 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 1,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pada akhir tahun 2024 merupakan bentuk terlaksananya strategi akselerasi penyaluran DAK Fisik setelah mengalami kontraksi pada triwulan III. Pertumbuhan ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan/kinerja pemda dalam penyampaian syarat salur. Dengan pencapaian 94,55 persen dari pagu, realisasi penyaluran DAK Fisik dimanfaatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan jalan. pada bidang infrastruktur energi terbarukan, sedangkan realisasi DAK Nonfisik mencapai Rp130,44 triliun, 97,52 persen dari pagu atau mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen *(yoy)*. Realisasi DAK Nonfisik didominasi oleh penyaluran BOSP, yaitu Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. Realisasi Hibah Kepada Daerah mencatatkan realisasi Rp2,21 triliun, 429,46 persen dari pagu. Penyaluran Hibah Kepada Daerah bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan meliputi Hibah MRT, Hibah READ-SI, Hibah UPLAND, dan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, dan Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang dan Hibah *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio CF ISFL).

Jenis TKD lainnya yaitu Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan realisasi 100 persen dari pagu, yaitu sebesar Rp1,42 triliun atau meningkat 3,44 persen *(yoy)*. Pertumbuhan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan koordinasi Pemerintah DIY dalam kecepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran.

Selain Dana Keistimewaan DIY, Dana Otonomi Khusus (otsus) juga telah disalurkan seluruhnya yaitu sebesar Rp18,27 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 5,98 persen *(yoy)*. Kinerja positif ini disebabkan karena kenaikan alokasi pagu Dana Otsus pada tahun 2024. Dana Otonomi Khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Penurunan realisasi dipengaruhi oleh ketidakpatuhan beberapa pemerintah daerah dalam penyampaian dokumen syarat salur, terutama pemda di wilayah Papua.

Dana Desa tersalurkan 99,90 persen dari pagu atau sebesar Rp70,93 triliun. Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,53 persen. Dana Desa pada tahun 2024 ditujukan utamanya untuk penanganan kemiskinan, program penanganan *stunting*, penyaluran bantuan melalui permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyaluran Dana Desa pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (*non-earmarked*) dan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program ketahanan pangan, dan pencegahan serta penurunan *stunting*. Kinerja positif yang cukup signifikan dipengaruhi oleh kepatuhan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa, perombakan sistem penyaluran Dana Desa melalui pemisahan Dana Desa *earmarked* dan *non-earmarked*, serta pemberian *reward* berupa persentase penyaluran Dana Desa *non-earmarked* yang disalurkan lebih cepat pada tahap I. Selain itu, peningkatan jumlah Desa berstatus Mandiri juga berkontribusi atas capaian kinerja penyaluran.

Sementara itu, Realisasi penyaluran Insentif Fiskal tahun 2024 mencapai mengalami penurunan sebesar 11,44 persen *(yoy)* dengan realisasi 87,52 persen dari pagu atau Rp7,00 triliun. Kontraksi ini disebabkan. Hal ini terjadi karena IF pada kategori pengendalian inflasi untuk periode II dan III tidak disalurkan. Selain itu, jumlah pemerintah daerah yang memenuhi dan menyampaikan persyaratan penyaluran IF untuk kategori kesehatan masyarakat serta kinerja tahun sebelumnya juga mengalami penurunan, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah dana yang disalurkan.

A.4.3. SURPLUS/(DEFISIT) DAN PEMBIAYAAN

Perpres 206 Tahun 2024 menetapkan pembiayaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp541,03 triliun. Sejalan dengan kontinuitas konsolidasi fiskal, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif namun tetap terarah, mendorong peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta untuk mempercepat transformasi ekonomi. Seiring dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia, berbagai risiko global menghadirkan tantangan bagi pelaksanaan APBN tahun 2024, terutama dalam hal perannya untuk memastikan optimalisasi dan stabilisasi ekonomi serta pencapaian sasaran pembangunan nasional. Pengelolaan pembiayaan anggaran akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Pemerintah harus tetap waspada terhadap berbagai faktor risiko global dan bertindak hati-hati dalam pelaksanaan APBN untuk memastikan bahwa target defisit anggaran tetap dapat tercapai.

Kebijakan fiskal tahun 2024 bersifat ekspansif dengan tetap menjaga defisit anggaran dalam batas yang aman. Langkah-langkah untuk menjaga defisit anggaran ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendukung program-program prioritas Pemerintah yang bertujuan memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Untuk menutupi defisit tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan berusaha untuk mengoptimalkan kombinasi pembiayaan dengan cara yang efisien dan tetap memperhatikan dan mengelola risiko yang mungkin timbul.

Kinerja Pendapatan Negara yang Belanja Negara tahun 2024 menghasilkan defisit APBN sebesar Rp509,16 triliun atau 2,30 persen terhadap jumlah PDB tahun 2024, lebih rendah dibandingkan persentase surplus (defisit) terhadap APBD yang ditetapkan pada Perpres No.206/2024. Defisit anggaran mencerminkan pelaksanaan konsolidasi fiskal pemerintah atas peningkatan kualitas belanja *(spending better)*. Defisit disumbangkan oleh realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp2.850,61 triliun, dengan Belanja Negara mencapai Rp3.359,77 triliun. Berikut tabel yang membandingkan realisasi Surplus/Defisit Anggaran tahun 2024 terhadap target APBN serta rasionya terhadap PDB Nominal.

Tabel 11
Rasio Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB Tahun 2024 dan 2023

Indikator	APBN 2024 (Perpres No. 206 Th 2024)	Realisasi Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Anggaran*)	(541,03)	(509,16)
PDB Nominal (Tahun 2024)	22.830**)	22.139
Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,37%) ***)	**(2,30%)**

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik
**) Dalam triliun rupiah*
***) Asumsi APBN 2024 berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2023*
****) Persentase target defisit berdasarkan Perpres No. 206 Tahun 2024 terhadap Asumsi APBN pada Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024*

Defisit APBN 2024 berhasil terjaga 2,30 persen dari PDB, lebih rendah dari target defisit APBN terhadap PBD berdasarkan Perpres No 206 Tahun 2024. Keberhasilan dari terjaganya defisit APBN didukung oleh kinerja penerimaan negara yang solid serta belanja yang efisien dan produktif untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan dan dioptimalkannya peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menopang daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah gejolak perekonomian global.

Defisit APBN ditopang oleh Pembiayaan Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp541,03 triliun rupiah. Pada tahun 2024, Pembiayaan Anggaran neto terealisasi sebesar Rp554,89 triliun atau 102,56 dari pagu yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci, Realisasi Pembiayaan tersebut bersumber dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp462,58 triliun dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar Rp92,31 triliun. Pembiayaan ditopang oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp558,06 triliun, 98,55 persen dari pagu APBN. Pembiayaan utang terdiri atas realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp450,73 triliun, realisasi Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp15,02 triliun yang terdiri dari hasil Penerimaan Pinjaman sebesar Rp20,12 triliun dikurangi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,10 triliun. Pemerintah juga melakukan penerimaan Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp92,31 triliun.

Realisasi Pembiayaan Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp59,33 triliun yang dimanfaatkan untuk penguatan BUMN dan BLU, mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur, dan dukungan penyelesaian proyek strategis dan prioritas. Di samping Pembiayaan Investasi, Pembiayaan juga diperoleh dari Pemberian Pinjaman sebesar Rp0,22 triliun, yang diperoleh dari Penerimaan Cicilan

Pengembalian Pemberian Pinjaman sebesar Rp4,02 triliun dan pemberian pinjaman senilai negatif Rp4,24 triliun. Selanjutnya, realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,46 triliun. Kewajiban Penjaminan merupakan pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2024 ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Pembiayaan Lainnya terealisasi sebesar Rp57,84 triliun yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri, Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi. Di bawah ini tabel rincian target dan realisasi Pembiayaan selama tahun 2024.

Tabel 12
Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2024 (Perpres No. 206 Tahun 2024)	Realisasi Tahun 2024	% Terhadap APBN
Pembiayaan Utang	566,29	558,06	98,55
Pembiayaan Investasi	(176,22)	(59,33)	33,67
Pemberian Pinjaman	(0,25)	(0,22)	87,33
Kewajiban Penjaminan	(0,82)	(1,46)	177,06
Pembiayaan Lainnya	152,03	57,84	38,04
Total Pembiayaan	541,03	554,89	102,56

Sumber: Kementerian Keuangan

Sampai dengan akhir tahun 2024, posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.812,90 triliun dengan rasio utang terhadap PBD sebesar 39,81 persen. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan dari sebelumnya 39,21 persen. Persentase utang terhadap PDB mengalami kenaikan karena adanya peningkatan *outstanding* SBN pada tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali. Defisit APBN yang terealisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp509,16 triliun, sedangkan jumlah pembiayaan yang diperoleh pemerintah untuk menutup defisit APBN mencapai sebesar Rp554,89 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,73 triliun, yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas nasional lainnya dan penyelesaian kewajiban pemerintah.

A.5. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan LKPP tahun 2024 mengacu kepada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Selain itu, LKPP tahun 2024 disusun berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Kerangka Umum SAPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

Kerangka Umum SAPP

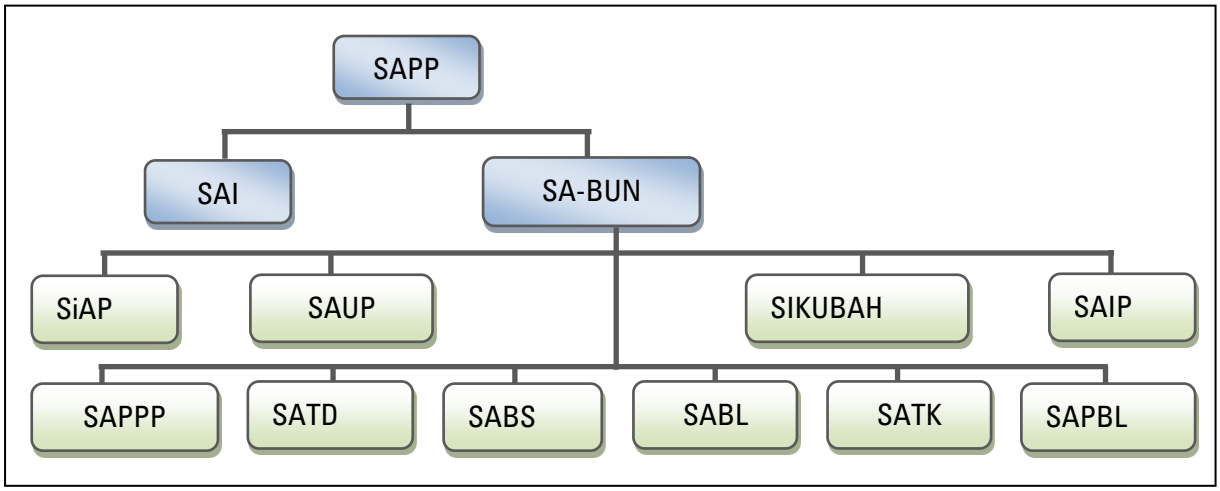

SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja. Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.
   - Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL pada Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, dan penyesuaian lainnya yang memengaruhi SAL. Seluruh penyesuaian/koreksi yang memengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

   Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikonsolidasikan dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan

Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca
   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas dari Hibah, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas
   Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment,* serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Secara lengkap, dasar hukum penyusunan LKPP Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1.E.**

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada SAP yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi pemerintah pada LKPP Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat beserta perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah. Sedangkan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO) adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP sebagai berikut.

1. Pendapatan

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a. Pendapatan-LO
   Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, Pendapatan LO dibagi

menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan, Pendapatan PNBP serta Pendapatan Hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018. Paragraf 82 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Sesuai PSAP 06 – Akuntansi Investasi, Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional.

Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN.

Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan dari Hibah Langsung pada K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/ akuntansi.

Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan, Pendapatan PNBP serta Pendapatan Hibah. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai.

Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti underlifting Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui PMK Nomor 44/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Usaha Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2018.

Paragraf 26 PSAP Nomor 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Di samping itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara. Di dalam peraturan tersebut, tata cara penyusunan Laporan Keuangan satuan kerja PNBP penerima laba BUMN mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah dan untuk satuan kerja PNBP khusus BUN pengelola PNBP setoran lainnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

2. Beban, Belanja, dan Transfer

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana insentif daerah, dan dana keistimewaan DI Yogyakarta, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, pemberian pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar
   Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

   Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing sebelumnya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, dicatat menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan.

   Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

   - Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
   - Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
   - Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
   - Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

   Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

   - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
   - Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari

pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan.

- Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
- Kas dan setara kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh LKBUN. Kas di KL dari Hibah pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L. Kas pada BLU pada LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

1) Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
4) Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, Piutang Transfer Diestimasi dan Piutang Pemberian Pinjaman, serta piutang yang timbul dari putusan pengadilan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul karena terdapat kelebihan salur atau kelebihan bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kelebihan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah.

Untuk Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dapat dilakukan penatausahaan dan pencatatan melalui prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diakui pada saat:

1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2) telah diterbitkan surat ketetapan; dan
3) telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang Piutang yang timbul dari putusan pengadilan dicatat sebesar nilai putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde*) dan/atau sebesar nilai yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. LKPP menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos

tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK.

Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah dan piutang transfer ke daerah diestimasi. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dan kendali untuk menagih oleh Pemerintah Pusat sangat besar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan *First In First Out* (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar.

b. Investasi
Secara umum, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/ berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
c) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
d) Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan, serta Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) dinilai menggunakan metode biaya. Untuk Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan dan investasi non permanen berbentuk dana bergulir dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/ berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga

internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L.

Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan.

PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan Neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk:
   a) peralatan dan mesin; atau
   b) aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
   a) gedung dan bangunan; atau
   b) aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diperlukan untuk Aset Tetap berupa

Tanah; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Tetap Lainnya seperti koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan tidak disajikan dalam neraca.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan (Depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2018, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Dampak perubahan nilai aset berdasarkan Penilaian Kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2018, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Nilai aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali beserta perbaikannya disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 mengingat hasil penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah diterima dan disetujui oleh Badan Pemeriksa Keuangan secara keseluruhan.

Perlakuan akuntansi atas Putusan Pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah berupa Aset Tetap, adalah sebagai berikut.

1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah dan telah dilakukan prosedur penghapusan, maka nilai Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht*:
   a) tidak disajikan pada Neraca dan diungkapkan dalam CaLK secara agregat (yaitu total nilai Aset Tetap tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum) jika SK penghapusan sudah terbit;
   b) dikeluarkan dari Neraca namun tetap disajikan dalam daftar BMN dan diungkapkan dalam CaLK jika SK penghapusan belum terbit.
2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah namun belum dilakukan prosedur penghapusan, maka Aset Tetap tuntutan hukum yang sudah *inkracht* tersebut masih disajikan di Neraca dan juga diungkapkan dalam CaLK; dan
3) Dalam hal tuntutan hukum masih belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan luar biasa dari Pemerintah, maka Aset Tetap dalam sengketa tetap disajikan pada Neraca dan tidak perlu diungkapkan dalam CaLK.

d. Perjanjian Konsesi Jasa.
Perlakuan akuntansi atas aset dan kewajiban konsesi jasa diatur di dalam PMK No.231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Perjanjian

konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) disediakan oleh mitra, yang:
   a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
   b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
   a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
   b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh pemberi konsesi diukur berdasarkan nilai reklasifikasi BMN menggunakan nilai tercatat asetnya. Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan atau dipartisipasikan oleh mitra diukur dengan ketentuan sebagai berikut.

1) Nilai berdasarkan dokumen perjanjian kerja sama, berita acara atau dokumen yang dipersamakan atas laporan progres penyelesaian konstruksi dan/atau laporan penyelesaian konstruksi untuk siap operasi pemberian layanan, dan berkorelasi sebagai substansi transaksi pertukaran terhadap asersi manajemen pihak mitra yang dapat diyakini oleh pemberi konsesi atas pengakuan pendapatan konstruksi mitra untuk aset konsesi jasa dalam progres pekerjaan dan diakumulasinya hingga aset konsesi jasa siap beroperasi.
2) Asersi manajemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja sama, dokumen progres penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan atau dokumen penyelesaian konstruksi aset atau berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan, dipertimbangkan cukup bagi entitas pemerintah pemberi konsesi untuk mencatat awal perolehan aset konsesi jasa pada nilai wajarnya.

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemberi konsesi jasa maupun disediakan oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa. Klasifikasi baris tersendiri Aset Konsesi Jasa, termasuk dalam hal ini aset yang disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMN, disajikan secara aset komposit di Neraca dalam pos Aset Tetap.

Namun, Jika secara karakteristik aset komposit yang disediakan oleh mitra sesuai dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud maka aset konsesi jasa yang demikian disajikan sebagai klasifikasi aset konsesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak Berwujud. BMN yang dipartisipasikan oleh pemberi konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa dilakukan mekanisme penyusutan BMN sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan BMN.

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara komposit nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa dilakukan perhitungan penyusutan asetnya sejak berita acara serah terima operasi atau dokumen yang dipersamakan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi.

Namun, pada masa konstruksi dalam pengerjaan, aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dalam pengerjaan tidak dilakukan perhitungan penyusutan dan disajikan sebesar nilai wajar aset konsesi jasa dalam pengerjaan. Selain mencatat aset konsesi, pemberi konsesi juga menyajikan kewajiban, baik substansinya sebagai kewajiban keuangan (karakteristik skema kompensasi kewajiban keuangan - *financial liability model*) maupun sebagai pendapatan tangguhan (karakteristik skema kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra - *grant of a right to the operator model*), disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangka panjang.

Jika pengaturan mengikat dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi

konsesi memberikan kompensasi atas penyediaan aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik berupa kombinasi sebagian dalam bentuk skema kewajiban keuangan dan sebagian dalam bentuk skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka pemberi konsesi memperlakukan dan menyajikan secara terpisah.

Amortisasi kewajiban pada skema kompensasi kewajiban keuangan dilakukan berdasarkan pembayaran realisasi anggaran belanja barang yang dilakukan oleh pemberi konsesi kepada mitra selama masa konsesi sebesar porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra, sedangkan amortisasi kewajiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi dilakukan dengan metode garis lurus selama masa konsesi pada masa substansi ekonomi terjadi, yaitu dimulai pada saat aset konsesi jasa dinyatakan komersial menghasilkan pendapatan dan dipungut oleh mitra.

e. Properti Investasi
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:
1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam PMK No.231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, terhadap BMN properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya.

Untuk perolehan awal BMN properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di tahun 2022 dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut.

1) Perolehan yang timbul dari transaksi pengadaan baru, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya.

2) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.

3) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan.

4) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMN sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan. Properti investasi disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMN properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Penilaian Kembali atau revaluasi atas properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

f. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/ kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Pemberian Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar). TP, TGR, TPA, dan Pemberian Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

g. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.

Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah)

kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kerja sama dalam penyediaan infrastruktur. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.

b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.

c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.

d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.

e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA), Aset Eks Pertamina, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), Aset BMN *Idle*, dan Aset PKP2B. Aset Eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman

dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Transfer Diestimasi, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah), Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, Kewajiban Masa Lalu Program THT/*Unfunded Past Service Liability* (UPSL) dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang Transfer Diestimasi merupakan kewajiban yang timbul karena terdapat kekurangan salur atau bayar dan belum diketahui secara definitif Pemda penerima yang kekurangan salur/bayar dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan transfer ke daerah.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang SBN Jangka Pendek (SPN dan SPN Syariah) adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun di satu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam Neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, DMO *fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK Migas.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih

dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi Negara/Surat Utang Negara (SUN) Jangka Panjang, Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Jangka Panjang, Utang Pembelian Cicilan, Utang Jangka Panjang Lainnya, dan Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum.

Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2022 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

- *Fixed Rate* (FR) *Bonds* adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Obligasi Negara Ritel (ORI) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Saving Bond Ritel* (SBR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SBR memiliki tingkat kupon yang mengambang dengan kupon minimal (*floating with floor*) dan dibayarkan secara periodik. Kupon SBR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SBR tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- Sukuk Tabungan (ST) adalah produk investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah, yang ditujukan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Tabungan merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu. Sukuk Tabungan dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah (Rp 1 juta). Sukuk Tabungan juga memberikan imbalan mengambang dengan imbalan/kupon minimal setiap bulan (*floating with floor*), dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat (2 tahun). Meskipun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun ada fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- *Variable Rate* (VR) *Bonds* adalah obligasi berbunga mengambang yang tingkat kuponnya ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Referensi tingkat bunga yang digunakan untuk seri VR ditetapkan dalam ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) penerbitan masing-masing seri. Saat ini terdapat beberapa referensi yang digunakan antara lain Suku Bunga Acuan Bank Indonesia *7-Day Reverse Repo Rate* dan tingkat Suku Bunga Reverse Repo Bank Indonesia tenor 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- *Zero Coupon* (ZC) *Bonds* adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP

kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.

- SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 0,1 persen per tahun (dari sebelumnya 1 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 0,1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2043 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- *International Bonds* adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/ diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di Neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Berkaitan dengan kewajiban jangka panjang terkait program pensiun dapat dijelaskan bahwa Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban jangka panjang terkait program pensiun, kecuali kewajiban jangka pendek, yaitu apabila terdapat hak penerima pensiun yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pada saat ini, belum terdapat PSAP yang mengatur akuntansi Imbalan Pascakerja. Dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengenai kewajiban pensiun ini telah memedomani PSAP Nomor 10 (Revisi 2020) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan.

Untuk kebutuhan transparansi dan menyajikan informasi secara lengkap bagi pengguna laporan keuangan, Pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai estimasi kewajiban jangka panjang pemerintah terkait program pensiun didasarkan pada perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuaria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang memengaruhi nilai *outstanding* pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca. UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

a. identitas pinjaman (*loan* ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
b. perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
c. kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

Kewajiban Akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut.

Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde),* telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
2) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
3) Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

6. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrual, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Lain-lain

a. Kurs Mata Uang Asing
Berdasarkan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan Kurs Tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
  - transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
  - transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan. Selisih

penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal Neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

b. Pencatatan Selisih Kurs atas Kas BUN di BI dalam Mata Uang Asing (Valas)
Pencatatan selisih kurs diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN, selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:
1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.
1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan memengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

c. Pencatatan Selisih Kurs atas Utang dalam Valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi *(unrealized loss)*. Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi *(unrealized gain)*.

d. Pencatatan Selisih Kurs atas Investasi dalam Valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

e. Dampak Penguatan JISDOR terhadap Penyajian Aset dan Kewajiban Moneter Pemerintah dalam Valas

Sehubungan dengan penguatan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) oleh Bank Indonesia mulai 5 April 2021 Bank Indonesia menerbitkan kurs yang digunakan bagi pemerintah (Kurs Tengah Khusus Pemerintah) pada pukul 08.00 WIB hari H+0, yang selanjutnya digunakan sebagai referensi kurs transaksi pada hari berkenaan. Lalu pada sore harinya pukul 16.15 WIB, Bank Indonesia kembali merilis kurs yaitu Kurs Penutup yang menjadi referensi Kurs Penutup pada hari tersebut. Berdasarkan konsepsi proses bisnis pada Bank Indonesia, Kurs Penutup yang diterbitkan pada pukul 16.15 WIB merupakan Kurs Tengah Khusus yang dipublikasikan keesokan harinya (H+1) pukul 08.00 WIB.

Dengan mengacu pada konsep ini, maka pada tanggal-tanggal pelaporan keuangan pemerintah, akan terdapat dua kurs yang relevan dalam satu hari yang bersamaan yaitu Kurs Tengah Khusus Pemerintah (digunakan untuk keperluan transaksi) dan Kurs Penutup (digunakan dalam rangka pelaporan keuangan).

Mengacu pada proses bisnis BI tersebut, Pemerintah membuat kebijakan bahwa akun moneter dalam valuta asing disajikan dalam laporan keuangan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan.

Dalam hal pelaporan Tahun 2024, pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam bentuk valuta asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup tanggal 31 Desember 2024.

Pos-pos aset moneter dalam valuta asing dan kewajiban dalam valuta asing pada laporan keuangan yang berpotensi terdampak dengan kebijakan akuntansi dimaksud diantaranya:

1) Kas Pemerintah;
2) Piutang (Jangka Pendek dan Jangka Panjang);
3) Investasi (Jangka Pendek dan Jangka Panjang);
4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
5) Kewajiban Jangka Pendek;
6) Kewajiban Jangka Panjang; dan
7) Aset dan Kewajiban Moneter Lainnya

f. Eliminasi Akun Timbal Balik dan Reklasifikasi dalam Konsolidasi Laporan Keuangan

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara andal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain:

1) Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
2) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari K/L/BABUN dilakukan eliminasi.
3) Saldo rekening *escrow* alutsista Kementerian Pertahanan yang dicatat pada LK Kementerian Pertahanan dan LKBUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh Kuasa BUN, sedangkan atas data yang berasal dari LK Kementerian Pertahanan dilakukan eliminasi.

Eliminasi juga dilakukan atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hanya dilakukan atas transaksi resiprokal yang telah dapat diidentifikasi secara memadai.

Dalam proses konsolidasi juga dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan pada SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

Jurnal eliminasi juga dilakukan atas transaksi *intercept* DAU/DBH yaitu berupa transaksi yang berasal dari dukungan operasional dan pemberian honor atau insentif kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh satuan kerja TNI dan Polri di daerah yang awalnya menggunakan dana APBN untuk kemudian diganti oleh Pemda dengan mekanisme Potongan DAU/DBH. Atas transaksi tersebut, K/L mencatat beban-LO atas biaya honor atau insentif kegiatan vaksinasi menggunakan dana APBN dan di sisi lain BUN mencatat pendapatan–LO atas potongan SPM/SP2D atas DAU/DBH yang

disalurkan sebagai penggantian atas biaya insentif atau honor kegiatan vaksinasi.

Pencatatan tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan LO pada LKKL dan kelebihan pendapatan LO pada LKBUN. Oleh karena itu dilakukan jurnal eliminasi ditingkat LKPP atas kelebihan beban LO yang disajikan di LKKL dan Pendapatan LO yang disajikan oleh LKBUN tersebut. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN TAYL yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun ekuitas pada neraca;
- Uang Muka dari KPPN dari tahun anggaran berjalan yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi akun DDEL/DKEL;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak lain-lain -LO;
- Hibah yang Belum Disahkan sampai akhir periode pelaporan pada LKKL menjadi Pendapatan Hibah-LO; dan
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

Kebijakan akuntansi dalam konsolidasi LKPP diatur Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

g. Dampak Pencatatan Akuntansi Atas Penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
   1) Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran saat prestasi pekerjaan belum diterima. Dengan mekanisme ini pencairan dana ditampung ke dalam RPATA terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel. RPATA menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.
   2) Kebijakan akuntansi pemerintah mengatur bahwa besarnya prestasi pekerjaan, baik barang maupun jasa per 31 Desember yang belum dibayarkan harus diakui berdasarkan BAST/BAPP. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menyajikan aset/beban maupun kewajiban sesuai peristiwa ekonomi yang terjadi pada periode yang berakhir pada 31 Desember.
   3) Dampak transaksi RPATA terhadap pencatatan akuntansi pada K/L dan BUN adalah sebagai berikut.
      a. BA BUN 999.00
         i. Pencatatan Kas (Kas di RKUN, Kas di RPKBUNP, dan Dana yang dibatasi Penggunaannya/ Dana Lainnya) sehubungan dengan Pemindahan Kas dalam rangka transaksi pada RPATA.
         ii. Pencatatan transaksi non anggaran dalam rangka pemindahbukuan Dana dalam rangka transaksi pada RPATA.

      b. Kementerian/Lembaga
         i. Pencatatan Dana yang dibatasi Penggunaannya atas pengeluaran belanja yang belum diterima pekerjaannya sampai dengan akhir tahun anggaran.
         ii. Pencatatan Belanja/Beban/Aset sehubungan dengan belanja menggunakan mekanisme RPATA, sesuai dengan realisasi anggaran/beban/penyelesaian aset.
         iii. Pencatatan Pendapatan/ Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu.
         iv. Pencatatan Utang sehubungan dengan telah terdapat progres penyelesaian pekerjaan, namun belum disalurkannya dana ke Rekening Penyedia sampai dengan akhir tahun anggaran.
   4) Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan mekanisme RPATA.
      Terdapat penyajian Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga yang dibukukan baik pada LKKL dan LKBUN. Oleh karena itu, pada periode pelaporan, dilakukan jurnal konsolidasi untuk mengeliminasi Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga pada UAKBUN Pusat sehingga tidak terjadi lebih saji atau pencatatan ganda dalam LKPP.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mencapai Rp2.850.605.244.178.865 atau 101,72 persen dari target APBN TA 2024 sebesar Rp2.802.462.150.331.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan Rp66.675.567.248.667 atau 2,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama TA 2023.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 berasal dari Pendapatan Perpajakan Rp2.231.839.822.879.833, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp584.378.057.583.276, dan Pendapatan Hibah Rp34.387.363.715.756.

Perkembangan realisasi Pendapatan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2020 s.d. TA 2024 dapat dilihat pada **Grafik 28**.

Grafik 28
Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah Tahun 2020 – 2024

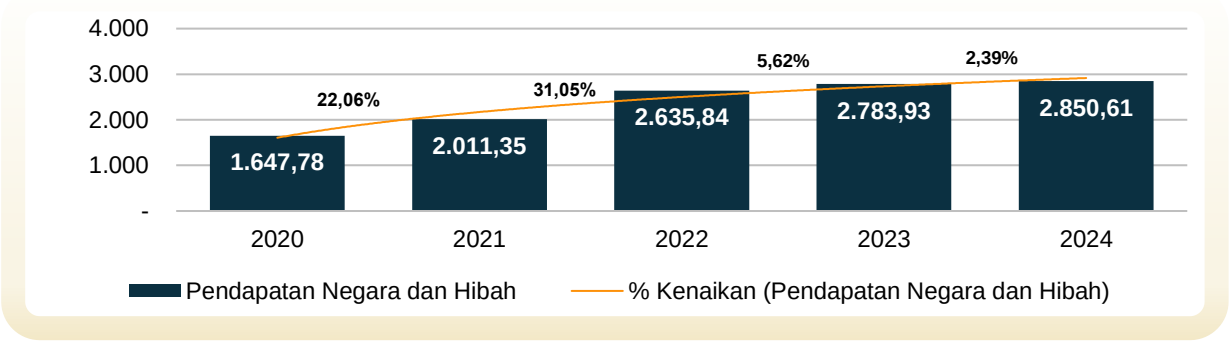

Realisasi Belanja Negara TA 2024 mencapai Rp3.359.766.708.068.248 atau 100,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.343.494.321.894.000. Realisasi tersebut mengalami kenaikan Rp238.549.462.360.630 atau 7,64 persen dibandingkan dengan TA 2023.

Realisasi Belanja Negara TA 2024 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.496.223.901.585.884 dan Transfer ke Daerah Rp863.542.806.482.364.

Perkembangan realisasi Belanja Negara TA 2020 s.d. TA 2024 terlihat pada **Grafik 29.**

Grafik 29
Perkembangan Realisasi Belanja Negara Tahun 2020 – 2024

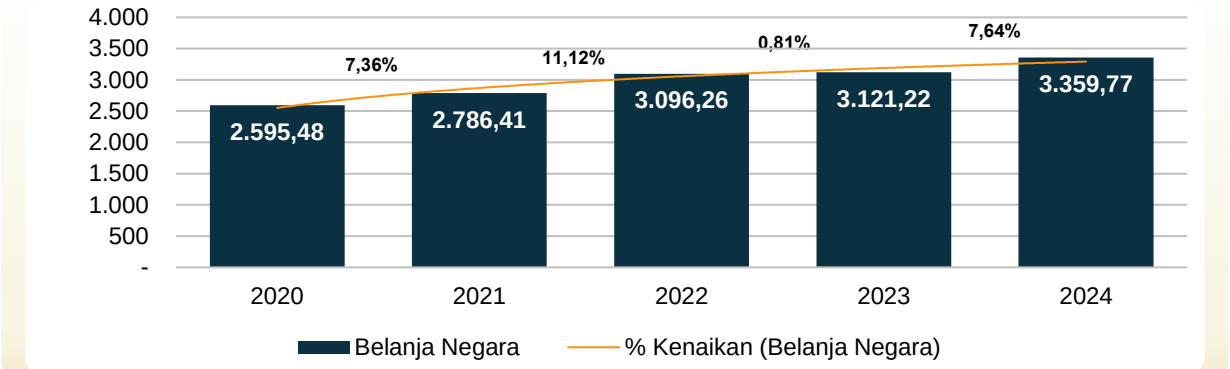

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara di atas, pada TA 2024 terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp509.161.463.889.383. Dalam rangka menutup defisit dimaksud, pada TA 2024 direalisasikan Pembiayaan (Neto) Rp554.888.579.353.028 yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) Rp462.577.425.084.416 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) Rp92.311.154.268.612. Selisih antara Defisit Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Neto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp45.727.115.463.645.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mencapai Rp2.850.605.244.178.865 atau 101,72 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.802.462.150.331.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Pendapatan Perpajakan, PNBP, dan Hibah. Pada realisasi ini terdapat selisih pencatatan BUN dan K/L sebesar Rp84.994. Selisih tersebut disebabkan oleh perbedaan sumber data yang digunakan, di mana LKPP menggunakan data dari SPAN, sedangkan LKKL menggunakan data dari SAKTI.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2024 dapat dilihat pada **Grafik 30.**

Grafik 30
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024

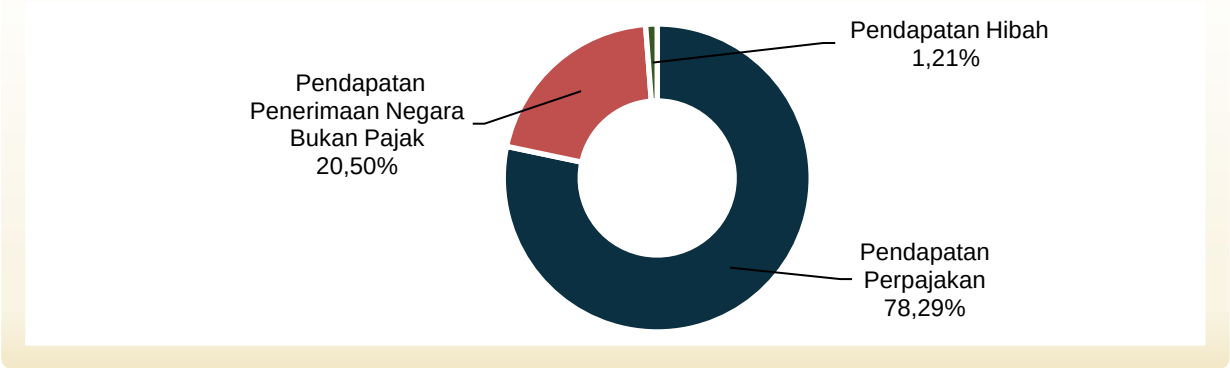

B.2.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan ini terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional dengan realisasi pada TA 2024 mencapai Rp2.231.839.822.879.833 atau 100,61 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.218.401.100.000.000. Pendapatan Perpajakan TA 2024 meningkat Rp77.631.603.412.003, atau 3,60 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi Pendapatan Perpajakan termasuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp9.116.394.780.661. Terdapat selisih nilai Penerimaan Perpajakan antara BUN dan K/L sebesar Rp6. Selisih tersebut disebabkan adanya pembulatan pada Pendapatan PPN Lainnya sebesar Rp4 dan Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp2.

Secara nominal, penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Cukai.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2024 mencapai Rp2.157.982.145.917.601 atau 100,54 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.146.466.840.000.000. Realisasi ini naik Rp68.263.860.914.184 atau 3,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri ini sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
PPh Migas	65.106.354.672.659	68.773.171.326.840
PPh Nonmigas	988.522.529.374.505	983.269.379.873.447
PPh Ditanggung Pemerintah	8.311.642.153.441	9.191.469.439.309
PPN	808.092.107.520.213	737.645.586.887.883
PPnBM	19.539.442.710.393	23.893.357.420.376
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	804.752.627.220	2.093.723.904.267
PBB	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958
Cukai	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725
Pajak Lainnya	6.970.560.114.585	6.894.911.665.855
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1.772.244.400.763	2.834.136.447.318
Pendapatan Denda Penagihan Pajak	-	741.947.439
Jumlah	**2.157.982.145.917.601**	**2.089.718.285.003.417**

Kenaikan pendapatan pajak dalam negeri pada TA 2024 dipengaruhi oleh perekonomian domestik yang terjaga, dan pertumbuhan PPh Orang Pribadi yang selaras dengan aktivitas ekonomi dan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak.

Kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh kenaikan dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Cukai.

- **PPh Nonmigas**
  PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya masih ditopang oleh tiga komponen terbesar, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final.

  Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan masih merupakan komponen terbesar pada PPh Nonmigas meskipun mengalami penurunan yang utamanya dipengaruhi oleh penurunan profitabilitas usaha pada tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh moderasi harga komoditas global seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara. Penurunan terbesar terjadi pada setoran Tahunan sebesar 42,94 persen. Sementara setoran Masa hanya naik tipis sebesar 0,71 persen (yoy). Secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada sektor berbasis komoditas yaitu Pertambangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian

  Pendapatan PPh Pasal 21 meningkat ditopang oleh faktor utilisasi dan upah tenaga kerja. Kinerja positif PPh Pasal 21 yang konsisten ditopang oleh kenaikan gaji dan upah serta tambahan lapangan kerja baru. Kondisi ini tercermin pada setoran Masa yang naik sebesar 21,69 persen (yoy). Setoran PPh Pasal 21 atas PNS/TNI/Pejabat Negara juga menunjukkan kenaikan sebesar 5,21 persen.

  Peningkatan PPh Pasal 21 terutama terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan dan Industri Pengolahan.

  Kinerja positif PPh Final utamanya ditopang oleh setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang naik 29,18 persen (yoy) sejalan dengan kenaikan tingkat suku bunga. Pertumbuhan positif juga ditunjukkan oleh setoran utama lainnya seperti Persewaan Tanah/Bangunan, Jasa Konstruksi, Pengalihan Tanah/Bangunan dan Diskonto/Bunga Obligasi. Secara sektoral, peningkatan PPh Final terbesar terjadi pada sektor Aktivitas Keuangan diikuti sektor Perdagangan dan *Real Estate*.

- **PPN**
  Realisasi PPN tumbuh baik PPN Dalam Negeri (PPN DN) maupun PPN Impor. Kinerja positif PPN DN sejalan dengan aktivitas ekonomi dan tingkat konsumsi dalam negeri yang masih terjaga. Peningkatan PPN Impor disebabkan oleh pertumbuhan nilai Impor Indonesia. Secara sektoral, peningkatan PPN DN terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan.

- **Cukai**
  Peningkatan Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA). Selain itu, peningkatan Penerimaan Cukai dipengaruhi oleh kenaikan produksi Ethil Alkohol (EA).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional TA 2024 mencapai Rp73.857.676.962.232 atau 102,67 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp71.934.260.000.000. Realisasi tersebut naik Rp9.367.742.497.819 atau 14,53 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Bea Masuk	52.965.349.842.955	50.891.762.896.870
Bea Keluar	20.892.327.119.277	13.598.171.567.543
Jumlah	**73.857.676.962.232**	**64.489.934.464.413**

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar. Kinerja Bea Masuk dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar Dollar Amerika terhadap rupiah dan kenaikan nilai impor. Sedangkan, kinerja Bea Keluar yang meningkat signifikan masih didorong oleh faktor kebijakan relaksasi ekspor mineral tembaga mentah atas ekspor PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Bea Keluar produk sawit yang meningkat akibat peningkatan rata-rata harga CPO. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan PNBP TA 2024 mencapai Rp584.378.057.583.276 atau 106,42 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp549.137.450.331.000. Realisasi ini turun Rp28.159.240.999.367 atau 4,60 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Terdapat selisih nilai pencatatan pada BUN dan K/L yang disebabkan karena dobel catat setoran Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp85.000.

Realisasi Pendapatan PNBP berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, Pendapatan BLU dan Pendapatan PNBP Lainnya. Kinerja PNBP yang terkontraksi jika dibandingkan dengan tahun lalu terutama disebabkan oleh tekanan pada PNBP yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) dan PNBP lainnya, sedangkan PNBP KND dan PNBP BLU meningkat.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan SDA TA 2024 mencapai Rp228.928.767.532.781 atau 97,20 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp235.522.497.376.000. Realisasi tersebut turun Rp25.274.263.540.833 atau 9,94 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Penurunan PNBP SDA ini antara lain disebabkan oleh penurunan *lifting* minyak dan kontraksi ICP pada tahun 2024. Rincian realisasi Penerimaan SDA sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	77.961.123.337.930	87.408.885.465.416
Pendapatan Gas Bumi	32.661.085.038.989	28.769.670.492.312
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	107.777.558.834.527	129.126.791.868.349
Pendapatan Kehutanan	6.739.119.543.721	5.429.603.320.398
Pendapatan Kelautan dan Perikanan	951.819.466.723	636.893.353.269
Pendapatan Panas Bumi	2.838.061.310.891	2.831.186.573.870
Jumlah	**228.928.767.532.781**	**254.203.031.073.614**

Pendapatan Minyak Bumi

Penurunan realisasi PNBP SDA Minyak Bumi antara lain disebabkan oleh turunnya realisasi ICP dan nilai *lifting* akibat *onstream* yang tertunda. Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNBP Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO sebagai berikut:

1. Terdapat Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp32.661.085.038.989.
2. Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan minyak mentah DMO (kode akun 423132) sebesar Rp4.775.446.292.310.

Pendapatan Gas Bumi

Peningkatan realisasi PNBP SDA Gas Bumi antara lain disebabkan karena adanya reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBP SDA Migas yang menyebabkan perubahan pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi sebesar Rp32.661.085.038.989.

Pendapatan SDA Nonmigas

Penurunan SDA Nonmigas terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan royalti batubara yang menurun sebagai dampak HBA yang termoderasi.

Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Penurunan Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain disebabkan oleh penurunan HBA dari sebelumnya rata-rata sebesar USD201/Ton menjadi rata-rata sebesar USD121/Ton dan penurunan rata-rata harga mineral acuan nikel dari sebelumnya sebesar USD22.823,75/DMT menjadi USD16.917,96/DMT.

Pendapatan Kehutanan

Pendapatan Kehutanan meningkat antara lain disebabkan oleh pendapatan Dana Reboisasi (DR) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang bersumber dari pendapatan perkebunan Kelapa Sawit yang telah terbangun dalam Kawasan hutan (Keterlanjuran Sawit) sebagai amanat pasal 110A UUCK serta peningkatan pembayaran piutang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH).

Pendapatan Kelautan dan Perikanan

Kenaikan Realisasi Pendapatan sektor Kelautan dan Perikanan khususnya dari Perikanan disebabkan karena pada tahun 2023 merupakan masa transisi mekanisme perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari Praproduksi menjadi Pascaproduksi. Kapal penangkap ikan baru mulai beralih dari sistem praproduksi ke pascaproduksi yang menyebabkan adanya jeda penerimaan karena sebelumnya pungutan dilakukan di awal perizinan beralih ke pungutan yang dilakukan saat pendaratan produksi ikan. Sementara itu, pada tahun 2024 seluruh kapal perikanan telah memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) pascaproduksi.

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi

Pendapatan panas bumi terdiri atas Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi, Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi, dan Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi. Kenaikan Pendapatan Panas Bumi utamanya disebabkan oleh berkurangnya kewajiban pemerintah yang berasal dari pencadangan pembayaran kembali PPN dan pencadangan penggantian bonus produksi Panas Bumi meskipun realisasi Setoran Bagian Pemerintah (SBP) mengalami penurunan sebesar 3,15 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Realisasi Pendapatan dari KND TA 2024 mencapai Rp86.384.593.538.563 atau 100,63 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp85.845.465.000.000. Realisasi ini meningkat Rp4.325.850.164.693 atau 5,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri dari:

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	85.572.985.213.463	81.217.243.776.870
Pendapatan Bagian Laba BUMN/ Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	811.608.325.100	841.499.597.000
Jumlah	**86.384.593.538.563**	**82.058.743.373.870**

Peningkatan realisasi ini utamanya disebabkan oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun 2023. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023. BUMN yang meningkat kinerjanya pada tahun 2024 utamanya pada sektor perbankan, sedangkan sektor nonperbankan mengalami penurunan. Penerimaan bagian pemerintah dari pembagian dividen secara tunai pada periode TA 2024 termasuk pembayaran piutang dividen tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Setoran Dividen masih didominasi oleh 10 besar BUMN penghasil dividen TA 2024. Rincian Setoran Dividen BUMN sebagai berikut.

	Uraian	Jumlah
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.714.901.623.444
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.178.737.880.394
3	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	11.214.162.000.000
4	PT Pertamina (Persero)	9.360.000.000.000
5	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9.211.235.606.774
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.277.029.672.897
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.090.004.000.000
8	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.213.402.000.000
9	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.038.470.000.000
10	PT Sarana Multi Infrastruktur	520.000.000.000
11	BUMN Lainnya	1.564.400.905.054,
12	Kesalahan Setoran PT. Virama Karya	2.249.850.000
	Jumlah	**86.384.593.538.563**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.B.**

B.2.1.2.3. Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan BLU TA 2024 mencapai Rp104.716.732.371.421 atau 130,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN yaitu sebesar Rp80.430.963.536.000. Realisasi ini meningkat Rp8.856.340.212.458 atau 9,24 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Realisasi Pendapatan BLU sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
a. Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	45.924.466.590.728	40.495.126.768.097
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.842.030.884.558	2.055.585.827.571
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	38.612.669.102.611	42.727.190.508.087
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	1.049.836.620.939	1.216.601.481.027
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	**88.429.003.198.836**	**86.494.504.584.782**
b. Pendapatan Hibah BLU	**775.438.966.691**	**419.285.384.531**
c. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	**1.685.792.466.002**	**1.220.147.435.517**
d. Pendapatan dari Alokasi APBN	**596.713.515.837**	**820.701.691.766**
e. Pendapatan BLU Lainnya	**13.229.784.224.055**	**6.905.753.062.367**
Jumlah	**104.716.732.371.421**	**95.860.392.158.963**

Kenaikan Pendapatan BLU TA 2024 didominasi dari pendapatan NonKelapa Sawit terutama dari peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, peningkatan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan utamanya disebabkan oleh peningkatan peserta yang mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) & Pendidikan Profesi Guru (PPG), peningkatan Pendapatan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan penambahan satuan kerja yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.2.4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2024 mencapai Rp164.347.964.140.511 atau 111,54 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp147.338.524.419.000. Realisasi PNBP Lainnya TA 2024 turun Rp16.067.167.835.685 atau 8,91 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian Realisasi PNBP Lainnya ini sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	45.393.455.336.177	51.733.615.730.078
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	27.743.265.311.822	28.028.272.839.161
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	6.693.335.550.852	6.748.502.699.372
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.074.841.592.851	3.720.222.791.370
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	31.855.957.320.485	30.028.772.290.804
Pendapatan Jasa Lainnya	2.753.114.727.970	1.308.205.045.864
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	30.278.124.149.439	40.503.003.442.795
Pendapatan Denda	4.525.845.781.493	2.261.698.342.186
Pendapatan Lain-Lain	12.030.024.369.422	16.082.838.794.566
Jumlah PNBP Lainnya	**164.347.964.140.511**	**180.415.131.976.196**

Penurunan realisasi PNBP Lainnya terutama disebabkan oleh penurunan Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara akibat penurunan HBA. Kontraksi juga berasal dari penurunan pendapatan PNBP K/L layanan antara lain pada Kejaksaan terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan, dan pada Kementerian Komunikasi dan Informasi yang terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Selain itu penurunan juga terjadi pada PNBP K/L nonlayanan antara lain Pendapatan Premium atas Obligasi Negara dan Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia.

Di sisi lain, PNBP beberapa K/L tumbuh signifikan seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perhubungan. Kinerja PNBP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tumbuh sebagai dampak dari kenaikan pendapatan pelayanan administrasi dan hukum (visa, paspor, izin keimigrasian, dll) yang disebabkan oleh peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia yang didukung penggunaan aplikasi layanan visa elektronik melalui MOLINA (Imigrasi) serta inovasi layanan seperti Eazy Passport, layanan paspor simpatik, dan kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Sementara itu, kinerja PNBP pada Kementerian Perhubungan terutama disebabkan oleh peningkatan pada Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi, Pendapatan Jasa

Kepelabuhan, dan Pendapatan dari Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge* (TAC).
Selain itu, Realisasi PNBP pada Tahun 2024 turun disebabkan oleh telah berakhirnya transaksi Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* Gen-1 sebagai salah satu program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2023.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.1.3. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 mencapai Rp34.387.363.715.756 atau 98,46 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp34.923.600.000.000. Pendapatan Hibah TA 2024 naik Rp17.203.204.836.031 atau 100,11 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Realisasi Pendapatan Hibah sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang	32.247.196.309.907	15.361.429.146.772
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	540.471.344.113	423.174.970.047
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang	1.599.696.061.736	1.399.554.762.906
Jumlah	**34.387.363.715.756**	**17.184.158.879.725**

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 yang melampaui target ini utamanya dipengaruhi meningkatnya penerimaan pendapatan hibah dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tahun 2024 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp19.082.362.771.120 dan Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp6.041.008.032.779. Sementara itu, atas non-pilkada serentak berjumlah Rp19.086.950.235.211.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 2.A.**

B.2.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Realisasi Belanja Negara TA 2024 mencapai Rp3.359.766.708.068.248 atau 100,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.343.494.321.894.000. Realisasi ini naik Rp238.549.462.360.630 atau 7,64 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Rincian atas pelaksanaan UU APBN 2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Namun pada perkembangannya dalam rangka melaksanakan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Perubahan Rincian Postur *Outlook* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan atas rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pelaksanaan atas APBN 2024 terdapat perubahan/revisi Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berupa perubahan pagu anggaran pada DIPA K/L dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Adapun perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L dan BA BUN sepanjang Tahun Anggaran 2024 antara lain dikarenakan beberapa hal sebagai berikut.

a. Revisi anggaran dilakukan antar jenis belanja di Kanwil DJPb;
b. Pergeseran antar jenis belanja untuk optimalisasi anggaran;
c. Penambahan alokasi anggaran akibat adanya PPPK dan CPNS baru di 2024 yang berasal dari optimalisasi anggaran dan relaksasi blokir *Automatic Adjustment* (AA);
d. Revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari relaksasi AA dan penambahan dari SP SABA untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai;
e. Revisi Penambahan Hibah Luar Negeri IBRD dan PNBP;
f. Tambahan dana BLU dan hibah langsung dari pemerintah daerah;
g. Revisi pergeseran anggaran dari BA 999.08 untuk kegiatan percepatan pembangunan IKN, DOB Papua, Inpres Jalan Daerah, Inpres Air Minum dan Air Limbah;
h. Penambahan alokasi dari pemanfaatan SAL;
i. Pengembalian dari sisa proyek PLN yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat terhadap alokasi dalam Perpres APBN Tahun 2024

dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam triliun Rupiah)

No	Nama Belanja	Perbandingan alokasi DIPA terhadap Perpres APBN			Penjelasan per Jenis Belanja			
		Perpres APBN	DIPA	Selisih	Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN	Pengurangan alokasi pagu melalui Realokasi	Pengurangan melalui Tidak diterbitkan DIPA	Total
1	Belanja Pegawai	484,43	468,93	(15,50)	9,42	(16,13)	(8,79)	(15,50)
2	Belanja Barang	406,98	553,12	146,13	152,84	(6,68)	(0,02)	146,13
3	Belanja Modal	247,47	382,90	135,42	135,34	0,08	-	135,42
4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	497,32	497,32	-	-	-	-	-
5	Belanja Subsidi	285,97	297,89	11,92	25,18	(13,26)	(0,00)	11,92
6	Belanja Hibah	0,01	0,37	0,36	0,36	-	-	0,36
7	Belanja Bantuan Sosial	157,30	156,88	(0,42)	5,39	(0,31)	(5,50)	(0,42)
8	Belanja Lain-lain	406,41	217,57	(188,84)	50,01	(0,50)	(238,35)	(188,84)
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat		**2.485,90**	**2.574,98**	**89,07**	**378,55**	**(36,81)**	**(252,67)**	**89,07**

Selisih lebih rendah belanja pegawai sebesar Rp15,50 triliun antara lain bersumber dari:

1. Penambahan pagu sebesar Rp9,42 triliun, yang bersumber dari revisi antar jenis belanja di Kanwil DJPB dalam rangka pemenuhan belanja pegawai, penambahan pagu yang berasal dari tambahan anggaran BABUN dalam rangka pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai, penambahan dari SP SABA dan Revisi antar jenis belanja di Kanwil DJPB, penambahan anggaran belanja tambahan dari BA BUN dalam rangka penyesuaian kenaikan ADTLN berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2024, penambahan alokasi anggaran akibat adanya PPPK dan CPNS baru di 2024 yang berasal dari optimalisasi anggaran dan relaksasi blokir *automatic adjustment*, penambahan ABT dari SP-SABA BA BUN, penambahan alokasi anggaran belanja pegawai karena adanya kenaikan gaji sebesar 8% dan kenaikan tukin, revisi pergeseran anggaran yang bersumber dari relaksasi AA dan penambahan dari SP SABA untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai;
2. Pengurangan sebesar Rp16,13 triliun yang bersumber dari Revisi antar jenis belanja di Kanwil DJPB, revisi pergeseran antar jenis belanja dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang dalam rangka pemenuhan BBO, terdapat realokasi anggaran a.l untuk keperluan seleksi CASN, penambahan anggaran langganan listrik, pemeliharaan gedung dan kantor, tenaga alih daya, serta kebutuhan restrukturisasi kementerian, relaksasi blokir *automatic adjustment* belanja pegawai untuk melaksanakan kegiatan belanja modal, antara lain pengembangan TIK dan rehabilitasi rumah dinas/jabatan, relokasi anggaran aneka tunjangan guru ke belanja barang untuk PPG Prajabatan dan Beasiswa Pendidikan Indonesia, adanya revisi efisiensi/pemanfaatan belanja pegawai untuk memenuhi kekurangan kebutuhan belanja barang operasional dan pemeliharaan kantor dan belanja modal sarana internal kantor; dan
3. Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp8,79 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja barang sebesar Rp146,13 triliun antara lain berasal dari:

1. Penambahan Alokasi Pagu atas Perpres Rincian APBN sebesar Rp152,84 triliun yang bersumber dari Revisi Penambahan HLN IBRD dan PNBP, tambahan anggaran BABUN dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggaran untuk rekrutmen CASN Tahun 2024, tambahan dana BLU dan hibah langsung dari pemerintah daerah, penambahan dari pergeseran antar jenis belanja, Penambahan dari sumber dana PLN, PNBP, HLN, HLLD, dan HLLN, penambahan pagu dalam rangka pemenuhan BBO disebabkan oleh revisi pergeseran antar jenis belanja dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang dan Belanja Modal ke Belanja Barang, penambahan pagu belanja barang bersumber dari BABUN dan satker BLU, penambahan ABT dari SP-SABA BA BUN untuk tambahan vaksin dan operasional NCC 119 *emergency call line*, penambahan ABT dari SP-SABA BA BUN untuk implementasi HPV DNA dan Pengadaan *Probe Linier* untuk pemeriksaan Kanker Payudara, revisi pergeseran anggaran dari BA 999.08 untuk kegiatan percepatan pembangunan IKN, DOB Papua, Inpres Jalan Daerah, Inpres Air Minum dan Air Limbah, penambahan dari sumber dana HLD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, revisi penambahan alokasi Cadangan Pangan Pemerintah melalui SP SABA;

2. Pengurangan sebesar Rp6,68 triliun yang bersumber dari revisi antar jenis belanja di Kanwil DJPB, revisi pergeseran antar jenis belanja dalam rangka optimalisasi anggaran internal untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, revisi pergeseran anggaran belanja barang yang bersumber dari relaksasi AA untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, pergeseran anggaran belanja barang ke belanja pegawai untuk memenuhi kenaikan tunjangan kinerja; dan
3. Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp0,02 triliun.

Selisih lebih tinggi belanja modal sebesar Rp135,42 triliun antara lain berasal dari:

1. Penambahan alokasi pagu atas Perpres Rincian APBN sebesar Rp135,34 triliun yang bersumber dari revisi antar jenis belanja, penambahan Pagu PLN untuk pemenuhan percepatan penarikan dan selisih kurs, hibah langsung dari pemerintah daerah serta tambahan dari sumber dana BLU, penambahan dari SP SABA untuk kegiatan SIPD Kemendagri, penambahan dari sumber dana PLN dan PNBP dalam rangka peningkatan kegiatan prioritas, penambahan pagu belanja modal dari BA 999.08 dalam rangka penanganan konflik papua, HUT TNI, rekrutmen Bintara TNI AD, percepatan penarikan kegiatan modernisasi alutsista, untuk operasional dan pelayanan satker PNBP a.l Rumkit TNI & pushidrosal, untuk percepatan penarikan kegiatan modernisasi alutsista, untuk operasional dan pelayanan satker BLU Rumkit TNI, untuk kegiatan pengamanan pilkada serentak, penambahan pagu sumber dana PNBP Ditjen Imigrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana TIK pendukung layanan dan pengawasan keimigrasian, rehab gedung kantor dan pengadaan mobil patroli, dan untuk pengadaan TIK pendukung layanan KI, penambahan pagu belanja modal untuk kebutuhan pengembangan TIK dan perbaikan ekosistem kerja (rehabilitasi rumah dinas/jabatan), penambahan ABT dari SP-SABA BA BUN untuk tambahan pembangunan RS IKN, pemenuhan alkes pada RS UPT Vertikal Surabaya, Makassar dan RS PON Prof Dr. dr.Mahar Mardjono Jakarta, renovasi Renovasi Penyempurnaan Gedung Pusat Layanan Ibu Anak IPT KIA RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Revisi luncuran dan percepatan yang bersumber dari PLN untuk kegiatan IsDB dan SIHREN, Revisi luncuran dan percepatan yang bersumber dari PLN untuk kegiatan SOPHI, Revisi penambahan anggaran belanja bersumber PNBP dalam hal pemanfaatan penerimaan klaim asuransi barang milik negara pada satker RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, Revisi penggunaan saldo kas BLU oleh satker RS UPT BLU di Kanwil DJPB, Revisi pengesahan belanja modal LMAN (semester I-2024), Revisi percepatan PHLN yang diproses di DJA maupun lanjutan pelaksanaan PHLN yang diproses di Ditjen Perbendaharaan; dan
2. Pengurangan sebesar Rp0,08 triliun yang bersumber dari pengembalian dari sisa proyek PLN yang sudah selesai dilaksanakan, revisi pergeseran antar jenis belanja dari Belanja Modal ke Belanja Barang dalam rangka pemenuhan BBO, pergeseran antar jenis belanja (pengurangan belanja barang & modal untuk dialihkan ke belanja pegawai) dalam rangka optimalisasi anggaran internal untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai, pengembalian pagu kepada BA BUN atas anggaran pengembangan komersialisasi pesawat N219A.

Selisih lebih tinggi belanja subsidi sebesar Rp11,92 triliun bersumber dari penambahan dari SPP BA BUN sebesar Rp25,18 triliun, realokasi sebesar Rp13,26 triliun (Subsidi Energi, Subsidi Bunga KUR, dan SB/SM KUA) ke akun 58 (999.08), dan pengurangan melalui tidak diterbitkannya DIPA sebesar Rp0,004 triliun (Subsidi Bunga Air Bersih dan Subsidi Pupuk).

Selisih lebih tinggi belanja hibah sebesar Rp0,36 triliun bersumber dari penambahan pagu dan penambahan rincian output sebagai akibat dari penetapan DRPH TA 2024 sebesar Rp364.640.916.000 serta dari SPP BA BUN sebesar Rp224.304.000.

Selisih lebih rendah belanja bantuan sosial sebesar Rp0,42 triliun antara lain berasal dari:

1) Penambahan pagu sebesar Rp5,39 triliun yang bersumber dari tambahan BA BUN untuk KIP Mahasiswa baru rekruitmen 2024, revisi pergeseran antar jenis belanja, Tambahan ABT dari SP SABA BA BUN, tambahan anggaran Hibah Langsung Dalam Negeri, adanya revisi penambahan anggaran karena adanya ABT sebanyak 4 Tahap di TA 2024;
2) Pengurangan sebesar Rp0,31 triliun yang berasal dari relokasi bansos untuk pembiayaan beasiswa dan program magang Dikti;
3) Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp5,50 triliun.

Selisih lebih rendah belanja lain-lain sebesar Rp188,84 triliun antara lain berasal dari:

1) Penambahan pagu sebesar Rp50,01 triliun, yang bersumber dari koreksi DIPA Revisi, penambahan alokasi dari pemanfaatan SAL, dari akun 51, dari DIPA Bawaslu, dari DIPA KPU, penerbitan DIPA tahun berjalan yang bersumber dari PNBP pada UO 999.99;
2) Pengurangan alokasi pagu sebesar Rp0,50 triliun yang bersumber dari realokasi ke akun 57; dan
3) Tidak diterbitkan DIPA sebesar Rp238,35 triliun.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp2.496.223.901.585.884 atau 100,42 persen dari APBN sebesar Rp2.485.902.580.516.000. Realisasi ini lebih besar Rp256.437.200.086.720 atau 11,45 persen dari Realisasi TA 2023.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, dan Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2024 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar terdapat pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp1.172.219.672.257.679 atau 46,96 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2024 pada K/L mencapai Rp1.324.004.229.328.205. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar pada Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp190.461.949.646.270 atau 14,39 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.A.**

Komposisi 5 (lima) terbesar realisasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L (dalam persentase) pada TA 2024 dapat dilihat pada **Grafik 31.**

Grafik 31
Komposisi K/L Lima Terbesar Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2024

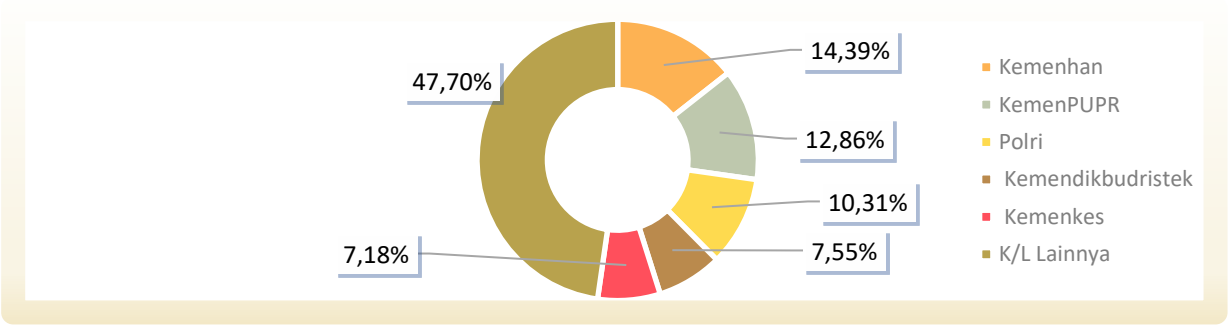

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi TA 2024 terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	Realisasi TA 2024
01	Pelayanan Umum	814.799.754.680.000	895.534.546.108.370
02	Pertahanan	139.101.857.282.000	190.271.135.592.425
03	Ketertiban dan Keamanan	192.802.737.029.000	230.127.968.930.295
04	Ekonomi	671.784.765.251.000	546.197.711.138.747
05	Perlindungan Lingkungan Hidup	14.128.144.359.000	14.536.108.543.033
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	41.797.983.514.000	48.104.109.736.565
07	Kesehatan	97.429.338.442.000	99.345.803.582.789
08	Pariwisata	3.396.315.256.000	3.899.935.384.281
09	Agama	11.762.810.790.000	12.738.479.319.300
10	Pendidikan	228.747.839.466.000	197.180.501.083.870
11	Perlindungan Sosial	270.151.034.447.000	258.287.602.166.209
	Total	**2.485.902.580.516.000**	**2.496.223.901.585.884**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang; (v) Belanja Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Belanja Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.B.**

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada **Grafik 32.**

Grafik 32
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja TA 2024

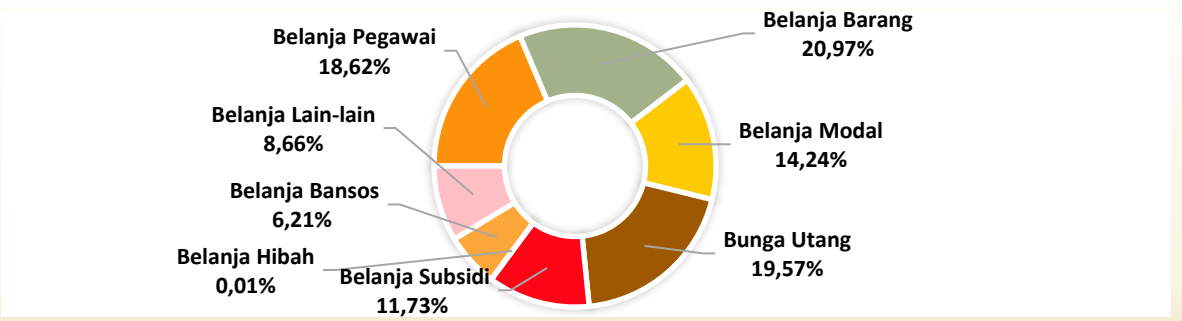

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mencapai Rp464.859.258.914.201 atau 95,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp484.430.934.181.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp52.147.934.447.637 atau 12,64 persen dari realisasi TA 2023. Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	94.474.584.839.711	86.439.214.441.661
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	70.478.736.226.243	65.784.325.265.335
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.627.058.251.782	1.445.968.520.506
Belanja Gaji Dokter PTT	-	971.858.800
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	20.450.131.425.466	18.571.148.205.747
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.660.298.575.577	1.872.998.267.850
Belanja Honorarium	1.464.038.800.138	1.517.199.173.983
Belanja Lembur	996.994.057.394	906.265.365.184
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	95.600.814.345.937	84.744.625.483.910
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	160.520.141.397.297	140.283.278.472.696
Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai	12.586.460.994.656	11.145.329.410.892
Jumlah	**464.859.258.914.201**	**412.711.324.466.564**

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai dipengaruhi antara lain oleh penyesuaian gaji pokok ASN/TNI/Polri sebesar 8 persen, rekrutmen pegawai ASN, dan penyesuaian tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi pada beberapa K/L. Realisasi Belanja Pegawai digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mencapai Rp523.368.042.639.998 atau 128,60 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp406.983.772.758.000. Realisasi tersebut lebih tinggi Rp90.653.072.774.871 atau 20,95 persen dari Realisasi TA 2023. Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	46.906.123.883.792	46.317.631.288.089
Belanja Barang Non Operasional	105.947.395.845.654	81.399.094.446.556

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	4.127.887.565	-
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	3.979.794.998.643	1.484.386.186.755
Belanja Barang Persediaan	25.958.190.240.660	20.774.735.211.855
Belanja Jasa	55.343.965.553.939	50.333.964.148.889
Belanja Pemeliharaan	48.661.532.294.819	48.113.526.685.260
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.910.115.534.031	44.470.108.196.630
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.981.751.403.096	3.835.783.568.105
Belanja Barang BLU	91.952.233.291.295	70.780.247.933.038
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	31.005.863.086.632	41.503.731.531.651
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	181.349.536.874	393.194.253.599
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	59.488.270.459.438	23.291.799.254.537
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	47.328.623.560	16.767.160.163
Jumlah	**523.368.042.639.998**	**432.714.969.865.127**

Kenaikan realisasi Belanja Barang utamanya dipengaruhi oleh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 dan pembayaran bantuan pangan (bantuan beras, daging ayam, dan telur). Selain itu, Belanja Barang juga dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pengelolaan BMN Matra Darat/Laut/Udara/Integratif, pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan nonalutsista, dan pelayanan kesehatan oleh Kementerian Pertahanan; (2) pembayaran selisih harga biodiesel dan pendanaan penyaluran beasiswa oleh Kementerian Keuangan; (3) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (4) pembayaran honorarium pengawas Badan Ad hoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum; (5) Penyaluran BOS oleh Kementerian Agama; serta (6) Pembayaran bantuan pangan (beras, daging ayam, dan telur) oleh Bapanas.

Kenaikan belanja barang BLU utamanya disebabkan karena belanja penyaluran insentif biodiesel pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 tingkat campuran mandatori biodiesel dinaikkan menjadi 35% (B35) dari semula 30% (B30).

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mencapai Rp355.511.133.723.811 atau 143,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp247.474.230.827.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp52.469.840.655.060 atau 17,31 persen dari Realisasi TA 2023. Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	18.364.728.983.726	21.762.067.765.333
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.399.691.211.787	138.693.504.896.413
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.410.294.553.570	38.664.408.477.682
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.974.443.874.034	91.301.385.315.249
Belanja Modal Lainnya	8.624.510.944.381	5.445.554.835.621
Belanja Modal BLU	8.737.464.156.313	7.174.371.778.453
Jumlah	**355.511.133.723.811**	**303.041.293.068.751**

Realisasi Belanja Modal antara lain dimanfaatkan untuk: (1) preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendidikan dasar/menengah/tinggi, pengembangan jaringan irigasi, pengembangan bendungan, pengendalian banjir/drainase/ pengaman pantai, penyelenggaraan sanitasi, rusun ASN dan Hankam IKN, bangunan Gedung IKN, serta penyelenggaraan air minum (SPAM) oleh KemenPUPR; (2) infrastruktur perkeretaapian, transportasi udara, dan transportasi laut oleh Kemenhub; (3) sarana dan prasarana pendidikan tinggi oleh Kemendikbudristek; (4) sarana dan prasarana madrasah, serta pendidikan tinggi oleh Kemenag; (5) modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasarana pertahanan oleh Kementerian

Pertahanan; (6) modernisasi almatsus, dan sarana prasarana Polri; serta (7) pengadaan peralatan BIN.

Kenaikan Belanja Modal BLU utamanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur telekomunikasi oleh BLU BAKTI pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tinggi bagi PTN BLU pada Kemendikbudristek, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan pada BLU rumah sakit pada Kemenkes, dan pembangunan infrastruktur kawasan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2024 mencapai Rp488.426.422.143.817 atau 98,21 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp497.319.602.591.000. Realisasi ini lebih besar Rp48.543.837.802.558 atau 11,04 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	344.233.666.145.424	320.230.634.610.168
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	89.241.671.087.884	82.042.499.639.521
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	42.487.792.193.659	30.575.331.536.948
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	5.710.276.912.350	3.448.731.870.328
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	160.319.500.000	536.653.910.900
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara	6.592.696.304.500	3.048.732.773.394
Jumlah	**488.426.422.143.817**	**439.882.584.341.259**

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan dipengaruhi oleh meningkatnya *outstanding* SBN, dan kenaikan utang program dan proyek di Tahun 2024.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 mencapai Rp292.692.594.096.846 atau 102,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp285.971.979.124.000. Realisasi ini lebih besar Rp23.100.508.043.099 atau 8,57 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian realisasi Belanja Subsidi sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Subsidi Minyak Solar	17.115.109.641.445	16.573.537.577.398
Belanja Subsidi Minyak Tanah	4.469.228.489.490	4.716.272.138.615
Belanja Subsidi Elpiji	80.213.612.965.648	74.300.193.555.508
Belanja Subsidi Listrik	75.817.285.111.936	68.702.258.911.876
Belanja Subsidi Pupuk	47.387.402.436.351	42.057.450.059.622
Belanja Subsidi PPh-DTP	8.311.642.153.441	8.587.136.656.062
Belanja Subsidi PPN-DTP	666.506.458.627	-
Belanja Subsidi PPnBM-DTP	138.246.168.593	-
Belanja Subsidi PT KAI	4.595.718.339.234	2.524.521.565.006
Belanja Subsidi PT PELNI	3.203.970.376.875	2.395.825.002.151
Belanja Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	176.322.920.000	172.000.950.000
Belanja Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	852.348.000.000	895.000.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	4.609.436.081.696	3.457.315.411.888
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	41.778.823.390.550	40.929.864.479.459
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	16.135.205.138	39.496.119.024
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	-	41.204.433
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	3.044.846.912	2.142.819.505
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19	2.857.430.716.719	-
Belanja Subsidi PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	-	604.334.469.803
Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	114.365.781.222	160.320.970.852

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19	365.965.012.969	1.380.650.258.278
Belanja Subsidi PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.028.573.395.855
Belanja Subsidi PPnBM Ditanggung Pemerintah	-	65.150.508.412
Jumlah	**292.692.594.096.846**	**269.592.086.053.747**

Kenaikan realisasi Belanja Subsidi antara lain dipengaruhi oleh peningkatan realisasi Subsidi Pupuk, Subsidi *Public Service Obligation* (PSO), Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah, dan Subsidi Energi yang meliputi Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Solar, JBT Minyak Tanah, Subsidi Elpiji, dan Subsidi Listrik.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 mencapai Rp278.430.938.953 atau 4.231,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp6.579.656.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp59.290.220.176 atau 27,06 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063
Belanja Hibah Lainnya	261.734.387	101.163.777
Jumlah	**278.430.938.953**	**219.140.718.777**

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri dan organisasi internasional bersumber dari PNBP hasil pengelolaan dana kelolaan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah tersebut antara lain untuk pembangunan "Kampung Indonesia" di daerah terdampak gempa Turki, bantuan dan perlindungan untuk orang-orang terdampak konflik, serta dukungan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria. Sementara itu, Belanja Hibah sebesar Rp261.734.387 merupakan belanja pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*).

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 mencapai Rp154.949.830.442.829 atau 98,50 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp157.302.981.407.000. Realisasi ini lebih kecil Rp1.651.803.389.385 atau 1,05 persen dari realisasi TA 2023.

Penurunan realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) antara lain dipengaruhi oleh adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang tidak dilanjutkan lagi di tahun 2024 serta berkurangnya jumlah penerima Bansos Rumah Sejahtera Terpadu yang semula 5.050 KPM menjadi 1.500 KPM. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	1.928.370.449.382	1.281.281.715.566
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	72.999.290.688.788	67.709.313.222.239
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	193.850.657.286	206.932.779.339
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	75.108.852.688.813	82.368.469.578.565
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	13.438.000.000	20.375.194.249
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	4.706.027.958.560	5.015.261.342.256
Jumlah	**154.949.830.442.829**	**156.601.633.832.214**

Realisasi Belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan PKH, penyaluran bantuan program kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar dan bantuan KIP Kuliah, serta pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2024 mencapai Rp216.138.188.685.429 atau 53,18 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp406.412.499.972.000. Realisasi tersebut lebih rendah Rp8.885.480.467.296 atau 3,95 persen dari Realisasi TA 2023. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM, kompensasi listrik dan penyelenggaraan Program Kartu Prakerja.

Rincian Belanja Lain-lain sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Cadangan Pangan Pemerintah	-	12.875.144.605.421
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	119.748.067.230	121.245.799.637
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	106.854.376.765	115.898.315.312
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	727.120.009.219	546.650.473.751
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	209.288.136.932.586	206.073.493.135.814
Belanja Lain-lain Penggunaan PNBP BUN	249.059.909.370	39.534.780.432
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan *Exotic Currency*	1.103	694
Belanja Lain-lain	5.647.269.389.156	5.251.702.041.664
Jumlah	**216.138.188.685.429**	**225.023.669.152.725**

Belanja Lain-lain untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2024 realisasinya Rp0 karena tahun 2024 dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2024 sebesar Rp863.542.806.482.364 atau 100,69 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp857.591.741.378.000. Realisasi ini lebih rendah Rp17.887.737.726.090 atau turun 2,03 persen dari Realisasi TA 2023 yang sebesar Rp881.430.544.208.454.Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.** Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2024 disajikan pada **Grafik 33.**

Grafik 33
Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024

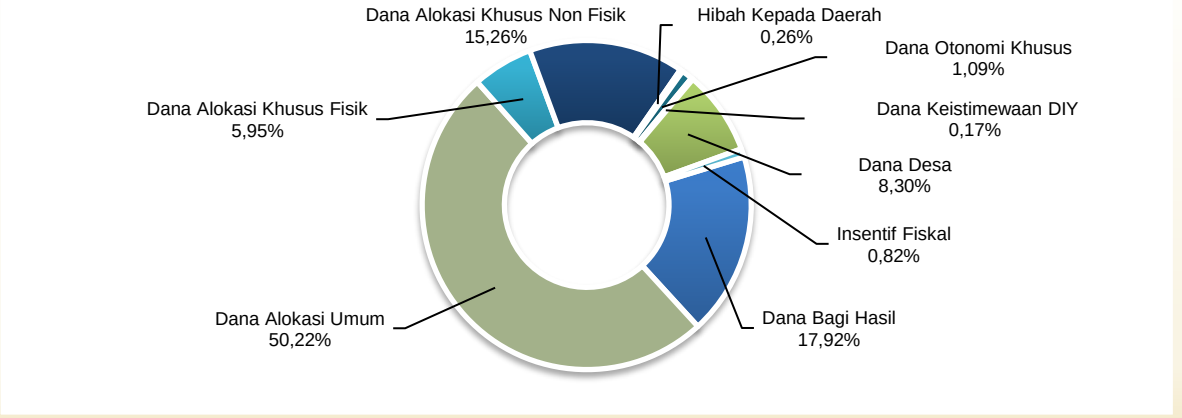

B.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 mencapai Rp153.174.562.784.262 atau 107,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp143.099.927.456.000. Realisasi ini lebih rendah Rp52.492.001.236.368 atau 25,52 persen dari realisasi TA 2023. Rincian realisasi Dana Bagi Hasil sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
DBH Pajak	**59.328.986.344.540**	**69.722.008.418.530**
Dana Bagi Hasil PPh	32.733.740.472.000	41.526.659.300.000
Dana Bagi Hasil PBB	21.507.689.731.000	22.319.338.323.000
Dana Bagi Hasil CHT	5.087.556.141.540	5.876.010.795.530
DBH Sumber Daya Alam	**91.020.649.057.222**	**132.739.779.094.100**
Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	8.944.481.225.000	16.491.258.147.000
Dana Bagi Hasil Gas Bumi	7.006.411.326.000	11.738.041.628.000
Dana Bagi Hasil Mineral dan Batu Bara	71.110.816.829.000	99.425.415.550.000
Dana Bagi Hasil Panas Bumi	1.586.280.291.000	2.005.232.650.000
Dana Bagi Hasil Kehutanan	1.420.960.624.222	1.984.193.334.100
Dana Bagi Hasil Perikanan	951.698.762.000	1.095.637.785.000
DBH Lainnya	**2.824.927.382.500**	**3.204.776.508.000**
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.824.927.382.500	3.204.776.508.000
Jumlah	**153.174.562.784.262**	**205.666.564.020.630**

Realisasi penyaluran DBH tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena realisasi penyaluran kurang bayar tahun 2024 hanya 13,21 T dan tidak ada tambahan DBH.

DBH ini baru dialokasikan dan disalurkan pada tahun 2023. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 mencapai Rp429.210.611.278.998 atau 100,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp427.699.303.543.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp31.180.982.684.456 atau 7,83 persen dari realisasi TA 2023.

Peningkatan realisasi DAU TA 2024 seiring dengan peningkatan pagu dan realisasi porsi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp54.597.717.515.000 atau 18,90 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi DAU yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi anggaran untuk Tambahan DAU pada akhir tahun 2024 yang dialokasikan dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya untuk pembayaran THR dan Gaji 13 Guru ASN Daerah yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tunjangan perbaikan penghasilan yang dibayarkan sebesar satu kali Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan pada pemerintah daerah.

Pada Tahun 2024, terdapat kebijakan pengalokasian DAU untuk Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASND, sesuai dengan PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 dan KMK 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut, ditetapkan alokasi tambahan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas pegawai aparatur sipil negara guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 mencapai Rp183.538.473.113.006 atau 97,57 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp188.101.019.444.000. Realisasi Dana Alokasi Khusus tersebut lebih besar Rp2.180.911.329.765 atau 1,20 persen dari Realisasi TA 2023.

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dan Hibah Kepada Daerah.
Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.3.1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 mencapai Rp50.890.077.113.845 atau 94,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp53.822.463.835.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp555.335.766.540 atau 1,10 persen dari realisasi TA 2023.

Realisasi DAK Fisik TA 2024 seluruhnya disalurkan untuk DAK Fisik Penugasan dengan rincian penyaluran per bidang sebagai berikut.

Bidang	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Air Minum	2.319.286.566.128	1.830.797.280.205
Industri Kecil dan Menengah	355.295.984.662	398.053.146.865
Infrastruktur Energi Terbarukan	87.452.503.920	87.215.780.515
Irigasi	1.559.041.608.960	1.507.510.515.757
Jalan	11.725.995.830.588	12.162.540.594.920
Kehutanan	29.402.396.409	29.220.059.595
Kelautan dan Perikanan	1.236.188.298.833	1.120.669.462.214
Kesehatan dan KB	12.496.924.270.572	12.376.619.051.710
Lingkungan Hidup	132.605.872.545	146.853.293.816
Pariwisata	402.845.647.941	349.057.002.092
Pendidikan	15.117.195.311.790	15.095.592.187.700
Perdagangan	69.499.769.000	149.622.533.098
Pertanian	2.310.501.901.284	2.174.853.051.003
Perumahan dan Permukiman	240.733.176.587	137.324.360.524
Sanitasi	1.658.452.595.251	1.550.016.807.373
Transportasi Perairan	348.006.240.634	401.797.186.095
Transportasi Perdesaan	707.527.853.146	722.014.296.662
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	93.121.285.595	94.984.737.161
Jumlah	**50.890.077.113.845**	**50.334.741.347.305**

Kenaikan realisasi DAK Fisik utamanya disebabkan oleh:

a. Perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam memenuhi *readiness criteria* kegiatan DAK Fisik, dan

b. Lebih banyak OPD yang memulai lelang/pra DPA (lelang dini) sehingga capaian kontrak menjadi lebih tinggi.

B.2.2.2.3.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2024 mencapai Rp130.441.233.738.467 atau 97,52 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp133.764.611.642.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp2.359.287.362.158 atau 1,84 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagai berikut.

Bidang	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	51.850.462.245.921	49.547.218.967.514
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.075.612.901.562	1.594.366.287.923
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.495.768.803.108	1.166.575.891.867
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.303.572.819.195	53.094.401.455.075
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	3.962.494.428.245	4.086.064.854.769
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.550.857.706.506	1.475.083.542.036
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	11.481.642.480.980	12.412.991.969.900
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.237.433.806.000	3.230.739.603.000
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	60.811.675.450	62.003.157.725
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	247.175.338.000	249.210.260.000
Dana Pelayanan Kepariwisataan	132.033.514.000	131.787.586.500
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129.806.000.000	128.562.300.000
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	248.324.714.500	247.386.450.000
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	297.142.612.500	292.704.050.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	198.119.692.500	192.875.000.000
TOTAL	**130.441.233.738.467**	**128.081.946.376.309**

B.2.2.2.3.3. Hibah Kepada Daerah

Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2024 mencapai Rp2.207.162.260.694 yang berarti 429,46 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp513.943.967.000. Realisasi ini lebih rendah Rp733.711.798.933 atau 24,95 persen dari realisasi TA 2023. Rincian Realisasi Hibah Kepada Daerah sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	810.103.833.952	1.977.982.930.618
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	101.257.208.226	143.405.713.248
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	1.295.801.218.516	819.485.415.761
Jumlah	**2.207.162.260.694**	**2.940.874.059.627**

Transfer Hibah ke Daerah disalurkan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mulai tahun 2023 dan hanya disalurkan melalui KPPN Jakarta I.

B.2.2.2.4. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2024 mencapai Rp18.271.490.935.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp18.271.490.935.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp1.030.227.365.000 atau 5,98 persen dari realisasi TA 2023.

Rincian realisasi Dana Otonomi Khusus sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.276.993.035.000	3.960.000.000.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	717.359.936.000	697.537.158.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	770.087.411.000	734.634.275.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	883.469.568.000	871.921.448.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	547.131.349.000	448.666.078.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	665.304.462.000	472.527.485.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	704.887.057.000	560.832.598.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	848.562.171.000	734.493.413.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	825.817.651.000	773.555.973.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.079.234.834.000	918.116.766.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.073.576.144.000	784.905.913.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	861.274.294.000	826.649.561.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.395.865.798.000	981.132.390.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	485.551.411.000	665.426.268.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	636.516.027.000	803.970.737.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	630.041.924.000	831.782.835.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	604.812.025.000	628.971.170.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	612.263.725.000	759.925.539.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	652.742.113.000	786.213.963.000
Jumlah	**18.271.490.935.000**	**17.241.263.570.000**

Kenaikan realisasi Dana Otonomi Khusus disebabkan oleh meningkatnya pagu alokasi Dana Otsus TA 2024 dibandingkan dengan pagu TA 2023, selain itu, alokasi Dana Otsus pada tahun 2024 telah disalurkan seluruhnya ke RKUD Pemda penerima sesuai pasal 49 ayat 7 dan pasal 76 ayat 8 PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang pengelolaan TKD dalam rangka Otsus. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2024 mencapai Rp1.420.000.000.000 atau 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.420.000.000.000. Realisasi ini lebih tinggi Rp47.274.190.776 atau naik 3,44 persen dari realisasi TA 2023. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.6. Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2024 mencapai Rp70.925.927.774.598 atau 99,90 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp71.000.000.000.000. Realisasi ini naik sebesar Rp1.069.159.157.281 atau 1,53 persen dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023. Kenaikan realisasi Dana Desa karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, dan beberapa desa di antaranya telah salur 100,00 persen sebagai dampak adanya redesain penyaluran yang menjadi lebih sederhana yang semula 3 tahap menjadi 2 tahap. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.2.2.7. Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal TA 2024 mencapai Rp7.001.740.596.500 atau 87,52 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp8.000.000.000.000. Realisasi ini lebih rendah Rp904.291.217.000 atau 11,44 persen dari realisasi TA 2023. Penurunan Insentif Fiskal kelompok kategori kesehatan masyarakat dan kinerja tahun sebelumnya karena terdapat Kepala Daerah yang tersangkut korupsi sehingga tidak disalurkan dan terdapat 63 daerah yang tidak memenuhi syarat salur, serta tidak dialokasikannya Insentif Fiskal kategori pengendalian inflasi periode II dan III. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 4.**

B.2.3. DEFISIT ANGGARAN

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Realisasi Belanja Negara TA 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, Defisit Anggaran tercatat sebesar Rp509.161.463.889.383, atau 94,11 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp541.032.171.563.000 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pendapatan Negara dan Hibah	2.850.605.244.178.865	2.783.929.676.930.198
Belanja Negara	(3.359.766.708.068.248)	(3.121.217.245.707.618)
Surplus (Defisit) Anggaran	**(509.161.463.889.383)**	**(337.287.568.777.420)**

Defisit anggaran TA 2024 tidak terlepas dari keputusan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan terukur, terarah, dan konsisten untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal tetap terjaga dan berkelanjutan.

B.2.4. PEMBIAYAAN

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2024 sebesar Rp 554.888.579.353.028 atau 102,56 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp541.032.171.563.000. Realisasi ini naik sebesar Rp198.224.831.638.507 atau 55,58 persen dibandingkan TA 2023.

Pembiayaan terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri dan Pembiayaan Luar Negeri.

Rincian realisasi Pembiayaan TA 2024 berdasarkan format dan struktur UU APBN 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Uraian	APBN	Realisasi
Pembiayaan Utang	**566.292.620.015.000**	**558.063.877.935.940**
1. Surat Berharga Negara (Neto)	554.655.048.027.000	450.733.252.420.187
2. Pinjaman (Neto)	11.637.571.988.000	107.330.625.515.753
1) Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	(636.230.414.000)	15.019.471.247.141
2) Pinjaman Luar Negeri (Neto)	12.273.802.402.000	92.311.154.268.612
Pembiayaan Investasi	**(176.216.040.000.000)**	**(59.332.592.681.665)**
PMN/Dana Investasi Pemerintah	(151.216.040.000.000)	(44.332.592.681.665)
1. Penerimaan Pembiayaan	-	22.888.424.941.857
1) Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	4.084.647.335.605

Uraian	APBN	Realisasi
2) Penerimaan Investasi dari UAKPA Set BPJT	-	3.268.707.260.033
3) Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU LMAN	-	14.994.205.687.037
4) Penerimaan pembiayaan dari UAKPA KBUMN	-	218.750.000.000
5) Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU BPDLH (*Mangrove*)	-	322.114.659.182
2. Pengeluaran Pembiayaan	(151.216.040.000.000)	(67.221.017.623.522)
1) Klaster Infrastruktur	(55.215.000.000.000)	(51.014.999.997.857)
2) Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(1.212.670.000.000)	(512.670.000.000)
3) Klaster Kerjasama Internasional	(1.907.140.000.000)	(2.023.117.731.764)
4) Klaster Lainnya	(92.881.230.000.000)	(13.670.229.893.901)
Dana Abadi di Bidang Pendidikan	(25.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)
Pemberian Pinjaman	**(250.652.452.000)**	**(218.899.374.441)**
Pemberian Pinjaman	(4.171.912.452.000)	(4.242.437.773.274)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.921.260.000.000	4.023.538.398.833
Kewajiban Penjaminan	**(823.986.000.000)**	**(1.458.986.000.000)**
Penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional	(823.986.000.000)	(823.986.000.000)
Dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan	-	(635.000.000.000)
Pembiayaan Lainnya	**152.030.230.000.000**	**57.835.179.473.194**
Saldo Anggaran Lebih	151.381.000.000.000	56.419.615.865.000
Hasil Pengelolaan Aset	649.230.000.000	1.415.563.608.194
Jumlah	**541.032.171.563.000**	**554.888.579.353.028**

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2024 sebesar Rp462.577.425.084.416 atau 87,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp528.758.369.161.000.

Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (1) Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan, (2) Pemberian Pinjaman, (3) Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, (4) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (5) Surat Berharga Negara , (6) Pinjaman Dalam Negeri, (7) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (8) Kewajiban Penjaminan, (9) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan (10) Pembiayaan lain-lain.

B.2.4.1.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan TA 2024 sebesar Rp56.419.615.865.000 atau 37,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp151.381.000.000.000. Realisasi ini naik Rp19.194.415.865.000 atau 51,56 persen dari realisasi TA 2023. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan terdiri atas Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang bersumber dari Rekening Lain BI SAL sebesar Rp56.381.000.000.000 dan Rekening Kas BLU LDKPI sebesar Rp38.615.865.000.

Penggunaan dana SAL merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan anggaran dalam APBN 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

B.2.4.1.2. Pemberian Pinjaman

Pemberian Pinjaman berperan sebagai pilihan pinjaman lunak untuk digunakan dalam *capital expenditure* pada BUMN dan Pemda khususnya proyek penugasan pemerintah. Realisasi Pemberian Pinjaman TA 2024 sebesar Rp4.242.437.773.274 atau 101,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp4.171.912.452.000. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.336.438.660.617 atau 122,58 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Rincian Pemberian Pinjaman (Neto) sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	2.801.304.537.758	286.277.630.136
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	1.441.133.235.516	1.619.721.482.521
Pemberian Pinjaman	**4.242.437.773.274**	**1.905.999.112.657**

Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan TA 2024 mengalami kenaikan signifikan karena adanya realisasi pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk Pembiayaan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project* (*Phase* 2) yang memasuki tahap konstruksi.

B.2.4.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan nilai pembayaran kembali kewajiban pokok atas pemberian pinjaman. Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman TA 2024 sebesar Rp 4.023.538.398.833 atau 102,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3.921.260.000.000. Realisasi ini turun Rp2.350.860.097.136 atau 36,88 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemda	1.120.000.000	1.120.000.000
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMD	1.149.090.909	198.181.821
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada BUMN	258.288.664.984	2.030.566.500.738
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	8.433.687.835	9.373.438.846
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	67.746.694.812	77.691.349.491
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	3.662.304.059.667	4.233.335.861.730
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman LN Non Pemerintah	24.496.200.626	22.113.163.343
Jumlah	**4.023.538.398.833**	**6.374.398.495.969**

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.948.576.567.426,00 atau 73,28 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan.

B.2.4.1.4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2024 berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI sebesar Rp1.400.109.062.740 atau 215,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp649.230.000.000. Realisasi ini naik Rp302.371.456.574 atau 27,54 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Penerimaan ini berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero), selanjutnya yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi *Treasury Billing System* (TBS), Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), SPAN, serta modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA).

Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	1.221.059.570.444	1.030.646.856.018
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	179.049.492.296	67.090.750.148
Jumlah	**1.400.109.062.740**	**1.097.737.606.166**

a. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN
   Realisasi Penerimaan Penjualan/ Penyelesaian Aset Eks BPPN tahun 2024 sebesar Rp1.221.059.570.444 mengalami kenaikan sebesar Rp190.412.714.426 atau 18,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Penerimaan ini terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset

eks BPPN aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

b. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL TA 2024 sebesar Rp179.049.492.296 mengalami kenaikan sebesar Rp111.958.742.148 atau 166,88 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

B.2.4.1.5. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2024 sebesar Rp 450.733.252.420.187 atau 81,26 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp554.655.048.027.000. Realisasi ini naik Rp142.539.464.014.225 atau 46,25 persen jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Kenaikan realisasi SBN neto tersebut dikarenakan penerbitan SBN TA Tahun 2024 yang lebih tinggi dibandingkan TA Tahun 2023. Realisasi SBN (Neto), terdiri dari penerimaan penjualan SBN dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN.

Rincian realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
1. **Penerimaan Surat Berharga Negara**		
a. Penerbitan / Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	33.504.000.000.000	34.542.000.000.000
b. Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	590.125.540.000.000	445.320.497.000.000
c. Utang Bunga Obligasi Negara	8.634.640.335.000	5.605.322.706.060
d. Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka panjang	222.421.958.000.110	221.619.255.704.658
e. Imbalan Dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Jangka panjang	2.328.793.438.300	2.469.080.982.310
f. Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	54.213.300.000.000	13.830.000.000.000
g. Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui Surat Berharga Syariah Negara - PBS	32.894.999.999.890	34.348.433.295.342
h. Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valuta Asing	92.879.895.000.000	58.971.351.694.000
i. Utang Bunga Obligasi Negara-Valuta Asing	-	4.114.360.058
j. Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	38.434.250.000.000	31.398.000.000.000
Total Penerimaan	**1.075.437.376.773.300**	**848.108.055.742.428**
2. Pengeluaran Surat Berharga Negara		
a. Pelunasan SPN	34.896.000.000.000	54.005.000.000.000
b. Pelunasan Obligasi Negara	277.851.067.798.505	159.532.411.170.979
c. Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	11.148.500.000.000	32.780.366.000.000
d. Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	7.471.744.860.158	5.993.063.722.946
e. Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	171.081.697.000.000	174.659.931.000.000
f. Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN-Jangka Panjang	2.272.251.668.300	2.582.477.419.452
g. Pelunasan SPN-Syariah	21.815.000.000.000	11.983.000.000.000
h. Pelunasan Obligasi Negara - Valas	63.305.247.366.000	79.319.816.212.000
i. Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	365.660.150	8.201.811.089
j. Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang	34.862.250.000.000	19.050.000.000.000
Total Pengeluaran	**624.704.124.353.113**	**539.914.267.336.466**
Jumlah Surat Berharga Negara (Neto) (1-2)	**450.733.252.420.187**	**308.193.788.405.962**

B.2.4.1.6. Pinjaman Dalam Negeri

Realisasi Pinjaman Dalam Negeri Neto TA 2024 sebesar Rp15.019.471.247.141 atau 2.360,70 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar minus Rp636.230.414.000. Realisasi ini naik Rp461.102.841.616 atau 3,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2024 sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
I. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	18.649.607.994.305	16.672.197.186.598
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	1.473.045.365.447	831.932.341.081
II. Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154
Jumlah (I-II)	**15.019.471.247.141**	**14.558.368.405.525**

Kenaikan realisasi penerimaan Pinjaman Dalam Negeri disebabkan oleh terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.
Pada Tahun 2024, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT. BNI dan PT. BTN serta Perusahaan Daerah yaitu Bank DKI. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

B.2.4.1.7. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2024 sebesar Rp44.332.592.681.665 atau 29,32 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp151.216.040.000.000. Realisasi ini turun Rp25.565.202.758.989 atau 36,58 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023 dikarenakan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan investasi yang dialokasikan kepada BUMN, BLU, dan Badan Lainnya pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah TA 2024 sebesar Rp44.332.592.681.665 terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp22.888.424.941.857 bersumber antara lain dari Penerimaan ini berasal dari UAP DJPK, UAKPA Set BPJT, UAKPA BLU LMAN, UAKPA Kementerian BUMN, dan UAKPA BLU BPDLH. Rincian penerimaan ini antara lain berasal dari pengembalian pokok pinjaman melalui pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2024, dan Pengembalian Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI, angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT, pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional, penyetoran ke Kas Negara atas Pokok Pinjaman IP PEN PT Kereta Api periode April 2024, pengesahan belanja BRGM atas pengelolaan dana rehabilitasi *mangrove.*

b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp67.221.017.623.522, yang berdasarkan arah kebijakan pembiayaan investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (1) mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan BUMN, BLU, *sovereign wealth fund* (SWF), dan *special mission vehicle* (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan yang efisien dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional; (2) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembangunan IKN dan proyek-proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; (3) mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR; (4) mengembangkan infrastruktur pariwisata dan aviasi serta; (5) mendukung pembebasan lahan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek strategis dan prioritas; serta mendukung kebijakan strategis lainnya.
Terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan berupa PMN kepada lima BUMN/Badan Hukum Lainnya (BHL) pada akhir tahun anggaran, yaitu pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian: PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000; PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp965.000.000.000; PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000; PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar

Rp1.891.000.000.000; dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp5.000.000.000.000. Pencairan PMN tersebut dilakukan melalui rekening penampungan Rekening Pengeluaran Lainnya Bank Umum – SKN/RTGS (RPgL *in transit*), karena proses penerbitan SP2D tidak dapat diselesaikan hingga berakhirnya *window time* BI pada tanggal 31 Desember 2024. Realisasi PMN pada akhir tahun anggaran untuk kelima BUMN tersebut, baru diterima di rekening masing-masing BUMN/BHL pada tanggal 2 Januari 2025.

PMN kepada PT LEN Industri sebesar Rp649.230.000.000 sesuai PP No. 54 Tahun 2024 berupa PMN non-tunai yang berasal dari konversi piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang ditujukan untuk untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional.

PMN tersebut telah dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, namun proses realisasinya dilaksanakan pada tahun 2025. Realisasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 179 PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, yang memberikan ruang atas revisi anggaran yang melewati batas waktu dalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak, sepanjang mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada bulan Februari 2025, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi anggaran yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran. Kemudian, pada bulan Maret 2025 revisi tersebut disahkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pencairan PMN, yang kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta II pada tanggal 29 April 2025.

Realisasi PMN kepada PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp649.230.000.000 belum dicatat sebagai penambah ekuitas pada ILKPN Tahun 2024 *Audited*. Hal ini disebabkan karena hingga penyampaian LKBUN Tahun 2024 *Audited*, PT LEN Industri (Persero) masih dalam proses audit laporan keuangan oleh KAP dan belum mencatat penambahan PMN tersebut dalam laporan keuangannya. Terdapat perbedaan nilai piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjadi objek PMN kepada PT LEN Industri Persero), di mana berdasarkan PP tercatat sebesar Rp649.230.000.000,00, sedangkan pada LK UAPBUN TK Pengelola Aset BA 999.99 TA 2024 *Audited* tercatat sebesar Rp672.094.959.385,47. Perbedaan tersebut disebabkan karena aset piutang tersebut dicatat dalam bentuk mata uang USD, sementara pada LK UAPBUN TK Pengelola Aset BA 999.99 TA 2024 *Audited*, konversi ke mata uang rupiah masih menggunakan kurs penutup JISDOR per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp15.439,00. Dengan demikian, nilai mutasi piutang adalah sebesar Rp672.094.959.385,57 (USD43.532.285,72 x Rp15.439).

Pada Semester II Tahun 2024, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan tambahan anggaran PMN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 berdasarkan KMK Nomor 380 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran. Namun, alokasi tambahan anggaran PMN tersebut tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja BUMN konstruksi, serta jaminan terhadap efisiensi dan kinerja dari BUMN Karya, sehingga proses penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah Penambahan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000 tidak dilanjutkan.

Rincian realisasi pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
I. Penerimaan Pembiayaan	**22.888.424.941.857**	**26.800.909.690.612**
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	218.750.000.000	3.437.500.000.000
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	-	1.847.519.139.000
Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	3.268.707.260.033	359.653.415.387

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman PEN Daerah	4.084.647.335.605	2.944.155.651.898
Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	322.114.659.182	4.997.550.000
Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang	14.994.205.687.037	18.207.083.934.327
II. Pengeluaran Pembiayaan	**67.221.017.623.522**	**96.698.705.131.266**
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	-	2.225.200.000.000
PMN untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	35.165.229.891.758	39.862.353.463.337
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	1.984.501.866.764	1.559.632.528.929
Penyertaan Modal Negara Lainnya	5.000.000.000.000	-
Investasi Pemerintah	-	4.300.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	-	1.047.519.139.000
Pengeluaran Pembiayaan Dana Kerjasama Pembangunan Internasional	38.615.865.000	2.000.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi BUN	17.020.000.000.000	19.480.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	7.500.000.000.000	25.424.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	512.670.000.000	800.000.000.000
Jumlah (I-II)	**(44.332.592.681.665)**	**(69.897.795.440.654)**

*Tanda negatif berarti pengeluaran PMN lebih besar dibandingkan penerimaan PMN

B.2.4.1.8. Kewajiban Penjaminan

Pada TA 2024 realisasi Kewajiban Penjaminan sebesar Rp1.458.986.000.000 atau 177,06 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN sebesar Rp823.986.000.000. Realisasi ini naik sebesar Rp1.128.474.495.000 atau 341,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023, kewajiban penjaminan hanya dianggarkan untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional. Sedangkan pada TA 2024 kewajiban penjaminan terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar Rp823.986.000.000 dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan sebesar Rp635.000.000.000.

B.2.4.1.9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2024 sebesar Rp15.000.000.000.000 atau 60,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp25.000.000.000.000. Realisasi ini turun Rp5.000.000.000.000 atau 25,00 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan Dana Abadi Pendidikan BLU Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB).

B.2.4.1.10. Pembiayaan Lain-Lain

Pada TA 2024 realisasi Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp15.454.545.454, turun sebesar Rp133.060.306.031 atau 89,59 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Realisasi ini berasal dari penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo sebagai pengembalian sebagian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2024 sebesar Rp92.311.154.268.612 atau 752,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp12.273.802.402.000. Realisasi ini naik Rp11.111.108.260.887 atau 13,68 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp179.765.350.519.789 dan

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp87.454.196.251.177.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2024 sebesar Rp179.765.350.519.789 atau 183,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp97.751.162.402.000. Realisasi ini naik Rp17.114.997.721.571 atau 10,52 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Kenaikan ini dikarenakan kebutuhan penarikan pinjaman yang merupakan bagian dari strategi pengelolaan utang tahunan. Realisasi ini berasal dari Penarikan Pinjaman Tunai sebesar Rp60.028.929.576.507 dan Penarikan Pinjaman Kegiatan sebesar Rp119.736.420.943.282.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai

Realisasi Penarikan Pinjaman Tunai TA 2024 sebesar Rp60.028.929.576.507 atau 100,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp60.000.000.000.000. Realisasi ini turun Rp22.961.851.264.177 atau 27,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang tentang APBN Tahun 2024 dimana terdapat opsi fleksibilitas pembiayaan utang sehingga pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang. Pinjaman Tunai merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat disesuaikan berdasarkan fleksibilitas pembiayaan utang tersebut.

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *underlying* dalam proses pencairan pinjaman. Untuk pinjaman tunai ini, setelah terpenuhinya *policy matrix* akan dilakukan negosiasi dan penandatanganan *loan agreement*, selanjutnya akan dilakukan pencairan. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *modalitas Program for Result* (PforR) *dan Investment Project Financing with Performance Based Conditions (IPF with PBC's)* dimana untuk PfR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Dalam proses pencairan pinjaman, DLIs terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Independent Verification Agency (IVA) yang disepakati antara Pemerintah dan *lender* dalam beberapa pinjaman tunai yang ditunjuk adalah BPKP. Hasil verifikasi tersebut akan dijadikan dasar penarikan pinjaman tunai. Untuk pinjaman dengan modalitas IPF with PBC seperti pinjaman *Disaster Risk Finance and Insurance* dilakukan penarikan setelah target PBC dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Daftar pinjaman tunai dengan menggunakan *policy matrix* dan DLIs/PBC untuk penarikan pinjaman tunai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

.No	*Lender*	Program		*Policy Matrix*/Output/Pilar
1	ADB	*Supporting Essential Health Actions for Transformation*/SEHAT (RBL)	1	*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
2	WB	*Intergovernmental Transfers and Sub-national Finance* (SINERGIS) (PfR)	1	*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
3	WB	*National Health Insurance* (JKN) *Reforms and Results* (PfR)	1	*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
4	WB	*Investing in Nutrition and Early Years* (PfR - AF)	1	*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
5	ADB	*Boosting Productivity through Human Capital Program Subprogram 2* (PBL)	1	*Strengthened Policies to Finance and Monitor Implementation of* SDGs
			2	*Improved Educational Attainment and Skills Development*
			3	*Enhanced Social Protection and Public Health Systems*
6	AIIB	*Co-financing Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 2*	1	*Creating and enabling environment for investments*
			2	*Easing barriers to trade*
			3	*Growing and upscalling enterprises*
7	AIIB	*Co-financing Boosting Productivity through Human Capital Program Subprogram 2*	1	*Strengthened Policies to Finance and Monitor Implementation of* SDGs
			2	*Improved Educational Attainment and Skills Development*
			3	*Enhanced Social Protection and Public Health Systems*
8	WB	*Disaster Risk Finance and Insurance* (IPF *with* PBCs)	1	*Performance Based Conditions* (PBC)
			2	*Expenditure*
9	WB	*Strengthening National Tuberculosis Response Program* (TB PfR)		*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
10	ADB	*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*		*Disbursement Linked Indicators* (DLI)

.No	*Lender*	Program		*Policy Matrix*/Output/Pilar
11	AIF	*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*		*Disbursement Linked Indicators* (DLI)
12	ADB	*Co-financing Marine Debris Program* (PBL)	1	*Plastic Waste Management Improved*
			2	*Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.*
			3	*Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened*
13	ADB	*Affordable and Sustainable Energy Transition Program* (PBL)	1	*Policies and regulatory framework for clean energy transition established*
			2	*Sector governance and financial sustainability strengthened*
14	KfW	*Marine Debris Program*	1	*Plastic Waste Management Improved*
			2	*Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.*
			3	*Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened*
15	AFD	*Co-financing Marine Debris Program*	1	*Plastic Waste Management Improved*
			2	*Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.*
			3	*Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened*

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi Pinjaman Kegiatan TA 2024 sebesar Rp119.736.420.943.282 atau 317,17 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp37.751.162.402.000. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp40.076.848.985.748 atau 50,31 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Kenaikan realisasi Pinjaman Proyek disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2024 sebesar Rp87.454.196.251.177 atau 102,31 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp85.477.360.000.000. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp6.003.889.460.684 atau 7,37 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2024. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok Pinjaman Tunai dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Kegiatan.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri yaitu sebagai berikut.

Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Tunai	47.109.598.460.079	41.620.171.896.141
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri – Pinjaman Kegiatan	40.344.597.791.098	39.830.134.894.352
Jumlah	**87.454.196.251.177**	**81.450.306.790.493**

B.2.5. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SILPA (SIKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp509.161.463.889.383 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp554.888.579.353.028 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp45.727.115.463.645. Atas hal tersebut, realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran–SiLPA TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.350.936.526.544 atau 136,00 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar minus Rp19.376.178.937.101. Rincian dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	TA 2024 (*Audited*)	TA 2023 (*Audited*)
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	2.850.605.244.178.865	2.783.929.676.930.198
B.	Belanja Negara	3.359.766.708.068.248	3.121.217.245.707.618
C.	Surplus (Defisit) (A-B)	(509.161.463.889.383)	(337.287.568.777.420)
D.	Pembiayaan Neto	554.888.579.353.028	356.663.747.714.521
E.	**SiLPA (SiKPA) (D + C)**	**45.727.115.463.645**	**19.376.178.937.101**

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP)

Dasar hukum pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2021 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah atau Pihak Lain yang Mendapat Penugasan dalam rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024; dan
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

a. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas komoditas panas bumi (PPh DTP Panas Bumi) diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik. Fasilitas ini diberikan kepada Pengusaha Panas Bumi yang menyetor bagian pemerintah sebesar 34% dari penerimaan bersih usaha kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik;
b. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri. Fasilitas ini diberikan atas bunga/imbalan SBN Valas dan penghasilan pihak ketiga yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN Valas; dan
c. Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kemampuan arus kas dan kinerja PDAM yang saat ini belum seluruhnya sehat sehingga dapat meningkatkan capaian target akses air minum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka mendukung dan meningkatkan investasi dan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah memberikan beberapa fasilitas antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran

2024. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas penyerahan kendaraan listrik tertentu yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan kepada konsumen akhir yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan pemberian insentif terhadap kendaraan listrik merupakan upaya pemerintah untuk mendukung peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik minat investasi, meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri dan mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi yang memiliki sifat objektif, bermakna bahwa aturan diterapkan secara sama terhadap semua Wajib Pajak. Meskipun demikian, saat dipertimbangkan adanya kebutuhan pemerintah untuk mendukung program tertentu yang bersifat temporer, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pemberian subsidi pajak. Pada tahun 2024, pemerintah memberikan subsidi pajak dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023. Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menstimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Secara garis besar, dalam peraturan tersebut diatur bahwa atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun diberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan sampai dengan akhir tahun 2024.

Per 31 Desember 2024, terdapat realisasi Pajak DTP sebesar Rp9.116.394.780.661,00 atau 91,73% dari pagu belanja berdasarkan DIPA LK BUN 999.07 sebesar Rp9.938.456.436.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

	Uraian	DIPA (Rp)	P-DTP yang Telah Dicairkan (Rp)
a.	**DTP Reguler**	**8.311.702.470.000**	**8.311.642.153.441**
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	2.968.099.696.000	2.968.099.696.000
	2) PPh Pasal 25/29 DTP Penghapusan Piutang PDAM	129.621.000	69.304.441
	3) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	5.343.473.153.000	5.343.473.153.000
b.	**DTP Lainnya**	**1.626.753.966.000**	**804.752.627.220**
	1) PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	509.300.000.000	509.300.000.000
	2) PPN DTP KBLBB	698.145.796.000	157.206.458.627
	3) PPnBM KBLBB	419.308.170.000	138.246.168.593
	Jumlah	**9.938.456.436.000**	**9.116.394.780.661**

Sementara itu, berikut ini merupakan insentif Pajak DTP tahun pajak 2019 s.d. 2020 serta tahun 2023 yang diajukan permohonan pencairan pada tahun 2024, yaitu:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	**Nilai Tagihan per Jenis Insentif DTP**	**16.293.504.749.922**
	a. DTP Reguler	10.547.990.259.645
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	4.529.833.873.952
	a) Tahun Pajak 2019-2020	1.416.607.984
	b) Tahun Pajak 2023	917.820.311.039
	c) Tahun Pajak 2024	3.610.596.954.929
	2) PPh Pasal 25/29 DTP Penghapusan Piutang PDAM	69.304.441
	a) Tahun Pajak 2024	69.304.441
	3) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	6.018.087.081.252
	a) Tahun Pajak 2023	323.169.474.517
	b) Tahun Pajak 2024	5.694.917.606.735
	b. DTP Lainnya	5.745.514.490.277
	1) PPN DTP KBLBB PMK 38/2023 stdd PMK 8/2024	1.281.354.716.276

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	a) Tahun Pajak 2023	505.554.567.558
	b) Tahun Pajak 2024	775.800.148.718
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	3.369.880.447.408
	a) Tahun Pajak 2023	580.159.885.270
	b) Tahun Pajak 2024	2.789.720.562.138
	3) PPnBM KBLBB DTP	1.094.279.326.593
	a) Tahun Pajak 2024	1.094.279.326.593
2	**Sudah Terbit SPM/SP2D**	**9.116.394.780.661**
3	**Selisih (1 - 2)**	**7.177.109.969.261**

Berikutnya, terdapat insentif Pajak DTP tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang telah terverifikasi namun belum dibayarkan karena anggaran ada DIPA LK BUN BA 999.07 belum tersedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	**Jumlah Tagihan pada Tahun Berjalan**	**5.534.169.839.815**
	a. DTP Reguler	1.679.122.429.586
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	1.327.677.975.851
	a) Kegiatan Triwulan III 2024	642.497.258.929
	b) Kegiatan Triwulan IV 2024	685.180.716.922
	2) PPh Pasal 25/29 DTP Penghapusan Piutang PDAM	351.444.453.735
	a) Oktober s.d. November 2024	112.984.750.441
	b) Desember 2024	238.459.703.294
	b. DTP Lainnya	3.855.047.410.229
	1) PPN DTP KBLBB PMK 38/2023 stdd PMK 8/2024	618.593.690.091
	a) Januari s.d. Oktober 2024	618.544.163.853
	b) November s.d. Desember 2024	49.526.238
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun PMK 120/2023 sttd PMK 7/2024	2.280.420.562.138
	a) Januari s.d. Juni 2024	1.496.296.803.067
	b) Juli s.d. Desember 2024	784.123.759.071
	3) PPnBM KBLBB DTP	956.033.158.000
	a) Januari s.d. Oktober 2024	956.033.158.000
2	**Jumlah Tagihan Tahun-tahun Sebelumnya**	**2.328.120.846.368**
	a. DTP Reguler	1.242.406.393.540
	1) PPh Pasal 25/29 DTP Panas Bumi	919.236.919.023
	a) Kegiatan 2019-2020	1.416.607.984
	b) Kegiatan Triwulan II 2023	11.182.614.865
	c) Kegiatan Triwulan III 2023	906.637.696.174
	2) PPh Pasal 26 DTP SBN Valas	323.169.474.517
	a) Oktober s.d. November 2023	90.742.313.530
	b) Desember 2023	232.427.160.987
	b. DTP Lainnya	1.085.714.452.828
	1) PPN DTP KBLBB PMK 38/2023 sttd PMK 8/2024	505.554.567.558
	a) April s.d. Desember 2023	505.554.567.558
	2) PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun	580.159.885.270
	a) November s.d. Desember 2023	580.159.885.270
3	**Total (1 + 2)**	**7.862.290.686.183**

2. Insentif/Fasilitas Fiskal di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan daya saing global serta peningkatan investasi dan mendorong ekspor, pemerintah memberikan stimulus-stimulus ekonomi dimana salah satunya adalah fasilitas kepabeanan.

Fasilitas kepabeanan, merupakan salah satu jenis kemudahan yang disediakan pemerintah, baik melalui kemudahan prosedur, maupun pemberian insentif dari sisi fiskal. Kemudahan prosedur pada bidang kepabeanan, meliputi pemangkasan waktu *clearance* melalui berbagai skema (e.g. MITA/AEO, *rush handling*, dan lain sebagainya). Sementara itu,

kemudahan fiskal diberikan berkenaan dengan pungutan negara, dalam bentuk fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, dan pengembalian bea masuk.

Mekanisme pelaporan insentif/fasilitas fiskal diatur dalam KMK nomor 499/KMK.01/2022 tentang Mekanisme Pelaporan atas Pemanfaatan Insentif atau Fasilitas/Kemudahan Perpajakan. Dalam KMK tersebut, dijelaskan bahwa Pemberian insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan berupa insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan Ditanggung Pemerintah yang disebut DTP dan selain insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan DTP sebagaimana dimaksud yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, disebut NonDTP.

Realisasi nilai pemanfaatan atas insentif atau fasilitas/kemudahan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp37.942.613.283.596,00 dengan jumlah wajib pajak penerima manfaat sejumlah 3.005 WP, secara rinci terdapat pada tabel berikut.

No	Jenis Insentif atau Fasilitas/Kemudahan (IFKP atau Dasar Peraturan	Jumlah Wajib Pajak	Realisasi Nilai IFKP (Rp)	Keterangan
1.	**DTP**			
1	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)	-	-	Tahun 2024 tidak diterbitkan PMK fasilitas BMDTP
2.	**Non DTP**			
1	Pembebasan Bea Masuk Sesuai Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang Kepabeanan	1.303	9.996.926.867.684	-
2	Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor	104	601.763.169.681	-
3	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Kawasan Berikat	1.275	24.874.458.485.774	-
4	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Gudang Berikat	180	3.845.025.124.618	
5	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Toko Bebas Bea	8	105.712.589.769	
6	Penangguhan Bea Masuk Dalam Rangka Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat	8	16.461.136.332	
7	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi	24	236.882.692.276	-
8	Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi	11	136.699.989.642	-
9	Pembebasan dan/atau penangguhan bea masuk pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	77	1.831.912.031.286	-
	Total	2.990	41.645.842.087.062	

3. Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP

Fasilitas PPh Bukan Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu fasilitas PPh badan dan fasilitas pemotongan dan pemungutan PPh .

1) Fasilitas PPh Badan
   a) Pengurangan PPh badan (*Tax Holiday*)
   b) Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (*Tax Allowance*)
   c) Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya (*investment allowance*)
   d) Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (*super tax deduction* vokasi)
   e) Fasilitas Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan *Pengembangan Tertentu di Indonesia (Super Tax Deduction* Litbang)
   f) Fasilitas Pemberian Pengecualian sebagai Objek PPh atas Hasil Investasi Pengembangan Dana Jaminan Sosial
   g) Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus
2) Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)

Berikut data Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas PPh Badan pada tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jenis Fasilitas	Jumlah WP			
	2021	2022	2023	2024
Tax Holiday	23	34	19	62
Tax Allowance	17	16	11	30
Tax Holiday di KEK – Badan Usaha	1	3	2	2
Tax Holiday di KEK – Pelaku Usaha	11	1	9	41
Tax Allowance di KEK	1	3	1	4
Investment Allowance	3	2	2	1
Super Tax Deduction Vokasi	34	37	32	38
Super tax Deduction Litbang	24	6	10	9
Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial	-	-	2	2
Total	**114**	**102**	**88**	**189**

Keterangan:
1. Data tersebut berdasarkan data permohonan dan/atau pemberitahuan yang diajukan Wajib Pajak melalui Sistem OSS dan mendapatkan persetujuan pada tahun 2021, tahun 2022, 2023, dan tahun 2024.
2. Satu Wajib Pajak dimungkinkan memperoleh lebih dari satu keputusan/notifikasi persetujuan

Berikut data Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Badan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022, 2023, per 31 Desember 2024.

Jenis Fasilitas	2022		2023	
	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan
Tax Holiday	26	8.645.400.360.652	36	6.932.496.211.622
Tax Allowance	42	602.350.447.175	41	433.326.560.369
Tax Holiday di KEK – Badan Usaha	-	-	-	-
Tax Holiday di KEK – Pelaku Usaha	1	8.872.212.580	1	36.275.126.956
Tax Allowance di KEK	2	7.204.061.711	3	7.899.415.726
Investment Allowance	1	8.388.344.967	2	11.662.281.380
Super Tax Deduction Vokasi	18	3.525.932.034	31	11.436.978.649
Super tax Deduction Litbang	1	599.273.929	2	7.656.187.132
Pengecualian sebagai objek PPh atas hasil investasi pengembangan dana jaminan sosial	-	-	2	11.829.134.883.866
Pengecualian sebagai objek PPh atas beasiswa	2.718	80.750.727.753	1.846	61.126.637.988
Pengecualian sebagai objek PPh pasal 26 ayat (4) – *Branch Profit Tax*	46	56.306.960.762	32	66.422.133.128
Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka	60	7.484.181.219.302	52	6.902.419.987.687
Total	**2.915**	**16.897.579.540.865**	**2.048**	**26.299.856.404.503**

Keterangan:
1. *Nilai pemanfaatan tax holiday di atas merupakan nilai pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.*
2. *Nilai pemanfaatan tax allowance dan investment allowance di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan pengurangan penghasilan neto berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).*
3. *Nilai pemanfaatan STD Vokasi dan STD Litbang di atas merupakan nilai penghitungan berdasarkan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan (22%).*
4. *Data diperoleh dari Direktorat DIP berdasarkan permintaan data sesuai dengan daftar Wajib Pajak yang berhak memanfaatkan.*
5. *Nilai pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan badan untuk Tahun Pajak 2024 belum dapat disajikan karena nilai pemanfaatan baru dapat diketahui pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2024 yang jatuh temponya apabila tidak ada pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan adalah pada 30 April 2025 (untuk Wajib Pajak dengan tahun buku Januari-Desember) serta diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengolahan data.*

4. Fasilitas PPN dan PPnBM Non Pajak DTP

Fasilitas PPN Non Pajak DTP dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu fasilitas PPN tidak dipungut dan fasilitas PPN dibebaskan. Per 31 Desember 2024, terdapat realisasi fasilitas PPN dan PPnBM Non DTP sebesar Rp6.682.049.684.576, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Pemanfaatan (Rp)
PPN Tidak Dipungut			
1	Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu	694	1.124.368.054.266
2	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*	17	635.966.588.257
3	Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil dengan Biaya Pengembalian (*Cost Recovery*)	2	1.401.294.965.702
4	BBM Kapal Angkutan Luar Negeri	1	25.305.259.154
5	Avtur Angkutan Udara Luar Negeri	87	2.163.809.332.861
PPN Dibebaskan			
6	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis (Mesin dan Peralatan Pabrik)	119	70.305.308.531
7	Impor dan/atau Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (*Compressed Natural Gas* (CNG) & *Liqufied Natural Gas* (LNG))	5.892	19.478.718.778.961
8	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Susun Sederhana Milik)	7	1.999.532.916
9	Penyerahan BKP yang Bersifat Strategis (Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja)	120	124.743.102.537
10	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Vaksin Polio dalam Rangka Pekan Imunisasi Nasional dan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19)	37	25.773.046.165
11	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Senjata, Amunisi, dan Kendaraan Angkutan Darat)	73	1.003.386.901.810
12	Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu (Peralatan dan Suku Cadang untuk Penyediaan Data Batas dan Foto Udara)	10	22.401.881
13	Penyerahan JKP Tertentu (Jasa Persewaan Rumah Susun Sederhana, Rumah Sederhana, dan Rumah Sangat Sederhana)	4	1.302.184.042
14	Pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional	127	138.565.469.081
15	Pembebasan PPN atas BKP Tertentu yang Bersifat Strategis berupa Listrik kecuali Listrik Rumah Tangga dengan Daya >6.000 VA	212	42.299.894.308.251
Pengurangan DPP PPnBM			
16	Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau (LCGC).	2	2.200.529.769.456
17	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan *Battery Electric Vehicles* atau *Fuel Cell Electric Vehicles*.	2	943.297.535.356
18	Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi *Full Hybrid* dan/atau *Mild Hybrid*, Teknologi *Flexy Engine*, *Plug-In Hybrid Electric Vehicles*	2	291.365.009.705
	Total	**7.408**	**71.930.647.548.932**

5. *Burden Sharing* yang ditanggung Bank Indonesia dan Pemerintah

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah merespons kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun nonutang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020).

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Sesuai SKB II, BI membeli SBN yang diperuntukkan untuk *Public Goods* (PG) dan menanggung seluruh beban yang timbul sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo. Selain itu, BI dan Pemerintah juga berbagi beban (*burden sharing*) biaya penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan *Non Public Goods* (NPG). Penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan PG dan NPG sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu melalui 8 kali transaksi *private placement* dengan nilai Rp397,56 triliun untuk PG dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk NPG.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespons kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.

SBN yang diterbitkan pemerintah sesuai SKB II dan SKB III, khususnya dengan seri VR yang dibeli di pasar perdana, bersifat *tradable* dan *marketable* sehingga dapat dipergunakan BI untuk pelaksanaan operasi moneter. Dengan meningkatnya kepemilikan SBN *tradable* oleh BI maka kondisi ini sejalan dengan kebijakan untuk penggunaan SBN dalam operasi moneter, yang pada akhirnya dapat mendorong likuiditas pasar SBN.

SBN seri VR yang dibeli BI di pasar perdana dalam rangka SKB II dan SKB III, akan mulai jatuh tempo pada tahun 2025. Sejalan dengan rencana operasi moneter tahun 2025, Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral debt switch*) dengan Pemerintah. Pelaksanaan *debt switch* akan dilakukan melalui pertukaran antara SBN yang jatuh tempo tahun 2025 dengan SBN *tradable* dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal Pemerintah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui penerbitan SBN dan operasi moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan meminimalkan terjadinya disrupsi pada pasar SBN akibat konsentrasi jatuh tempo pada periode tertentu.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah. Pada Tahun 2024 rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut:

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Januari	1.063.218.760.000	-	1.063.218.760.000
2	Februari	2.311.539.140.000	-	2.311.539.140.000
3	Maret	2.984.585.270.000	-	2.984.585.270.000
4	April	1.108.478.470.000	-	1.108.478.470.000
5	Mei	2.291.361.160.000	-	2.291.361.160.000
6	Juni	2.931.325.430.000	-	2.931.325.430.000
7	Juli	1.093.170.890.000	-	1.093.170.890.000
8	Agustus	2.380.368.360.000	-	2.380.368.360.000
9	September	3.187.289.920.000	-	3.187.289.920.000

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
10	Oktober	1.189.877.760.000	-	1.189.877.760.000
11	November	2.453.153.280.000	-	2.453.153.280.000
12	Desember	3.101.763.440.000	-	3.101.763.440.000
Subtotal PG		26.096.131.880.000	-	26.096.131.880.000
B. *Non Public Goods*				
1	Juni	263.610.395.000	4.757.363.605.000	5.020.974.000.000
2	Desember	45.277.408.000	4.764.264.807.500	4.809.542.215.500
Subtotal NPG		308.887.803.000	9.521.628.412.500	9.830.516.215.500
C. *Cluster* A				
1	Januari	336.453.795.750	-	336.453.795.750
2	Februari	142.229.566.980	-	142.229.566.980
3	Maret	936.062.000.000	-	936.062.000.000
4	April	502.162.768.080	-	502.162.768.080
5	Mei	140.365.183.860	-	140.365.183.860
6	Juni	919.358.000.000	-	919.358.000.000
7	Juli	494.117.329.940	-	494.117.329.940
8	Agustus	145.817.625.060	-	145.817.625.060
9	September	1.158.161.119.840	-	1.158.161.119.840
10	Oktober	378.245.359.200	-	378.245.359.200
11	November	150.276.314.880	-	150.276.314.880
12	Desember	1.144.199.345.630	-	1.144.199.345.630
Subtotal *Cluster* A		6.447.448.409.220	-	6.447.448.409.220
Total PG, NPG dan *Cluster* A		**32.852.468.092.220**	**9.521.628.412.500**	**42.374.096.504.720**

6. Pagu dan Realisasi SBSN Proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga

Pada Tahun 2024, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut.

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran	Realisasi
1	Kejaksaan Republik Indonesia	319.541.881.000	318.382.603.580
2	Kementerian Pertahanan	1.348.570.555.000	1.348.499.493.232
3	Kementerian Pertanian	317.138.369.000	307.509.160.188
4	Kementerian Perindustrian	68.454.888.000	68.410.360.860
5	Kementerian Perhubungan	11.047.070.155.000	6.507.290.013.869
6	Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi	2.042.182.040.000	1.835.149.066.094
7	Kementerian Agama	3.123.051.991.000	3.101.884.038.463
8	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	52.405.606.000	42.822.450.973
9	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	16.787.845.893.000	16.126.937.168.089
10	Badan Pusat Statistik	19.295.370.000	14.176.767.985
11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	562.506.354.000	556.909.438.187
12	Badan Kepegawaian Negara	60.604.570.000	49.341.420.379
13	Badan Keamanan Laut	188.089.151.000	187.952.228.931
14	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	140.092.245.000	140.080.422.705
	Jumlah	**36.076.849.068.000**	**30.605.344.633.535**

Realisasi pelaksanaan SBSN proyek TA 2024 adalah 84,83% (dari total alokasi termasuk lanjutan/luncuran). Secara umum, kinerja pelaksanaan SBSN proyek TA 2024 tersebut cukup baik namun terdapat beberapa proyek dengan alokasi besar yang akan dilanjutkan/diluncurkan pada tahun 2025 khususnya pada Kementerian Perhubungan.

7. Pengembalian Pinjaman Kegiatan

Sampai dengan Tahun 2024, terdapat pengembalian pinjaman kepada *Lender* sebesar Rp61.355.941.348 dikarenakan adanya *refund administratif* dan *refund*

ineligible. *Refund* merupakan koreksi nilai ekuitas tahun lalu, sehingga tidak memengaruhi akun penarikan pinjaman kegiatan. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut:

No	*Loan ID*	Register	Kementerian/Lembaga	*Lender*	Nilai Rupiah
Refund Administratif					(32.426.515.613)
1	20421000	1ZZ7LGXA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(1.900.054.309)
2	20600002	1XH37L2A	DITJEN S.D.AIR-PU	AIIB	(1.902.630.968)
3	20818000	1116F8FA	KEMEN PU & PERA	IFAD	(21.461.078.584)
4	21265000	17D37YEA	DITJEN S.D.AIR-PU	ADB	(3.658.238.782)
5	20434000	1BUY9N3A	KEMEN ATR/BPN	IBRD	(307.971.386)
6	21246000	10884001	KEMEN PU & PERA	ADB	(1.033.481.517)
7	21265000	17D37YEA	KEMEN PU & PERA	ADB	(2.163.060.067)
Refund Ineligible					(28.929.425.735)
8	20413000	10881901	BRIN	IBRD	(112.708.548)
9	20419000	18K6ECNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(6.079.779.794)
10	20426000	1HG72SWA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(6.010.693.858)
11	20600001	1PTDQQAA	KEMEN PU & PERA	AIIB	(5.652.203.278)
12	20408000	10864001	KEMENRISTEK	IBRD	(24.289.892)
13	20421000	1ZZ7LGXA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(5.114.008.417)
14	20433000	1M1JWRAA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(761.840.501)
15	20600002	1XH37L2A	KEMEN PU & PERA	AIIB	(5.114.008.571)
16	20818000	1116F8FA	KEMEN PU & PERA	IFAD	(59.892.876)
			Jumlah		**(61.355.941.348)**

8. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2020 Pasal 3 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp200.000.000.000 dan pekerjaan nonkonstruksi sampai dengan Rp20.000.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran. Selanjutnya untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000 dan pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000 dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan. Selain itu, pada Pasal 3 ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan, dan Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan pada tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.F.**

9. Rincian Belanja Terkait dengan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan realisasi belanja dengan kode kewenangan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2024 pada Kementerian/Lembaga dapat dirinci sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian/Lembaga	Realisasi TA 2024	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
010	Kementerian Dalam Negeri	45.505.274.824	931.113.600
018	Kementerian Pertanian	306.187.062.421	4.312.317.260.011
019	Kementerian Perindustrian	-	48.342.037.305
024	Kementerian Kesehatan	253.885.816.059	-
026	Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	122.111.748.508	-
029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	-	48.858.802.174
032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	1.504.290.118	73.680.023.056

Kode BA	Kementerian/Lembaga	Realisasi TA 2024	
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	-	1.132.826.625.998
040	Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata	-	66.724.697.457
044	Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	227.891.341.695	55.860.221.385
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	29.062.038.834	-
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	10.554.272.928	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	12.244.912.499	-
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi	136.302.000	76.477.919.355
090	Kementerian Perdagangan	5.626.785.084	72.425.241.444
092	Kementerian Pemuda Dan Olah Raga	77.260.493.307	-
125	Badan Pangan Nasional	146.883.424.847	-
	Jumlah	**1.238.853.763.124**	**5.888.443.941.785**

10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

BLU merupakan implementasi konsep "*enterprising the government*" dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah, dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*) meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2020, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 341 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang masuk dalam ikhtisar Laporan Keuangan BLU dan berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga. Ditinjau dari jenis layanan dapat dibagi menjadi:

1. 47 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;
2. 7 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
3. 126 BLU bidang Kesehatan;
4. 153 BLU bidang Pendidikan;
5. 8 BLU bidang Pengelolaan Dana.

Sejak 30 Oktober 2024 satker pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Pusat Pelayanan Teknologi berubah status menjadi satker non BLU. Ikhtisar keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan-LRA, dan Belanja-LRA Tahun 2024 sebagai berikut.

(Rp Miliar)

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker BLU	Aset	Kewajiban	Pendapatan-LRA	Pendapatan-BLU	Belanja-LRA
1	Kejaksaan RI	1	177,83	0,06	59,15	52,27	130,36
2	Kementerian Sekretariat Negara	2	487.080,14	182,78	780,94	662,92	519,06

(Rp Miliar)

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker BLU	Aset	Kewajiban	Pendapatan-LRA	Pendapatan-BLU	Belanja-LRA
3	Kementerian Pertahanan	41	5.814,03	764,46	5.291,19	4.630,17	6.989,52
4	Kementerian Keuangan	7	305.724,56	223.053,94	47.351,72	47.350,75	44.593,81
5	Kementerian Pertanian	3	4.793,04	0,88	79,36	77,94	145,89
6	Kementerian Perindustrian	18	3.770,98	58,83	315,85	284,25	603,37
7	Kementerian ESDM	8	9.745,34	65,50	731,41	728,45	1.104,76
8	Kementerian Perhubungan	42	67.768,27	347,35	2.467,70	2.436,29	5.539,33
9	Kemendikbudristek	57	171.896,08	1.052,16	11.020,01	10.833,59	24.932,85
10	Kementerian Kesehatan	74	95.808,94	2.107,52	19.946,73	19.881,46	28.400,99
11	Kementerian Agama	29	38.277,75	328,93	3.736,59	3.715,44	8.611,15
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6	4.497,10	1.362,68	184,19	182,66	371,67
13	Kementerian Pariwisata	3	1.131,47	0,42	7,37	7,01	92,80
14	Kementerian KUKM	2	8.018,89	6.591,57	343,58	343,44	305,04
15	Kementerian Kominfo	1	32.501,25	11.277,92	8.290,88	8.126,23	12.264,28
16	Kepolisian Negara Republik Indonesia	43	7.278,10	215,59	3.020,82	3.013,43	3.760,04
17	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	217,28	0,00	65,76	65,65	57,73
18	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	58.164,97	6.383,97	2.296,20	2.295,44	2.647,41
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	1	3.199,64	6,08	6,44	6,29	54,28
20	Badan Riset dan Inovasi Nasional[1)]	1	0,00	0,00	23,15	23,06	14,96
	Jumlah	**341**	**1.305.865,66**	**253.800,63**	**106.019,03**	**104.716,73**	**141.139,30**

[1)]Sejak 30 Oktober 2024, satker pada Badan Riset dan Inovasi Nasional berubah status menjadi satker non BLU

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.G.**

11. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Berdasarkan surat Ketua BPK nomor 152/S/I/11/2018 tanggal 22 November 2018 hal Penyelarasan dan Pengungkapan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LK PHLN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga perlu dilakukan penyelarasan penyusunan LK PHLN dengan LKKL dan LKPP.

Di samping itu dalam rangka pengungkapan yang lebih memadai, Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi PHLN menyusun ikhtisar LK PHLN yang meliputi informasi nama PHLN, realisasi pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKKL tahun 2024.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.C dan 3.D.**

12. Pengeluaran Negara untuk Pendidikan *(Mandatory Spending)*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* adalah berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD.

Total Anggaran Pendidikan dalam APBN 2024 sebesar Rp668,69 triliun, adapun Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2024 sebesar Rp569,08 triliun atau 85,10 persen dari yang dianggarkan di APBN.

Rincian alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan TA 2024 sebagai berikut:

No	Komponen Anggaran Pendidikan	APBN 2024	DIPA	Realisasi
1.	**Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**245.140.156.204.000**	**222.033.362.883.200**	**213.430.048.204.601**
1.1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja K/L	194.151.886.133.000	217.033.362.883.200	210.335.560.923.394
1.2.	Non Kementerian Negara/Lembaga	50.988.270.071.000	5.000.000.000.000	3.094.487.281.207
2.	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah**	**346.558.708.175.000**	**346.353.735.592.100**	**340.653.889.632.604**
2.1.	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.520.091.000	211.972.547.508.650	208.057.038.003.144
2.2.	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan:	132.135.766.740.000	132.135.766.740.000	129.532.285.853.696
2.2.1.	DAK Fisik	15.820.300.000.000	15.820.300.000.000	15.117.625.243.790
2.2.2.	DAK Nonfisik	116.315.466.740.000	116.315.466.740.000	114.414.660.609.906
2.2.2.1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.493.556.448.000	59.493.556.448.000	58.822.841.659.315
2.2.2.2.	Tunjangan Guru ASN Daerah	56.651.935.292.000	56.651.935.292.000	55.421.843.950.591
2.2.2.3.	BOP Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	169.975.000.000
2.3.	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.245.421.344.000	2.245.421.343.450	3.064.565.775.764
3.	**Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan**	**77.000.000.000.000**	**77.000.000.000.000**	**15.000.000.000.000**
3.1.	Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000
3.2.	Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000.000	-	-
3.3.	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000.000	-	-
3.4.	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000.000	-	-
3.5.	Pembiayaan Pendidikan	52.000.000.000.000	-	-
	Jumlah	**668.698.864.379.000**	**645.387.098.475.300**	**569.083.937.837.205**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 3.E.**

13. Capaian Output per Fungsi APBN Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pasal 2 ayat (2), RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yaitu pengelompokkan anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN. Salah satu pengelompokkan anggaran tersebut adalah pengelompokan alokasi sesuai fungsi kepemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the Functions of Government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 - International Monetary Fund (IMF), dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (recreation, culture, and religion).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) perlindungan lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Lampiran **5.A.**

Capaian output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN pada TA 2024 antara lain sebagai berikut.

a. Pelayanan Umum (01)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	29.391,04	29.382,83	99,97	11.300.000	13.024.073	Kiloliter
Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	24.152,62	15.540,50	64,34	604	591	Lembaga

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	2.969,03	2.407,67	81,09	13.455	13.448	Lembaga
Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.821,47	1.815,31	99,66	553	553	Lembaga
Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.598,76	1.525,02	95,39	553	553	Lembaga

b. Pertahanan (02)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
MRCA sejenis Rafale dan dukungannya beserta *Logistic Support* 2 PLN TNI AU	13.629,92	13.608,00	99,84	1	1	Unit
Pesawat Terbang	3.628,36	3.628,22	100,00	126	126	Unit
Pesawat *Multirole Transport Tanker* (MRTT) dan Dukungannya PLN TNI AU	2.397,86	2.397,86	100,00	1	1	Unit
Rudal Jarak Sedang (*Dual Mission* Missile) dan Duk PLN TNI AU	2.001,88	2.001,88	100,00	1	1	Unit
Overhaul SU-27/30 PLN TNI AU	1.691,11	1.682,25	99,48	1	1	Unit

c. Ketertiban dan Keamanan (03)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Pemenuhan Almatsus (Sumber PHLN dan PDN)	21.601,66	19.126,71	88,54	97	44	Unit
Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen	18.612,21	16.188,55	86,98	14	13	Unit
Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus)	9.863,67	9.838,58	99,75	96.147	96.147	Unit
Pemenuhan Alat Material	6.189,18	5.414,22	87,48	17.944	18.255	Unit
Penyaluran Dana Siap Pakai	4.387,95	4.341,50	98,94	46.113	46.113	Paket

d. Ekonomi (04)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	36.123,47	35.970,43	99,58	283.642.980	283.642.980	Paket
Dukungan Infrastruktur IKN	18.341,83	18.341,44	100,00	59,86	59,86	km
Jalan Strategis	7.589,75	7.427,17	97,86	1.432,544	1.401,677	km
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	7.746,26	7.408,47	95,64	28,65	28,155	km
Program percepatan peningkatan tata guna air irigasi	2.690,55	2.655,56	98,70	2.732,75	2.553,11	km

e. Lingkungan Hidup (05)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	613,64	565,19	92,10	3.448.895	3.416.357	Hektar
Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	529,23	498,10	94,12	17.000	17.053	Hektar
PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa-Bali	465,04	397,74	85,53	1.484.370	1.451.343	Hektar
Rehabilitasi Ekosistem *Mangrove*	715,18	375,07	52,44	2.215	14.475	Hektar
PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori V	202,56	202,50	99,97	1.312.723	1.312.723	Bidang

f. Perumahan dan Fasilitas Umum (06)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan IKN	9.071,14	8.188,26	90,27	15	7,001	Unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	3.667,00	3.664,50	99,93	47	47	Unit
Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya	2.869,48	2.851,80	99,38	130.707	130.394	Unit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	1.556,52	1.511,47	97,11	22	22	Unit
Pendampingan Desa	1.506,08	1.504,86	99,92	35.000	35.000	Orang

g. Kesehatan (07)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20)	46.168,34	46.096,22	99,84	96.800.000	96.762.367	Orang
Kontribusi iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) (PK-20)	2.816,12	2.816,12	100,00	50.517.073	50.517.073	Orang
Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)	1.067,85	1.067,85	100,00	6	6	Unit
Pembangunan dan Pengembangan RS IKN (LR-12)	1.121,88	944,11	84,15	2	2	Paket
Alat Kesehatan	1.120,84	942,09	84,05	11.184	10.472	Unit

h. Pariwisata dan Budaya (08)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Kejuaraan *Multievent* Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi	557,81	542,04	97,17	5	2	Lembaga
Olahragawan Andalan Nasional yang Terbina Dalam Peningkatan Prestasi Olahraga	476,99	431,28	90,42	1.561	1.003	Orang
Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	274,46	250,00	91,09	192	210	Lembaga
Olahragawan *Elite Junior* Nasional yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional	136,53	128,57	94,17	500	612	Orang
Pendukungan *Event* Daerah	61,28	61,13	99,76	110	240	kegiatan

i. Agama (09)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Layanan Nikah dan Rujuk	522,12	491,54	94,14	624.274	623.484	Orang
Petugas Haji yang Profesional	451,98	413,42	91,47	23.763	23.822	Orang
Penyuluh Agama Islam NonPNS Penerima Tunjangan	403,41	399,86	99,12	43.870	44.161	Orang
KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana [1)]	218,92	215,04	98,23	619	619	Lembaga
Pembangunan Pusat Pelayanan Literasi Keagamaan Islam	186,81	185,76	99,44	2	2	Lembaga

j. Pendidikan (10)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Mahasiswa Yang mendapatkan KIP Kuliah	13.682,70	13.473,38	98,47	985.577	1.022.084	Orang
Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa	12.099,41	10.922,95	90,28	61.385	192.713	Orang

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	4.223,40	4.222,07	99,97	10.360.614	10.360.614	Orang
Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	3.793,96	3626,62	95,59	71	69	Orang
Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	3.308,47	3.308,43	100,00	1.928.271	2.125.512	Orang

k. Perlindungan Sosial (11)

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120,00	44.272,90	98,12	18.800.000	18.370.020	Keluarga
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	28.765,01	28.019,28	97,41	10.000.000	10.000.000	Keluarga
Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	1.096,50	1.095,02	99,87	132.604	154.415	Orang
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	692,91	691,51	99,80	304.673	316.323	Orang
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	551,89	550,80	99,80	92.074	106.683	Orang

14. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat arah kebijakan nasional selama satu tahun dan bertujuan untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya. Adapun sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029.

Rincian realisasi anggaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

Uraian Output	Jumlah KL	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%
PN I: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	27	53.255,48	51.258,87	96,25
PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	14	6.112,02	5.691,53	93,12
PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	32	238.445,58	231.255,74	96,98
PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	20	6.865,59	6.250,54	91,04
PN V Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	13	141.961,82	126.835,33	89,34
PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	19	10.160,04	9.316,83	91,70
PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	45	118.947,62	111.699,77	93,91
Jumlah		575.748,15	542.308,61	94,19

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Lampiran 5.B.**

Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. PN I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor, dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

PN I memiliki 8 program prioritas, 45 kegiatan prioritas, 128 proyek prioritas, dan 1.234 rincian output yang tersebar di 27 K/L.

Capaian *output* PN I yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	29.391,04	29.382,83	99,97	11.300.000	13.024.073	Kiloliter
Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	1.797,07	1.723,48	95,91	91.098	91.098	Unit

b. PN II Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada tahun 2024 diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

PN II memiliki 7 program prioritas, 35 kegiatan prioritas, 450 proyek prioritas, dan 289 rincian output yang tersebar di 14 K/L.

Capaian *output* PN II yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Pendampingan Desa	1.506,08	1.504,86	99,92	35.000	35.000	Orang
PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	613,64	565,19	92,10	3.448.895	3.416.357	Hektar

c. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

PN III memiliki 7 program prioritas, 29 kegiatan prioritas, 80 proyek prioritas, dan 1.610 rincian output yang tersebar di 32 K/L.

Capaian *output* PN III yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Cakupan penduduk yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam JKN/KIS (PK-20)	46.168,34	46.096,22	99,84	96.800.000	96.762.367	Orang
KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako	45.120,00	44.272,90	98,12	18.800.000	18.370.020	Keluarga

d. PN IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

PN IV memiliki 4 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 62 proyek prioritas, dan 338 rincian output yang tersebar di 20 K/L.

Capaian *output* PN IV yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	872,68	735,22	84,25	597	858	Unit
Layanan Nikah dan Rujuk	522,12	491,54	94,14	624.274	623.484	Orang

e. PN V Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas karena memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut.

PN V memiliki 5 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 65 proyek prioritas, dan 540 rincian output yang tersebar di 13 K/L.

Capaian output PN V yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Dukungan Infrastruktur IKN	18.341,83	18.341,44	100,00	59,86	59,86	Km
Jalan Strategis	7.589,75	7.427,17	97,86	1.432,54	1.401,68	Km

f. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada tahun 2024 difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, serta pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

PN VI memiliki 3 program prioritas, 11 kegiatan prioritas, 39 proyek prioritas, dan 242 rincian output yang tersebar di 19 K/L.

Capaian output PN VI yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian Output	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Penyaluran Dana Siap Pakai	4.387,95	4.341,50	98,94	46.113	46.113	Paket
Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan [1)]	358,09	355,64	99,32	533.700	547.481	Paket

[1)] Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan terdiri dari RO Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat serta RO Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial

g. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara, pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara, serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

PN VII memiliki 5 program prioritas, 20 kegiatan prioritas, 67 proyek prioritas, dan 882 rincian output yang tersebar di 45 K/L.

Capaian output PN VII yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 antara lain sebagai berikut.

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Honorarium Badan Ad hoc	13.719,12	13.706,15	99,91	505	505	Lembaga
MRCA sejenis Rafale dan dukungannya beserta *Logistic Support* 2 PLN TNI AU	13.629,92	13.608,00	99,84	1	1	Unit

15. Capaian Output lainnya

Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjaga *governance* dan akuntabilitas setiap kebijakan dalam pelaksanaan APBN TA 2024. Belanja negara dalam APBN TA 2024 dioptimalkan untuk menghasilkan output yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan atas penggunaan anggaran yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2024, berikut ini adalah beberapa output strategis Belanja Negara atas Belanja BUN tahun 2024 antara lain:

Uraian *Output*	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi Belanja (Miliar Rp)	%	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Satuan
Subsidi Pupuk	49.874,45	47.387,40	95,01	7.276.806	8.808.295	Ton
Subsidi LPG Tabung 3 Kg	80.860,11	80.213,61	99,20	8.030.000	7.868.951	Metrik Ton
Subsidi Listrik	75.831,22	75.817,28	99,98	68,31	68,46	TWH
Subsidi Bunga KUR	45.103,59	44.377,35	98,39	4.848.747	4.830.785	Debitur
Subsidi Minyak Solar	17.265,28	17.115,11	99,13	17.968.000	16.143.103	Kilo Liter
Subsidi Minyak Tanah	4.570,93	4.469.23	97,78	524.000	417.367	Kilo Liter
Subsidi Bunga Kredit Perumahan	4.609,44	4.609,44	100,00	732.927	732.927	Unit
Program Kartu Pra Kerja	4.824,96	2.923,80	60,60	1.334.399	1.419.298	Peserta
Kompensasi Harga BBM	128.701,05	128.701,05	100,00	44.057.882	44.057.882	Kilo Liter
Kompensasi Tarif Tenaga Listrik	80.587,08	80.587,08	100,00	204,41	204,41	TWH
Subsidi PSO Kereta Api	4.714,24	4.595,72	97,49	409.354.209	412.171.796	Penumpang
Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	3.203,97	3.203,97	100,00	3.907.047	3.907.047	Penumpang

16. Laporan Kinerja Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP).

LKjPP Tahun 2024 disusun untuk menyampaikan informasi kinerja pemerintah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap kinerja atas penggunaan anggaran Tahun 2024. Laporan ini dilengkapi dengan informasi kinerja berupa prestasi yang dicapai oleh kementerian/lembaga (K/L), berkenaan dengan anggaran yang digunakan, serta hambatan dan kesulitan yang dihadapi setiap K/L dalam mencapai kinerjanya. Pengungkapan informasi kinerja berhubungan dengan informasi sasaran pokok pembangunan nasional yang dicapai oleh K/L, termasuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Informasi kinerja Pemerintah Pusat yang diungkapkan berupa capaian sasaran makro dan sasaran prioritas pembangunan, yang penyusunannya dilakukan dengan cara mengikhtisarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 dari masing-masing K/L, yang telah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PANRB. Metodologi LKjPP Tahun 2024 disusun dengan melakukan pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L di lingkungan Pemerintah Pusat berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran strategis beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan kinerja organisasi terkait dengan sasaran pokok pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2024, dan bidang tugas atau urusan K/L bersangkutan. Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja atau prestasi kerja dalam LKjPP ini sangat terbatas hanya mencakup pada pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dari K/L (termasuk di dalamnya pelaksanaan anggaran belanja K/L). LKjPP telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Adanya perbedaan angka-angka, terutama pada informasi makro antara LKPP dan LKjPP disebabkan perbedaan tanggal *cut-off* data yang digunakan dalam penyusunan laporan. LKjPP secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran Buku II LKjPP.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. SAL Awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp459.497.872.070.698 merupakan SAL per 31 Desember 2023. SAL Awal dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2024	1 Januari 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Saldo Awal Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Saldo Awal Kas BLU yang Sudah Disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yang Telah Disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**454.548.329.062.453**	**478.954.317.677.062**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK Penyesuai Fisik SAL	(44.029.816.776)	5.390.038.579
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Penyesuai Fisik SAL	(513.135.846)	210.753.180
Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	(3.336.178.894)	3.355.675.440
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.707.739.111)	(6.766.936.036)
Penempatan Dana di Bank Umum	5.000.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**4.949.543.008.245**	**2.838.642.339**
Saldo Anggaran Lebih Awal	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**

C.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, Pemerintah menganggarkan Penerimaan Pembiayaan Lainnya dari Saldo Anggaran Lebih. Dalam Perpres Rincian APBN TA 2024, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 206 Tahun 2024, nilai Penerimaan Pembiayaan Lainnya dari SAL sebesar Rp151.381.000.000.000. Dalam PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, disebutkan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat penggunaan SAL sebesar Rp56.381.000.000.000 yang berasal dari Rekening Lain BI SAL (500000002980).

C.3. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Rincian SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Pendapatan Negara	2.850.605.244.178.865	2.783.929.676.930.198
Belanja Negara	3.359.766.708.068.248	3.121.217.245.707.618
Surplus (Defisit)	**(509.161.463.889.383)**	**(337.287.568.777.420)**
Pembiayaan Neto	554.888.579.353.028	356.663.747.714.521
SiLPA/(SiKPA)	**45.727.115.463.645**	**19.376.178.937.101**

SiLPA Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.350.936.526.544 atau 136 persen dari SiLPA Tahun 2023.

C.4. PENYESUAIAN PEMBUKUAN

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs belum terealisasi *(unrealized)*, koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.293.355.123.095 dan minus Rp3.548.034.701.030 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Koreksi SiLPA	2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
Koreksi Kas BUN	(61.355.941.239)	(243.005.835.551)
Koreksi Kas Hibah	85.975.723.953	(27.019.436.853)
Koreksi Kas BLU	859.144.688.316	(4.264.411.251.718)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	25.046.772.092	19.102.196.151
Koreksi Utang PFK	613.457.641	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	4.371.606.409	(200.381.898)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	**9.293.355.123.095**	**(3.548.034.701.030)**

1. **Koreksi SiLPA**
   Koreksi SiLPA sebesar Rp2.052.665.074.805 merupakan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp2.128.035.811.698 serta pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp75.370.736.893. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui Penerbitan SPM PP senilai minus Rp53.367.852.195 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp22.002.884.698.

2. **Selisih Kurs *(Unrealized)***
   Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar Rp6.326.893.741.118 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp7.436.474.073.826 dikurangi kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar minus Rp1.109.580.332.708 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

3. **Koreksi Kas BUN**
   Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp61.355.941.239 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.

4. **Koreksi Kas Hibah**
   Koreksi Kas Hibah sebesar Rp85.975.723.953 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada tahun 2024 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah langsung uang luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp108.425.756.794, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp13.074.500.841, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp6.338.497.000 serta penyesuaian kas hibah senilai minus Rp3.037.035.000.

5. **Koreksi Kas BLU**
   Koreksi Kas BLU sebesar Rp859.144.688.316 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2024, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, koreksi kas BLU akibat kekurangan/kelebihan setor PNBP TAYL, penyesuaian kas BLU akibat kesalahan pembukuan, penyesuaian kas BLU akibat pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang.

6. **Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran**
   Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.046.772.092 merupakan penyesuaian terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas sebesar Rp20.146.086.805, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar Rp1.504.317.373 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar Rp3.396.367.914. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	197.710.858.794	215.927.152.362
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	230.036.155.068	197.710.858.794
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	(32.325.296.274)	18.216.293.568
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	(7.278.524.182)	37.318.489.719
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) = Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran *)	**25.046.772.092**	**19.102.196.151**

**) merupakan penyesuaian akibat dari Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.*

7. Koreksi Utang PFK

Koreksi Utang PFK sebesar Rp613.457.641 merupakan selisih penerimaan dengan pengeluaran non anggaran pihak ketiga dan piutang pengembalian kelebihan penyaluran PFK TAYL. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang PFK yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Awal Utang PFK (I)	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(215.857.198.521)	620.417.513.169
Mutasi Transaksi PFK (III)	(215.134.088.039)	620.329.866.094
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	723.110.482	(87.647.075)
Mutasi Utang PFK dalam Bentuk *Invoice* (IV)	(109.652.841)	(87.647.075)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk *Invoice*)*	**613.457.641**	**-**

**) merupakan penyesuaian penerimaan dengan pengeluaran non anggaran pihak ketiga dan dan piutang pengembalian kelebihan penyaluran PFK TAYL.*

8. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp4.371.606.409 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) terdiri dari penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valas sebesar Rp2.850.145.840, selisih kurs sebesar Rp122.014.302.049, koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp120.492.841.480. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	128.907.360.569	247.752.918.368
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	580.770.692.629	128.907.360.569
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	451.863.332.060	(118.845.557.799)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	456.234.938.469	(119.045.939.697)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) *)	**4.371.606.409**	**(200.381.898)**

**) berasal dari penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam valas, selisih kurs, dan koreksi saldo Utang kepada pihak ketiga.*

C.5. PENYESUAIAN LAIN-LAIN (PENYESUAIAN PERHITUNGAN CATATAN SAL)

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris) dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL ini dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh saldo dari transaksi-transaksi non-SAL dan untuk menghindari pencatatan ganda pada pembukuan catatan SAL.

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar minus Rp594.067.608.219 dan minus Rp287.428.484.774 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Penyesuaian Transaksi RPL	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penyesuaian Transaksi Rek. *Escrow*	(677.792.588.991)	160.185.740
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(286.740)	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	5.914.039.133	2.762.149.420
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	**(594.067.608.219)**	**(287.428.484.774)**

1. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL meliputi Penyesuaian Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) sebesar Rp77.811.228.379, Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp677.792.588.991 dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar minus Rp286.740 merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh transaksi non-SAL yang masih terdapat pada perhitungan catatan SAL. Nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap perhitungan catatan SAL, sehingga dapat diperoleh nilai SAL yang tepat sesuai dengan nilai fisik kas SAL. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Rekening Pemerintah Lainnya dan Rekening Escrow yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

a. Penyesuaian Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Awal RPL	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Dikurangi:		
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Awal Tahun	128.394.224.723	247.963.671.548
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL setelah Koreksi (I)	3.379.352.455.808	5.203.653.636.302
Saldo Akhir RPL	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531
Dikurangi:		
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rekening Retur RPL Akhir Tahun	230.630.620.696	128.394.224.723
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	9.705.631.964.379	3.379.352.455.808
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	6.326.279.508.571	(1.824.301.180.494)
Mutasi Transaksi RPL (III)	6.404.090.740.923	(2.114.652.000.428)
Koreksi Saldo RPL	3.973	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) dan Koreksi Saldo RPL =Penyesuaian Transaksi RPL *)	**77.811.228.379**	**(290.350.819.934)**

**) berasal dari Penyesuaian Selisih Kurs di Rekening Migas dan Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN*

b. Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow*

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Awal Rekening *Escrow*	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
Dikurangi:		
Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Awal Tahun	4.492.658.156.434	3.921.748.145.695
Saldo Awal Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (I)	143.663.249.475.207	48.331.400.902.982
Saldo Akhir Rekening *Escrow*	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641
Dikurangi:		
Saldo pada Rekening Dana PFK dan Reksus PEN Akhir Tahun	3.773.165.929.527	4.492.658.156.434
Saldo Akhir Rekening *Escrow* untuk perhitungan SAL (II)	157.050.664.847.791	143.663.249.475.207
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	13.387.415.372.584	95.331.848.572.225
Mutasi Transaksi Rekening *Escrow* (III)	12.709.622.783.593	95.332.008.757.965
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)=Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* *)	**(677.792.588.991)**	**160.185.740**

**) berasal dari Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Escrow Dana Cadangan Alutsista TNI AU Kemenhan dan RPATA serta penyesuaian dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN sebagai Pembiayaan APBN Tahun 2024*

2. Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL

Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan sebesar Rp5.914.039.133 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Total
Selisih Kiriman Uang (TAYL)	(4.129.878.872)
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	3.336.178.894
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD (TAYL)	6.707.739.111
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	**5.914.039.133**

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	**459.497.872.070.698**	**478.957.156.319.401**
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL	**403.116.872.070.698**	**443.957.156.319.401**
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	45.727.115.463.645	19.376.178.937.101
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	**448.843.987.534.343**	**463.333.335.256.502**
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
Selisih Kurs *(Unrealized)*	6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
Koreksi Kas BUN	(61.355.941.239)	(243.005.835.551)
Koreksi Kas Hibah	85.975.723.953	(27.019.436.853)
Koreksi Kas BLU	859.144.688.316	(4.264.411.251.718)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) [1)]	25.046.772.092	19.102.196.151
Koreksi Utang PFK [2)]	613.457.641	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) [3)]	4.371.606.409	(200.381.898)
Total Penyesuaian Pembukuan	**9.293.355.123.095**	**(3.548.034.701.030)**
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Transaksi RPL [4)]	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* [5)]	(677.792.588.991)	160.185.740
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(286.740)	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada Tahun Berjalan	5.914.039.133	2.762.149.420
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	**(594.067.608.219)**	**(287.428.484.774)**
Saldo Akhir Catatan SAL	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**

C.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

SAL Akhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp457.543.275.049.219 dan Rp459.497.872.070.698. Nilai perhitungan catatan SAL telah sesuai dengan perhitungan fisik SAL. Rincian SAL akhir berdasarkan perhitungan fisik SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 *(Audited)*	Tahun 2023 *(Audited)*
Saldo Anggaran Lebih		
Saldo Akhir Kas BUN	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576
Saldo Akhir Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Saldo Akhir Kas pada BLU yang Sudah Disahkan	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yang Sudah Disahkan	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**458.485.159.605.073**	**454.548.329.062.453**
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Utang PFK Penyesuai Fisik SAL	(547.774.498.003)	(44.029.816.776)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) Penyesuai Fisik SAL	(350.140.071.933)	(513.135.846)
Selisih Kiriman Uang	(2.179.402.806)	4.129.878.872
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	-	(3.336.178.894)
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(41.790.583.112)	(6.707.739.111)
Penempatan Dana di Bank Umum	-	5.000.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	**(941.884.555.854)**	**4.949.543.008.245**
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**457.543.275.049.219**	**459.497.872.070.698**

Dengan demikian, SAL Akhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.954.597.021.479 atau 0,43 persen dibandingkan dengan dari SAL Akhir 31 Desember 2023.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Neraca	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	906.115.615.707.206	894.407.139.081.901	1,31
Investasi Jangka Panjang	4.391.554.633.530.362	4.077.230.147.021.115	7,71
Aset Tetap (bersih)	7.149.820.030.417.489	6.964.294.021.049.510	2,66
Properti Investasi (bersih)	110.538.104.927.987	104.373.750.662.580	5,91
Piutang Jangka Panjang (bersih)	48.618.466.930.997	49.188.253.842.798	(1,16)
Aset Lainnya (bersih)	1.085.718.999.996.188	983.326.656.191.290	10,41
Jumlah Aset	**13.692.365.851.510.229**	**13.072.819.967.849.194**	**4,74**
Kewajiban Jangka Pendek	1.328.524.056.593.660	1.092.254.611.766.819	21,63
Kewajiban Jangka Panjang	8.940.494.201.648.217	8.444.424.909.729.798	5,87
Jumlah Kewajiban	**10.269.018.258.241.877**	**9.536.679.521.496.617**	**7,68**
Ekuitas	**3.423.347.593.268.352**	**3.536.140.446.352.577**	**(3,19)**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**13.692.365.851.510.229**	**13.072.819.967.849.194**	**4,74**

Nilai Aset per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp619.545.883.661.035 atau 4,74 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2023. Kenaikan terbesar Aset terjadi pada Investasi Jangka Panjang yang mengalami kenaikan sebesar Rp271.893.144.528.770 atau 7,71 persen.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp732.338.736.745.260 atau 7,68 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2023. Kenaikan terbesar Kewajiban terjadi pada Kewajiban Jangka Panjang yang mencapai Rp496.158.990.671.714 atau 5,87 persen.

Kenaikan Aset yang lebih kecil dibandingkan kenaikan Kewajiban mengakibatkan penurunan Ekuitas sebesar Rp112.792.853.084.225 atau 3,19 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2023.

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 34.**

Grafik 34
Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2020 – 2024

(dalam triliun Rupiah)

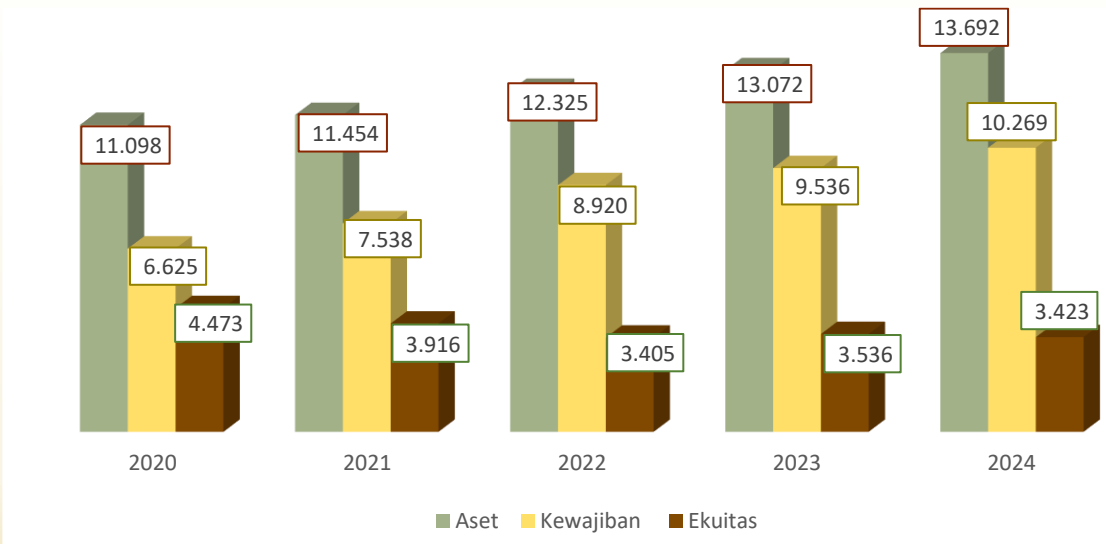

D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. Aset lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp906.115.615.707.206 dan Rp894.407.139.081.901. Ringkasan Aset Lancar disajikan sebagai berikut.

Aset Lancar	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Kas dan Setara Kas	429.668.592.676.299	430.715.095.759.788	(0,24)
Uang Muka dari Rekening Khusus	47.984.869.011	44.479.546.335	7,88
Investasi Jangka Pendek	41.604.232.972.240	35.230.294.868.007	18,09
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	6.094.076.708.176	9.638.827.128.108	(36,78)
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	33.545.755.681.226	19.541.282.967.950	71,67
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	15.016.056.040.236	15.268.713.521.615	(1,65)
Piutang Jangka Pendek (Bersih)	174.755.223.244.133	179.785.295.421.158	(2,80)
Persediaan	205.383.693.515.885	204.183.149.868.940	0,59
Jumlah	**906.115.615.707.206**	**894.407.139.081.901**	**1,31**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.708.476.625.305 atau 1,31 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2023. Kenaikan Aset Lancar terutama berasal dari kenaikan Uang Muka Belanja (*prepayment*) sebesar Rp14.004.472.713.276 atau 71,67 persen. Di sisi lain Piutang Jangka Pendek (bersih) mengalami penurunan sebesar Rp5.030.072.177.024 atau 2,80 persen.

D.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

D.2.1.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum (BU) dalam Rupiah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp180.923.940.557.096 dan Rp149.595.370.820.262, mengalami kenaikan sebesar Rp31.328.569.736.834 atau 20,94 persen dibandingkan tahun 2023. Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah disajikan sebagai berikut.

Nama dan Nomor Rekening	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah	1.412.484.191.184	3.397.837.721.385
Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH	2.874.137.905.125	2.711.147.196.694
Rekening Lain BI SAL	157.278.533.057.481	121.859.042.325.583
Rekening Kas Penempatan Dalam Rupiah	-	6.336.895.305.865
Rekening Khusus dalam Rupiah	6.134.714.082.349	4.698.022.677.397
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-Gaji	9.506.048.384.323	8.602.239.471.956
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat-NonGaji	2.399.943.739.619	1.182.832.010.487
Rekening Investasi Pemerintah BUN	1.318.079.197.015	807.354.110.895
Jumlah	**180.923.940.557.096**	**149.595.370.820.262**

Rekening yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah peningkatan saldo pada Rekening Lain BI SAL dan RPKBUNP.

Peningkatan saldo pada Rekening Lain BI SAL antara lain disebabkan adanya pengembalian atas penggunaan SAL untuk memenuhi kebutuhan kas temporer (peminjaman SAL) tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp90.000.000.000.000 yang dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2024 serta Pemenuhan Dana SAL BUN sebesar Rp1.800.490.731.898 pada tanggal 28 Juni 2024. Selain itu, peningkatan saldo pada RPKBUNP Rp2.120.920.641.499 dari transaksi *dropping* dana untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Januari 2025 yang dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025.

D.2.1.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing

Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum (BU) dalam Valuta Asing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp169.108.412.005.997 dan Rp193.240.328.220.314, mengalami penurunan sebesar Rp24.131.916.214.317 atau 12,49 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2023. Rekening ini merupakan rekening pemerintah di BI dan Bank

Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Rincian Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Rekening KUN Dalam Valuta USD	537.263.479.023	756.926.477.074
Rekening KUN Dalam Valuta Yen	21.666.604.858	6.099.000.486.364
Rekening KUN dalam Valuta Euro	23.223.159.124	15.262.144.761
Rekening Kas Penempatan Dalam USD	3.672.424.884.520	39.874.716.757.070
Rekening Kas Penempatan Dalam Euro	21.602.777.733.225	15.255.402.886.248
Rekening Kas Penempatan Dalam Yen	5.977.775.835.318	-
Kas di Rekening SAL dalam Valuta USD	135.969.518.719.521	129.927.177.044.667
Rekening Khusus dalam Valas	1.303.761.590.408	1.311.842.424.130
Jumlah	**169.108.412.005.997**	**193.240.328.220.314**

Penurunan terbesar berasal dari Rekening Kas Penempatan Dalam USD senilai Rp36.202.291.872.550 atau 90,79 persen yang merupakan transaksi pembayaran/pelunasan pokok serta pembayaran bunga SBN yang jatuh tempo.

D.2.1.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum. Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.936.262.585.075 dan Rp3.507.746.680.531, mengalami kenaikan sebesar Rp6.428.515.904.544 atau 183,27 persen. Kenaikan terbesar berasal dari Rekening Pengelolaan Migas yang naik sebesar Rp6.156.473.487.688 atau 419,82 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2023. Berdasarkan peruntukannya, rekening pengelolaan migas ini dibuka untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Aliran uang masuk pada rekening ini dikategorikan sebagai penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam yang meliputi hasil penjualan minyak mentah, hasil penjualan gas alam, dan *overlifting*.

Rincian Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya disajikan sebagai berikut

Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Rekening Penerimaan - Dana Investasi	-	(10)
Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	-	27
Rekening Penerimaan Migas	7.622.914.791.421	1.466.441.303.733
Rekening Penerimaan Panas Bumi	2.082.717.172.958	1.912.870.273.103
Rekening Dana Bergulir	-	40.878.955
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji	229.354.385.423	127.419.028.658
Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	2.690.900	-
Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	1.273.544.373	975.196.065
Jumlah	**9.936.262.585.075**	**3.507.746.680.531**

Rincian Saldo Kas di Rekening Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

D.2.1.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN

Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp697.379.362.618 dan Rp5.128.787.424.755, mengalami penurunan sebesar Rp4.431.408.062.137 atau 86,40 persen.

Nilai Kas di rekening kas di KPPN terdiri dari saldo pada Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) sebesar Rp697.379.362.611, dan saldo pada Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7.

Nilai tersebut merupakan penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang belum dilimpahkan ke RKUN. Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo rupiah dan setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 pada *collecting agent* yang belum dilimpahkan ke RKUN.

Terdapat selisih sebesar Rp102.821.725.759 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp697.379.362.618 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp800.202.088.377. Adapun rincian selisih sebesar Rp102.821.725.759 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih	Keterangan	Nilai	Tindak Lanjut Atas Selisih
RK ONLY	Transaksi yang hanya dicatat di Rekening CA, namun bukan transaksi MPN	(1.022.971.994)	Koreksi pendebetan di rekening CA
DUPLIKASI	Pencatatan dobel (lebih dari satu kali) kode billing pada catatan rekening CA	(160.896.147)	Koreksi pendebetan di rekening CA
SETTLEMENT ONLY	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di Rekening CA	3.468.036	Koreksi pengkreditan di rekening CA
PENDEBETAN RK	Pengurangan di rekening CA yang bukan transaksi pelimpahan ke negara	195.451	Koreksi pengkreditan di rekening CA
PELIMPAHAN DANA TALANGAN	Pengurangan di rekening CA memiliki nomor sakti namun tidak ditemukan di BI	(1.081)	Koreksi pendebetan di rekening CA
PERBEDAAN PENCATATAN	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di settlement	(101.642.244.612)	Tidak ada tindak lanjut karena akan sama di periode berikutnya
BEDA NOMINAL	Nominal yang tercatat pada CA berbeda dengan yang seharusnya terdapat di settlement	(275.427)	Koreksi pendebetan di rekening CA
KOREKSI LAIN-LAIN		1.000.000	-
PEMBULATAN	Pembulatan atas setoran yang memiliki desimal	15	-
Total selisih		**(102.821.725.759)**	

Rincian Kas di Rekening Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 7.A.**

D.2.1.1.1.5. Kas dalam Transito

Kas dalam Transito per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.750.411.765 dan Rp4.930.665.723. Kas Dalam Transito pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.180.253.958 atau 44,22 persen dibandingkan periode akhir tahun 2023, disebabkan bertambahnya aktivitas non anggaran pemerintah yang melibatkan rekening-rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN

Nilai Kas dalam Transito tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Rincian Kas dalam Transito sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kas Dalam Transito BUN	2.750.411.765	800.786.851
Selisih Kiriman Uang	-	4.129.878.872
Jumlah	**2.750.411.765**	**4.930.665.723**

D.2.1.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp230.036.155.068 dan Rp197.710.858.794, mengalami kenaikan sebesar Rp32.325.296.274 atau 16,35 persen. Kas di Bendahara Pengeluaran yang signifikan terdapat pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp132.479.164.274, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp41.477.233.276, dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp16.763.297.761.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetor/ dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Lampiran 7.B**.

D.2.1.1.1.7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.763.197.575 dan Rp318.602.129.457, mengalami penurunan sebesar Rp303.838.931.882 atau 95,37 persen. Kas di Bendahara Penerimaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp7.653.639.038 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebesar Rp2.512.397.000.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada **Lampiran 7.B**.

D.2.1.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.413.383.992.003 dan Rp21.596.978.800.469, mengalami penurunan sebesar Rp8.183.594.808.466 atau 37,89 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain Uang Persediaan dan bendahara penerimaan. Nilai tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan sumber dan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L	**13.408.384.012.403**	**16.588.864.124.902**
Setara Kas lainnya	60.254.988.965	221.957.000
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	613.612.958.067	500.941.742.665
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	10.552.112.799.126	13.992.553.217.607
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	17.762.165.636	6.336.318.514
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.269.270.357.075	1.127.962.631.955
Kas Lainnya di BLU	877.370.743.534	955.593.582.161
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	18.000.000.000	5.254.675.000
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	**10.557.112.778.726**	**19.000.667.893.174**
Penempatan di Bank Umum	-	5.000.000.000.000
Setara Kas lainnya	5.190	709
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000.000	8.114.674.858
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
3. Penyesuaian Kas Lainnya dan Setara Kas pada LKPP	**(10.552.112.799.126)**	**(13.992.553.217.607)**
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	(10.552.112.799.126)	(13.992.553.217.607)
Jumlah	**13.413.383.992.003**	**21.596.978.800.469**

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L yang signifikan terdapat pada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp6.997.293.790.099 dan pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp2.076.995.501.323 yang hampir seluruhnya berupa Kas Lainnya di K/L dari Hibah dalam rangka Pemilihan Umum. Terdapat saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp18.000.000.000 pada Kejaksaan RI.
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
a. BA 999.00 Kuasa BUN	10.552.112.773.536	18.992.553.217.607
b. BA 999.07 Pengelola Subsidi	5.190	709
c. BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya	5.000.000.000	8.114.674.858
Jumlah	**10.557.112.778.726**	**19.000.667.893.174**

   1) Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.00 sebesar Rp10.552.112.773.536 berupa Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Sudah Disahkan. Nilai tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab K/L yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima K/L dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2024.
   2) Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp5.190 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2024.
   3) Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp5.000.000.000 merupakan dana Bantuan Masyarakat pada Istana Kepresidenan Jakarta.
3. Penyesuaian Kas Lainnya dan Setara Kas pada LKPP sebesar minus Rp10.552.112.799.126 merupakan eliminasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada BUN yang juga disajikan pada K/L. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas dapat dilihat pada **Lampiran 7.B**.

D.2.1.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.341.664.409.102 dan Rp57.124.640.159.483, atau mengalami penurunan sebesar Rp1.782.975.750.381 atau 3,12 persen. Kas pada BLU merupakan nilai dari Kas pada BLU yang sudah disahkan dikurangi reklasifikasi Kas pada BLU yang sudah disahkan ke Investasi Jangka Pendek BLU dan Kas BLU Dibatasi Penggunaannya, ditambah Kas pada BLU yang belum disahkan. Rincian Reklasifikasi Kas pada BLU yang sudah disahkan dapat dilihat pada **Lampiran 7.I**.

Kas pada BLU yang sudah disahkan merupakan nilai pengesahan Kas BLU melalui KPPN dengan penerbitan SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut.

Kas pada BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kejaksaan RI	13.186.465.952	-
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	998.572.414.289	854.705.264.574
BLU di Kementerian Pertahanan	566.097.812.030	553.114.867.451
BLU di Kementerian Keuangan	32.306.552.238.760	36.953.238.523.654
BLU di Kementerian Pertanian	13.662.013.011	26.032.774.492
BLU di Kementerian Perindustrian	191.453.281.515	146.398.361.360
BLU di Kementerian ESDM	220.387.215.423	208.706.324.664
BLU di Kementerian Perhubungan	1.377.305.553.514	1.240.694.784.229
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	4.171.638.508.128	3.242.933.442.879
BLU di Kementerian Kesehatan	4.091.185.559.358	3.995.807.026.504
BLU di Kementerian Agama	1.855.069.270.635	2.216.226.841.908
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	210.657.196.390	30.779.421.970
BLU di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.083.587.930	1.274.407.201
BLU di Kementerian KUKM	1.408.789.158.664	1.301.700.029.797
BLU di Kementerian Kominfo	5.750.762.347.424	4.185.981.614.100
BLU di Kepolisian RI	1.091.354.252.832	1.300.989.019.945
BLU Kementerian Pemuda dan Olah Raga	207.579.666.192	199.654.656.112
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	855.234.483.479	654.557.041.955
BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	10.093.383.576	5.945.830.464
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	5.899.926.224
Jumlah pada K/L	**55.341.664.409.102**	**57.124.640.159.483**
Bendahara Umum Negara	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Jumlah pada K/L dan BUN	**152.314.943.159.860**	**149.518.218.680.204**
Penyesuaian Kas BLU pada LKPP	(96.973.278.750.758)	(92.393.578.520.721)
Jumlah	**55.341.664.409.102**	**57.124.640.159.483**

Penyesuaian Kas BLU pada LKPP sebesar minus Rp96.973.278.750.758 merupakan eliminasi saldo Kas BLU yang sudah disahkan pada BUN.

D.2.1.1.2. Uang Muka Rekening Khusus

Uang Muka Rekening Khusus per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.984.869.011 dan Rp44.479.546.335, mengalami kenaikan sebesar Rp3.505.322.676 atau 7,88 persen.

Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun Uang Muka Rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus). Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan. Rincian Uang Muka Rekening Khusus disajikan sebagai berikut.

Lender	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
ADB	189.391.819	5.565.010.548
IFAD	1.338.906.116	237.160.000
Bank Dunia	46.045.990.247	34.143.459.515
IDB	44.160.000	342.708.000
UNI EROPA	17.997.299	-
KFW	348.423.530	4.191.208.272
Jumlah	**47.984.869.011**	**44.479.546.335**

D.2.1.1.3. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp41.604.232.972.240 dan Rp35.230.294.868.007, mengalami kenaikan sebesar Rp6.373.938.104.233 atau 18,09 persen.

Nilai Investasi Jangka Pendek BLU terbesar pada Kementerian Keuangan antara lain pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp21.276.764.613.665 dan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp12.184.810.755.807.

Investasi Jangka Pendek merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan yang keseluruhan nilai tersebut merupakan Investasi Jangka Pendek BLU berupa deposito yang berada di BLU.

Rincian Investasi Jangka Pendek BLU disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Pendek	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU pada Kementerian Pertahanan	11.000.000.000	42.000.000.000
BLU pada Kementerian Keuangan	36.603.659.524.153	28.449.253.233.849
BLU pada Kementerian Pertanian	119.140.383.548	131.432.327.661
BLU pada Kementerian ESDM	100.000.000.000	68.000.000.000
BLU pada Kementerian Perhubungan	147.155.656.455	39.048.823.536
BLU pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	761.617.180.642	1.098.388.111.114
BLU pada Kementerian Kesehatan	2.180.818.227.442	2.622.972.371.847
BLU pada Kementerian Agama	587.392.000.000	240.250.000.000
BLU pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan	23.450.000.000	110.950.000.000
BLU pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.025.000.000.000	2.325.000.000.000
BLU pada Kepolisian RI	45.000.000.000	103.000.000.000
Jumlah	**41.604.232.972.240**	**35.230.294.868.007**

D.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.094.076.708.176 dan Rp9.638.827.128.108, mengalami penurunan sebesar Rp3.544.750.419.932 atau 36,78 persen. Rincian Belanja Dibayar Dimuka disajikan sebagai berikut.

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Pada K/L	6.066.700.731.523	9.615.908.359.766
2. Pada BUN	30.664.150.302	22.930.421.699
3. Penyesuaian LKPP	(3.288.173.649)	(11.653.357)
Jumlah	**6.094.076.708.176**	**9.638.827.128.108**

1. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada K/L yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp3.515.858.781.004 antara lain berupa Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang masih berada di rekening *Escrow* dan layanan di muka untuk beasiswa, riset, layanan dana abadi kebudayaan, dan layanan dana abadi perguruan tinggi. Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp446.206.725.856 antara lain berupa belanja bantuan pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/Lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.
2. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada BUN merupakan Belanja Lain-lain Dibayar di Muka pada SKK Migas dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja.

3. Penyesuaian LKPP merupakan eliminasi transaksi resiprokal utang piutang antar K/L.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.5. Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.545.755.681.226 dan Rp19.541.282.967.950, mengalami kenaikan sebesar Rp14.004.472.713.276 atau 71,67 persen. Rincian Uang Muka Belanja disajikan sebagai berikut.

.Uang Muka Belanja (*prepayment*)	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Pada K/L	33.545.745.681.226	19.541.272.967.950
2. Pada BUN	10.000.000	10.000.000
Jumlah	**33.545.755.681.226**	**19.541.282.967.950**

1. Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada K/L yang paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp32.557.126.218.616 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp343.675.723.250. Keduanya antara lain berupa uang muka belanja barang dan modal.
2. Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada BUN adalah Uang Muka Belanja Lain-Lain pada SKK Migas.

   Rincian Uang Muka Belanja dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.6. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.016.056.040.236 dan Rp15.268.713.521.615, mengalami penurunan sebesar Rp252.657.481.379 atau 1,65 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Pada K/L	16.508.594.386.704	13.606.568.766.196
2. Pada BUN	6.369.768.939.715	4.303.538.793.658
3. Penyesuaian LKPP	(7.862.307.286.183)	(2.641.394.038.239)
Jumlah	**15.016.056.040.236**	**15.268.713.521.615**

1. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada K/L yang signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp9.072.161.415.168. Nilai tersebut sebagian besar merupakan potensi pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) yang belum direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan berita acara hasil verifikasi penghitungan belanja subsidi perpajakan oleh BPK. Selain itu nilai signifikan juga terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.813.623.116.465 antara lain berupa pendapatan atas layanan Palapa Ring dan BTS BAKTI serta pendapatan BHP Telekomunikasi yang belum diterima.
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada BUN per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.369.768.939.715 dengan rincian sebagai berikut.
   a. BA 999.01 sebesar Rp3.291.777.706.915 merupakan perhitungan akrual kontribusi BI.
   b. BA 999.03 sebesar Rp23.631.514.571 merupakan perhitungan akrual bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pendapatan akrual imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan, dan Pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP belum digulirkan BP Tapera.
   c. BA 999.07 sebesar Rp2.282.238.051.794 antara lain merupakan kelebihan pembayaran belanja subsidi pupuk PT. Pupuk Kalimantan Timur TA.2020 sebesar Rp1.942.332.641.125, kelebihan pembayaran subsidi bunga KPR sebesar Rp912.110.186 dan beban subsidi bunga kredit program lainnya sebesar Rp338.993.300.483.
   d. BA 999.99 sebesar Rp772.121.666.435 merupakan kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS, pendapatan hasil kegiatan usah panas bumi, dan pendapatan atas pengelolaan kas negara.
3. Penyesuaian sebesar minus Rp7.862.307.286.183 merupakan penyesuaian atas transaksi resiprokal pengakuan utang dan piutang antara Kemenkeu BA 015 dan BA BUN terkait Subsidi Pajak DTP.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.1.1.7. Piutang Jangka Pendek
D.2.1.1.7.1. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp116.122.193.803.295 dan Rp117.416.962.637.093, mengalami penurunan sebesar Rp1.294.768.833.798 atau 1,10 persen.

Nilai Piutang Perpajakan bersih per 31 Desember 2024 yang dihitung berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) mencapai Rp73.748.909.094.768. Nilai ini berasal dari nilai bruto sebesar Rp116.122.193.803.295 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp42.373.284.708.527. Piutang Perpajakan hanya disajikan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi disajikan sebagai berikut.

Piutang Perpajakan	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Direktorat Jenderal Pajak		
Nilai Bruto	75.335.838.609.367	73.722.552.156.555
Penyisihan	(40.083.949.796.699)	(39.913.599.945.722)
Nilai Neto	**35.251.888.812.668**	**33.808.952.210.833**
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai		
Nilai Bruto	40.786.355.193.928	43.694.410.480.538
Penyisihan	(2.289.334.911.828)	(3.566.912.519.482)
Nilai Neto	**38.497.020.282.100**	**40.127.497.961.056**
Jumlah Bruto	**116.122.193.803.295**	**117.416.962.637.093**
Penyisihan Piutang Perpajakan	(42.373.284.708.527)	(43.480.512.465.204)
Jumlah Neto	**73.748.909.094.768**	**73.936.450.171.889**

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis piutang pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Perpajakan	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang Pajak PPh Migas	147.019.152.990	99.090.478.059	48,37
Piutang Pajak PPh Non Migas	32.827.024.753.878	32.280.360.977.977	1,69
Piutang Pajak PPN	27.932.019.210.370	27.599.374.735.897	1,21
Piutang Pajak PPnBM	101.442.469.266	114.404.746.912	(11,33)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	5.221.587.726.415	6.603.088.981.006	(20,92)
Piutang Cukai dan Bea Materai	37.490.433.237.056	38.979.972.933.478	(3,82)
Piutang Pajak Lainnya	9.367.107.805.981	7.205.391.912.158	30,00
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	2.898.041.429.932	4.379.963.137.007	(33,83)
Piutang Bea Masuk Tindakan	137.518.017.407	155.314.734.599	(11,46)
Jumlah	**116.122.193.803.295**	**117.416.962.637.093**	**(1,10)**

Rincian Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih per jenis Piutang Perpajakan disajikan sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Perpajakan Tidak Tertagih	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PPh Migas	50.146.567.619	43.579.886.450	15,07
Piutang Pajak PPH Non Migas	16.268.222.495.166	16.035.729.928.195	1,45
Piutang Pajak PPN	15.090.747.245.727	15.212.235.392.718	(0,80)
Piutang Pajak PPnBM	61.420.779.254	63.419.576.561	(3,15)
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	1.419.911.632.044	2.628.118.054.686	(45,97)
Piutang Cukai dan Bea Materai	270.762.422.858	255.090.566.452	6,14
Piutang Pajak Lainnya	7.210.049.098.591	5.951.679.580.570	21,14
Piutang Pajak Perdagangan Internasional	2.002.024.467.268	3.290.659.479.572	(39,16)
Jumlah	**42.373.284.708.527**	**43.480.512.465.204**	(2,55)

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 9.A dan 9.B.**

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang pajak daluwarsa per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.409.264.115.175, penambahan selama tahun 2024 sebesar Rp9.127.801.006.411, pengurangan selama tahun 2024 sebesar Rp5.784.878.036.806, sehingga nilai piutang pajak daluwarsa per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.752.187.084.780. Dari Transaksi Penambah

sebesar Rp9.127.801.006.411, yang signifikan berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp7.526.248.923.977.

Rincian piutang pajak daluwarsa dapat dilihat pada **Lampiran 9.C**.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh WP. Terhadap pajak terutang yang disetujui WP wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, WP dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*. Dalam praktiknya, sebagian wajib pajak memilih opsi melakukan pembayaran terlebih dahulu nilai pajak terutang yang tidak disetujui sebelum upaya hukumnya memperoleh keputusan hukum yang bersifat *inkracht.*

D.2.1.1.7.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp362.283.604.412.936 dan Rp346.336.409.911.621, mengalami kenaikan sebesar Rp15.947.194.501.315 atau 4,60 persen.

Kenaikan nilai Piutang Bukan Pajak terutama disebabkan penambahan piutang dividen dari PT Bank Rakyat Indonesia Tahun Buku 2024 sebesar Rp10.882.481.878.260 pada BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah. Selain itu kenaikan Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp2.656.355.582.669 terbesar berupa Piutang uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi yang *inkracht* dan Piutang denda tilang verstek dari perkara pelanggaran lalu-lintas yang *inkracht*.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp88.654.744.437.321, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp362.283.604.412.936 dikurangi Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp273.628.859.975.615. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Piutang Bukan Pajak (bruto)	**362.283.604.412.936**	**346.336.409.911.621**
Pada BUN [1)]	253.122.402.777.910	241.872.476.098.171
Pada K/L [2)]	109.215.685.641.222	104.521.092.242.348
Penyesuaian LKPP [3)]	(54.484.006.196)	(57.158.428.898)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	**(273.628.859.975.615)**	**(253.235.759.667.436)**
Pada BUN	(212.659.822.313.426)	(200.923.692.003.913)
Pada K/L	(60.995.806.372.619)	(52.341.563.646.681)
Penyesuaian LKPP	26.768.710.430	29.495.983.158
Piutang Bukan Pajak (bersih)	**88.654.744.437.321**	**93.100.650.244.185**

1. Piutang Bukan Pajak pada K/L yang signifikan terdapat pada Kejaksaan RI sebesar Rp58.524.385.519.518, Kementerian ESDM sebesar Rp38.079.395.517.275 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp4.700.024.130.934. Piutang Bukan Pajak pada Kejaksaan RI sebagian besar merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, piutang denda dan biaya perkara tilang *verstek*. Pada Kementerian ESDM, sebagian besar merupakan Piutang *Signature Bonus*, piutang *Firm Commitment,* dan Piutang atas Tagihan Royalti/ DHPB, Iuran Tetap, denda *smelter* dan denda DMO. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, piutang berasal dari pendapatan penggunaan kawasan hutan. Rincian Piutang Bukan Pajak Pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 10.**
2. Piutang Bukan Pajak pada BUN disajikan sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BUN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
a. Piutang Dividen pada BA 999.03	10.924.958.559.900	49.577.182.163
b. Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05	14.014.954.200.303	12.892.897.399.321
c. Piutang Subsidi pada BA 999.07	12.350.000.000	12.350.000.000
d. Piutang Belanja Lain-lain pada BA 999.08	299.050.825.309	310.101.704.547
e. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	227.871.089.192.398	228.607.549.812.140
Jumlah	**253.122.402.777.910**	**241.872.476.098.171**

a. Piutang Dividen (Bagian Laba BUMN) pada BA 999.03 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.924.958.559.900 dan Rp49.577.182.163, mengalami kenaikan sebesar Rp10.875.381.377.737 atau 21.936,26 persen, dengan rincian sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.03	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Pokok Dividen	10.906.308.456.707	23.826.578.448
Denda	18.609.415.075	25.750.603.715
Piutang Lainnya	40.688.118	-
Jumlah	**10.924.958.559.900**	**49.577.182.163**

Nilai Piutang Lainnya (Bagian Laba BUMN) naik sebesar Rp10.875.381.377.737 dengan rincian:

1) Pengurangan dari piutang dari Pembayaran Dividen PT Inhutani V sebesar Rp692.788.265 dan PT Perkebunan Nusantara II sebesar Rp6.448.400.376.
2) Penambahan piutang dari dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia Tahun Buku 2024 sebesar Rp10.882.481.878.260. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2024 tercatat menjadi sebesar Rp10.924.917.871.782 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp10.906.308.456.707 dan denda sebesar Rp18.609.415.075.
3) Penambahan piutang lainnya pada UAKPA DJPK sebesar Rp40.688.118. Nilai tersebut berasal dari koreksi PNBP bunga PT SMI yang belum disetor ke kas negara.

b. Piutang Transfer ke Daerah pada BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah (BA 999.05) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.014.954.200.303 dan Rp12.892.897.399.321, mengalami kenaikan sebesar Rp1.122.056.800.982 atau 8,70 persen. Rincian Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.05	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1) Piutang Transfer ke Daerah	12.316.984.195.966	10.498.054.168.192
a) Piutang DBH	9.795.347.278.000	6.370.424.360.396
b) Piutang DAK Non Fisik	2.497.771.161.333	4.103.787.260.228
c) Piutang DK DIY	23.865.756.633	23.842.547.568
2) Piutang Transfer ke Daerah Lainnya – Dana Desa	80.977.185.711	2.188.819.277
3) Piutang TKD Diestimasi – DBH Diestimasi	1.616.992.818.626	2.392.654.411.852
Jumlah	**14.014.954.200.303**	**12.892.897.399.321**

1.a) Piutang Transfer Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.795.347.278.000, mengalami kenaikan sebesar Rp3.424.922.917.604 atau 53,76 persen dari 31 Desember TA 2023 sebesar Rp6.370.424.360.396. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi penerimaan PPh dan PBB bagian daerah serta realisasi penerimaan SDA, terutama Migas, Panas Bumi, dan Minerba. Selain itu, terdapat pula penyelesaian sebagian lebih bayar DBH.

1.b) Piutang DAK Non Fisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.497.771.161.333, mengalami penurunan sebesar Rp1.606.016.098.895 atau 39,13 persen dari 31 Desember 2023 sebesar Rp4.103.787.260.228. Piutang DAK Non Fisik antara lain berupa Piutang Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND dan Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND.

1.c) Piutang Transfer ke Daerah Dana Keistimewaan DIY per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.865.756.633, mengalami kenaikan sebesar Rp23.209.065 atau 0,10 persen dari 31 Desember TA 2023 sebesar Rp23.842.547.568. Nilai tersebut merupakan kelebihan penyaluran DK DIY.

Rincian Piutang Transfer ke Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

2) Piutang Dana Desa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp80.977.185.711 dan Rp2.188.819.277 mengalami kenaikan sebesar Rp78.788.366.434 atau 3.599,58 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh terdapatnya pengakuan piutang dana desa berdasarkan data potongan SPM Penyaluran periode tahun 2024.

3) Piutang TKD Diestimasi – DBH Diestimasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.616.992.818.626 dan Rp2.392.654.411.852 mengalami penurunan sebesar Rp775.661.593.226 atau 32,42 persen. Nilai Piutang TDK Diestimasi merupakan kelebihan bayar DBH.

c. Piutang Subsidi pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp12.350.000.000. Piutang tersebut merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih.

d. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp299.050.825.309 dan Rp310.101.704.547, mengalami penurunan sebesar Rp11.050.879.238 atau 3,56 persen. Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08 terdiri atas Piutang PNBP dan Piutang Lainnya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08 sebagai berikut.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.08	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1) Kementerian Kominfo (BA 059)		9.097.887.689
2) Kementerian Keuangan (BA 015)	7.101.770.243	6.398.716.692
3) Kementerian Pertanian (BA 018)	288.901.122.353	288.901.122.353
4) MPP Kartu Prakerja	2.445.234.900	5.269.130.000
5) SKK Migas	602.697.813	434.847.813
Jumlah	**299.050.825.309**	**310.101.704.547**

Keterangan: pada BA Pelaksana Kementerian Pertanian sebesar Rp288.901.122.353 merupakan piutang atas belanja lain-lain Cadangan Benih Nasional (CBN).

e. Piutang Bukan Pajak pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp227.871.089.192.398 dan Rp228.607.549.812.140, mengalami penurunan sebesar Rp736.460.619.742 atau 0,32 persen. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1) Piutang pada UAPBUN TK DJPb	107.792.038.684	133.599.138.234
2) Piutang pada UAPBUN TK DJA	15.778.396.457.441	16.892.965.586.621
3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN	211.984.900.696.273	211.580.985.087.285
Jumlah	**227.871.089.192.398**	**228.607.549.812.140**

1) Piutang Pada UAPBUN TK DJPb sebesar Rp107.792.038.684, antara lain merupakan Piutang kelebihan pencairan belanja pensiun kepada PT Taspen dan PT Asabri.

2) Piutang pada UAPBUN TK DJA sebesar Rp15.778.396.457.441, merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi.

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 UAPBUN TK DJA	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Hasil Penjualan Minyak	8.436.256.854.277	9.126.643.089.767
Hasil Penjualan Gas	4.516.099.950.074	2.653.801.451.359
Overlifting KKKS	1.898.439.889.435	4.362.688.151.564
PNBP Migas lainnya	927.599.763.655	748.416.285.947

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 UAPBUN TK DJA	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kekurangan Setoran Bagian Pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi	-	1.416.607.984
Jumlah	**15.778.396.457.441**	**16.892.965.586.621**

3) Piutang pada UAPBUN TK DJKN sebesar Rp211.984.900.696.273 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak pada BA 999.99 UAPBUN TK DJKN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
a) Piutang Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI	211.957.341.532.847	211.549.299.194.630
i. Aset Kredit eks BPPN	101.677.737.767.431	103.094.434.266.065
ii. Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	100.789.774.362.132	98.650.243.861.984
iii. Piutang eks BDL	9.489.829.403.284	9.804.621.066.581
b) Piutang pemanfaatan sewa BMN pada KKKS	27.559.163.426	31.685.892.655
Jumlah	**211.984.900.696.273**	**211.580.985.087.285**

a.i. Aset Kredit eks BPPN terdiri dari Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN) sebesar Rp49.747.446.548.535, Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp33.787.431.802.566, Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN sebesar Rp15.464.700.114.762 dan Aset Kredit ATK Lainnya sebesar Rp2.678.159.301.568. Rincian Aset Kredit Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 13.A.**

a.ii. Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkelolakan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan dan tidak diserahkelolakan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero). Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA terdiri dari Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN sebesar Rp98.867.673.004.271 dan Aset kredit yang masih dikelola DJKN sebesar Rp1.922.101.357.860. Rincian Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Lampiran 13.B**.

a.iii. Piutang eks BDL terdiri dari Eks Dana Talangan sebesar Rp7.289.839.895.890 dan Eks Dana Penjaminan sebesar Rp2.199.989.507.394. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

b) Piutang pemanfaatan sewa BMN pada KKKS merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode 1 tahun.

3. Piutang Bukan Pajak Penyesuaian pada LKPP sebesar minus Rp54.484.006.196 merupakan eliminasi transaksi resiprokal Piutang Bukan Pajak dengan utang yang dicatat pada entitas yang dikonsolidasikan dalam LKPP. Transaksi resiprokal berupa transaksi resiprokal BHP Frekuensi Kementerian Kominfo dengan utang BHP frekuensi pada LPP TVRI, transaksi resiprokal Klaim *Covid*-19 Kementerian Kesehatan dengan Rumah Sakit lingkup Kemhan/TNI dan Kepolisian RI, dan transaksi resiprokal utang dan piutang lainnya.

D.2.1.1.7.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.973.296.910 dan Rp6.303.880.875, mengalami penurunan sebesar Rp1.330.583.965 atau 21,11 persen. Bagian Lancar TPA merupakan saldo Piutang TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar Rp3.439.577.704 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.973.296.910 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.533.719.206.

Bagian Lancar TPA terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp3.456.862.014 berupa estimasi nilai pembayaran sewa beli rumah negara, pada Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288 dan pada LPP RRI sebesar Rp295.882.608.

D.2.1.1.7.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.927.723.868 dan Rp51.329.053.281, mengalami penurunan sebesar Rp3.401.329.413 atau 6,63 persen. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan saldo Piutang Tagihan TP/TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp13.842.478.831 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp47.927.723.868 dikurangi penyisihan sebesar Rp34.085.245.037. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang signifikan terdapat pada Badan Pusat Statistik sebesar Rp15.227.357.084, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp11.701.328.857 dan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp9.596.500.361.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

D.2.1.1.7.5. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.286.136.965.214 dan Rp20.910.716.095.280, mengalami kenaikan sebesar Rp375.420.869.934 atau 1,80 persen. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp7.790.544.090.574 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp21.286.136.965.214 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman sebesar Rp13.495.592.874.640.

Rincian Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.672.218.564.890	12.335.896.343.702
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	8.293.593.433.556	8.140.563.689.625
Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrual	320.324.966.768	434.256.061.953
Jumlah Bruto	**21.286.136.965.214**	**20.910.716.095.280**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	(13.495.592.874.640)	(12.914.325.478.458)
Jumlah Neto	**7.790.544.090.574**	**7.996.390.616.822**

D.2.1.1.7.6. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.877.977.149.129 dan Rp7.658.986.809.661, mengalami kenaikan sebesar Rp218.990.339.468 atau 2,86 persen. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp378.689.473.536 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.877.977.149.129 dikurangi Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp7.499.287.675.593.

Rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya disajikan sebagai berikut.

	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1.	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L	159.337.432.891	152.247.628.482
2.	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN	7.718.639.716.238	7.506.739.181.179
a)	Pada BA 999.03 Investasi Pemerintah	40.000.000.000	33.500.000.000
b)	Pada BA 999.99 Transaksi Khusus	7.678.639.716.238	7.473.239.181.179
Jumlah Bruto		**7.877.977.149.129**	**7.658.986.809.661**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman		(7.499.287.675.593)	(7.294.561.085.168)
Jumlah Neto		**378.689.473.536**	**364.425.724.493**

1. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp159.233.218.891 merupakan bagian lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BLU LMAN atas tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam, pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebesar Rp54.426.000, dan pada Kementerian Perdagangan sebesar Rp49.788.000.
2. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN.
   a) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.03 merupakan bagian lancar atas piutang tunggakan Dana

Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas.

b) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BA 999.99 terdiri atas bagian lancar atas piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) Lapindo Brantas sebesar Rp2.708.785.209.470 dan bagian lancar piutang yang timbul sebagai akibat dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebesar Rp4.969.854.506.768.

D.2.1.1.7.7. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.030.989.502.636 dan Rp5.226.516.523.383, mengalami kenaikan sebesar Rp804.472.979.253 atau 15,39 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp3.627.079.386.979 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.030.989.502.636 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp2.403.910.115.657.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kejaksaan RI	4.537.797.042	-
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.036.195.977.971	1.063.525.938.532
BLU di Kementerian Pertahanan	280.352.723.025	330.537.313.885
BLU di Kementerian Keuangan	520.504.731.334	114.864.668.504
BLU di Kementerian Pertanian	1.573.354.605	586.350.000
BLU di Kementerian Perindustrian	1.346.154.025	2.736.153.860
BLU di Kementerian ESDM	123.774.041.795	95.727.230.868
BLU di Kementerian Perhubungan	74.567.969.555	76.386.459.075
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	235.227.999.708	223.868.946.781
BLU di Kementerian Kesehatan	2.416.733.540.357	2.085.137.875.656
BLU di Kementerian Agama	6.175.700.435	4.554.383.201
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	40.334.387.105	28.745.692.709
BLU di Kementerian KUKM	218.235.073.894	214.417.391.906
BLU di Kementerian Kominfo	289.890.515.409	237.141.534.883
BLU di Kepolisian RI	280.556.206.827	262.468.671.130
BLU di BPKPBPB Batam	572.807.942.199	531.837.819.441
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	25.281.088.002
Eliminasi Konsolidasi LKPP*	(71.824.612.650)	(71.300.995.050)
Jumlah Bruto	**6.030.989.502.636**	**5.226.516.523.383**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(2.403.910.115.657)	(1.233.577.705.038)
Jumlah Neto	**3.627.079.386.979**	**3.992.938.818.345**

*Terdapat penyesuaian konsolidasi pada LKPP berupa eliminasi transaksi resiprokal Utang Piutang Klaim Covid-19 antara rumah sakit lingkup Kementerian Pertahanan (TNI) dan Polri, serta eliminasi transaksi resiprokal utang piutang lainnya.

D.2.1.1.7.8. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp601.641.690.434 dan Rp439.971.307.053, mengalami kenaikan sebesar Rp161.670.383.381 atau 36,75 persen. Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp537.974.704.420 berasal dari nilai bruto sebesar Rp601.641.690.434 dikurangi Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp63.666.986.014.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU disajikan sebagai berikut.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kejaksaan RI	74.263.500	-
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	9.302.693.089	6.636.067.689
BLU di Kementerian Perindustrian	-	-
BLU di Kementerian ESDM	4.983.533.632	43.150.000
BLU di Kementerian Perhubungan	22.655.735.433	29.648.497.746
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	8.476.911.188	8.452.439.763
BLU di Kementerian Kesehatan	27.862.792.391	27.645.178.866

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kementerian Agama	52.948.411.737	65.179.685.494
BLU di Kementerian Perikanan dan Kelautan	19.780.175	35.235.000
BLU di Kementerian Kominfo	457.393.392.366	280.467.609.890
BLU di Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.241.600	1.452.510
BLU di Kementerian Pemuda dan Olahraga	18.655.800.000	21.298.800.000
Eliminasi Konsolidasi LKPP*	(1.296.054.772)	-
Jumlah Bruto	**601.641.690.434**	**439.971.307.053**
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(63.666.986.014)	(65.153.909.315)
Jumlah Neto	**537.974.704.420**	**374.817.397.738**

*Terdapat penyesuaian konsolidasi pada LKPP berupa eliminasi transaksi resiprokal Utang Piutang Klaim Covid-19 antara rumah sakit lingkup Kementerian Pertahanan (TNI) dan Polri, serta eliminasi transaksi resiprokal utang piutang lainnya.

D.2.1.1.7.9. Piutang PFK

Piutang PFK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp109.652.841, mengalami penurunan sebesar Rp109.652.841 atau 100 persen. Rincian Piutang PFK disajikan sebagai berikut.

Piutang PFK	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai	-	-
Piutang PFK 8% Gaji	-	-
Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu	-	109.652.841
Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	-	-
Piutang PFK 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri	-	-
Jumlah	**-**	**109.652.841**

D.2.1.1.7.10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp339.500.221.300.289 dan Rp318.262.010.449.930 mengalami kenaikan sebesar Rp21.238.210.850.358 atau 6,67 persen. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Pendek	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1.	Piutang Pajak	42.373.284.708.527	43.480.512.465.204
2.	Piutang Bukan Pajak	273.655.628.686.045	253.265.255.650.594
3.	Bagian Lancar TPA	1.533.719.206	1.540.372.126
4.	Bagian Lancar TP/TGR	34.085.245.037	36.580.667.186
5.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	13.495.592.874.640	12.914.325.478.458
6.	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.499.287.675.593	7.294.561.085.168
7.	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2.403.910.115.657	1.233.577.705.038
8.	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	63.666.986.014	65.153.009.315
9.	Penyesuaian Konsolidasi LKPP	(26.768.710.430)	(29.495.983.158)
	Jumlah	**339.500.221.300.289**	**318.262.010.449.931***

*Selisih Rp1 berupa pembulatan

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.373.284.708.527 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 9.A.**
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp273.655.628.686.045 merupakan Penyisihan Piutang Tidak Bukan Pajak pada KL sebesar Rp60.995.806.372.619 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada BUN sebesar Rp212.659.822.313.426.

   Kenaikan nilai penyisihan piutang bukan pajak terutama disebabkan kenaikan Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp11.714.079.497.590 pada BA BUN 999.99 Transaksi Khusus. Selain itu kenaikan nilai penyisihan piutang bukan pajak pada Kejaksaan RI sebesar Rp7.118.263.632.947.

   Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.533.719.206, merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPR, Kementerian KUKM, dan LPP RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.085.245.037. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 14.**
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.495.592.874.640.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.499.287.675.593.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.403.910.115.657 dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kejaksaan RI	22.688.986	-
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	1.026.787.729.498	102.295.347.715
BLU di Kementerian Pertahanan	23.063.399.132	15.080.082.454
BLU di Kementerian Keuangan	196.906.515.917	5.097.426.876
BLU di Kementerian Pertanian	15.492.423	2.931.750
BLU di Kementerian Perindustrian	571.652.248	504.312.915
BLU di Kementerian ESDM	44.149.423.273	34.465.388.369
BLU di Kementerian Perhubungan	23.702.603.095	13.119.730.086
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	67.649.687.229	64.847.641.525
BLU di Kementerian Kesehatan	383.751.328.224	396.562.778.091
BLU di Kementerian Agama	350.246.117	628.821.147
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	28.682.135.319	20.423.296.818
BLU di Kementerian KUKM	213.418.270.314	206.265.587.619
BLU di Kementerian Kominfo	228.980.018.540	198.837.700.251
BLU di Kepolisian RI	2.133.233.871	1.556.976.970
BLU di BPKPBPB Batam	163.725.691.471	168.856.321.245
BLU di Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	5.033.361.207
Jumlah	**2.403.910.115.657**	**1.233.577.705.038**

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 sebesar Rp63.666.986.014 dengan rincian sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU di Kejaksaan RI	371.318	-
BLU di Kementerian Sekretariat Negara	563.190.095	563.190.095
BLU di Kementerian Keuangan	6.091.105.706	5.069.298.388
BLU di Kementerian Perindustrian	-	-
BLU di Kementerian ESDM	24.917.665	4.315.000
BLU di Kementerian Perhubungan	12.828.693.918	13.742.523.885
BLU di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	6.301.147.471	4.689.831.898
BLU di Kementerian Kesehatan	13.173.052.720	15.411.438.135
BLU di Kementerian Agama	2.929.497.199	2.631.006.806
BLU di Kementerian Kelautan dan Perikanan	98.901	35.235.000
BLU di Kementerian Kominfo	3.099.104.813	1.707.362.845
BLU di Kepolisian RI	6.208	7.263
BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	18.655.800.000	21.298.800.000
Jumlah	**63.666.986.014**	**65.153.009.315**

9. Penyesuaian konsolidasi LKPP sebesar minus Rp26.768.710.430 adalah penyesuaian pada Piutang Bukan Pajak berupa eliminasi penyisihan piutang BHP Frekuensi Kementerian Kominfo yang merupakan transaksi resiprokal antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan LPP TVRI.

D.2.1.1.8. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp205.383.693.515.885 dan Rp204.183.149.868.940, mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.543.646.945 atau 0,59 persen. Rincian Persediaan disajikan sebagai berikut.

Persediaan	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Persediaan di K/L	205.381.203.272.102	204.181.933.423.550
2. Persediaan di BUN	2.490.243.783	1.216.445.390
Jumlah	**205.383.693.515.885**	**204.183.149.868.940**

1. Persediaan di Kementerian Negara/Lembaga
   Persediaan di K/L per 31 Desember 2024 sebesar Rp205.381.203.272.102. Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp93.501.050.844.556 yang sebagian besar berupa persediaan untuk diserahkan ke Masyarakat, Kementerian Pertahanan sebesar Rp72.860.284.745.766 yang sebagian besar merupakan persediaan suku cadang dan amunisi, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp12.261.654.795.838 yang sebagian besar berupa persediaan barang konsumsi, amunisi dan suku cadang.
2. Persediaan di Bendahara Umum Negara
   Persediaan di BUN per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.490.243.783 dan Rp1.216.445.390. Persediaan tersebut berupa barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan pada Istana Kepresidenan Jakarta, SKK Migas dan BP Batam.

Rincian Nilai Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 15.A**.

Dari nilai Persediaan sebesar Rp205.383.693.515.885, sebesar Rp113.546.733.630.436 merupakan Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat. Rincian Nilai Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 15.B**.

D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.391.554.633.530.362 dan Rp4.077.230.147.021.115. Rincian Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	Kenaikan / Penurunan (%)
Investasi Non Permanen	283.818.161.204.397	297.456.952.607.978	(4,59)
Investasi Permanen	4.107.736.472.325.965	3.779.773.194.413.137	8,68
Jumlah	**4.391.554.633.530.362**	**4.077.230.147.021.115**	**7,71**

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp314.324.486.509.247 atau 7,71 persen. Investasi Non Permanen mengalami penurunan sebesar Rp13.638.791.403.581 atau 4,59 persen sedangkan Investasi Permanen mengalami kenaikan sebesar Rp327.963.277.912.828 atau 8,68 persen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp283.818.161.204.397 dan Rp297.456.952.607.978. Investasi Non Permanen terdiri dari Dana Bergulir sebesar Rp16.831.926.939.422, Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp1.404.183.720.277 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sebesar Rp269.364.784.080.765 dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar Rp974.366.095.513.

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.107.736.472.325.965 dan Rp3.779.773.194.413.137.

D.2.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.831.926.939.422 dan Rp19.553.196.920.303, mengalami penurunan sebesar Rp2.721.269.980.881 atau 13,92 persen. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir tersebut sedang dalam proses perguliran atau *outstanding* di masyarakat atau pihak ketiga lainnya Rincian Dana Bergulir dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	5.197.083.516.907	5.468.632.719.703
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT)	621.633.119.508	3.890.340.379.540
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	8.399.546.659.356	8.019.775.521.545

Dana Bergulir	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	1.289.162.028.597	874.548.562.835
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI)	1.308.416.308.939	1.283.355.073.501
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	16.085.306.116	16.544.663.179
Jumlah	**16.831.926.939.423***	**19.553.196.920.303**

*Selisih Rp1 berupa pembulatan

1. Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.197.083.516.907 dan Rp5.468.632.719.703. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUMKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir. Rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM disajikan sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Piutang Dana Bergulir	4.855.061.286.975
NRB Dana Bergulir BA 044 s.d 31 Desember 2024	342.022.229.929
Saldo	**5.197.083.516.904***

*Selisih Rp3 karena pembulatan

2. Dana Bergulir pada Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp621.633.119.508 dan Rp3.890.340.379.540 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol-nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

   Rincian Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT disajikan sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	45.804.619.447	142.058.292.184
PT Pemalang Batang *Toll Road* / Pemalang – Batang	32.556.096.062	173.730.172.460
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	29.735.705.526	96.465.054.626
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang *Toll Road* / Pejagan – Pemalang	-	176.007.138.972
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	313.993.673.322
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	691.921.936.197
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	303.802.866.247	750.225.629.202
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	192.353.001.405	548.617.667.026
PT Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	525.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok *Port Tollways* / Cibitung-Cilincing	-	285.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung *Tollways* / Cimanggis-Cibitung	-	168.494.978.731
Jumlah	**621.633.119.508**	**3.890.340.379.540**

3. Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.399.546.659.356 dan Rp8.019.775.521.545. Terjadi kenaikan sebesar Rp379.771.137.811 atau 4,74 persen karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada penyalur/masyarakat.
4. Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.289.162.028.597 dan Rp874.548.562.835. Saldo Dana Bergulir merupakan saldo atas transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi).
5. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.308.416.308.939 dan Rp1.283.355.073.501, mengalami kenaikan sebesar Rp25.061.235.438 atau 1,95 persen dari saldo 31 Desember 2023.

6. Dana Bergulir pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.085.306.116 dan Rp16.544.663.179, mengalami penurunan sebesar Rp459.357.063 atau 2,78 persen yang berasal dari pengembalian pokok dana bergulir dari debitur.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.404.183.720.277 dan Rp1.562.930.032.200, mengalami penurunan sebesar Rp158.746.311.923 atau 10,16 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih Dana Bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	732.408.871.754	788.878.222.350
2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT)	77.806.059.690	404.676.785.693
3. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	68.004.075.492	67.200.566.340
4. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI)	422.224.809.462	245.257.000.363
5. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	87.654.597.764	40.372.794.275
6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	16.085.306.116	16.544.663.179
Jumlah	**1.404.183.720.278***	**1.562.930.032.200**

*Selisih Rp1 karena pembulatan

1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM
   Dana bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUMKM termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang dengan jumlah nilai dana bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp732.408.871.754 dan Rp788.878.222.350. Dari nilai Dana Bergulir sebesar Rp5.197.083.516.907, sebesar Rp1.156.397.692.501 dikategorikan macet.

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT)
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (Set. BPJT) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp77.806.059.690 dan Rp404.676.785.693. Rincian Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut.

BUJT/ Ruas Jalan Tol	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
PT Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	4.580.461.945	14.205.829.218
PT Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	3.255.609.606	17.373.017.246
PT Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	2.973.570.553	9.646.505.463
PT Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	-	17.600.713.897
PT Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	31.399.367.332
PT Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	69.192.193.620
PT Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	30.380.286.625	75.022.562.920
PT Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	19.235.300.141	54.861.766.703
PT Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	52.544.821.638
PT Cibitung Tanjung Priok Port *Tollways*/Cibitung-Cilincing	-	28.599.678.962
PT Cimanggis Cibitung *Tollways* / Cimanggis-Cibitung	-	16.849.497.873
Jumlah	**77.806.059.691***	**404.676.785.693**

*Selisih Rp1 karena pembulatan

3. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPMUP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp68.004.075.492 dan Rp67.200.566.340, mengalami kenaikan sebesar Rp803.509.152 atau 1,20 persen. Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp68.004.075.492 merupakan nilai penyisihan piutang dari *outstanding* pokok dana bergulir senilai Rp1.289.162.028.597 dikurangi dengan nilai penyisihan jaminan sesuai kualitas piutang setiap debitur. Dari nilai *outstanding* pokok tersebut di antaranya senilai Rp427.661.031.606 (33,17%) dikategorikan macet.

4. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH-Dit SMI)

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU BPDLH-Dit SMI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp422.224.809.462 dan Rp245.257.000.363, mengalami kenaikan sebesar Rp176.967.809.099 atau 72,16 persen.

Dari nilai Dana Bergulir sebesar Rp1.308.416.308.939, sebesar Rp543.562.428.074 dikategorikan macet.

5. BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
   Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp87.654.597.764 dan Rp40.372.794.275, mengalami kenaikan sebesar Rp47.281.803.489 atau 117,11 persen.

   Dari nilai Dana Bergulir sebesar Rp8.399.546.659.395, sebesar Rp45.222.663.113 dikategorikan macet.

6. BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
   Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPDLH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.085.306.116 dan Rp16.544.663.179, nilai tersebut berasal dari pengalihan dana *Debt for Nature Swap* (DNS) eks KLH yang disisihkan seluruhnya.

D.2.1.2.1.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp269.364.784.080.765 dan Rp280.412.334.935.034, mengalami penurunan sebesar Rp11.047.550.854.269 atau 3,94 persen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Investasi Pemerintah PEN Kementerian BUMN	9.693.749.999.411	9.912.499.999.411
2. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP)	278.424.972.731	278.424.972.731
3. UAKPA Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)	233.746.918.386.731	240.529.752.919.543
4. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI)	8.038.681.014.148	8.000.000.000.000
5. Pinjaman PEN Daerah	17.607.009.707.744	21.691.657.043.349
Jumlah	**269.364.784.080.765**	**280.412.334.935.034**

1. Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya PEN Kementerian BUMN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.693.749.999.411 dan Rp9.912.499.999.411. Investasi Pemerintah PEN baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam tingkat nasional. Rincian investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut.
   a. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.843.750.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19;
   b. Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh Indonesia;
   c. PT Krakatau Steel sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna;
   d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.999.999.999.411.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada UAIP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp278.424.972.731 dan Rp278.424.972.731 dengan rincian sebagai berikut.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kementerian Perindustrian	4.089.232.145	4.089.232.145
PT Karabha Digdaya, PT SEG, dan PT Aldevco	274.335.740.586	274.335.740.586
Jumlah	**278.424.972.731**	**278.424.972.731**

   a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.145. Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2. Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahaan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%. Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN pada tahun 2020.

3. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2024 sebesar Rp233.746.918.386.731 terdiri dari:
   a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LPDP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp117.471.804.386.731 dan Rp140.037.133.919.543. Terjadi penurunan sebesar Rp22.565.329.532.812 atau 16,11 persen, disebabkan adanya pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara. Rincian klasifikasi portofolio LPDP disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 *(Audited)*
1	Deposito	-	34.292.400.229.705
2	Obligasi menurut harga perolehan:		
	a. Obligasi Negara – HTM	109.819.905.386.731	103.583.483.689.838
	b. Obligasi Korporasi – HTM	7.651.899.000.000	2.161.250.000.000
	Jumlah	**117.471.804.386.731**	**140.037.133.919.543**

   b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.275.114.000.000 antara lain terdiri dari:
      1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.
      2) Akumulasi dana FLPP yang berasal dari APBN TA 2022 sampai dengan Semester II 2024 sebesar Rp55.600.000.000.000.
   c) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BPDPKS per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp1.237.505.000.000. Penurunan tersebut dikarenakan investasi tersebut telah jatuh tempo dan dikembalikan ke Kas BLU sebesar Rp1.028.105.000.000 dan penyesuaian intensi atau strategi dari HTM menjadi *Available For Sale* (AFS) sebesar Rp209.400.000.000, sehingga nilai investasi non permanen BPDPKS menjadi sebesar Rp0.
      Perubahan intensi tersebut dinyatakan dalam Peraturan Direktur BPDPKS Nomor Per-1/DPKS/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Utama Nomor Per-6/DPKS/2023 tentang Kebijakan dan Rencana Investasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan pada 27 Juni 2024. Peraturan Direktur tersebut antara lain mengatur bahwa Investasi atas saldo dana cadangan yang ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Negara, Obligasi Korporasi dan/atau saham dilakukan dengan intensi *Available For Sale* (AFS).

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BLU LDKPI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.038.681.014.148 dan Rp8.000.000.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp38.681.014.148 dikarenakan adanya reklasifikasi pencatatan dari investasi jangka pendek menjadi investasi jangka panjang sebesar Rp65.322.148 dan adanya penambahan investasi jangka panjang yang bersumber dari saldo kas BLU LDKPI sebesar Rp38.615.692.000.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya untuk Pinjaman PEN Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp17.607.009.707.744 dan Rp21.691.657.043.349, mengalami penurunan sebesar Rp4.084.647.335.605 atau 18,83 persen. Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk

digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN. Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah.

D.2.1.2.1.4. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya diragukan Realisasinya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp974.366.095.513 dan Rp945.649.215.159, mengalami kenaikan sebesar Rp28.716.880.354 atau 3,04 persen.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya disajikan sebagai berikut.

Unit Pengelola	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Investasi Non Permanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.145	4.089.232.145
Dit SMI	955.257.621.372	916.204.591.745
IP PEN	34.218.749.997	35.312.499.997
LDKPI	(19.199.508.001)	(9.957.108.728)
Jumlah	**974.366.095.513**	**945.649.215.159**

a. Kemenperin (SKIM-2). Tidak terdapat pergerakan nilai investasi jangka Panjang nonpermanen diragukan realisasinya pada Kementerian Perindustrian.
b. Dit SMI. Berasal dari penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen pada BLU LPDP dan BLU BPDPKS.
c. IP PEN. Merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman.
d. LDKPI. Berasal dari amortisasi diskonto atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

D.2.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

D.2.1.2.2.1. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) atau dapat disebut juga Penyertaan Modal Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.317.709.229.098.828 dan Rp3.093.225.298.186.938, mengalami kenaikan sebesar Rp224.483.930.911.890 atau 7,26 persen. Rincian Investasi Permanen PMP disajikan sebagai berikut.

Investasi PMP	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. PMP pada Persero	3.109.055.891.450.581	2.890.480.531.829.837
2. PMP pada Perum	38.959.606.930.482	36.912.745.897.463
3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional	35.559.449.396.360	32.347.909.903.362
4. PMP pada Badan Usaha Lainnya	134.134.281.321.405	133.484.110.556.276
Jumlah	**3.317.709.229.098.828**	**3.093.225.298.186.938**

1. PMP pada Persero per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.109.055.891.450.581 dan Rp2.890.480.531.829.837. PMP pada Persero merupakan kepemilikan negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih besar dari 50 persen, sehingga nilai PMP pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

   a. PMP pada Persero di Bawah Pembinaan Kementerian BUMN

      Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero di bawah pembinaan Kementerian BUMN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.023.668.410.040.017 dan Rp2.809.922.466.950.580, mengalami kenaikan sebesar Rp213.745.943.089.437 atau 7,61 persen.

      Terdapat selisih nilai PMN pada Persero di bawah Kementerian BUMN dengan Lampiran Ikhtisar LK BUMN sebesar Rp649.229.893.901, dikarenakan PT LEN Industri (Persero) masih menggunakan nilai LK 2024 *Unaudited* yang belum mencatatkan PMN di tahun 2024.

      Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada

BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional. Selain itu, peningkatan nilai investasi juga dipengaruhi adanya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMN yang dilakukan pemerintah pada tahun 2024.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan, tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki Pemerintah. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 16.A**.

b. PMP pada BUMN di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMP pada Persero di bawah pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.387.481.410.564 dan Rp80.558.064.879.257, mengalami peningkatan sebesar Rp4.829.416.531.307 atau 5,99 persen. Investasi ini merupakan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam modal BUMN atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

1) Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
2) Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian PMP pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan sebagai berikut**.**

Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
PT Sarana Multigriya Finansial	100%	20.559.960.000.000	18.231.142.000.000
PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	43.811.220.354.747	42.261.465.973.664
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	16.672.573.693.000	15.962.800.178.000
PT Geo Dipa Energi	94,5%	4.343.727.362.817	4.102.656.727.593
PT Bina Karya	100%	-	-
Jumlah		**85.387.481.410.564**	**80.558.064.879.257**

Nilai Ekuitas Bersih PT Bina Karya bernilai negatif sehingga nilai PMP disajikan sebesar Rp0 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 174 tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 17.A** dan **Lampiran 17.B.**

2. PMP pada Perum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.959.606.930.482 dan Rp36.912.745.897.463, mengalami peningkatan sebesar Rp2.046.861.033.019 atau 5,55 persen. Peningkatan nilai Investasi PMP dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional.

   PMP Perum merupakan kepemilikan Pemerintah pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Nilai PMP pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Rincian PMP pada Perum dapat dilihat pada **Lampiran 16.A.**

3. PMP pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada LKI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp35.559.449.396.360 dan Rp32.347.909.903.362, mengalami peningkatan sebesar Rp3.211.539.492.998 atau 9,93 persen. Perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) antara lain berasal dari penambahan investasi pemerintah tahun berjalan pada tiga LKI, yaitu IFAD, IDA, dan IsDB senilai Rp1.984.501.866.764, pendapatan selisih lebih hasil konfirmasi senilai Rp3.024.045.380 yang berasal dari IsDB dan selisih kurs. Rincian PMP pada Lembaga Keuangan Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

4. PMP pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp134.134.281.321.405 dan Rp133.484.110.556.276, mengalami kenaikan sebesar Rp650.170.765.129 atau sebesar 0,49 persen.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya [1)]	124.754.540.945.568	125.073.797.670.565
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	637.129.177	625.792.238
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri [2)]	1.687.799.417.150	1.737.793.416.650
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri [3)]	2.003.468.000.000	1.914.436.000.000
Modal Awal BP Tapera (Ditjen Pembiayaan)	2.845.624.180.464	2.794.889.273.282
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	2.842.211.649.046	1.962.568.403.541
Jumlah	**134.134.281.321.405**	**133.484.110.556.276**

*[1)] Rincian PMP pada Badan Usaha Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 17.A** dan **Lampiran 17.B**.*

*[2)] Rincian PMP pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 19.A** dan **Lampiran 19.B**.*

*[3)] Rincian PMP pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 18**.*

D.2.1.2.2.2. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.053.004.500 dan Rp8.053.004.500, tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai investasi dari nilai investasi per 31 Desember 2023. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.053.004.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya; dan
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B sebesar Rp1.415.810.000. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82 persen menjadi 22,82 persen.

D.2.1.2.2.3. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp790.019.190.222.637 dan Rp686.539.843.221.699, mengalami kenaikan sebesar Rp103.479.347.000.938 atau 15,07 persen. Investasi Permanen Lainnya merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Rincian Investasi Permanen Lainnya disajikan sebagai berikut.

Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia	473.944.440.890.756	401.109.298.000.000
2. Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan	239.408.499.778.000	211.972.301.807.000
3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain	76.666.249.553.881	73.458.243.414.699
Jumlah	**790.019.190.222.637**	**686.539.843.221.699**

1. PMN pada BI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp473.944.440.890.756 dan Rp401.109.298.000.000. Terdapat kenaikan sebesar Rp72.835.142.890.756 atau 18,16 persen yang berasal dari peningkatan nilai akumulasi surplus dan selisih revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024. Modal BI dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal BI merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada **Lampiran 20.A.**
2. PMN pada Otorita/LPS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp239.408.499.778.000 dan Rp211.972.301.807.000. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp27.436.197.971.000 yang berasal dari surplus tahun berjalan. Modal LPS dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Modal LPS merupakan kekayaan

negara dipisahkan. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 20.A**.

3. PMN Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp76.666.249.553.881 dan Rp73.458.243.414.699. Rincian PMP Lain-lain sebagai berikut:

PMN Lain-lain	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
e. **PMP Lain-lain pada PTNBH**	**53.552.505.681.613**	**50.728.676.736.263**
Institut Pertanian Bogor**	2.990.843.503.969	2.910.480.548.431
Universitas Airlangga	3.591.352.850.630	3.386.481.519.574
Institut Teknologi Bandung	2.205.593.497.050	2.137.070.933.465
Universitas Indonesia	4.987.446.197.141	4.791.021.213.806
Universitas Gadjah Mada	4.690.537.636.727	4.459.932.986.932
Universitas Pendidikan Indonesia	1.337.549.025.053	1.142.149.933.752
Universitas Sumatera Utara	1.974.779.275.696	1.898.360.166.970
Universitas Padjajaran	1.385.194.813.264	1.346.990.132.123
Universitas Diponegoro***	4.503.404.904.260	4.086.012.209.150
Universitas Hassanudin	2.653.554.569.612	2.492.172.787.826
Institut Teknologi Sepuluh November***	2.024.869.034.265	1.879.170.650.603
Universitas Negeri Sebelas Maret	1.779.364.907.379	1.706.907.381.088
Universitas Negeri Malang**	2.142.369.181.646	1.954.637.430.081
Universitas Andalas**	1.401.297.719.035	1.278.810.808.160
Universitas Brawijaya	3.821.445.509.872	3.610.213.266.894
Universitas Negeri Padang**	1.403.755.330.398	1.358.228.340.297
Universitas Syah Kuala	1.590.623.277.520	1.528.961.186.361
Universitas Terbuka	3.370.784.028.495	3.675.028.228.668
Universitas Negeri Surabaya**	1.977.372.725.959	1.765.447.318.340
Universitas Negeri Yogyakarta**	1.709.485.958.936	1.452.469.064.422
Universitas Negeri Semarang**	2.010.881.734.706	1.868.130.629.320
f. **PMP Lain-lain pada BPJS**	**23.113.743.872.268**	**22.729.566.678.439**
BPJS Kesehatan	10.581.197.310.345	10.289.025.406.713
BPJS Ketenagakerjaan***	12.532.546.561.923	12.440.541.271.726
Jumlah	**76.666.249.553.881**	**73.458.243.414.702***

**Selisih Rp3 karena pembulatan*
***Menggunakan angka LK Unaudited 2024*
****Menggunakan angka LK Draft Audited 2024*

a. PMP Lain-lain pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)

Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN 999.03. Per 31 Desember 2024, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 21 PTNBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan BUN BA 999.03 Lingkup UAIP.

Sementara itu, terdapat tiga PTNBH, yang belum ditetapkan kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan, yaitu:

- PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, dikarenakan masih menunggu penyelesaian proses hibah dari Kementerian Agama kepada PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia.
- PTNBH Universitas Negeri Jakarta dan PTNBH Universitas Sriwijaya, dikarenakan belum terdapat usulan penetapan nilai kekayaan awal.

Nilai penyertaan modal pada PTNBH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp53.552.505.681.613 dan Rp50.728.676.736.263.

b. PMP Lain-lain pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan di antaranya adalah modal awal

dari Pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Nilai investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada BPJS adalah sebesar Rp23.113.743.872.268 dan Rp22.729.566.678.439.

Ikhtisar Laporan Keuangan BPJS dan PTNBH dapat dilihat pada **Lampiran 20.B**.

D.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.718.204.617.970.734 dan Rp8.364.120.669.249.853. Nilai neto Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.149.820.030.417.489 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.718.204.617.970.734 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp1.568.384.587.553.245. Ringkasan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Aset Tetap	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	4.440.708.614.330.710	4.428.281.859.414.984	0,28
Peralatan dan Mesin	1.047.706.500.749.303	933.675.927.241.240	12,21
Gedung dan Bangunan	520.656.941.799.388	474.213.237.924.935	9,79
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.219.031.657.528.366	1.138.237.638.193.193	7,10
Aset Tetap Lainnya	54.507.515.237.225	54.932.081.546.750	(0,77)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	292.828.848.722.880	246.569.189.414.353	18,76
Aset Konsesi Jasa	1.142.764.539.602.862	1.088.210.735.514.398	5,01
Jumlah Bruto	**8.718.204.617.970.734**	**8.364.120.669.249.853**	**4,23**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.568.384.587.553.245)	(1.399.826.648.200.343)	12,04
Jumlah Neto	**7.149.820.030.417.489**	**6.964.294.021.049.510**	**2,66**

Nilai Aset Tetap (bruto) per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp354.083.948.720.881 atau 4,23 persen. Nilai Aset Tetap (neto) per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp185.526.009.367.979 atau 2,66 persen. Kenaikan Aset Tetap terutama berasal dari kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp114.030.573.508.063.

D.2.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.440.708.614.330.710 dan Rp4.428.281.859.414.984. Nilai Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp12.426.754.915.726 atau 0,28 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Nilai Tanah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.455.514.449.179.586, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp777.896.690.799.727, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp580.292.324.764.940, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp364.695.605.066.168, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp312.516.448.393.058.

Terdapat penyesuaian Tanah konsolidasi LKPP sebesar minus Rp235.438.998.279 yang merupakan koreksi kurang nilai tanah akibat pencatatan ganda pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut.

No	Entitas 1	Entitas 2	Nilai Eliminasi
1	Kementerian Pertahanan	Badan Pusat Statistik	104.278.709.000
2	Kementerian Pertahanan	Bank Indonesia	42.259.875.000
3	Kementerian Pertahanan	Kementerian Perhubungan	26.177.969.000
4	Kementerian Pertahanan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	11.675.220.000
5	Kementerian Pertahanan	Kementerian Luar Negeri	139.470
6	Kementerian Keuangan	Kementerian Perhubungan	1.597.110.000
7	Kementerian Perindustrian	Kementerian Ketenagakerjaan	39.104.315.000
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.345.660.809
		Jumlah	**235.438.998.279**

Rincian Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 21.A.**

D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.047.706.500.749.303 dan Rp933.675.927.241.240. Nilai Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp114.030.573.508.063 atau 12,21 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai buku (neto) Peralatan dan Mesin sebesar Rp323.182.674.612.468, berasal dari nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.047.706.500.749.303 dikurangi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp724.523.826.136.835.

Nilai Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp407.959.675.126.015, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp233.551.970.617.305, Kementerian Perhubungan sebesar Rp60.778.188.303.815, Kementerian Kesehatan sebesar Rp36.976.787.379.467, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp34.517.573.454.686.

Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 21.C.**

D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp520.656.941.799.388 dan Rp474.213.237.924.935. Nilai Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp46.443.703.874.453 atau 9,79 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai buku (neto) Gedung dan Bangunan sebesar Rp410.662.379.168.098, berasal dari nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp520.656.941.799.388 dikurangi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp109.994.562.631.290.

Nilai Gedung dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp109.542.393.227.996, Kementerian Agama sebesar Rp54.469.390.639.305, Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp50.123.528.905.282, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp48.707.796.315.021, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp41.580.741.742.323.

Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 21.D.**

D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.219.031.657.528.366 dan Rp1.138.237.638.193.193. Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp80.794.019.335.173 atau 7,10 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai buku (neto) Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp604.244.038.422.813, berasal dari nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.219.031.657.528.366 dikurangi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp614.787.619.105.553.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp973.711.740.523.890, Kementerian Perhubungan sebesar Rp192.069.760.343.133, Kementerian Pertahanan sebesar Rp17.985.552.416.592, BP Batam sebesar Rp12.225.608.172.700, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.053.129.578.585.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 21.E.**

D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp54.507.515.237.225 dan Rp54.932.081.546.750. Nilai Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp424.566.309.525 atau 0,77 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai buku (neto) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp35.152.521.398.161, berasal dari nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp54.507.515.237.225 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp19.354.993.839.064.

Nilai Aset Tetap Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp34.962.292.377.637, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp6.668.957.396.662, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp3.254.092.323.251, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.469.374.928.030 dan Kementerian Agama sebesar Rp1.855.987.459.425.

Pada Aset Tetap Lainnya konsolidasi LKPP terdapat koreksi sebesar Rp2.600.000 akibat transaksi transfer keluar aset dari BUN yang belum dicatat sebagai transfer masuk oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 21.F.**

D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp292.828.848.722.880 dan Rp246.569.189.414.353. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp46.259.659.308.527 atau 18,76 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp124.475.025.440.513, Kementerian Pertahanan Rp83.687.184.775.097, Kementerian Perhubungan sebesar Rp25.301.881.158.656, Badan Intelijen Negara sebesar Rp16.823.247.074.768, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp15.078.319.500.407.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 21.G.**

D.2.1.3.7. Aset Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.142.764.539.602.862 dan Rp1.088.210.735.514.398. Nilai Aset Konsesi Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp54.553.804.088.464 atau 5,01 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: (a) disediakan oleh mitra, yang: (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau (b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	459.445.899.337.105	438.166.750.223.301
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	572.773.935.142.795	513.841.931.878.479
Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	110.544.705.122.962	136.202.053.412.618
Jumlah Bruto	**1.142.764.539.602.862**	**1.088.210.735.514.398**
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(99.723.585.840.503)	(80.340.569.263.966)
Jumlah Neto	**1.043.040.953.762.359**	**1.007.870.166.250.432**

1. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar Rp459.445.899.337.105 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp438.151.047.437.256 sebagian besar merupakan BMN yang dipartisipasikan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp16.924.551.319.334 berupa BMN yang dipartisipasikan utamanya dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, dan pada BP Batam sebesar Rp4.370.300.580.515 berupa reklasifikasi Aset Konsesi Jasa pada Unit Pengelolaan Logistik dan Pelabuhan.
2. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra sebesar Rp572.773.935.142.795 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp391.606.088.969.683 antara lain disebabkan oleh pengembangan Konsesi Jasa dengan KDP Konsesi Jasa Ditjen Bina Marga, pada Kementerian Perhubungan Rp167.058.980.024.322 antara lain berupa Penyelenggaraan Prasarana LRT Terintegrasi dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp13.770.252.510.858 berupa jaringan serat optik Palapa Ring dan Satria-1, dan pada BP Batam sebesar Rp338.613.637.932.
3. Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan sebesar Rp110.544.705.122.962 terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp107.565.419.441.852, pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp2.056.615.178.741 dan pada BP Batam sebesar Rp922.670.502.369. Rincian Aset Konsesi Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 21.H.**

D.2.1.3.8. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.568.384.587.553.245 dan Rp1.399.826.648.200.343. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp168.557.939.352.902 atau 12,04 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Rincian Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya disajikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 *(Audited)*	31 Desember 2023 (*Audited*)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	724.523.826.136.835	649.277.746.527.849
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.994.562.631.290	94.583.917.350.940
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	614.787.619.105.553	554.798.319.123.399
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	19.354.993.839.064	20.826.095.934.189
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	99.723.585.840.503	80.340.569.263.966
Jumlah	**1.568.384.587.553.245**	**1.399.826.648.200.343**

D.2.1.4. Properti Investasi

D.2.1.4.1. Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp167.441.790.385.915 dan Rp160.506.675.838.552. Nilai Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp6.935.114.547.363 atau 4,32 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau b) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Aset Properti Investasi sebagai berikut.

Properti Investasi	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Pada K/L	78.170.782.736.229	72.377.458.373.964
2. Pada BUN	89.271.007.649.686	88.129.217.464.588
Jumlah Bruto	**167.441.790.385.915**	**160.506.675.838.552**
Akumulasi Penyusutan	**(56.903.685.457.928)**	**(56.132.925.175.972)**
1. Pada K/L	(390.182.741.285)	(339.259.823.801)
2. Pada BUN	(56.513.502.716.643)	(55.793.665.352.171)
Jumlah Neto	**110.538.104.927.987**	**104.373.750.662.580**

1. Properti Investasi pada K/L

   Properti Investasi pada K/L per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.170.782.736.229 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp61.914.565.880.000 merupakan Aset Dalam Penguasaan (ADP) berupa tanah di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara, pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp6.697.062.681.170 berupa properti yang dikelola oleh satker Pusat Pengelolaan Komplek (PPK)–Gelora Bung Karno serta PPK–Kemayoran, dan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp4.160.410.336.536 utamanya berupa pemanfaatan aset Properti Investasi pada Lanud Halim Perdanakusuma.

2. Properti Investasi pada BUN

   Properti Investasi pada BUN per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.271.007.649.686 terdapat pada BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah sebesar Rp31.409.555.874.245 yang merupakan seluruh aset kelolaan LMAN, baik yang berasal dari Aset eks PPA, Aset eks BPPN, Aset eks Pertamina, dan Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Selain itu, Properti Investasi pada BUN juga terdapat pada BA BUN 999.99 Transaksi Khusus sebesar Rp57.861.451.775.441 yang merupakan PI pada UAKPA BMN Eks BMN *Idle*, PI pada UAKPA Eks Pertamina, PI pada UAKPA PKP2B dan PI pada UAKPA BMN Hulu Migas DJKN.

   Rincian Properti Investasi pada BA 999.03 per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Kelompok Aset Penyerah-kelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi eks BPPN	964.787.053.773	(1.003.505.753)	963.783.548.020
Properti Investasi eks PPA	652.379.473.774	(63.685.461.433)	588.694.012.341
Properti Investasi eks Pertamina	28.821.040.315.002	(19.164.621.538.252)	9.656.418.776.750
Properti Investasi eks HTBI	754.881.078.467	(25.766.813.591)	729.114.264.876
Properti Investasi Lainnya	216.467.953.229	(11.451.885.724)	205.016.067.505
Total Properti Investasi	**31.409.555.874.245**	**(19.266.529.204.753)**	**12.143.026.669.492**

Rincian Properti Investasi pada BA 999.99 per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

UAKPA	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
UAKPA BMN Eks BMN *Idle*	88.809.950.101	(140.554.714)	88.669.395.387
UAKPA Eks Pertamina	18.759.780.038.841	(7.685.669.636.181)	11.074.110.402.660
UAKPA PKP2B	38.990.110.003.101	(29.561.163.320.995)	9.428.946.682.106
UAKPA BMN Hulu Migas DJKN	22.751.783.398	-	22.751.783.398
Total Properti Investasi	**57.861.451.775.441**	**(37.246.973.511.890)**	**20.614.478.263.551**

Nilai buku (neto) Properti Investasi sebesar Rp110.538.104.927.987, berasal dari nilai Properti Investasi sebesar Rp167.441.790.385.915 dikurangi Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp56.903.685.457.928. Rincian Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 21.I.**

D.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp56.903.685.457.928 dan Rp56.132.925.175.972. Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi mengalami kenaikan sebesar Rp770.760.281.956 atau 1,37 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada K/L
   Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada K/L per 31 Desember 2024 sebesar Rp390.182.741.285 dengan nilai yang signifikan terdapat pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp146.384.467.965, pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp36.478.730.599 dan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp20.702.249.107.
2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada BUN
   Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada BUN per 31 Desember 2024 sebesar Rp56.513.502.716.643 terdapat pada BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah sebesar Rp19.266.529.204.753 dan pada BA BUN 999.99 Transaksi Khusus sebesar Rp37.246.973.511.890, dengan rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada BA BUN per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Uraian	Akumulasi Penyusutan
BA BUN 999.03	**(19.266.529.204.753)**
Properti Investasi Eks BPPN	(1.003.505.753)
Properti Investasi Eks PPA	(63.685.461.433)
Properti Investasi Eks Pertamina	(19.164.621.538.252)
Properti Investasi Eks HTBI	(25.766.813.591)
Properti Investasi Lainnya	(11.451.885.724)
BA BUN 999.99	**(37.246.973.511.890)**
UAKPA BMN Eks BMN *Idle*	(140.554.714)
UAKPA Eks Pertamina	(7.685.669.636.181)
UAKPA PKP2B	(29.561.163.320.995)
UAKPA BMN Hulu Migas DJKN	-
Total Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada BUN	**(56.513.502.716.643)**

D.2.1.5. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp53.185.205.141.267 dan Rp53.609.768.282.371. Nilai Piutang Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp424.563.141.104 atau 0,79 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai neto Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.618.466.930.997 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp53.185.205.141.267 dikurangi penyisihan piutang sebesar Rp4.566.738.210.270.

Rincian Piutang Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Tagihan Penjualan Angsuran	67.788.724.997	78.839.430.596
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	312.123.674.481	310.437.056.539
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	48.201.737.216.319	48.644.267.627.749
Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.603.555.525.470	4.576.224.167.487
Jumlah Bruto	**53.185.205.141.267**	**53.609.768.282.371**
Penyisihan Piutang Jangka Panjang	(4.566.738.210.270)	(4.421.514.439.573)
Jumlah Neto	**48.618.466.930.997**	**49.188.253.842.798**

D.2.1.5.1. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp67.788.724.997 dan Rp78.839.430.596. Nilai Piutang TPA mengalami penurunan sebesar Rp11.050.705.599 atau 14,02 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai neto Piutang TPA yang dapat direalisasikan sebesar Rp35.090.440.871, berasal dari nilai bruto sebesar Rp67.788.724.997 dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp32.698.284.126.

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) terdapat pada Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp67.788.724.997.

D.2.1.5.2. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp312.123.674.481 dan Rp310.437.056.539. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp1.686.617.942 atau 0,54 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai neto Piutang Tagihan TP/TGR yang dapat direalisasikan sebesar Rp122.473.191.268, berasal dari nilai bruto sebesar Rp312.123.674.481 dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp189.650.483.213.

Tagihan tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp94.229.858.436, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebesar Rp41.603.473.973, Kementerian Luar Negeri sebesar Rp33.469.087.080, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebesar Rp29.677.072.122. Rincian Piutang Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

D.2.1.5.3. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.201.737.216.319 dan Rp48.644.267.627.749. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp442.530.411.430 atau 0,91 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman terdiri dari Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp47.613.855.967.381 dan Aset Lainnya Kredit Program sebesar Rp587.881.248.938. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman adalah piutang pokok pemberian pinjaman yang belum jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan.

Nilai neto Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman yang dapat direalisasikan sebesar Rp47.375.786.687.543, berasal dari nilai bruto sebesar Rp48.201.737.216.319 dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp825.950.528.776.

D.2.1.5.4. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.603.555.525.470 dan Rp4.576.224.167.487. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp27.331.357.983 atau 0,60 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Nilai neto Piutang Jangka Panjang Lainnya yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.085.116.611.315, berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.603.555.525.470 dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp3.518.438.914.155.

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp2.301.698.582.578, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.193.609.134.597 dan Kementerian Keuangan sebesar Rp956.325.136.412.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BUN sebesar Rp2.301.698.582.578 terdiri atas:
   a. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.225.637.648 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.725.637.648, yang merupakan Piutang Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas. Nilai piutang tersebut berasal dari saldo restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 dikurangi dengan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebesar total Rp45.000.000.000.
   b. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 sebesar USD141,392,144 atau ekuivalen sebesar Rp2.284.472.944.930 yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp34.879.369.683. Saldo piutang jangka panjang tahun 2024 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.193.609.134.597 merupakan piutang atas BHP yang masuk dalam putusan homologasi dan dikategorikan dalam kualitas macet (disisihkan 100%) pada PT. Bakrie Telecom, PT. Internux dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kemenkeu sebesar Rp956.325.136.412 terbesar pada BLU LMAN senilai Rp955.399.313.351. Piutang tersebut merupakan tagihan pemanfaatan Kilang LNG Badak oleh PT Pertamina Hulu Mahakam yang telah lampau, sehubungan dengan disepakatinya perjanjian antara BLU LMAN dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) nomor PRJ-127/LMAN/2023 dan SP-004/PHM000/2023-S0 tanggal 16 Desember 2022 yang mengatur butir-butir kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran atas pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan LNG WBx dan NR (*Western Buyer Extension*/WBx dan Nusantara Regas/NR), sehingga tagihan lampau kontrak WBx dan NR dapat diakui sebagai pendapatan/piutang jangka panjang.

D.2.1.5.5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.566.738.210.270 dan Rp4.421.514.439.573. Nilai Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp145.223.770.697 atau 3,28 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	32.698.284.126	31.826.693.337
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	189.650.483.213	183.538.148.192
Piutang Pemberian Pinjaman	825.950.528.776	836.493.387.309
Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.518.438.914.155	3.369.656.210.735
Jumlah	**4.566.738.210.270**	**4.421.514.439.573**

D.2.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.510.052.983.101.380 dan Rp1.364.417.385.162.997. Nilai Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp145.635.597.938.383 atau 10,67 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai neto Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp102.392.343.804.898 atau 10,41 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai Neto Aset Lainnya sebesar Rp1.085.718.999.996.188 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.510.052.983.101.380 dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp424.333.983.105.192.

Ringkasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	49.801.920.221.767	49.875.449.199.365
Aset Tak Berwujud	83.281.083.305.526	71.168.490.628.320
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	2.043.967.654.510	1.241.448.631.883
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	492.213.916.370.469	451.183.897.393.302
Dana Cadangan Penjaminan	13.675.145.505.000	12.216.159.505.000
Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi	747.738.900.000	613.442.550.000
Dana Kelolaan BLU	53.287.731.646.004	16.047.968.379.573
Dana Jangka Panjang	28.528.648.017.150	36.015.899.438.036
Aset Lain-lain	755.180.684.209.603	696.199.863.151.665
Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
Jumlah Bruto	**1.510.052.983.101.380**	**1.364.417.385.162.997**
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(424.333.983.105.192)	(381.090.728.971.707)
Jumlah Neto	**1.085.718.999.996.188**	**983.326.656.191.290**

D.2.1.6.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp49.801.920.221.767 dan Rp49.875.449.199.365. Nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar Rp73.528.977.598 atau 0,15 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Nilai neto aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp48.914.464.042.328, berasal dari nilai bruto aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp49.801.920.221.767 dikurangi Akumulasi Penyusutan aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp887.456.179.439.

Nilai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang signifikan terdapat pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp34.103.223.233.831, Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.696.050.678.641 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.191.282.592.000.

Mutasi saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat negara sebesar Rp36.826.416.574 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Kemitraan berupa bangunan Waduk dan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp110.355.394.172 merupakan reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Properti Investasi.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan sebagai berikut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kementerian Sekretariat Negara	34.103.223.233.831	34.066.396.817.257
Kementerian Luar Negeri	156.068.872.428	156.068.872.428
Kementerian Pertahanan	11.696.050.678.641	11.696.050.678.641
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.373.335.000	5.373.335.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	103.876.004.000	214.231.398.172
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.191.282.592.000	2.191.282.592.000
Kementerian PPN/Bappenas	490.209.375.000	490.209.375.000
Kepolisian RI	649.537.210.000	649.537.210.000
BP Batam	402.192.570.867	402.192.570.867
BP Sabang	4.106.350.000	4.106.350.000
Jumlah	**49.801.920.221.767**	**49.875.449.199.365**

D.2.1.6.2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp83.281.083.305.526 dan Rp71.168.490.628.320. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) mengalami kenaikan sebesar Rp12.112.592.677.206 atau 17,02 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023.

Nilai neto Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp37.886.744.650.077, berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud (ATB) sebesar Rp83.281.083.305.526 dikurangi Amortisasi ATB sebesar Rp45.394.338.655.449. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) yang signifikan terdapat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp21.301.002.844.223, Kementerian Pertahanan sebesar Rp16.742.748.313.831, Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp6.902.015.078.409, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp6.433.158.454.720 dan Badan Intelijen Negara sebesar Rp6.190.292.938.154.

Rincian ATB berdasarkan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Hak Cipta	5.920.405.000	47.479.738.000
Paten	1.015.721.436.235	440.834.553.197
Software	56.633.215.562.955	45.787.744.960.227
Lisensi	8.556.991.572.910	6.929.574.574.423
Hasil Kajian/Penelitian	7.575.747.286.527	6.817.163.944.141
Aset Tak Berwujud Lainnya	9.493.487.041.899	11.145.692.858.332
Jumlah Bruto	**83.281.083.305.526**	**71.168.490.628.320**
Akumulasi Amortisasi ATB	(45.394.338.655.449)	(36.878.597.132.909)
Jumlah Neto	**37.886.744.650.077**	**34.289.893.495.411**

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 23.A.**

D.2.1.6.3. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.043.967.654.510 dan Rp1.241.448.631.883. Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp802.519.022.627 atau 64,64 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp1.159.648.419.240, Kementerian Perhubungan sebesar Rp372.181.023.357 dan Badan Informasi Geospasial sebesar Rp230.817.617.621.

Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 23.B.**

D.2.1.6.4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp492.213.916.370.469 dan Rp451.183.897.393.302. Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya mengalami kenaikan sebesar Rp41.030.018.977.167 atau 9,09 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan sumber dan jenisnya disajikan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. DDP pada K/L	**28.664.511.180.278**	**27.351.887.044.922**
Dana lainnya	4.566.921.105.854	5.401.284.521.578
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	1.891.931.567	1.590.534.903
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	21.933.258.259.012	21.043.371.166.827
Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	694.448.762.957	672.607.878.119
Dana di Rekening Penampungan - BLU	1.467.991.120.888	233.032.943.495
2. DDP pada BUN	**486.632.618.588.563**	**446.302.794.935.058**
Cadangan Dana Subsidi/PSO	170.974.000.000	-
Dana lainnya	440.094.342.941.863	354.184.283.761.926
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	3.773.165.929.527	4.492.658.156.434

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah	20.558.040.446.440	66.498.332.128.500
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	22.036.095.270.733	21.127.520.888.198
3. Penyesuaian DDP pada LKPP	**(23.083.213.398.372)**	**(22.470.784.586.678)**
Total	**492.213.916.370.469**	**451.183.897.393.302**

1. DDP pada K/L sebesar Rp28.664.511.180.278 yang signifikan terdapat pada:
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.698.661.551.803 berupa Dana di Rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (RPATA) utamanya pada Ditjen Bina Marga.
   b. Badan Pangan Nasional sebesar Rp3.423.191.383.675 berupa Dana di Rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (RPATA).
   c. Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.417.520.438.314 di antaranya berupa Dana Lainnya *Escrow* Alutsista dan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/ Lembaga (RPATA).

2. DDP pada BUN sebesar Rp486.632.618.588.563 dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BA 999.00 Kuasa BUN/Akuntansi Pusat	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641
BA 999.07 Subsidi	170.974.000.000	-
BA 999.08 Belanja Lainnya	58.632.821.728.923	51.085.061.052.125
BA 999.99 Transaksi Khusus	280.282.974.599.043	259.362.135.477.663
Penyesuaian DDP pada LKBUN	(13.277.982.516.721)	(12.300.309.226.371)
Total	**486.632.618.588.563**	**446.302.794.935.058**

   a. DDP BA 999.00 Kuasa BUN/Akuntansi Pusat sebesar Rp160.823.830.777.318 dijelaskan sebagai berikut.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.00	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Dana di Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer Keuangan Daerah	20.558.040.446.440	66.498.332.128.500
Dana Lainnya	114.456.529.130.618	56.037.396.458.509
Dana Perhitungan Fihak Ketiga	3.773.165.929.527	4.492.658.156.434
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA)	22.036.095.270.733	21.127.520.888.198
Total	**160.823.830.777.318**	**148.155.907.631.641**

      Dari saldo DDP pada BA 999.00 sebesar Rp160.823.830.777.318, terdapat penyesuaian DDP sebesar Rp13.277.982.516.721 terdiri dari:
      1) Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) sebesar Rp12.768.268.505.000.
      2) Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) sebesar Rp406.877.000.000.
      3) Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) pada BA BUN 999.08 sebesar Rp77.113.649.721.
      4) Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) pada BA BUN 999.99 sebesar Rp25.723.362.000.

   b. DDP pada BA 999.07 sebesar Rp170.974.000.000 merupakan dana subsidi yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR.

   c. DDP pada BA 999.08 sebesar Rp58.632.821.728.923 terdiri dari:
      1) Pada Satker SKK Migas sebesar Rp58.555.708.079.202 berupa Dana Lainnya dari kegiatan pasca operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment and Site Restoration* (ASR) serta Dana *Equipment & Services* (E&S) dalam kegiatan usaha hulu migas pada SKK Migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD2,956,492,921.42 dan saldo E&S sebesar USD30,284,960.03

menggunakan kurs penutup BI 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157.

2) Saldo Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) sebesar Rp77.113.649.721 yang telah dieliminasi pada BA BUN 999.00.

d. DDP pada BA 999.99 sebesar Rp280.282.974.599.043 berupa Dana Lainnya Akumulasi Iuran Pensiun (AIP). Pencantuman Nilai Aset Lainnya berupa AIP menggunakan angka perubahan yang tertera pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Perhitungan antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan Badan Penyelenggara. Per 31 Desember 2024 AIP dengan PT Taspen (Persero) sebesar Rp250.426.347.869.742, AIP dengan PT Asabri (Persero) sebesar Rp29.830.903.367.301 dan satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN sebesar Rp25.723.362.000 yang telah dieliminasi pada BA BUN 999.00. Rincian Dana Lainnya Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada PT Taspen dan PT Asabri adalah sebagai berikut.

Uraian	PT Taspen	PT Asabri
Penambahan		
Hasil Investasi	17.220.345.016.014	1.028.990.895.856
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(5.696.956.669.615)	(745.010.663.604)
Iuran Peserta	8.615.786.187.678	1.861.732.328.453
Pendapatan di Luar Investasi	2.162.643.720	12.093.980.417
Jumlah Penambahan	**20.141.337.177.797**	**2.157.806.541.122**
Pengurangan		
Beban AIP	(1.287.662.217.571)	(116.557.668.968)
Jumlah Pengurangan	**(1.287.662.217.571)**	**(116.557.668.968)**
Selisih Revaluasi Aset Tetap		191.927.000
Peningkatan Dana Bersih	**18.853.674.960.226**	**2.041.440.799.154**
Dana Bersih Awal Tahun	**231.572.672.909.516**	**27.789.462.568.147**
Dana Bersih Akhir Tahun	**250.426.347.869.742**	**29.830.903.367.301**

a) Hasil investasi pada PT Taspen sebesar Rp17,2 triliun dan pada PT Asabri sebesar Rp1,02 triliun merupakan pendapatan bunga deposito, bunga obligasi,bagi hasil sukuk, deviden saham, deviden reksadana, laba rugi pelepasan investasi dan pendapatan investasi lainnya. hasil investasi pada PT Taspen terbesar berasal dari bunga obligasi pemerintah sebesar Rp8,27 triliun. Hasil investasi pada PT Taspen Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp1,7T dari Tahun 2023 dikarenakan terdapat kenaikan signifikan pada bunga deposito yang disebabkan adanya kenaikan nilai deposito dari tahun 2023 +/- sebesar Rp20T, sedangkan hasil investasi PT Asabri Tahun 2024 menurun sebesar (Rp149M) dari tahun 2023 yang mana untuk PT Asabri pada tahun 2024 terdapat unrealized penurunan nilai saham sebesar (Rp691M) disebabkan adanya penurunan nilai saham karena pergerakan IHSG;

b) penurunan nilai investasi obligasi, sukuk, reksadana dan saham pada PT Taspen dan PT Asabri tahun 2024 masing-masing sebesar Rp5,69 triliun dan Rp745,01 miliar merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat investasi tahun berjalan. Namun, kepemilikan surat berharga atas investasinya masih dimiliki oleh PT Taspen dan PT Asabri. Adapun selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat pada investasi tahun 2024 dikarenakan adanya penurunan nilai IBPA Fair Price dan harga di pasar pada hampir seluruh instrumen investasi;

c) Iuran peserta pada tahun 2024 baik di PT Taspen maupun PT Asabri mengalami kenaikan yang disebabkan adanya kenaikan gaji ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

3. Penyesuaian DDP pada LKPP sebesar minus Rp23.083.213.398.372 dijelaskan sebagai berikut:

a. Eliminasi Dana Lainnya dari pembentukan Rekening *Escrow* Alutsista sebesar minus Rp1.149.955.139.360 karena disajikan pada BA 999.00 Kuasa BUN dan pada BA 012 Kementerian Pertahanan; dan

b. Eliminasi Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga (RPATA) sebesar minus Rp21.933.258.259.012 karena disajikan pada BA 999.00 Kuasa BUN dan pada BA Kementerian/Lembaga yang menggunakan RPATA.

Rincian Saldo Dana di Rekening Penampungan-K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7.E.**

D.2.1.6.5. Dana Cadangan Penjaminan

Dana Cadangan Penjaminan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.675.145.505.000 dan Rp12.216.159.505.000. Nilai Dana Cadangan Penjaminan mengalami kenaikan sebesar Rp1.458.986.000.000 atau 11,94 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 Dana Cadangan Penjaminan merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Dana Penjaminan pada BUN sebesar Rp13.675.145.505.000 terdapat pada BA 999.03 Investasi Pemerintah. Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yaitu pada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen (EAS) dan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (PRKN). Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp13.268.268.505.000 digunakan untuk:

a. Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
b. Pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
c. Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
d. Pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
e. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
f. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/*light rail transit* terintegrasi di wilayah perkotaan;
g. Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
h. Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
j. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM; dan
k. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk BUMN.

Dana Cadangan Penjaminan pada Dit. EAS sebesar Rp13.268.268.505.000 terdiri dari sebesar Rp12.768.268.505.000 berada di Rekening BI Nomor 519000126980 dengan Nama Rekening Rek Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan sebesar Rp500.000.000.000 sedang dikelola melalui mekanisme Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 69 Tahun 2023 dan KMK Nomor 13 Tahun 2024 oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) BLU LDKPI, terdiri dari Rp122.905.310.000 dalam bentuk SUN dan sebesar Rp377.094.690.000 dalam bentuk Giro/Deposito.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN sebesar Rp406.877.000.000 merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

D.2.1.6.6. Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi

Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp747.738.900.000 dan Rp613.442.550.000. Nilai Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi mengalami kenaikan sebesar Rp134.296.350.000 atau 21,89 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi merupakan dana yang disediakan sebagai jaminan atas kredit dan/atau pembiayaan dari program ataupun proyek pemerintah dengan tujuan tertentu.

Dana Penjaminan Pihak Ketiga Retensi sebesar Rp747.738.900.000 yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan adalah Dana Jaminan Pihak Ketiga Retensi berbentuk bilyet deposito perusahaan P3MI yang belum diambil, baik pada perusahaan P3MI masih aktif maupun sudah dicabut izinnya.

D.2.1.6.7. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp53.287.731.646.004 dan Rp16.047.968.379.573. Nilai Dana Kelolaan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp37.239.763.266.431 atau 232,05 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Dana Kelolaan BLU sebesar Rp53.287.731.646.004 merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah atau pengalihan dari Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan

penganggarannya, atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Nilai Dana Kelolaan BLU yang signifikan terdapat pada Dana Kelolaan BLU LPDP (UAKPA Dit. SMI) sebesar Rp37.731.110.629.484 yang merupakan penyesuaian nilai dana kelolaan dan investasi jangka panjang non permanen lainnya pada BLU LPDP.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan nilai Dana Kelolaan BLU LPDP yang belum digulirkan sebesar Rp37.731.110.629.484 yang sebelumnya disajikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan:

a. PMK Nomor 174 Tahun 2023 pada Bab IV Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum yang menyatakan pada periode pelaporan setelah perolehan awal, UAKPA BUN melakukan pengujian substansi model bisnis yang mempengaruhi untuk reklasifikasi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai dengan model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud.
b. Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-159/LPDP/2024 yang mengubah Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-56/LPDP/2021 tentang Kebijakan Strategis Alokasi Aset Investasi (*Strategic Asset Allocation*) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam keputusan nomor KEP-159/LPDP/2024 mengatur bahwa jenis investasi/instrumen antara lain berupa instrumen investasi jangka pendek minimum 25% dan maksimum 100%.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut.

Dana Penjaminan	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	1.600.453.340.644	1.980.224.478.455
BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) (Dit. SMI)	2.924.438.479.445	2.956.427.625.499
BLU Lembaga Penyalur Dana Bergulir KUMKM	1.377.389.357.978	1.193.503.022.225
BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	60.837.971.403	475.451.437.165
BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	1.247.520.036.882	1.266.323.666.466
BLU BPDLH (Pengelola dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS)	7.360.423.866.350	7.359.964.509.287
BLU BPDLH (*Mangrove*)	985.557.790.818	795.002.450.000
BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS)	-	21.071.190.476
BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Dit. SMI)	37.731.110.629.484	-
BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	173.000	-
Total	**53.287.731.646.004**	**16.047.968.379.573**

D.2.1.6.8. Dana Jangka Panjang

Dana Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp28.528.648.017.150 dan Rp36.015.899.438.036. Nilai Dana Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar Rp7.487.251.420.886 atau 20,79 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Dana Jangka Panjang sebesar Rp28.528.648.017.150 merupakan dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Rincian mutasi Dana Jangka Panjang LMAN pada tahun 2024 sebagai berikut.

	Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2023		36.015.899.438.036
(-)	Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	(14.510.738.184.850)
(-)	Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	(483.467.502.187)
+	Retur/pengembalian dana atas transaksi sebelum tahun 2024	6.954.266.151
+	Pencairan anggaran pembiayaan investasi dari RKUN	7.500.000.000.000
	Posisi per 31 Desember 2024	**28.528.648.017.150**

Penggunaan dana jangka panjang pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dirinci per proyek adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Proyek Air Baku	62.790.158.500	22.945.264.480
Proyek Bendungan	1.476.236.509.747	1.969.712.922.391
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	2.106.409.275.212	1.426.137.165.291
Proyek Irigasi	19.822.077.282	31.769.023.220
Proyek Jalan Tol	11.246.731.987.455	14.396.683.929.514
Proyek Pelabuhan	-	975.468.666
Proyek Perkeretaapian	75.261.412.690	358.114.168.711
Jumlah Penggunaan Dana s.d. 31 Desember 2024	**14.987.251.420.886**	**18.206.337.942.273**

D.2.1.6.9. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp755.180.684.209.603 dan Rp696.199.863.151.665. Nilai Aset Lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp58.980.821.057.938 atau 8,47 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai neto Aset Lain-lain adalah sebesar Rp377.128.495.939.299, berasal dari nilai bruto sebesar Rp755.180.684.209.603 dikurangi Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp378.052.188.270.304.

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Aset Lain-lain pada K/L	57.283.842.822.484	51.254.745.733.362
2. Aset Lain-lain pada BUN	697.896.841.387.119	644.945.117.418.303
Jumlah Bruto	**755.180.684.209.603**	**696.199.863.151.665**
Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L	(31.862.315.714.574)	(30.500.598.127.290)
Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lain-lain pada BUN	(346.189.872.555.730)	(312.960.305.867.524)
Jumlah Akumulasi Amortisasi/Penyusutan	**(378.052.188.270.304)**	**(343.460.903.994.814)**
Jumlah Neto	**377.128.495.939.299**	**352.738.959.156.851**

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 25.A.**

1. Aset Lain-lain pada K/L sebesar Rp57.283.842.822.484 antara lain berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, serta BMN dalam Proses PMPP. Aset Lain-lain pada K/L terbesar terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp18.614.001.566.433, Kementerian Pertahanan sebesar Rp7.858.056.611.976 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp4.887.214.428.954.

2. Aset Lain-lain pada BUN sebesar Rp697.896.841.387.119 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BA 999.03 Investasi Pemerintah	764.944.939.588	822.118.554.755
BA 999.08 Belanja Lainnya	69.874.268.741	42.911.594.436
BA 999.99 Transaksi Khusus	697.062.022.178.790	644.080.087.269.112
Total	**697.896.841.387.119**	**644.945.117.418.303**

a. Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp764.944.939.588 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN 999.03	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1) Aset Eks BPPN	43.730.869.333	50.142.844.000
2) Aset Eks Kelolaan PT PPA	135.440.964.393	169.178.500.393
3) Aset Eks Pertamina	557.961.421.612	583.403.259.612
4) Aset Lain-lain BUN	27.811.684.250	19.393.950.750
Total	**764.944.939.588**	**822.118.554.755**

1) Aset Eks BPPN sebesar Rp43.730.869.333. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan aset lain-lain eks BPPN sebesar Rp11.480.040.000 di antaranya disebabkan adanya reklasifikasi Aset Serang Kramatwatu dari Aset Lain-Lain ke Properti Investasi.
2) Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp135.440.964.393. Pada tahun 2024 terdapat penarikan dari Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar

Rp9.142.461.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp548.547.660 serta reklasifikasi ke pos Properti Investasi sebesar Rp1.736.772.000 atas Aset Grogol Permai dan sebesar Rp23.704.973.000 atas Aset Blok M (Sultan Hasanudin).

3) Aset Eks Pertamina sebesar Rp557.961.421.612.
4) Aset Lain-lain BUN sebesar Rp27.811.684.250. Nilai Neto Aset Lain-lain BUN sebesar Rp27.628.708.746 berasal dari nilai bruto Rp27.811.684.250, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp182.975.504.

Aset Lain-lain BUN terdiri dari Aset Tanah PSN sebesar Rp0 dan Aset Lain-lain BUN eks HTBI (setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp27.628.708.746.

b. Aset Lain-lain pada BA 999.08 sebesar Rp69.874.268.741 merupakan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah terdapat pada Satker Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp69.709.081.741 dan pada Satker SKK Migas yang diusulkan untuk penghapusan sebesar Rp165.187.000.

c. Aset Lain-lain pada BA 999.99 sebesar Rp697.062.022.178.790 dijelaskan sebagai berikut.

Aset Lain-lain pada BUN 999.99	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1) Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN	-	17.161.363.257
2) Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN	243.028.148.370	104.061.918.709
3) Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas	668.740.738.490.428	615.910.897.460.531
4) Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA	14.371.313.426.237	14.331.042.210.113
5) Aset PKP2B	3.063.230.520.563	2.941.049.250.958
6) Aset Lainnya Eks BLBI	10.230.620.927.132	10.355.953.839.630
7) Aset ABMA/T	35.474.626.100	37.267.219.100
8) Aset BMN *Idle*	14.113.278.239	20.081.172.095
9) Aset Lain-lain	363.502.761.721	362.572.834.719
Total	**697.062.022.178.790**	**644.080.087.269.112**

1) Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN sebesar Rp0 merupakan aset tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari KKKS Terminasi.
2) Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN sebesar Rp243.028.148.370 berupa aset, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP) yang berada pada Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM. Nilai tersebut tidak termasuk tanah, karena tanah tercatat Rp0.
3) Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas sebesar Rp668.740.738.490.428. Aset tersebut berupa Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP).
4) Aset KKKS Hulu Migas pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebesar Rp14.371.313.426.237 berupa Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP).
5) Aset PKP2B sebesar Rp3.063.230.520.563 berupa aset Tanah dan Non Tanah.
6) Aset Lainnya Eks BLBI sebesar Rp10.230.620.927.132 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2023
1	Aset Properti eks BPPN[1)]	3.317.862.433.615	(262.030.247.428)	3.579.892.681.042
2	Aset Inventaris Eks BPPN[2)]	5.209.616.797	(88.973.924)	5.298.590.721
3	Aset Nostro[3)]	2.920.898.206	(584.179.642)	3.505.077.848
4	Surat Berharga Eks BPPN[4)]	540.677.395.604	23.742.056.078	516.935.339.526
5	Aset Saham Eks BPPN[5)]	47.276.314.736	(9.356.905.704)	56.633.220.440
6	Aset Lain-lain Eks BPPN[6)]	6.316.674.268.174	122.985.338.122	6.193.688.930.053
	Jumlah	**10.230.620.927.132**	**(125.332.912.498)**	**10.355.953.839.630**

[1)] *Rincian Aset Properti Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24.A**.*
[2)] *Rincian Aset Inventaris Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24.B**.*
[3)] *Rincian Aset Nostro dapat dilihat pada **Lampiran 24.C**.*
[4)] *Rincian Surat Berharga Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24.D**.*
[5)] *Rincian Aset Saham Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24.E**.*
[6)] *Rincian Aset Lain-lain Eks BPPN dapat dilihat pada **Lampiran 24.F, Lampiran 24.G,** dan **Lampiran 24.H,***

7) Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) sebesar Rp35.474.626.100 merupakan aset yang belum diterbitkan KMK pelepasannya.

8) Aset BMN *Idle* sebesar Rp14.113.278.239 merupakan BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN *Idle*.

9) Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN sebesar Rp363.502.761.721 dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi dari KPK	3.546	115.391.969.721
2	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m^2	248.110.792.000
	Total		**363.502.761.721**

D.2.1.6.10. Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya

Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.292.147.271.351 dan Rp29.854.766.285.853. Nilai Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.437.380.985.498 atau 4,81 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Nilai Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya merupakan nilai Ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) bukan Satuan Kerja. Rincian Aset Lainnya dari Ekuitas pada Unit Badan Lainnya disajikan sebagai berikut.

Unit Badan Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. YHK/BPP TMII	-	4.334.012.243
2. Otorita Asahan	5.396.635.686	5.396.635.686
3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	412.670.873.066	372.961.149.121
4. Badan Wakaf Indonesia	32.798.408.382	26.562.574.185
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	8.588.481.225.894	8.485.008.632.384
6. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	22.246.225.752.806	20.956.233.856.603
7. Yayasan Gedung Veteran	6.574.375.517	4.269.425.631
Jumlah	**31.292.147.271.351**	**29.854.766.285.853**

1. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/ BPP TMII) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.334.012.243.

   Pada periode penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024, proses likuidasi YHK/BPP TMII telah selesai dilakukan melalui penetapan KMK 99/KM.6/2021 dan KMK 27/KM.6/KNL.0702/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Sekretariat Negara.

2. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.396.635.686 dan Rp5.396.635.686. Aset Lainnya tersebut merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 *Audited*.
   Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.
   Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2024 masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan, bahwa tim likuidasi dimaksud bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp412.670.873.066 dan Rp372.961.149.121. Aset Lainnya tersebut merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2024. Laporan Keuangan Baznas disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.

4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.798.408.382 dan Rp26.562.574.185. Aset Lainnya tersebut merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2024. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Aset Lainnya yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.588.481.225.894 dan Rp8.485.008.632.384. Aset Lainnya tersebut merupakan Aset Bersih OJK selaku lembaga sebesar Rp8.192.290.861.543 dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08 sebesar Rp0.
   Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

6. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.246.225.752.806 dan Rp20.956.233.856.603. Aset Lainnya tersebut merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

7. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.574.375.517 dan Rp4.269.425.631. Aset Lainnya tersebut adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2024. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
   Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya/Unit Pemerintah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 30.A, Lampiran 30.B** dan **Lampiran 30.C.**

D.2.1.6.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp424.333.983.105.192 dan Rp381.090.728.971.707. Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp43.243.254.133.485 atau 11,35 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	**30.997.698.244.500**	**30.119.119.698.041**
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	887.456.179.439	751.227.843.984
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.908.116.640.359	806.089.732.443
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	28.202.125.424.702	28.561.802.121.614
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	**346.189.872.555.730**	**312.960.305.867.524**
Akumulasi Penyusutan Aset Eks BPPN	26.127.720	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	69.761.442.285	42.911.594.436
Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	344.014.224.878.691	310.876.916.694.161
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	1.182.858.342	1.247.388.940
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina	400.685.355.608	423.880.011.094

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Akumulasi Penyusutan Aset yang berasal dari Kontraktor PKP2B	1.673.035.046.864	1.589.463.650.617
Akumulasi Penyusutan Aset *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN	6.113.239.732	7.275.644.182
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	24.843.606.488	18.610.884.094
Jumlah	**377.187.570.800.230**	**343.079.425.565.565**

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada K/L	**47.039.446.224.272**	**37.914.524.897.168**
Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	445.078.916	9.244.688.313
Akumulasi Amortisasi Paten	179.418.401.543	132.857.495.845
Akumulasi Amortisasi *Software*	37.030.625.514.206	28.989.876.640.822
Akumulasi Amortisasi Lisensi	3.488.204.232.640	2.898.523.440.659
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	4.588.679.347.454	4.751.316.358.296
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.752.073.649.513	1.132.706.273.233
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada BUN	**106.966.080.690**	**96.778.508.974**
Akumulasi Amortisasi *Software*	100.316.693.576	95.426.490.124
Akumulasi Amortisasi Lisensi	6.649.387.114	1.352.018.850
Jumlah	**47.146.412.304.962**	**38.011.303.406.142**

D.2.2. KEWAJIBAN

D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.328.524.056.593.660 dan Rp1.092.254.611.766.819, mengalami kenaikan sebesar Rp236.269.444.826.841 atau 21,63 persen.

Ringkasan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

Kewajiban	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan / (Penurunan)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051	(4,76)
Utang kepada Pihak Ketiga	169.505.587.248.935	191.809.032.711.121	(11,63)
Utang Bunga	118.250.088.626.967	112.693.785.312.937	4,93
Utang Subsidi	19.445.038.835.881	25.207.352.917.324	(22,86)
Utang Transfer	97.460.927.735.555	52.187.965.129.846	86,75
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	786.695.375.102.677	638.953.070.948.495	23,12
Unamortized Discount	(885.329.385.000)	(368.630.075.000)	140,17
Unamortized Premium	265.185.148.000	440.320.180.000	(39,77)
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	62.418.300.000.000	31.412.000.000.000	98,71
Unamortized Discount	(1.566.657.675.000)	(467.650.585.000)	235,01
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	63.620.122.728.245	27.965.899.727.133	127,49
Pendapatan Diterima Dimuka	8.791.568.189.681	7.476.388.964.347	17,59
Pendapatan yang Ditangguhkan	111.122.213.990	403.617.716.901	(72,47)
Utang Jangka Pendek Lainnya	91.787.396.199	4.661.192.664	1.869,18
Jumlah	**1.328.524.056.593.660**	**1.092.254.611.766.819**	**21,52**

Kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek terbesar berasal dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu sebesar Rp147.742.304.154.182 atau 23,12 persen. Di samping itu saldo akhir Kewajiban Jangka Pendek juga dipengaruhi oleh kenaikan Utang Transfer sebesar Rp45.272.962.605.709 atau 86,75 persen.

D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Utang PFK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.320.940.427.530 dan Rp4.536.797.626.051, mengalami penurunan sebesar Rp215.857.198.521 atau 4,76 persen. Penurunan ini terutama berasal dari Utang PFK Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengalami penurunan sebesar 13,21 persen atau senilai Rp123.213.797.334.

Rincian Utang PFK dijelaskan sebagai berikut.

Utang PFK	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Utang PFK BA 999.99 DJPb	809.372.413.024	932.586.210.358
2. Utang PFK BA 999.99 DJKN	-	887.002.856
3. Utang PFK BA 999.99 DJPK	3.511.568.014.506	3.603.324.412.837
Jumlah	**4.320.940.427.530**	**4.536.797.626.051**

1. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perbendaharaan (DJPb)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPb berupa Utang PFK Pegawai Per 31 Desember 2024 sebesar Rp809.372.413.024, mengalami penurunan sebesar Rp123.213.797.334 atau 13,21 persen. Rincian Utang PFK DJPb menurut badan penyelenggara disajikan sebagai berikut.

Badan Penyelenggara	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. BPJS Kesehatan	764.116.700.443	810.479.628.369
2. Perum Bulog	12.167.064	-
3. PT Taspen (Persero)	44.610.450.818	121.484.623.448
4. PT Asabri (Persero)	252.560.339	197.192.160
5. BP Tapera	380.534.360	424.766.381
Jumlah	**809.372.413.024**	**932.586.210.358**

2. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)

Utang PFK DJKN merupakan Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3). Saldo awal tahun 2024 sebesar Rp887.002.856. Sepanjang tahun 2024 terdapat mutasi tambah berupa penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BDL Rp491.306.579 dan mutasi kurang berupa pembayaran, reklasifikasi, dan koreksi utang perwalian/PFK sebesar Rp1.378.309.435, sehingga Saldo Akhir tahun 2024 adalah Rp0.

3. Utang PFK BA 999.99 Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.511.568.014.506, merupakan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran berikutnya.

D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp169.505.587.248.935 dan Rp191.809.032.711.121, mengalami penurunan sebesar Rp22.303.445.462.186 atau 11,63 persen.

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga yang signifikan terdapat pada Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp114.456.395.428.905 dan Kementerian Pertahanan sebesar Rp11.599.534.755.334. Selain itu, penyajian nilai Utang Kepada Pihak Ketiga pada LKBUN sebesar Rp114.541.686.926.029, atas hal tersebut terdapat perbedaan sebesar Rp85.291.497.124 antara LKPP dengan LKBUN karena adanya perbedaan penyajian akun 219913.

Penyesuaian konsolidasian LKPP sebesar minus Rp104.091.436.837 adalah penyesuaian pada Utang kepada Pihak Ketiga berupa eliminasi atas transaksi resiprokal utang-piutang antara Kementerian/Lembaga.

Terdapat penurunan signifikan utang kepada pihak ketiga pada BA BUN 999.05 Pengelola Transfer ke Daerah sebesar Rp45.896.040.702.993 yang disebabkan adanya pembayaran kewajiban pilkada serentak oleh Pemda melalui pemotongan saldo TDF Pemda dan *intercept* DAU/DBH.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	Kenaikan/(Penurunan)
Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L	**55.153.283.256.867**	**38.112.534.006.174**	**17.040.749.250.693**
Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN	**114.456.395.428.905**	**153.708.347.553.967**	**(39.251.952.125.062)**
BA 999.00 Kuasa BUN	11.936.770.692.629	128.777.189.720	11.807.993.502.909
BA 999.03 Pengelola Investasi Pemerintah	253.152.246	674.852.747	(421.700.501)
BA 999.05 Pengelola Transfer ke Daerah	20.619.467.553.611	66.515.508.256.604	(45.896.040.702.993)
BA 999.08 Pengelola Belanja Lainnya	68.647.993.489.467	73.779.210.341.878	(5.131.216.852.411)
BA 999.99 Pengelola Transaksi Khusus	13.500.322.810.692	13.665.908.922.980	(165.586.112.288)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	Kenaikan/(Penurunan)
Penyesuaian LKBUN	(248.412.269.740)	(381.732.009.962)	133.319.740.222
Penyesuaian LKPP	**(104.091.436.837)**	**(11.848.849.020)**	**(92.242.587.817)**
Jumlah	**169.505.587.248.935**	**191.809.032.711.121**	**(22.303.445.462.186)**

D.2.2.1.3. Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp118.250.088.626.967 dan Rp112.693.785.312.937, mengalami kenaikan sebesar Rp5.556.303.314.030 atau 4,93 persen. Rincian Utang Bunga disajikan sebagai berikut.

Utang Bunga	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Utang Bunga Surat Berharga Negara	107.929.410.656.405	98.115.043.145.096
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman	10.320.677.970.562	14.578.742.167.841
a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	787.685.924.925	494.312.527.035
b. Utang Bunga Luar Negeri	9.532.992.045.637	14.084.429.640.806
Jumlah	**118.250.088.626.967**	**112.693.785.312.937**

Utang Bunga untuk instrumen Pinjaman dan SBN per 31 Desember 2024 terdiri dari:

1. Utang Bunga SBN/Utang Bunga Dalam Negeri sebesar Rp107.929.410.656.405, naik 10 persen dibanding Tahun 2023 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN. Utang Bunga SBN Tahun 2024 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan.
2. Utang Bunga Instrumen Pinjaman per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.320.677.970.562, terdiri dari:
   a. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp787.685.924.925, mengalami kenaikan sebesar 59,35 persen dari Tahun 2023; dan
   b. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp9.532.992.045.637, mengalami penurunan sebesar 32,32 persen dari Tahun 2023.

D.2.2.1.4. Utang Subsidi

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp19.445.038.835.881 dan Rp25.207.352.917.324, mengalami penurunan sebesar Rp5.762.314.081.443 atau 22,86 persen. Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

Utang Subsidi	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kementerian Keuangan	24.448.204.017.570	13.744.959.186.456
Kementerian Perhubungan	1.329.383.027.036	1.544.109.295.439
Kementerian PUPR	340.567.087.938	602.874.649.812
Kementerian KUKM	-	2.112.882.040.781
Kementerian Perdagangan	2.001.449.037	22.831.160
Kementerian Pertanian	1.187.173.940.483	9.843.898.951.915
Penyesuaian LKPP	(7.862.290.686.183)	(2.641.394.038.239)
Jumlah	**19.445.038.835.881**	**25.207.352.917.324**

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Eselon I	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Ditjen Anggaran	16.585.913.331.387	11.103.565.148.217
Ditjen Pajak	7.862.290.686.183	2.641.394.038.239
Jumlah	**24.448.204.017.570**	**13.744.959.186.456**

   a. Utang subsidi pada satker Ditjen Anggaran sebesar Rp16.585.913.331.387 yang merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan rincian Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Rp10.746.063.132.940, Utang Subsidi Listrik Rp5.839.850.198.447.
   b. Utang subsidi pada satker Ditjen Pajak sebesar Rp7.862.290.686.183. Utang Subsidi tersebut atas tagihan subsidi PPh

DTP Panas Bumi tahun 2024, subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2024, dan Utang Subsidi tahun 2024 yang berasal dari tagihan subsidi Pajak DTP reguler tahun-tahun sebelumnya (Utang Subsidi atas tagihan subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 s.d. 2020, subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023, dan subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2023)

2. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan
   Utang Subsidi 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.329.383.027.036. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp241.921.103.312, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.087.461.923.724.
3. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   Utang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp340.567.087.938 berupa Utang Subsidi pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rp337.115.561.301, dan Utang subsidi-estimasi sebesar Rp3.451.526.637 pada Ditjen Cipta Karya.
4. Utang Subsidi pada Kementerian Perdagangan
   Utang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.001.449.037 yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menjadi operator subsidi resi gudang.
5. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian
   Utang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.187.173.940.483 berupa tagihan atas penyaluran kredit yang belum dibayarkan pada periode Desember 2024 sebesar Rp81.572.807 dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui dua operator sebesar Rp1.187.092.367.676.
6. Penyesuaian LKPP
   Terdapat penyesuaian LKPP pada 31 Desember 2024 sebesar minus Rp7.862.290.686.183 untuk penyesuaian utang piutang antara Kementerian Keuangan BA 015 dengan BA BUN terkait subsidi pajak DTP.

D.2.2.1.5. Utang Transfer

Utang Transfer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.460.927.735.555 dan Rp52.187.965.129.846, mengalami kenaikan sebesar Rp45.272.962.605.709 atau 86,75 persen. Utang transfer tersebut merupakan kewajiban transfer ke daerah dengan rincian sebagai berikut.

Rincian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Utang TKD	43.227.738.725.030	200.961.455.619
Utang TKD Estimasi	54.233.189.010.525	51.987.003.674.227
Jumlah	**97.460.927.735.555**	**52.187.965.129.846**

1. Utang TKD

Utang TKD per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.227.738.725.030. Kewajiban TKD terdiri dari kewajiban DBH dan Kewajiban DAK Non Fisik. Terdapat peningkatan nilai kewajiban TKD pada 31 Desember 2024 yang disebabkan oleh penetapan PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kurang Bayar/Lebih Bayar Tahun 2023 sebagai dasar penetapan utang/piutang DBH definitif dan menyelesaikan Utang TKD Diestimasi. Rincian Kewajiban TKD disajikan pada tabel berikut.

Rincian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
DBH	43.011.107.391.000	2.356.367
DAK Non fisik	216.631.334.030	200.959.099.252
Jumlah	**43.227.738.725.030**	**200.961.455.619**

a. Utang TKD Satker DBH
   Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.011.107.391.000. Rincian Utang TKD Satker DBH disajikan pada tabel berikut.

Transaksi	Nilai
Kewajiban DBH TA 2023 *Audited*	2.356.367
Penetapan kewajiban DBH TA 2023 berdasarkan PMK No. 89 Tahun 2024	56.216.473.637.633
Penyelesaian kewajiban DBH TA 2023 berdasarkan KMK No. 44KM.7/2024	(13.205.368.603.000)
Jumlah	**43.011.107.391.000**

b. Utang TKD Satker DAK Nonfisik

Nilai utang Transfer DAK Nonfisik per 31 Desember 2024 sebesar Rp216.631.334.030 terdapat pada Satker Transfer DAK Nonfisik. Saldo tersebut merupakan Utang Transfer DAK Nonfisik yang terdiri dari kurang salur Dana TPG ASND, TKG ASND, dan Tamsil Guru ASND tahun 2023 *Audited* serta terdapat pengakuan dan penyelesaian utang atas kurang salur DAK Non Fisik – TPG, TKG, dan Tamsil guru ASND. Belum terdapat penyelesaian atas utang dimaksud sampai dengan periode 31 Desember 2024. Rincian Utang TKD Satker DAK Non Fisik disajikan pada tabel berikut.

Jenis Dana	Nilai
Dana TPG ASND	81.998.462.116
Dana TKG ASND	6.095.345.532
Dana Tamsil Guru ASND	128.537.526.382
Jumlah	**216.631.334.030**

Rincian Utang Transfer ke Daerah disajikan pada **Lampiran 28**.

2. Utang TKD Estimasi

Utang TKD Estimasi - DBH per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.233.189.010.525 disebabkan kenaikan penerimaan negara yang akan dibagihasilkan yang berasal dari komponen penerimaan Non-SDA/Pajak, sehingga potensi/estimasi kurang bayar DBH tahun 2024 meningkat. Rincian Utang TKD Diestimasi disajikan pada tabel berikut.

Jenis Dana	Nilai
DBH PPh Pasal 21	19.254.598.969.225
DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.120.527.339.668
DBH PBB Perkebunan	1.491.699.899.192
DBH PBB Perhutanan	314.216.253.744
DBH PBB Pertambangan	5.594.560.370.817
DBH PBB Migas	4.254.614.530.463
DBH PBB Pertambangan Panas Bumi	168.063.591.610
DBH PBB Lainnya	135.884.219.906
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.514.190.954.436
DBH Minyak Bumi	3.377.542.571.379
DBH Gas Bumi	3.492.231.044.390
DBH Mineral dan Batubara - Landrent	278.547.556.195
DBH Mineral dan Batubara - Royalti	11.846.933.254.702
DBH Kehutanan - DR	115.827.916.622
DBH Kehutanan - IIUPH	48.718.470.000
DBH Kehutanan - PSDH	333.970.079.464
DBH Panas Bumi-Iuran Tetap	1.947.825.903
DBH Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah	849.767.998.058
DBH Panas Bumi-Iuran Produksi	39.346.164.751
Jumlah	**54.233.189.010.525**

D.2.2.1.6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (UJP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 786.695.375.102.677 dan Rp638.953.070.948.495, mengalami kenaikan sebesar Rp147.742.304.154.182 atau 23,12 persen. Nilai neto Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebesar Rp786.075.230.865.677 berasal dari nilai bruto sebesar Rp786.695.375.102.677 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp885.329.385.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp265.185.148.000. Rincian Bagian Lancar UJP disajikan sebagai berikut.

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BUN		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri [1)]	92.568.473.192.354	87.150.338.807.931
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.980.796.808.650	4.682.550.610.035
Bagian Lancar Obligasi Negara dan SBSN	687.017.166.440.462	546.991.016.669.505
Bagian Lancar UJP BUN	**786.566.436.441.466**	**638.823.906.087.471**

Bagian Lancar UJP	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
K/L		
Bagian Lancar UJP pada Kementerian Luar Negeri	128.938.661.211	129.164.861.024
Jumlah Bruto	**786.695.375.102.677**	**638.953.070.948.495**
Unamortized Discount	(885.329.385.000)	(368.630.075.000)
Unamortized Premium	265.185.148.000	440.320.180.000
Jumlah Neto	**786.075.230.865.677**	**639.024.761.053.495**

[1)]Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 29.A** dan **Lampiran 29.B**.

D.2.2.1.7. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp62.418.300.000.000 dan Rp31.412.000.000.000, mengalami kenaikan sebesar Rp31.006.300.000.000 atau 98,71 persen. Nilai neto Utang SBN Jangka Pendek sebesar Rp60.851.642.325.000 berasal dari nilai bruto sebesar Rp62.418.300.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.566.657.675.000. Terdapat kenaikan Utang SBN – Jangka Pendek di Tahun 2024 dikarenakan penerbitan SBN Jangka Pendek pada Tahun 2024 yang lebih besar dari pelunasannya. Rincian Utang SBN Jangka Pendek disajikan sebagai berikut.

Utang SBN Jangka Pendek	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Utang SBN Jangka Pendek	62.418.300.000.000	31.412.000.000.000
Jumlah Bruto	**62.418.300.000.000**	**31.412.000.000.000**
Unamortized Discount	(1.566.657.675.000)	(467.650.585.000)
Jumlah Neto	**60.851.642.325.000**	**30.944.349.415.000**

D.2.2.1.8. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.620.122.728.245 dan Rp27.965.899.727.133, mengalami kenaikan Rp35.654.223.001.112 atau 127,49 persen. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp61.732.245.262.634 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pendapatan perpajakan per 31 Desember 2024 yang belum terbit SP2D-nya.

D.2.2.1.9. Pendapatan Diterima Di muka

Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.791.568.189.681 dan Rp7.476.388.964.347, mengalami kenaikan sebesar Rp1.315.179.225.334 atau 17,59 persen. Nilai Pendapatan Diterima Di Muka yang signifikan disajikan sebagai berikut.

1. BP Batam sebesar Rp4.817.866.457.089 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Lahan, Pendapatan sewa di Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan, dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.
2. Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.075.186.372.161 yang merupakan pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk menyerahkan barang/jasa.

Rincian Pendapatan Diterima Di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

D.2.2.1.10. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp111.122.213.990 dan Rp403.617.716.901, mengalami penurunan sebesar Rp292.495.502.911 atau 72,47 persen. Saldo Pendapatan Migas Ditangguhkan merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.1.11. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp91.787.396.199 dan Rp4.661.192.664, mengalami kenaikan sebesar Rp87.126.203.535 atau 1.869,18 persen. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp16.794.769.706 berupa utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang belum disetor ke rekening kas negara. Selain itu,

terdapat penyesuaian nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar minus Rp46.163.118.612 yang dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk mereklasifikasi (mengakui) Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor ke Pendapatan Pajak Lain-lain, dan menyesuaikan nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

D.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.940.494.201.648.217 dan Rp8.444.424.909.729.798, mengalami kenaikan sebesar Rp496.069.291.918.419 atau 5,87 persen. Ringkasan Kewajiban Jangka Panjang disajikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)	% Kenaikan / (Penurunan)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	7.389.691.085.866.588	6.969.118.619.680.504	6,03
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	943.372.917.754.043	886.303.870.122.628	6,44
Kewajiban Konsesi Jasa	607.430.198.027.586	589.002.419.926.666	3,13
Jumlah	**8.940.494.201.648.217**	**8.444.424.909.729.798**	**5,87**

Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 terutama berasal dari kenaikan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp420.572.466.186.084 atau 6,03 persen.

D.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

D.2.2.2.1.1. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp44.273.286.260.921 dan Rp31.552.061.212.395, mengalami kenaikan sebesar Rp12.721.225.048.526 atau 40,32 persen.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri bersumber dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Bank DKI, Bank Mandiri, PT. BNI (Persero) dan PT. BTN (Persero). Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri paling signifikan ke Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp31.154.517.794.629.

D.2.2.2.1.2. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.890.023.998.123.707 dan Rp6.563.241.522.670.168, mengalami kenaikan sebesar Rp326.782.475.453.539 atau 4,98 persen. Nilai neto Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.883.109.422.194.707 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.890.023.998.123.707 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp49.634.944.892.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp42.720.368.963.000. Rincian Utang Jangka Panjang SBN disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang SBN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Utang Jangka Panjang SBN	6.890.023.998.123.707	6.563.241.522.670.168
Unamortized Discount	(49.634.944.892.000)	(49.942.041.191.000)
Unamortized Premium	42.720.368.963.000	44.567.904.657.000
Jumlah Neto	**6.883.109.422.194.707**	**6.557.867.386.136.168**

Rincian *Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium* dapat dilihat pada **Lampiran 29.C, Lampiran 29.D** dan **Lampiran 29.E.**

D.2.2.2.1.3. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp86.273.473.974.300 dan Rp39.891.869.021.700, mengalami kenaikan sebesar Rp46.381.604.952.600 atau 116,27 persen.

Transaksi ini merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

D.2.2.2.1.4. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp31.042.846.841.712 dan Rp25.871.215.355.337 mengalami kenaikan sebesar Rp5.171.631.486.375 atau 19,99 persen.

Hal ini disebabkan karena terdapat Surat Menteri Keuangan nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 Hal Pengakuan dan Penetapan UPSL Program THT yang Dikelola PT Asabri (Persero) sebesar Rp5.171.631.486.375.

Rincian Utang Kepada Dana Pensiun dan THT sebagai berikut.

Uraian	Nilai	Pembayaran	Sisa
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2022	22.176.507.759.421	-	22.176.507.759.421
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2023	3.694.707.595.916	-	3.694.707.595.916
Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri Tahun 2024	5.171.631.486.375	-	5.171.631.486.375
Jumlah			**31.042.846.841.712**

D.2.2.2.1.5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp344.461.288.264.152 dan Rp313.375.462.067.170, mengalami kenaikan sebesar Rp31.085.826.196.982 atau 9,92 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya disajikan sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. BA 999.03 Investasi Pemerintah	2.134.614.540	1.750.007.897
2. BA 999.04 Pemberian Pinjaman	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
3. BA 999.08 Belanja Lainnya	58.555.708.079.202	51.000.911.330.754
4. BA 999.99 Transaksi Khusus	280.257.601.688.710	259.362.722.970.725
5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	3.760.684.864.971	1.127.646.013.793
6. Penyesuaian Konsolidasian LKPP	(26.768.710.430)	(29.495.983.158)
Jumlah	**344.461.288.264.152**	**313.375.462.067.170**

1. BA 999.03 Investasi Pemerintah
   Nilai utang jangka panjang dalam negeri lainnya berasal dari UAKPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp2.134.614.540. Nilai tersebut merupakan pencairan klaim subrogasi mitra pada tahun 2022 sebesar Rp860.633.286, pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2023 sebesar Rp889.374.611 yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2024 sebesar Rp384.606.643.

2. BA 999.04 Pemberian Pinjaman
   Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2024 dengan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah. sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

3. BA 999.08 Belanja Lainnya
   Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.555.708.079.202 dan Rp51.000.911.330.754. Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas. Kewajiban ini merupakan lawan akun dari Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) dan Dana *Equipment & Services* (E&S) yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

4. BA 999.99 Transaksi Khusus
   Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp280.257.601.688.710 dan Rp259.362.722.970.725. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Asabri (Persero), serta pembayaran sewa Aset Eks Pertamina. AIP ini

selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BA 999.99 dengan rincian sebagai berikut.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada BA 999.99	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	250.426.347.869.742	231.572.672.909.516
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	29.830.903.367.301	27.789.462.568.147
Aset Eks Pertamina	350.451.667	587.493.062
Jumlah	**280.257.601.688.710**	**259.362.722.970.725**

5. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L dengan rincian sebagai berikut

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada K/L	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Kementerian Luar Negeri	670.822.370.149	812.174.395.025
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	335.150.056.647	268.476.157.326
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	29.447.336.699	46.995.461.442
Kementerian Perhubungan	2.687.370.134.451	-
Kementerian Kesehatan	37.894.967.025	-
Jumlah	**3.760.684.864.971**	**1.127.646.013.793**

a. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian Luar Negeri adalah utang jangka panjang pembelian tanah dan gedung Perwakilan RI di luar negeri.
b. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian ESDM merupakan pencadangan dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) ditambah dengan dana *Equipment & Services* (E&S).
c. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada LPP TVRI adalah Utang BHP Izin Stasiun Radio (ISR) yang timbul karena penggunaan frekuensi oleh satuan-satuan transmisi yang dimiliki oleh LPP TVRI.
d. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian Kesehatan merupakan transaksi penyediaan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator pada Ditjen Yankes.
e. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Kementerian Perhubungan merupakan kekurangan pembayaran atas pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) PT. KAI pada Ditjen Perkeretaapian.

6. Penyesuaian Konsolidasian LKPP
Penyesuaian konsolidasian LKPP sebesar minus Rp26.768.710.430 merupakan eliminasi transaksi resiprokal utang piutang BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo.

D.2.2.2.1.6. Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp530.768.330.796 dan Rp560.625.887.734 mengalami penurunan sebesar Rp29.857.556.938 atau 5,33 persen. Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi disajikan sebagai berikut.

No	K/L	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1	Kementerian Pertanian	420.266.452.275	420.266.452.275
2	Kementerian Perhubungan	110.501.878.521	140.359.435.459
	Jumlah	**530.768.330.796**	**560.625.887.734**

1. Kementerian Pertanian
Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 berupa Utang Subsidi Pupuk sebesar Rp420.266.452.275 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

2. Kementerian Perhubungan
Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.501.878.521. Merupakan kurang bayar atas *Public Service Obligation* (PSO) TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521 dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000

D.2.2.2.2. Utang Jangka Panjang Luar Negeri

D.2.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp943.345.582.337.528 dan Rp886.277.290.731.920, mengalami kenaikan sebesar Rp57.068.291.605.608 atau 6,44 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena penarikan pokok

pinjaman pada Tahun 2024 yang lebih besar dari pembayarannya. Rincian Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Utang Program	514.882.523.504.606	496.507.150.437.946
Utang Proyek	428.463.058.832.922	389.770.140.293.974
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	**943.345.582.337.528**	**886.277.290.731.920**

Nilai Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2024 merupakan bagian dari total *outstanding* Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp1.035.914.055.529.882 (Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp943.345.582.337.528 ditambah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar Rp92.568.473.192.354).

Profil jatuh tempo utang pemerintah dapat dilihat pada **Lampiran 26**.
Rincian Utang Program dapat dilihat pada **Lampiran 29.A**.
Rincian Utang Proyek dapat dilihat pada **Lampiran 29.B**.

D.2.2.2.2. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp27.335.416.515 dan Rp26.579.390.708, mengalami kenaikan sebesar Rp756.025.807 atau 2,84 persen. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat tagihan pencairan utang. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya terdapat pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar. Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebagai berikut.

Lender		Mata Uang Asal	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545
Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1,135,018	18.338.485.826	17.523.542.902
Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223,450.21	3.759.029.144	3.817.946.261
Jumlah*			**27.335.416.515**	**26.579.390.708**

**) kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157/USD* dan *Rp16.822/EUR*

Rincian *promissory note* Pemerintah Indonesia pada LKI disajikan sebagai berikut.

LKI	Mata Uang Penempatan	*Promissory Note*	Tanggal	Nilai
IDA	IDR	2 *(two) promissory notes*	19 Januari 1973	129.523.754
		1 *(one) promissory note*	21 September 1973	355.340.804
		1 *(one) promissory note*	26 Desember 1973	71.956.501
		1 *(one) promissory note*	25 Mei 1974	514.542.829
		1 *(one) promissory note*	14 Juli 2000	2.163.936.250
		1 *(one) promissory note*	22 Mei 2003	2.002.601.407
MIGA	USD	1 *(one) promissory note*	27 Juni 1988	1.135.018
CFC	EUR	1 *(one) promissory note*	03 Agustus 1990	742.326
		1 *(one) promissory note*	19 Agustus 1991	2.969.303.

D.2.2.2.3. Kewajiban Konsesi Jasa
D.2.2.2.3.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan Kewajiban yang timbul dari dampak pengakuan Aset Konsesi Jasa yang berasal dari mitra (badan usaha) sesuai dengan perjanjian Konsesi Jasa antara entitas pemerintah pusat dengan mitra. Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp607.430.198.027.586 dan Rp589.002.419.926.666, mengalami kenaikan sebesar Rp18.427.778.100.920 atau 3,13 persen. Rincian Kewajiban Konsesi Jasa sebagai berikut.

1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp434.962.489.158.828 terdiri atas Skema Pembayaran Kepada Mitra sebesar Rp5.143.169.958.383 dan Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra sebesar Rp429.819.319.200.445.

2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp161.631.987.457.576 terdiri dari Skema Pembayaran Kepada Mitra sebesar Rp2.015.288.408.540 dan Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra sebesar Rp159.616.699.049.036.
3) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp9.574.437.270.881. Nilai kewajiban ini timbul dari pengakuan Aset Konsesi Jasa atas Paket Konstruksi Proyek Palapa Ring (Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, Palapa Ring Timur) dan Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan Skema Pembayaran Kepada Mitra.
4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp1.261.284.140.301 merupakan kewajiban atas konsesi jasa partisipasi mitra pada Badan Usaha Pelabuhan Laut.

D.2.3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.423.347.593.268.352 dan Rp3.536.140.446.352.577, mengalami penurunan sebesar Rp112.792.853.084.225 atau 3,19 persen. Penjelasan lebih rinci terkait perubahan ekuitas dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

a. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak *Production Sharing* (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD 471,802,611.34 atau ekuivalen sebesar Rp7.622.914.791.421. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 7.C.**

Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 jo. No. 121 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Penetapan HGBT diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang: 1) industri pupuk, 2) industri petrokimia, 3) industri *oleochemical*, 4) industri baja, 5) industri keramik, 6) industri kaca, 7) industri sarung tangan karet, serta 8) penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Penetapan HGBT dilakukan melalui penyesuaian harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor atau tarif penyaluran gas bumi, yang menyebabkan penurunan harga gas bumi di sejumlah KKKS yang memberlakukan HGBT.

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari SKK Migas dan BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas dan BPMA diketahui terdapat besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT dengan rincian:

a. Pada tahun 2024 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp43.836.298.588.038 dan Rp85.193.127.074. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.251.980.232.795 dan Rp1.809.039.059. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp13.509.705.487.059 dan Rp30.538.766.662. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp4.269.443.320.167 dan Rp22.752.551.699. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp18.805.169.548.017 dan Rp30.092.769.654.
b. Pada tahun 2023 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp38.681.435.809.060 dan Rp81.298.459.247. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.356.957.354.460 dan Rp3.458.340.691. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp11.362.912.854.107 dan Rp48.416.510.302. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.305.320.925.338 dan Rp3.135.779.299. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar

Rp13.656.244.675.155 dan Rp26.287.828.954.

c. Pada tahun 2022 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp52.228.049.220.107 dan Rp151.131.951.406. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp9.523.533.983.284 dan Rp6.856.148.650. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp15.948.330.215.292 dan Rp95.985.566.897. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.075.963.489.095 dan Rp8.577.758.915. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp23.680.221.532.435 dan Rp39.712.476.945.

d. Pada tahun 2021 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp40.992.195.353.406 dan Rp133.384.528.710. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.408.926.449.236 dan Rp4.700.821.802. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp10.583.363.221.527 dan Rp65.811.152.672. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.131.465.924.649 dan Rp25.779.665.891. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp17.868.439.757.994 dan Rp37.092.888.344.

e. Pada tahun 2020 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp27.970.425.235.344 dan Rp200.129.371.792. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp2.454.640.286.309 dan Rp3.222.044.251. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.924.671.965.471 dan Rp25.591.368.636. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp5.204.357.297.105 dan Rp94.397.142.981. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp16.386.755.686.457 dan Rp76.918.815.925. Pada tahun 2020 terdapat nilai kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah senilai Rp18.133.883.933. Namun demikian, atas nilai tersebut pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengakumulasikan seluruh KKKS di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA, maka total nilai kewajiban pemerintah, penyesuaian HGBT, dan bagian negara akhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Rincian	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
*(**1**) Bagian negara awal (sebelum HGBT)*	*28.170.554.607.136*	*41.125.579.882.116*	*52.379.181.171.513*	*38.762.734.268.307*	*43.921.491.715.112*
*(**2**) Kewajiban pemerintah terhadap Kontraktor*	*5.298.754.440.086*	*6.157.245.590.541*	*3.084.541.248.010*	*7.308.456.704.637*	*4.292.195.871.866*
*(**3**) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah **[3 = 1 - 2]***	*22.871.800.167.050*	*34.968.334.291.575*	*49.294.639.923.503*	*31.454.277.563.670*	*39.629.295.843.246*

Rincian	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
*(**4**) Penyesuaian HGBT (kept-whole kontraktor + penurunan entitlement GOI akibat HGBT)*	*6.408.125.664.668*	*17.062.801.645.237*	*25.574.705.914.123*	*17.771.745.059.561*	*20.794.033.525.575*
*(**5**) Bagian negara akhir atau setelah HGBT [**5 = 3 - 4**]*	*16.463.674.502.382*	*17.905.532.646.338*	*23.719.934.009.380*	*13.682.532.504.109*	*18.835.262.317.671*
*(**6**) Proporsi penyesuaian bagian negara [**6 = 4 / 3**]*	*28,02%*	*48,80%*	*51,88%*	*56,50%*	*52,47%*
*(**7**) Kekurangan Bagian Pendapatan KKKS yang Tidak Tertutupi dari Kept-whole *)*	*18.133.883.933*	*-*	*-*	*-*	*-*
Total penyesuaian HGBT sejak 2020 s.d. tahun ybs:	***6.408.125.664.668***	***23.470.927.309.905***	***49.045.633.224.028***	***66.817.378.283.589***	***87.611.411.809.164***

** Pada tahun 2024, nilai kekurangan bagian pendapatan KKKS (Medco E&P Malaka) yang tidak tertutupi dari keptwhole tersebut telah ditindaklanjuti dengapenyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku*

Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas melakukan rekonsiliasi hulu-hilir atas implementasi HGBT. Berdasarkan data SKK Migas dan BPMA, diketahui bahwa terdapat penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 sebesar USD255,305,550.

Tahun	Total Hasil Rekon	Penyelesaian 2022	Penyelesaian 2023	Penyelesaian 2024	Total penyelesaian	%	Outstanding	%
SKK Migas								
2020	51.950.364		45.903.905	4.741.341	50.645.246	97,49	1.305.118	2,51
2021	80.434.950	6.167.215	69.121.549	4.015.067	79.303.831	98,59	1.131.119	1,41
2022	64.300.968		54.304.427	7.053.859	61.358.286	95,42	2.942.682	4,58
2023	58.375.256			55.025.108	55.025.108	94,26	3.350.148	5,74
Subtotal	**255.061.538**	**6.167.215**	**169.329.881**	**70.835.375**	**246.332.471**	**96,58**	**8.729.067**	**3,42**
BPMA								
2020	95.257			95.257	95.257	100,00		
2021	133.569		18.742	114.827	133.569	100,00		
2022	13.592		4.109	9.483	13.592	100,00		
2023	1.594			1.594	1.594	100,00		
Subtotal	**244.012**	**-**	**22.851**	**221.161**	**244.012**	**100,00**		
Total SKK+BPMA	**255.305.550**	**6.167.215**	**169.352.732**	**71.056.536**	**246.576.483**	**96,58**	**8.729.067**	**3,42**

Pada periode pelaporan keuangan tahun 2024, diketahui bahwa terhadap nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT untuk KKKS yang berada di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA telah dilakukan penyelesaian sebesar USD6,167,215 pada tahun 2022, USD169,352,732 pada tahun 2023, dan USD71,056,636 pada tahun 2024. Nilai penyelesaian 2023 telah diterima pada rekening kas umum negara pada tahun 2023, sedangkan atas penyelesaian tahun 2022 dan 2024 telah dicadangkan untuk dipindahbukukan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, realisasi nilai pembayaran atas penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT telah mencapai USD246,576,483 atau 96,58 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024 tersisa *outstanding* hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 yang belum diselesaikan senilai USD8,729,067 atau mencapai 3,42 persen dari nilai totalnya.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084980 Rekening Panas Bumi

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain *reimbursement* PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 ke RKUN/ rekening Pengusaha Panas Bumi

didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.082.717.172.953 dan Rp1.912.870.273.099. Berikut adalah mutasi Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi.

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 *(Audited)*
I.	**Saldo Awal**	**1.912.870.273.099**	**1.588.329.504.770**
II.	**Penerimaan:**		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	3.610.596.954.925	3.727.920.311.039
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
	Total Penerimaan	**3.610.596.954.925**	**3.727.920.311.039**
III.	**Pengeluaran:**		
	1. Pembayaran PBB Panas Bumi [a)]	447.695.185.254	439.988.647.320
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi [b)]	179.482.201.175	175.871.851.026
	3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum [c)]	106.361.907.803	93.180.322.346
	4. Pemindahbukuan PNBP Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN [d)]	2.707.210.760.839	2.694.338.722.018
	5. Koreksi Pembukuan debit	-	-
	Total Pengeluaran	**3.440.750.055.071**	**3.403.379.542.710**
IV.	**Kenaikan/Penurunan (II - III)**	**169.846.899.854**	**324.540.768.329**
V.	**Saldo Akhir (I + IV)** [e)]	**2.082.717.172.953**	**1.912.870.273.099**

Penjelasan:

a) Pembayaran PBB Panas Bumi tahun 2024 sebesar Rp447.695.185.254.

b) Pembayaran kembali *(reimbursement)* PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp179.482.201.175 adalah *reimbursement* PPN dengan perincian: (1) Pengajuan Tahun 2017 sebesar Rp4.571.844.078, (2) Pengajuan Tahun 2021 sebesar Rp6.867.812.518, (3) Pengajuan Tahun 2022 sebesar Rp61.434.097.547, dan (4) Pengajuan Tahun 2023 sebesar Rp106.608.447.032.

c) Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha panas bumi sebesar Rp Rp106.361.907.803 dengan rincian sebagai berikut.

Penggantian Bonus Produksi Tahun	Jumlah
2019	443.659.147
2020	746.121.754
2021	934.596.365
2022	222.044.859
2023	56.543.726.335
2024	47.471.759.343
Total	**106.361.907.803**

d) Pemindahbukuan PNBP Panas Bumi Tahun 2024 ke RKUN sebesar Rp2.707.210.760.839 terdiri dari:
   1) PNBP Panas Bumi Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp381.732.009.962.
   2) PNBP Panas Bumi Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp818.083.599.523.
   3) PNBP Panas Bumi Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp780.271.531.406.
   4) PNBP Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp727.123.619.948.

e) Saldo Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.082.717.172.953 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Terdapat selisih Rp5 antara rekening koran dengan saldo neraca 31 Desember 2024 karena pembulatan.

2. Rekening TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Sampai dengan Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan

penarikan DBH nontunai berupa TDF yang berasal dari saldo TDF tahun 2023 kepada 546 pemda dengan total Rp55.189.182.222.060. Sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 masih terdapat sisa saldo TDF 2023 yang belum dilakukan penarikan sebesar Rp11.309.149.906.440 dari 33 Pemda.

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat pengisian TDF yang berasal dari penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2023 non tunai - TDF yang dialokasikan pada TA 2024 dengan total Rp9.248.890.540.000 sehingga dana DBH nontunai berupa TDF yang disimpan di rekening TDF pada 31 Desember 2024 sebesar Rp20.558.040.446.440. Rincian saldo DBH nontunai tahun 2024 yang disimpan dalam Rekening TDF terdapat pada **Lampiran 7.D**.

3. Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan tersebut. RPATA merupakan rekening untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Pengelolaan RPATA berpedoman pada PMK Nomor 109 tahun 2023 menggantikan probis Bank Garansi yang diterapkan sebelumnya.

Saldo RPATA pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp 22.036.095.270.733. Mutasi saldo RPATA sejak pembentukan RPATA s.d. 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

			Pembayaran RPATA s.d. 31 Desember 2024				
Jumlah K/L	Nilai Kontrak	Nilai Pembentukan RPATA	SPM Pembayaran RPATA (Bruto)	Potongan Total	SPM Pembayaran RPATA (Netto)	SPM Penihilan ke RKUN	Nilai RPATA 31 Desember 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)	(7)	(8) = (3-4-7)
82 K/L & 1 BUN	84.628,47	22.370,42	328,99	32,81	296,18	5,33	22.036,1

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai pembentukan awal RPATA adalah sebesar Rp22.370.419.976.736. Dari dana tersebut s.d. 31 Desember 2024 telah dilakukan pembayaran bruto sebesar Rp328.988.987.322 dan penihilan ke RKUN sebesar Rp5.335.718.681 sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo RPATA sebesar Rp 22.036.095.270.733. Rincian mutasi saldo RPATA per Kementerian/Lembaga sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 7.F**.

4. Perjanjian Konsesi Jasa

Berdasarkan PSAP 16, Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi (entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat) dan mitra (badan usaha) dimana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu, dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Dalam LKPP 2024 telah disajikan nilai Aset dan kewajiban Konsesi Jasa yang berasal dari Perjanjian Konsesi Jasa pada empat Kementerian Lembaga yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

a. Kementerian PUPR
   1) Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra berasal dari pencatatan 89 perjanjian konsesi jasa yaitu :
      a) 1 perjanjian konsesi untuk pekerjaan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan *Callender Hamilton*.
      b) 1 perjanjian untuk pekerjaan pengembangan *Multi Lane Free Flow*.
      c) 2 perjanjian konsesi untuk pekerjaan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera dan Riau.
      d) 83 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
      e) 2 perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk

pekerjaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yakni SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong.

2) Dari 83 PPJT, terdapat 4 PPJT yang ditandatangani pada tahun 2023, yaitu:
   a) PPJT Akses Patimban Nomor 30, tanggal 24 Januari 2023 dengan masa konsesi selama 50 tahun mulai 24 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2073 dengan status proses pengadaan tanah.
   b) PPJT Ruas Kamal - Teluk Naga - Rajeg Nomor 01, tanggal 1 Agustus 2023 dengan masa konsesi selama 40 tahun mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2063 dengan status proses pengadaan tanah.
   c) PPJT Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir - Ulujami Nomor 01, tanggal 11 Oktober 2023 dengan masa konsesi selama 45 tahun mulai 11 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2068 dengan status proses pengadaan tanah.
   d) PPJT Rengat - Pekanbaru Nomor 10, tanggal 22 Desember 2023 dengan status proses konstruksi.

b. Kementerian Perhubungan
   1) Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Perkeretaapian merupakan Aset Konsesi Jasa atas penyelenggaraan 4 perjanjian, yaitu:
      a) Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak HK.201/A.566/DJKA/ 12/17 dan Nomor Kontrak KL.705/XII/10/KA2017 tanggal 19 Desember 2017. Aset yang dikonsesikan berupa aset prasarana (jalur LRT Jabodebek dan fasilitas pengoperasian), peralatan persinyalan, aset sarana, aset perawatan prasarana, aset prasarana (17 Stasiun) dan aset Depo. Konsesi berlangsung selama 50 tahun sejak izin operasi ditetapkan.
      b) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Nomor Kontrak HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan Nomor Kontrak HK.222/VII/2/KA-2014 tanggal 10 Juli 2014. Konsesi berlangsung selama 30 tahun sejak izin operasi ditetapkan. Aset yang dikonsesikan berupa Aset Prasarana (Tanah, Jalur, Fasilitas Operasi) milik mitra.
      c) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare oleh PT. Celebes Railway Indonesia dengan Addendum Kontrak Pertama Nomor: HK.201/A.250/DJKA/IV/19 dan Nomor: 01/EXT/IV/CRI-DU/2019 tanggal 5 April 2019. Konsesi berlangsung selama 16 tahun sejak tanggal operasi komersial. Aset yang dikonsesikan berupa Prasarana Perkeretaapian Umum Makassar – Parepare.
      d) Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Cepat Jakarta – Bandung oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China dengan addendum kontrak kedua Nomor: PJ 22 TAHUN 2017 dan Nomor: 10100/HK.02/2017 tanggal 4 Oktober 2017. Konsesi berlangsung selama 50 tahun sejak izin operasi ditetapkan. Aset yang dikonsesikan berupa Jalur Kereta Api Cepat, Fasilitas Pengoperasian Kereta Api Cepat, Stasiun dan Depo yang dimiliki oleh pihak kedua.
   2) Aset Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Laut merupakan Aset Konsesi Jasa atas penyelenggaraan 40 Perjanjian, yang terdiri dari 7 Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) BMN, 1 perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan 32 Perjanjian Konsesi *Non-Existing*.
   3) Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Ditjen Perhubungan Darat merupakan aset pemerintah yang dikerjasamakan dalam rangka pelaksanaan perjanjian KPBU *Proving Ground* antara Ditjen Perhubungan Darat dengan PT IIAPG.
   4) Konsesi Jasa pada Ditjen Perhubungan Udara meliputi:
      a) Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah terdiri dari Aset dalam rangka KSP BMN pada 5 Bandar Udara (Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Radin Inten II, Bandara Tjilik Riwut, dan Bandara Sentani), dan tanah yang digunakan dalam rangka KPBU Bandara Dhoho Kediri, dimana

atas tanah tersebut telah diserahkan kepemilikannya kepada Ditjen Perhubungan Udara.

b) Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra, terdiri dari aset sehubungan dengan realisasi investasi dalam rangka KSP BMN pada 5 Bandar Udara (Bandara Fatmawati Soekarno, Bandara Hanandjoeddin, Bandara Radin Inten II, Bandara Tjilik Riwut, dan Bandara Sentani), merupakan aset konsesi jasa partisipasi mitra sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian KPBU Bandara Dhoho Kediri antara Kementerian Perhubungan dengan PT Surya Dhoho Investama.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Aset Konsesi Jasa pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Palapa Ring dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Satria I.

1) Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Palapa Ring

Terdapat tiga perjanjian kemitraan dengan pola konsesi jasa, yaitu:

a) Palapa Ring Barat

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT Palapa Ring Barat Nomor 284/M.KOMINFO/HK.03.02/02/2016 dan Nomor 002/PRB/PD-DIR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat dengan amandemen terakhir yaitu Amandemen ke dua melalui perjanjian Nomor 01/M.KOMINFO/HK.04.02/03/2024 dan Nomor: 1901/PRB/PDDIR/III/2024 tanggal 19 maret 2024.

Pada tanggal 29 Februari 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa Ring Barat (PT PRB) menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Barat yang berisi tentang kesepakatan terkait kerjasama pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket barat. Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi selama 15 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) yaitu tanggal 2 Maret 2018 sehingga akan berakhir tanggal 1 Maret 2033.

b) Palapa Ring Tengah

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah Nomor 286/M.KOMINFO/HK.03.03/02/2016 dan Nomor 001/PKS/DU/II/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang telah mengalami amandemen, dengan amandemen terakhir adalah amandemen keempat Perjanjian Kerjasama Palapa Ring Tengah dengan nomor perjanjian Nomor 02/M.KOMINFO/HK.04.02/03/2024 dan Nomor 003/AMD/DU/III/2024.

Pada tanggal 4 Maret 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Len Telekomunikasi Indonesia (PT LTI) menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Tengah yang berisi tentang kesepakatan terkait kerjasama pembangunan dan pengelolaan serta pemeliharaan jaringan tulang punggung serat optik palapa ring paket tengah. Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi selama 15 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD) yaitu tanggal 21 Desember 2018 sehingga akan berakhir tanggal 20 Desember 2033.

c) Palapa Ring Timur

Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan PT Palapa Timur Telematika tentang Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur Nomor

1425/M.KOMINFO/HK.03.02/09/2016 dan Nomor 2901/PTT/PDDIR/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 yang telah mengalami beberapa kali amandemen, dengan amandemen terakhir adalah amandemen kedelapan dengan Nomor kontrak 03/M.KOMINFO/HK.04.02/03/2024 dan Nomor 1901/AMD/PTT-KOMINFO/EXT/III/2024 tanggal 19 Maret 2024.

Dalam Perjanjian tersebut diatur masa konsesi selama 15 tahun sejak tanggal *Commercial Operation Date* (COD). Masing-masing Badan Usaha Pelaksana (BUP) membangun jaringan dan selanjutnya akan mengoperasikan dan memelihara jaringan tersebut selama 15 tahun dan pada masa akhir operasi seluruh fasilitas akan dialihstatuskan kepada Pemerintah.

2) Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Satria I

SATRIA-1 bertujuan untuk mendukung percepatan pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Penyediaan SATRIA-1 menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme pengembalian investasi melalui pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Satelit Nusantara Tiga sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan masa konsesi 15 tahun terhitung sejak tanggal operasi komersial (*Commercial Operation Date* (COD).

Pekerjaan SATRIA-1 berdasarkan Kontrak Nomor 372/M.KOMINFO/HK.04.03/5/2019 dan Nomor 001/KON/NST/V/2019 Tanggal 3 Mei 2019 dengan amandemen terakhir adalah amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Proyek KPBU Untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah Nomor 225/BAKTI.31/KS.1.01/11/2021 dan Nomor 014/AMAND/SNT/XI/2021 Tanggal 29 November 2021.

d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Pada BP Batam terdapat beberapa perjanjian Konsesi Jasa, yaitu sebagai berikut:

1) Perjanjian Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pengelola Logistik Aerocity merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama untuk desain, pembangunan, pembiayaan, pengalihan, pengoperasian, dan pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim yang terdiri dari Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity dan PT Bandara Internasional Batam dengan Nomor perjanjian 47/SPJ/KA/12/2021;0001/BIB/2021.
2) Perjanjian Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan Perjanjian Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry International Batam Centre yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dengan PT Sinergy Tharada dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011;014/BCPKSO/Add.II/XII/211. Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama membangun, mengelola, dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Indodharma Corpora dengan Nomor perjanjian 1/PERJKA/1/2010;010/IDC-OB/ADD/BOT-KSP/I/2010 tanggal 11 Januari 2010.
3) Pada Badan Usaha Pelabuhan Laut terdapat perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan Infrastruktur untuk pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Persero Batam dengan Nomor perjanjian 691/SPJ/A4/8/2023 dan SPB-DIR/075/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024.

5. Aset KKKS Pada SKK Migas Yang Tidak Disajikan di Neraca

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2024, terdapat aset KKKS pada SKK MIGAS yang tidak disajikan dalam Neraca karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset Tanah sebesar Rp11.830.184.554.973,50.

b. Aset Harta Benda Modal:
   1) Aset sumur yang tidak digunakan USD27,399,005.
   2) Aset Kondisi Rusak Berat USD185,729,166.
   3) Aset *Subsequence Expenditure* (SE) USD606,220,479.
   4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dengan total nilai USD5,047,253,919.67.
   5) Aset dalam proses penghapusan
      Terdapat aset yang sudah terjual namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2024 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD370,197,336.18.
   6) Aset Tidak Ditemukan
      Terdapat aset tidak ditemukan sebesar USD57,636,946.79 yang merupakan aset eks PT. Chevron Pacific Indonesia yang tidak ditemukan, di mana secara pencatatan telah diserahkan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai KKKS Alih Kelola WK Rokan.

c. Aset Harta Benda Inventaris.
   1) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian Posisi Per 31 Desember 2024.
      Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2024 sebesar USD4,157,876.09
   2) Aset Dalam Proses Penghapusan.
      Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada 31 Desember 2024 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD98,999.
   3) Aset Tidak Ditemukan.
      Pada Tahun 2024, terdapat aset tidak ditemukan sebesar USD27,522.

5. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Beberapa krakteristik yang sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah adalah sebagai berikut:

a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah tercatat pada beberapa Kementerian/Lembaga antara lain:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat mencatat aset bersejarah berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja sebanyak 1 unit. Gedung tersebut adalah Gedung Merdeka yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.65 RT01/RW04 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur, Bandung, Jawa Barat dengan luas 7.646 m^2.
b. Kementerian Pertahanan
   Pada Unit Organisasi TNI AD terdapat 1.544 unit terdiri dari Peralatan Dan Mesin 748 unit, Aset Tetap Lainnya 796 unit. Sementara pada UO TNI AL terdapat 8 unit aset bersejarah yang berupa Monumen dan Gedung di antaranya Monumen Yos Sudarso di Tegal, Monumen Bahari/Kapal Selam di Surabaya dan Monumen KKO AL/CA-4 di Pemalang.
c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
   Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57

Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.

Data Aset Bersejarah pada Kementerian/Lembaga disajikan pada **Lampiran 25.B**.

6. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa

Sampai dengan 31 Desember 2024, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 129 Tahun 2024, sebanyak 579 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 441 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 87 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 354 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

7. Aset Properti Eks BPPN

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Pemerintah telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut, dan sampai dengan saat ini masih terdapat sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri yaitu sebanyak 191 aset senilai Rp6.030.236.094.

8. Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.584.827.988.662, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.435.583.853.284. Berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.435.583.853.284. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit Rp10.873.502.849.595, aset inventaris Rp1.342.300, aset surat berharga Rp1.524.031.350, dan aset properti eks BDL Rp1.560.555.630.038.

9. Pengelolaan Aset Eks-Pelindo oleh Badan Pengusahaan Bebas dan Pelabuhan bebas Sabang (BPKS)

BPKS mengelola aset-aset eks-Pelindo berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan Sabang. Terdapat dua jenis dokumen serah terima terkait aset eks-Pelindo, yaitu:

a. BAST Aset PT Pelindo I berupa Pelabuhan Sabang kepada Pemerintah Aceh Nomor KU.61/1/15/P.I-09 dan 17/BA/2009 tanggal 13 November 2009. Atas dasar BAST tersebut, Pemerintah Aceh mencatat seluruh aset eks-pelindo sebagai Barang Milik Daerah seluruhnya senilai Rp16.310.510.056.

b. BAST FIsik dan Operasional Aset Pelabuhan Sabang dari PT Pelindo I kepada Pemerintah Aceh yang diwakili oleh BPKS dengan Nomor KU.61/1/1/P.I-10 dan 032/BPKS/BA/90/2010 tanggal 3 Maret 2010. Atas dasar BAST tersebut pihak BPKS menerima dan mengelola aset-aset eks-Pelindo.

Dalam perkembangannya terdapat dispute antara Pemerintah Aceh dengan BPKS yang belum diselesaikan, antara lain:

a. Bukti sertifikat atas aset tanah disimpan oleh BPKS sementara pencatatan aset dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai BMD.

b. BPKS mengelola sebagian aset eks-Pelindo untuk dipergunakan operasional BPKS dan disewakan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan PNBP.

c. Pemerintah Aceh memanfaatkan sebagian aset eks-Pelindo untuk operasional pemerintahan, seperti pembangunan kantor Samsat.

d. Sebagian aset telah direnovasi dan dibangun kembali di atas tanah eks-Pelindo oleh Pemerintah Kota Sabang dan menjadi sumber PAD Pemerintah Kota Sabang.

e. Sebagian tanah dan bangunan telah beralih kepemilikan dan dikuasai oleh pihak ketiga.

f. Tidak terdapat perjanjian antara Pemerintah Aceh, BPKS, dan Pemerintah Kota Sabang perihal pengelolaan dan pemanfaatan aset eks-Pelindo tersebut.

10. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah

Sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 terkait BMN berupa tanah yang belum di dukung dokumen kepemilikan, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah periode sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 116,88% dari target tahunan. Berdasarkan data SIMAN yang ditarik pada 7 Mei 2025, total jumlah tanah sebanyak 135.433 NUP. Berdasarkan data SIMAN tersebut, dari jumlah total tanah sebanyak 135.433 NUP terdapat 74 NUP terindikasi merupakan perolehan pada Tahun 2025 dan 54 NUP terindikasi telah dilakukan transaksi keluar pada tahun 2025. Data Tanah sebanyak 135.433 NUP tersebut, pada Aplikasi SIMAN teridentifikasi sebagai Properti Investasi sebanyak 790 NUP, Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebanyak 1.951 NUP, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebanyak 112 NUP, Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebanyak 5.265 NUP dan Aset Tetap Tanah (termasuk didalamnya BMN Tanah dalam proses PMPP) sebanyak 127.315 NUP.

Saat ini, jumlah Tanah yang telah bersertipikat sebanyak 93.741 NUP termasuk didalamnya merupakan Tanah yang Bersertipikat Sebagian Bidang dan Bersertipikat atas nama Kementerian/Lembaga, dan selebihnya sebanyak 41.692 NUP pada SIMAN berstatus belum bersertipikat yang didalamnya meliputi kategori Bersertipikat Lainnya, Inputan Tidak Lengkap dan Tidak Ada Inputan. Data persertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah disajikan pada **Lampiran 21.B.**

11. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan. Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai aset SBSN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan PMK Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 99/PMK.08/2021, BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan paling tidak yaitu memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. BMN tersebut merupakan BMN yang belum pernah diajukan sebagai aset SBSN atau BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai aset SBSN pada periode sebelumnya.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban, imbalan, dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat

penerbitan SBSN dimaksud, serta BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka penerbitan SBSN. Adapun total usulan BMN *underlying assets* SBSN selama tahun 2024 dalam rangka penerbitan SBSN Tahun 2025 adalah sebesar Rp201,30 triliun yang selanjutnya dilakukan proses *due diligence* oleh Konsultan Hukum.

Penggunaan BMN memiliki peran penting dalam penerbitan SBSN, yang dapat dilihat dari besarnya nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. Outstanding SBSN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.583,62 Triliun. Outstanding penerbitan SBSN sampai dengan per 31 Desember 2024 yang menggunakan BMN sebagai dasar penerbitannya adalah sebesar Rp923,67 triliun. Resume Penggunaan BMN sebagai *Underlying Asset* Penerbitan SBSN dapat dilihat pada **Lampiran 31.**

Selain penggunaan BMN sebagai aset SBSN, keterkaitan lain BMN dalam penerbitan SBSN yaitu digunakannya proyek pengadaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN atau disebut dengan *project underlying*. Output berupa BMN yang dihasilkan dari proyek pengadaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak akan digunakan sebagai aset SBSN selama *project underlying* belum selesai. Adapun *Outstanding asset* per 31 Desember 2024 yang terdiri dari *project underlying* adalah sebesar Rp654,09 triliun.

Dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, sejak tahun 2020 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Sementara itu untuk menghindari penggunaan BMN yang tidak layak digunakan sebagai underlying asset SBSN, secara reguler dilakukan penggantian atas BMN yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prinsip Syariah (sengketa, kondisi rusak berat dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN).

Selain penggunaan BMN dan proyek pengadaan BMN yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN terdapat pula dasar penerbitan SBSN berupa jasa layanan haji sebesar Rp5,85 Triliun atas penerbitan SBSN seri-seri SDHI 2029A, SDHI 2029B, dan SDHI 2025A.

12. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Desember tahun 2024, tidak terdapat gagal bayar (*default*) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau nihil.
Dalam APBN TA 2024 telah dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp823.986.000.000 untuk alokasi penjaminan infrastruktur nasional dan Rp635.000.000.000 untuk alokasi penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Alokasi tersebut telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan pada bulan Desember tahun 2024. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp13.268 miliar dengan dana sebesar Rp500 miliar di tempatkan dalam instrumen investasi.

13. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
b. Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Pemerintah masih memiliki hak tagih kepada dua PDAM debitur penerusan pinjaman yaitu PDAM Kabupaten Sorong dan PDAM Kabupaten Biak yang saat ini dalam pengurusan PUPN. Pengurusan Piutang Negara PDAM Kabupaten Sorong dan PDAM Kabupaten Biak diserahkan kepada PUPN sejak tanggal 22 Oktober 2013.

14. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat tiga Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara, dengan rincian sebagai berikut.

a. Satu Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi pelaksanaan *debt swap* yaitu Pemprov Maluku;

b. Satu Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak yaitu Pemkot Makassar;

c. Satu Pemda dalam proses cicilan melalui potongan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

15. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi bagian penting dari keuangan negara. Industri keuangan syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, terdapat empat Kementerian/Lembaga yang memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari *Islamic Development Bank* (IsDB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Pembiayaan syariah dari *Islamic Development Bank* (IsDB) kepada Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam kerjasama pembangunan ekonomi antara kedua pihak. IsDB telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam membiayai berbagai proyek dan program pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan berbagai skema pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, IsDB telah membantu membiayai proyek strategis di berbagai sektor, memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain pembiayaan Syariah dari IsDB, di tahun 2024 terdapat Satker BLU Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yaitu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) yang mendapatkan pembiayaan berbasis syariah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Data pembiayaan berbasis Syariah disajikan pada **Lampiran 29.F**.

16. Pengungkapan Kewajiban Pemerintah Terkait Pensiun

Nilai kewajiban jangka Panjang program pensiun per 31 Desember 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-182/AG.9/2025 tanggal 14 April 2025 hal Penyampaian Hasil Penghitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp3.556.364.670.438.740 dengan rincian:

Peserta	PT Taspen	PT Asabri	Total
Pegawai Aktif	1.261.630.281.893.900	278.597.960.442.684	1.540.228.242.336.584
Pensiunan	1.755.996.087.617.490	260.140.340.484.669	2.016.136.428.102.159
Total	**3.017.626.369.511.390**	**538.738.300.927.353**	**3.556.364.670.438.743**

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2024 untuk pegawai aktif dapat dikelompokkan ke dalam kewajiban terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp564.112.630.052.529 yang terdiri atas:
   1) Pada PT Taspen sebesar Rp285.514.669.609.845;
   2) Pada PT Asabri sebesar Rp278.597.960.442.684;
b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp976.115.612.284.055.

17. Unit Badan Lainnya

Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai amanat peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga di mana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggungjawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen dan dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2024, terhadap 70 UBL yang

terdiri dari UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 UBL dan UBL Bukan Satker sebanyak 8 UBL. Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut di atas disajikan dalam **Lampiran 30**.

18. Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2025

Melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang membawahi Holding Operasi (PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)) dan Holding Investasi.

Pada tanggal 21 Maret 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional, Pemerintah melakukan pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 BUMN kepada Holding Operasi.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama melalui PP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99% saham milik negara berupa saham Seri B pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga komposisi pemegang saham PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi:

a. Negara Republik Indonesia melalui Menteri BUMN memiliki 1% saham berupa saham Seri A Dwiwarna.
b. BPI Danantara memiliki 99% saham berupa saham seri B.

Selanjutnya, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 15 tahun 2025, kepemilikan Negara atas Saham Seri B dan Seri C telah sepenuhnya dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Holding Operasional. Akibat dari hal tersebut, Dividen BUMN untuk Tahun Buku 2024 untuk BUMN tertutup disetorkan kepada para Pemegang Saham sesuai pada tanggal RUPS dan untuk BUMN Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah melalui Menteri BUMN masih mempunyai saham 1 lembar pada BUMN dan 1% pada PT BKI (selaku Holding Operasional). Terkait hal tersebut, saat ini masih dilakukan kajian mengenai pengelolaan dividen 1 lembar dan 1% saham. Adapun dividen dari laba BUMN tahun buku 2024 yang sudah disetorkan ke Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2025 adalah sebesar Rp10,88 triliun yang merupakan dividen interim dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

19. Perkembangan Pembubaran Perusahaan Negara

Terdapat beberapa Perusahaan Negara yang dinilai tidak layak dipertahankan sehingga diusulkan untuk dilakukan pembubaran. Berikut penjelasan atas proses pembubaran beberapa BUMN tersebut.

a. PT Iglas (Persero)
   1) Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat keputusan RUPS Nomor S-149/MBU/03/2022 tanggal 10 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 diterbitkan PP Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.
   2) PT Iglas (Persero) telah dinyatakan pailit sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 15/Pdt.SusPailit/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 23 November 2023.
   3) Pada tanggal 13 Agustus 2024, telah dilakukan pertemuan antara Direktorat Lelang Kementerian Keuangan, PT PPA, dan PT BNI (Persero) Tbk, dan disepakati bahwa akan dilakukan pelaksanaan Lelang Bersama antara aset yang menjadi boedel pailit PT Iglas (Persero) dan aset yang dimiliki PT PPA (milik PT Iglas yang dibeli oleh PT PPA sehubungan dengan upaya retrukturisasi menyeluruh dan penyelesaian kewajiban PT Iglas).

b. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
   1) Dinyatakan dibubarkan setelah ditetapkan melalui PP Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Kertas Kraft Aceh tanggal 3 April 2023 yang kemudian dilanjuti dengan penerbitan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Nomor 08 tanggal 21 Juli 2023 dan ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Nomor 01 tanggal 2 Oktober 2023, yang secara definitif menetapkan

pembubaran KKA dan penunjukan likuidator.

2) KKA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn tanggal 6 Februari 2024.

3) Pada Mei 2024 terdapat Daftar Piutang Tetap dengan total tagihan sebesar Rp2.448.267.595.750.

4) Telah dilakukan lelang sebagian kendaraan dan scrap pada 15 Agustus 2024 dengan nilai penjualan Rp3,1 milyar, dan lelang atas tanah bangunan sebanyak tiga kali, dimana Tidak Ada Peminat. Belum ada informasi lanjutan terkait progres penyelesaian piutang negara atas pembubaran PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

c. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
   1) Dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby pada tanggal 2 Juni 2022. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.
   2) Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan surat tertanggal 24 Januari 2025 yang isinya menyampaikan:
      a) Progres kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit):
         - Telah berhasil menjual aset berupa tanah dan bangunan, scrap, dan saham PT MNA di PT Meprati Maintenance Facility dan PT Merpati Training Center; dan
         - Terhadap hasil penjualan aset-aset tersebut, Tim Kurator telah melakukan pembagian sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pada tanggal 23 Desember 2022, 23 Mei 2023, 23 Juni 2023, dan 14 Juni 2024.
      b) Tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham pemerintah.
      c) Belum pernah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

d. PT Kertas Leces (Persero)
   1) Dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.
   2) Total tagihan Leces berdasarkan Daftar Piutang Tetap adalah sebesar Rp3.001 miliar dimana terdapat utang kepada Kementerian Keuangan (yang terdiri dari utang eks *Foreign Exchange Loan* (SLA), Direktorat Dana Investasi (RDI), dan utang subordinasi) sebesar Rp749,8 miliar dan utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga sebesar Rp12,4 miliar.
   3) Atas utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga telah dilakukan pembagian sebesar Rp22,5 juta berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) tertanggal 30 Agustus 2021 dan sebesar Rp12,3 miliar berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 1 Desember 2021.

e. PT PANN (Persero)
   1) Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS LB yang dituangkan melalui Berita Acara Nomor 05 tanggal 11 Oktober 2023 dan sudah diterbitkan PP Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.
   2) Pada tahun 2017, telah dilakukan upaya restrukturisasi SLA, berupa konversi menjadi Penyertaan Modal Negara non-tunai. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan melalui Surat No. S-537/MK.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 mengenai Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) menyetujui hal-hal sebagai berikut:
      a) Konversi utang pokok SLA, sebesar US$261.304.449,49, menjadi PMN non-tunai.
      b) Penghapusan utang non-pokok SLA, sebesar US$199.792.520,10, yang mana memerlukan persetujuan dari DPR sebelum ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
   3) Penghapusan utang non-pokok SLA, telah memperoleh persetujuan dari DPR. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah dibahas dalam Panitia Antar Kementerian dan harmonisasi RPP. Namun demikian, mengingat PANN dianggap tidak lagi memiliki kapabilitas untuk mengembangkan usaha kedepannya, maka proses penetapan RPP tidak dilanjutkan.
   4) Rapat Umum Pemegang Saham terkait penetapan pembubaran Perseroan (RUPS Definitif Pembubaran) telah

dilakukan pada tanggal 11 Februari 2025 dan berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Likuidator secara resmi ditunjuk.

5) Saat ini, proses pembubaran PANN masih ada dalam tahap verifikasi aset dan kewajiban yang sedang dilakukan oleh Likuidator.

f. PT Istaka Karya (Persero)
1) Dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolven berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juli 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya.

2) Saat ini, penanganan PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) (ISTAKA) dilakukan oleh Kurator yang ditujuk oleh Pengadilan, dimana sedang dilakukan proses pemberesan boedel pailit hingga nantinya melakukan pencabutan status badan hukum ISTAKA pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3) Nilai Daftar Piutang Tetap ISTAKA sebesar Rp786.276.796.998, dimana terdapat tagihan pajak sebesar Rp4.500.000 yang telah dibayar berdasarkan Pembagian Tahap Pertama hasil pemberesan harta pailit ISTAKA berupa penjualan scrap, piutang tertagih dan penjualan tanah di Pecatu Bali.

4) PT Istaka Karya (Persero) sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN tahun 2024 karena dianggap sudah tidak memiliki nilai investasi pemerintah sebagaimana adanya surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa tidak ada potensi penerimaan negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.

g. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
1) Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-90/MBU/02/2022 pada tanggal 2 Februari 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

2) Tim Likuidator PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) telah menyampaikan surat tertanggal 5 Juli 2024 yang isinya menyampaikan:

a) Proses likuidasi PT Industri Sandang Nusantara (Persero) masih berlangsung.
b) Ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham Pemerintah.
c) Belum pernah dilakukan penyetoran ke kas negara.

3) PT Industri Sandang Nusantara (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena dianggap masih memiliki nilai investasi pemerintah.

h. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS Nomor S-30/MBU/01/2025 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tanggal 22 Januari 2025 dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP 9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saat ini PP pembubaran belum diterbitkan dan masih dalam proses. PT Jiwasraya (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena hingga akhir 2024 masih dalam proses persiapan RUPS dan proses penerbitan PP Pembubaran.

i. PT Indah Karya (Persero)
Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per tanggal 26 November 2024 dalam Surat PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Nomor S-92/PPA/DU/0125 tanggal 9 Januari 2025. PT Indah Karya (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena hingga akhir tahun 2024 belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembubarannya dan saat ini sedang diproses pengajuan Izin Prakarsa Pembubaran kepada Menteri BUMN sebagai tahap awal untuk selanjutnya ditetapkan dalam PP.

20. Sisa Dana Hibah Pilkada Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang bersumber dari hibah Pemerintah Daerah, nilai pengesahan pendapatan hibah langsung Pilkada per 15 Mei 2025 sebesar Rp37.228.950.022.340,00 yang mencakup pendapatan hibah langsung pada KPU sebesar Rp28.654.411.168.911,00 dan Bawaslu sebesar Rp8.574.538.853.429,00. Atas pengesahan pendapatan hibah tersebut, telah disahkan belanja hibah Pilkada sebesar Rp29.695.064.580.259,00 yang terdiri dari pengesahan belanja hibah pada KPU sebesar Rp22.891.024.755.311,00 dan pada Bawaslu sebesar Rp6.804.039.824.948,00, sehingga

sisa dana hibah Pilkada yang belum disahkan belanjanya sebesar Rp7.533.885.442.081,00, yang meliputi:

a. Sisa dana hibah Pilkada yang telah disetorkan ke RKUD sebesar Rp5.490.831.274.908,02, yang terdiri dari pengembalian dana hibah yang telah disahkan melalui SP4HL sebesar Rp3.424.410.697.713,00 dan yang belum SP4HL sebesar Rp2.066.420.577.195,02.
b. Sisa dana hibah Pilkada yang belum disetorkan ke RKUD sebesar Rp2.043.054.167.172,98, yang terdiri dari sisa hibah Pilkada pada KPU sebesar Rp1.474.018.418.007,00 dan Bawaslu sebesar Rp569.035.749.165,98.

21. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Tahun 2024

UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan penambahan PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN (PMPP) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum DAMRI, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha, PT Danareksa (Persero), dan Badan Bank Tanah.

Pada tahun 2024 hanya PMPP kepada PT Pertamina (Persero) yang telah diterbitkan PP PMPP, yaitu PP Nomor 40 Tahun 2024. Sementara untuk BUMN lain yang belum terbit PP PMPP dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. PMPP kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) telah sampai pada tahap permohonan penetapan RPP pada Setneg.
b. PMPP kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero), PT Danareksa (Persero), Perum Damri, PT Bio Farma (Persero) dan PT Pertamina (Persero) telah sampai pada tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum.
c. PMPP kepada PT Sejahtera Eka Graha telah sampai pada tahap permohonan Izin Prakarsa.
d. PMPP kepada Badan Bank Tanah tidak dapat diproses lebih lanjut karena berdasarkan hasil rapat pendalaman PMN yang dilaksanakan tanggal 1-3 Juli 2024, Komisi XI DPR RI memutuskan bahwa Pemerintah tidak dapat melaksanakan PMN pada Badan Bank Tanah tahun 2024.

Selanjutnya, pada bulan Februari 2025 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1 Tahun 2025) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang di dalamnya mengatur bahwa Penambahan PMN (termasuk PMN yang berasal dari Barang Milik Negara) kepada BUMN diajukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

Atas hal tersebut, Kemensetneg dan Kemenkum mengembalikan permohonan penetapan RPP dan permohonan harmonisasi untuk disesuaikan proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pada UU 1 Tahun 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-313/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 menyampaikan kepada Menteri BUMN bahwa pelaksanaan PMN Non Tunai kepada BUMN baik yang masih berproses maupun untuk di masa yang akan datang agar dilaksanakan dan diproses lebih lanjut sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO. Defisit LO Tahun 2024 mencapai Rp215.659.289.663.223. Nilai defisit LO mengalami penurunan sebesar Rp247.285.455.473.086 atau 781,90 persen dibandingkan Tahun 2023 yang mengalami surplus sebesar Rp31.626.165.809.863. Defisit LO Tahun 2024 berasal dari defisit kegiatan operasional sebesar Rp238.337.988.310.911 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp22.678.698.647.688.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp238.337.988.310.911, berasal dari selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp3.115.258.961.391.959 dan Beban Operasional sebesar Rp3.353.596.949.702.870.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp22.678.698.647.688 berasal dari Defisit Pelepasan Aset sebesar Rp12.327.778.657.047, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp129.960.500.000, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp35.136.437.804.735.

Perkembangan Laporan Operasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada **Grafik 35.**

Grafik 35
Perkembangan Laporan Operasional Tahun 2020 s.d Tahun 2024

(Rp Triliun)

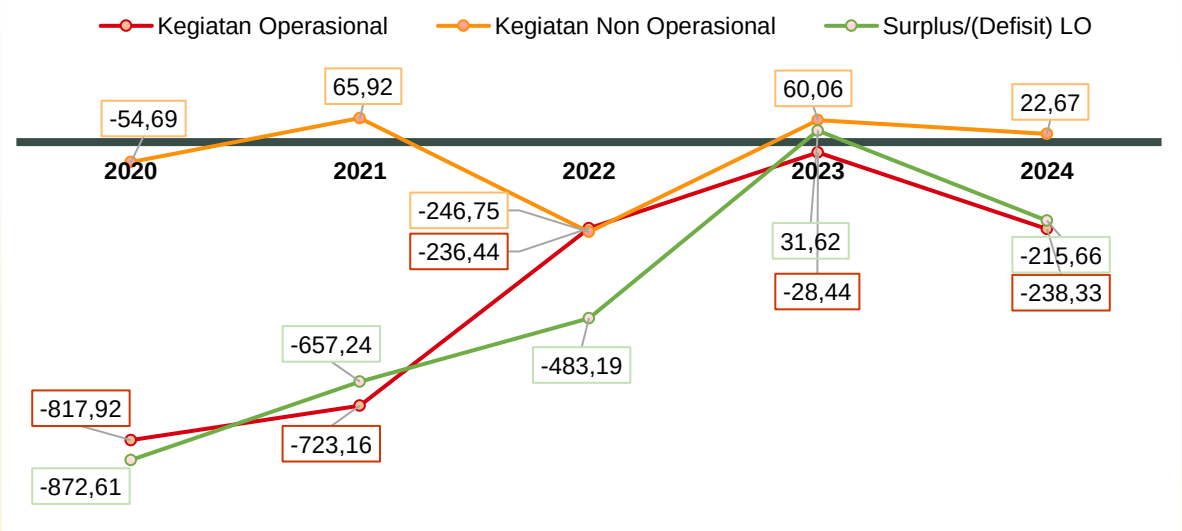

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1.KEGIATAN OPERASIONAL

Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Operasional Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp238.337.988.310.911. Nilai tersebut lebih besar Rp210.041.453.258.460 atau 742,29 persen dibandingkan defisit pada Tahun 2023. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada **Grafik 36**.

Grafik 36
Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Tahun 2024 dan 2023

(Rp Triliun)

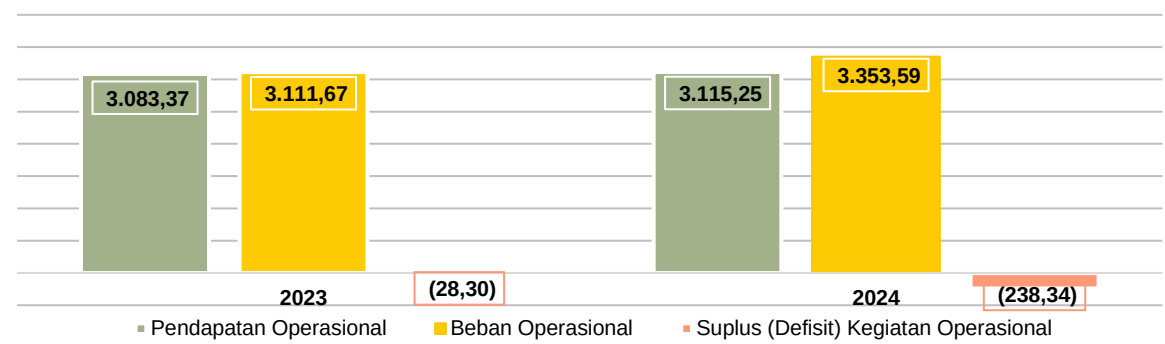

E.2.1.1.Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan Operasional apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Operasional pada Tahun 2024 mencapai Rp3.115.258.961.391.959 yang terdiri dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp2.194.479.800.984.721, Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp876.574.676.770.633, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp44.204.483.636.605. Pendapatan Operasional Tahun 2024 lebih tinggi Rp31.885.456.466.212 atau 1,03 persen dibanding Tahun 2023 sebesar Rp3.083.373.504.925.747.

Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2024 dapat dilihat pada **Grafik 37.**

Grafik 37
Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2024

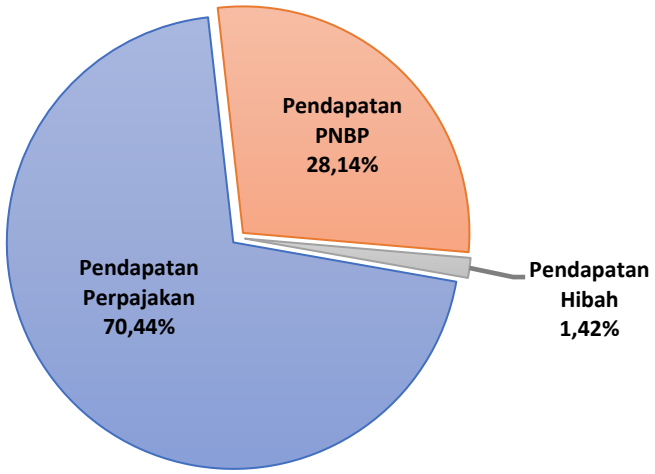

E.2.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan Perpajakan adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Perpajakan Tahun 2024 mencapai Rp2.194.479.800.984.721, naik sebesar Rp59.673.012.590.430 atau 2,80 persen dibanding Tahun 2023 sebesar Rp2.134.806.788.394.291. Kenaikan tersebut ditopang oleh kinerja PPN Dalam Negeri, serta kinerja pajak terkait impor yang membaik. Rincian Pendapatan Perpajakan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.038.768.057.988.153	1.056.264.876.071.451
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	811.437.285.482.573	749.872.917.946.326
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	33.329.636.622.280	35.111.968.220.488
Pendapatan Cukai	224.896.521.710.713	218.828.516.227.555
Pendapatan Pajak Lainnya	11.995.165.095.884	9.962.359.820.249
Pendapatan Bea Masuk	53.376.144.254.078	50.951.896.485.742
Pendapatan Bea Keluar	20.676.989.831.040	13.814.253.622.480
Total	**2.194.479.800.984.721**	**2.134.806.788.394.291**

E.2.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2024 mencapai Rp1.038.768.057.988.153, turun sebesar Rp17.496.818.083.298 atau 1,66 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.056.264.876.071.451. Rincian Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	20.876.472.814.733	22.940.477.064.534
Pendapatan PPh Gas Bumi	44.172.722.835.093	45.874.280.254.549
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.978.096.486	1.572.224.727
Pendapatan PPh Pasal 21	240.349.320.369.395	201.186.176.672.685
Pendapatan PPh Pasal 22	35.790.260.824.505	34.117.835.702.959
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	73.780.524.483.913	69.534.204.345.819
Pendapatan PPh Pasal 23	64.827.517.110.722	58.450.222.301.338
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.739.377.394.259	12.623.982.112.669
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	320.861.366.984.802	408.235.004.516.176
Pendapatan PPh Pasal 26	82.769.278.663.929	77.391.327.914.654
Pendapatan PPh Final	140.414.488.876.328	125.757.096.159.889
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	180.749.533.988	152.696.801.452
Jumlah	**1.038.768.057.988.153**	**1.056.264.876.071.451**

Penurunan Pendapatan Pajak penghasilan terutama dipicu oleh turunnya Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan sebagai dampak termoderasinya harga komoditas global antara lain minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil* - CPO) dan batu bara.

Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Penghasilan antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh penetapan utang kelebihan pembayaran pendapatan (UKPP) PPh dan penetapan piutang pajak tahun berjalan.

E.2.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2024 mencapai Rp811.437.285.482.573, naik sebesar Rp61.564.367.536.247 atau 8,21 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp749.872.917.946.326. Rincian Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	507.044.857.078.690	462.317.035.003.923
Pendapatan PPN Impor	274.368.570.530.259	255.641.181.915.144
Pendapatan PPN Lainnya	10.197.914.483.310	8.010.587.913.149
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.355.035.883.677	16.795.565.871.666

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPnBM Impor	6.470.435.364.287	7.107.546.458.786
Pendapatan PPnBM Lainnya	472.142.350	1.000.783.658
Jumlah	**811.437.285.482.573**	**749.872.917.946.326**

Kenaikan Pendapatan PPN utamanya berasal dari peningkatan Pendapatan PPN Dalam Negeri yang menggambarkan masih meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi dalam negeri selama tahun 2024. Selain itu, Pendapatan PPN Impor juga mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan nilai impor Indonesia.

Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh penetapan utang kelebihan pembayaran pendapatan (UKPP) PPN dan penetapan piutang pajak tahun berjalan.

E.2.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 mencapai Rp33.329.636.622.280, turun sebesar Rp1.782.331.598.208 atau 5,08 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp35.111.968.220.488. Rincian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PBB Perkebunan	3.547.324.726.408	3.364.879.808.126
Pendapatan PBB Kehutanan	891.079.843.416	838.602.241.073
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	12.326.615.393.480	12.193.691.522.005
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	15.787.220.101.160	18.030.357.168.131
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	534.090.593.011	618.233.513.493
Pendapatan PBB Lainnya	243.305.964.805	66.203.967.660
Jumlah	**33.329.636.622.280**	**35.111.968.220.488**

Penurunan Pendapatan PBB terbesar terdapat pada Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mencapai Rp2.243.137.066.971 atau 12,44 persen dari Tahun 2023.

Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh penerbitan SPPT PBB yang belum diterima pelunasan pembayaran.

E.2.1.1.1.4. Pendapatan Cukai

Pendapatan Cukai Tahun 2024 mencapai Rp224.896.521.710.713, naik sebesar Rp6.068.005.483.158 atau 2,77 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp218.828.516.227.555. Rincian Pendapatan Cukai Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	215.285.118.429.123	210.290.310.431.136
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	142.679.407.000	126.729.867.000
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	9.265.323.875.300	8.088.201.742.000
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	135.688.647.212	283.980.874.000
Pendapatan Cukai Lainnya	67.711.352.078	39.293.313.419
Jumlah	**224.896.521.710.713**	**218.828.516.227.555**

Peningkatan pada Pendapatan Cukai Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: (1) kenaikan tarif cukai hasil tembakau, (2) kenaikan tarif minuman mengandung ethyl alkohol, dan (3) kenaikan produksi ethyl alkohol.

Perbedaan nilai Pendapatan Cukai antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh penetapan UKPP Pendapatan Cukai.

E.2.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2024 Rp11.995.165.095.884, naik Rp2.032.805.275.635 atau 20,40 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp9.962.359.820.249. Rincian Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bea Materai	1.337.772.551.226	1.223.134.338.946
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.466.245.735.017	5.470.840.719.647
Pendapatan PPn Batubara	163.571.868.066	196.395.808.289
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.189.315.756	3.797.155.830
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.011.994.744.326	2.573.551.129.574
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	980.460.568.855	477.836.481.408
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	14.583.471.152	6.410.033.324
Pendapatan Denda Penagihan PPh	-	729.772.787
Pendapatan Denda Penagihan PPN	-	12.174.652
Pajak Lain-lain	18.346.841.486	9.652.205.792
Jumlah	**11.995.165.095.884**	**9.962.359.820.249**

Kenaikan pada Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2024 utamanya terdapat pada Pendapatan Bunga Penagihan PPh yang mencapai Rp1.438.443.614.752 atau 55,89 persen dari Tahun 2023 dan Pendapatan Bunga Penagihan PPN yang mencapai Rp502.624.087.447 atau 105,19 persen dari Tahun 2023.

Perbedaan nilai Pendapatan Pajak Lainnya antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh pengakuan Utang Pajak Bendahara Yang Belum Disetor dan Piutang Perpajakan yang terbit di tahun 2024.

E.2.1.1.1.6. Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Masuk Tahun 2024 mencapai Rp53.376.144.254.078, naik sebesar Rp2.424.247.768.336 atau 4,76 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp50.951.896.485.742. Rincian Pendapatan Bea Masuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk	48.830.236.869.134	47.007.953.096.112
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.248.880.823.561	980.673.878.926
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	1.030.074.644.646	424.068.178.662
Pendapatan Pabean Lainnya	37.221.663.043	67.748.558.042
Pendapatan Bea Masuk *Antidumping*	364.576.143.000	299.503.535.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.865.154.110.694	2.171.949.239.000
Jumlah	**53.376.144.254.078**	**50.951.896.485.742**

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk antara lain dipengaruhi oleh (1) kenaikan nilai impor meskipun tarif efektif menurun, dan (2) penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah.

Perbedaan nilai Pendapatan Bea Masuk antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh Piutang Perpajakan yang terbit di tahun 2024.

E.2.1.1.1.7. Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2024 mencapai Rp20.676.989.831.040, naik sebesar Rp6.862.736.208.560 atau 49,68 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp13.814.253.622.480. Rincian Pendapatan Bea Keluar Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bea Keluar	20.710.369.796.676	13.812.270.982.754
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	(35.568.147.000)	601.387.726
Pendapatan Bunga Bea Keluar	2.188.181.364	1.381.252.000
Jumlah	**20.676.989.831.040**	**13.814.253.622.480**

Naiknya Pendapatan Bea Keluar dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan dari PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai dampak kebijakan relaksasi ekspor tembaga dan kenaikan penerimaan bea keluar dari produk sawit.

Pada komponen Pendapatan Bea Keluar terdapat pendapatan yang bernilai minus, yaitu Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar karena adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan banding sehingga menimbulkan restitusi Denda Administrasi Bea Keluar.

Perbedaan nilai Pendapatan Bea Keluar antara penyajian pada LRA dan LO utamanya disebabkan oleh Penetapan UKPP di tahun 2024.

E.2.1.1.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 mencapai Rp876.574.676.770.633, turun sebesar Rp45.142.153.283.482 atau 4,90 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp921.716.830.054.115.

E.2.1.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2024 mencapai Rp256.629.229.940.936, turun sebesar Rp23.656.601.687.824 atau 8,44 persen dibandingkan Pendapatan SDA Tahun 2023 sebesar Rp280.285.831.628.760. Rincian Pendapatan SDA Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi	136.183.556.431.541	142.259.466.286.081
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	688.744.827.394	1.154.642.269.162
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	105.784.649.603.704	123.941.672.734.325
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.730.218.316.915	3.717.621.028.239
Pendapatan Dana Reboisasi	2.219.981.975.653	1.556.237.095.717
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.320.534.935.596	1.068.152.455.166
Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	123.980.767.500	33.417.084.550
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.532.328.056.254	2.201.265.574.932
Pendapatan Perikanan	954.494.968.076	637.161.520.387
Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.954.649.409.456	3.586.160.908.554
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	31.531.288.010	30.858.255.740
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	104.559.360.837	99.176.415.907
Jumlah	**256.629.229.940.936**	**280.285.831.628.760**

Pendapatan Sumber Daya Alam terbesar terdapat pada Bendahara Umum Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penurunan signifikan terjadi pada Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Penurunan disebabkan terkontraksinya ICP dan *lifting* minyak pada Tahun 2024.
2. Penurunan pada harga batubara dan pemberlakuan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 227 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Batubara yang mengatur tentang pemberlakuan 4 jenis Harga Batubara Acuan (HBA, HBA 1, HBA 2, dan HBA 3).
3. Penurunan produksi komoditas mineral periode tahun 2024 seperti timah dan bauksit.
4. Penurunan rata-rata harga mineral acuan pada beberapa komoditas seperti nikel dan timah.

Perbedaan nilai Pendapatan SDA antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan secara akrual pada LO diantaranya pencatatan Piutang dan PYMHD.

E.2.1.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024 mencapai Rp2.254.798.245, naik sebesar Rp2.250.268.511 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4.529.734 yang utamanya disebabkan adanya kenaikan bagian laba setoran lainnya

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan bagian laba BUMN perbankan di bawah kementerian BUMN	19	10
Pendapatan bagian laba BUMN non perbankan di bawah kementerian BUMN	2.254.798.226	(15.023.343.076)
Pendapatan bagian laba BUMN/Lembaga Perbankan di bawah kementerian Keuangan	-	15.027.872.800
Jumlah	**2.254.798.245**	**4.529.734**

E.2.1.1.2.3. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU Tahun 2024 mencapai Rp101.023.954.431.534, naik sebesar Rp3.653.071.137.867 atau 3,75 persen dari Tahun 2023 sebesar Rp97.370.883.293.667. Rincian Pendapatan BLU Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	46.439.005.282.426	41.697.543.672.854
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.303.688.447.754	2.497.820.590.827
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	38.438.634.229.761	42.887.769.491.904
Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	796.740.378.574	1.075.397.515.047
Subtotal Pendapatan Jasa Layanan Umum	**87.978.068.338.515**	**88.158.531.270.632**
Pendapatan Hibah BLU	**1.624.518.847.264**	**793.400.134.748**
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	**1.579.431.515.066**	**1.413.537.192.274**
Pendapatan dari Alokasi APBN	**213.686.679.013**	**218.945.635.657**
Pendapatan BLU Lainnya	**9.628.249.051.676**	**6.786.469.060.356**
Jumlah	**101.023.954.431.534**	**97.370.883.293.667**

Pendapatan BLU Tahun 2024 dengan nilai terbesar terdapat pada BLU di Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Beberapa jenis Pendapatan BLU yang mengalami kenaikan pada K/L tersebut, antara lain:

1. Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan penambahan satuan kerja yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLU;
2. Pendapatan SPI dan UKT Mahasiswa, biaya ujian-ujian, biaya pendaftaran masuk PTN atau layanan kursus, biaya wisuda, sewa gedung, sewa ruang, dan bagi hasil profit usaha.
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU untuk Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Pra Jabatan, Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun 2024.

Perbedaan nilai Pendapatan BLU antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh penyesuaian kurang pada satker BLU LPDP karena reklasifikasi atas *Accrued Interest* dan Amortisasi Premium ke Dana Kelolaan, serta Penyesuaian tambah atas pengakuan PYMHD, terdapat pelunasan piutang periode sebelumnya pada LMAN, adanya penyesuaian terkait pendapatan uang kuliah tunggal dari mahasiswa, pendapatan atas sewa BMN, Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU, Pendapatan Hibah BLU, Pendapatan penerimaan kembali belanja bantuan sosial, modal, pegawai dan barang TAYL, dan resiprokal PNBP antar K/L.

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2024 mencapai Rp518.919.237.599.918, turun sebesar Rp25.140.873.002.036 atau 4,62 persen dari Tahun 2023 sebesar Rp544.060.110.601.954. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	51.765.955.523.733	61.368.768.330.894
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	30.924.059.761.499	47.047.464.976.193
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6.549.454.345.441	8.589.526.585.698
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	2.975.176.655.739	3.405.296.567.562
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	31.649.070.527.185	29.808.797.594.036
Pendapatan Jasa Lainnya	2.705.201.933.201	1.174.417.506.185
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	31.712.856.524.009	39.693.602.836.914
Pendapatan Denda	4.622.294.390.615	8.668.138.335.177
Pendapatan Lain-lain	36.030.903.142.891	34.067.558.582.663
Pendapatan Penyesuaian Akrual	319.984.264.795.605	310.236.539.286.632
Jumlah	**518.919.237.599.918**	**544.060.110.601.954**

Pendapatan PNBP Lainnya terbesar antara lain berasal dari Bendahara Umum Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penurunan Pendapatan PNBP Lainnya terbesar terdapat pada Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, komponen Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan di Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, penurunan terjadi pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha serta Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan.

Turunnya Iuran Badan Usaha terutama berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara yang disebabkan adanya penurunan pada harga batubara dan pemberlakuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 227 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Batubara yang mengatur tentang pemberlakuan 4 jenis Harga Batubara Acuan (HBA, HBA 1, HBA 2, dan HBA 3).

Turunnya Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 yang berasal dari Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99).

Pada Tahun 2024, Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN mengalami perpindahan pos yang semula terdapat pada pos Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya menjadi pos Pendapatan PNBP Lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan format LO pada LKPP dan LKBUN.

Perbedaan nilai Pendapatan PNBP Lainnya antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan secara akrual pada LO diantaranya piutang dan PYMHD.

E.2.1.1.3. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2024 mencapai Rp44.204.483.636.605, naik sebesar Rp17.354.597.159.264 atau 64,64 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp26.849.886.477.341. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah. Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	3.202.856.466.557	3.274.761.499.466
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	46.358.566.704	45.477.730.108
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	32.247.196.309.907	15.361.429.146.772
Subtotal Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**35.496.411.343.168**	**18.681.668.376.346**
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	540.471.344.113	423.174.970.047
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.667.450.649.849	2.393.230.936.908
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	4.912.291.640.244	3.999.627.682.797
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	1.599.696.061.736	1.399.554.762.906
Subtotal Pendapatan Hibah Luar Negeri	**8.719.909.695.942**	**8.215.588.352.658**
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	**(11.837.402.505)**	**(47.370.251.663)**
Jumlah	**44.204.483.636.605**	**26.849.886.477.341**

Pendapatan Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan yang disebabkan terutama adanya hibah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Perbedaan nilai Pendapatan PNBP Lainnya antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh pengakuan hibah langsung yang belum disahkan.

E.2.1.2.Beban Operasional

Beban Operasional Tahun 2024 mencapai Rp3.353.596.949.702.870, naik sebesar Rp241.926.909.724.672 atau 7,77 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.111.670.039.978.198. Komposisi Beban Operasional dapat dilihat pada **Grafik 38.**

Grafik 38
Komposisi Beban Operasional Tahun 2024

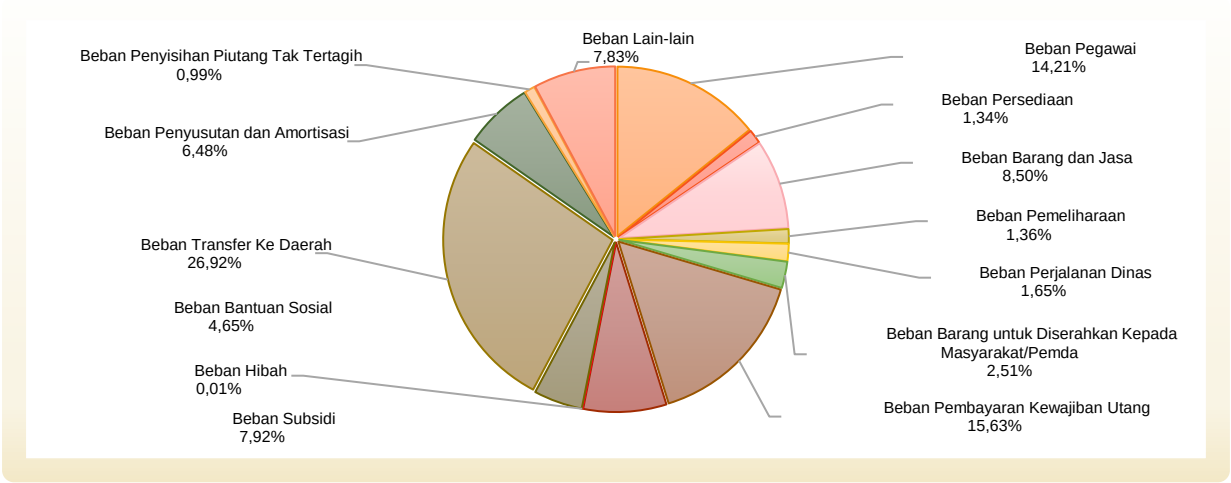

Rincian Beban Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Pegawai	476.500.700.049.411	430.426.321.089.044
Beban Persediaan	44.883.665.149.185	44.418.157.818.790
Beban Barang dan Jasa	285.139.851.823.393	225.619.161.434.819
Beban Pemeliharaan	45.486.795.081.937	36.518.876.440.164
Beban Perjalanan Dinas	55.492.575.872.049	49.900.388.208.994
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	84.334.448.261.243	58.308.588.088.465
Beban Pembayaran Kewajiban Utang	524.147.192.364.375	489.648.053.202.050
Beban Subsidi	265.510.751.678.440	242.021.207.563.568
Beban Hibah	278.430.938.953	219.140.718.777
Beban Bantuan Sosial	155.975.985.991.008	156.341.091.530.982
Beban Transfer ke Daerah	902.646.703.693.172	881.390.373.057.804
Beban Penyusutan dan Amortisasi	217.330.170.896.748	209.244.320.645.414
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	33.297.587.421.879	1.928.970.209.539
Beban Lain-Lain	262.572.090.481.077	285.685.389.969.788
Jumlah	**3.353.596.949.702.870**	**3.111.670.039.978.198**

E.2.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2024 mencapai Rp476.500.700.049.411, naik sebesar Rp46.074.378.960.367 atau 10,70 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp430.426.321.089.044. Rincian Beban Pegawai sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	91.362.300.169.780	86.409.241.180.350
Beban Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	70.018.504.838.487	65.784.408.013.485
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.627.240.464.206	1.445.977.632.407
Beban Gaji Dokter PTT		971.858.800
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	27.120.347.774.100	20.466.091.960.424
Beban Honorarium	1.464.525.442.602	1.514.960.016.547
Beban Lembur	996.026.443.604	906.145.827.468
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	96.241.028.748.825	85.892.306.111.679
Beban Pensiun dan Uang Tunggu	160.421.106.032.556	143.853.310.805.044
Beban Program Jaminan Sosial Pegawai	12.580.240.711.500	11.162.280.566.968
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Gaji dan Tunjangan	14.669.379.423.751	12.990.627.115.872
Jumlah	**476.500.700.049.411**	**430.426.321.089.044**

Kenaikan terbesar Beban Pegawai tercatat pada komponen Beban Pensiun dan Uang Tunggu serta Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito.

Perbedaan nilai Pendapatan Beban Pegawai antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh penerapan Petunjuk Teknis Akuntansi 19 Tentang Identifikasi Dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (revisi kesatu), penyesuaian beban yang masih harus dibayar atas pembayaran uang makan, dan pengakuan LRA atas belanja gaji Non PNS dan tunjangan pegawai BLU terdapat pada belanja barang (akun 52) sedangkan belanja gaji NonPNS dan tunjangan pegawai BLU pada LO terdapat pada akun Beban Pegawai.

E.2.1.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2024 mencapai Rp44.883.665.149.185, naik sebesar Rp465.507.330.395 atau 1,05 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp44.418.157.818.790. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Persediaan Konsumsi	28.972.847.186.608	32.572.120.893.472
Beban Persediaan Amunisi	2.613.296.571.232	2.074.393.867.755
Beban Persediaan Bahan Baku	3.288.743.939.415	1.254.714.666.361
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	7.428.485.398	22.493.753.564
Beban Persediaan Lainnya	10.001.314.591.532	8.494.434.637.638
Beban Persediaan Badan Layanan Umum	34.375.000	
Jumlah	**44.883.665.149.185**	**44.418.157.818.790**

Kenaikan Beban Persediaan terbesar terdapat pada Beban Persediaan Bahan Baku di Komisi Pemilihan Umum disebabkan oleh transaksi transfer masuk dan transfer keluar terkait Persediaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, penggunaan persediaan, penjualan, atau penyerahan aset persediaan ke pihak lainnya.

Beban Persediaan dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada: Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mencapai Rp285.139.851.823.393, naik sebesar Rp59.520.690.388.574 atau 26,38 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp225.619.161.434.819. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Barang Operasional	46.973.084.943.882	45.196.400.165.690
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid - 19	94.227.265	89.467.700.074
Beban Barang Non Operasional	103.588.831.647.104	80.095.828.326.396
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid -19		18.959.696.536
Beban Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah MCC	4.127.887.565	
Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	1.201.393.158.433	1.083.024.922.213
Beban Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan	2.040.333.507.431	356.179.054.179
Beban Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi	1.414.519.000	1.401.380.000
Belanja penggantian biaya dan margin kepada badan usaha pelaksana investasi dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – Penanganan Pandemi COVID-19	3.472.451.250	10.047.885.858
Beban Langganan Daya dan Jasa	8.441.179.603.592	8.600.595.261.309
Beban Jasa Pos dan Giro	12.673.433.766	14.134.054.305
Beban Jasa Konsultan	6.542.565.097.226	5.980.822.578.975
Beban Sewa	11.328.407.684.871	11.345.929.593.136
Beban Fasilitas Sewa Rumah untuk Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	471.853.797.930	3.567.290.758.048
Beban Jasa Profesi	3.680.232.138.147	17.716.434.174
Beban Jasa kepada BLU	59.822.255.962	304.877.715.000
Beban Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	325.459.644.000	7.538.361.198
Beban Jasa Pelayanan Perbendaharaan	10.165.067.314	23.425.113.875.275

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Jasa Lainnya	28.913.258.818.932	27.243.563.835
Beban Barang dan Jasa BLU I	70.789.298.955.044	45.053.394.018.044
Beban Barang dan Jasa BLU kepada BLU Lain	3.149.439.129	3.823.585.200
Beban Barang dan Jasa BLU II	659.088.543.071	213.947.448.383
Beban Barang Ekstrakomptabel BLU	44.173.694.168	45.621.804.993
Beban Aset Ekstrakomptabel	45.771.308.311	159.803.251.998
Jumlah	**285.139.851.823.393**	**225.619.161.434.819**

Kenaikan Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2024 dipicu antara lain oleh (1) penyelenggaran pemilihan kepala Daerah Tahun 2024; dan (2) kenaikan penyaluran pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit pada BLU BPDPKS.
Perbedaan nilai Pendapatan Beban Barang dan Jasa antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh pembayaran atas penyaluran barang tahun 2023 yang dibayarkan tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian dan pencatatan transaksi yang bersumber dari hibah langsung serta transaksi belanja yang masih harus dibayar.

E.2.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mencapai Rp45.486.795.081.937, naik sebesar Rp8.967.918.641.773 atau 24,56 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp36.518.876.440.164. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.433.813.681.339	6.488.925.169.428
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	134.479.590.652	118.309.752.041
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi Covid-19		547.672.780
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	386.002.914.857	371.548.571.007
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.343.799.311.575	11.014.363.567.074
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	2.511.201.714.074	2.174.878.943.781
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	36.375.289.832	29.566.370.576
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.206.399.857	252.012.345.493
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.624.743.100.655	4.926.807.057.536
Beban Pemeliharaan Irigasi	3.835.834.983.482	1.163.765.465.688
Beban Pemeliharaan Jaringan	414.020.770.767	2.537.575.758.493
Beban Pemeliharaan Lainnya	478.193.357.263	402.967.721.163
Beban Barang dan Jasa BLU- Beban Pemeliharaan	1.856.190.485.062	1.647.751.887.067
Beban Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19		2.575.000
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	334.454.039.690	359.929.028.457
Beban Persediaan Suku Cadang	9.777.595.904.561	5.019.159.157.141
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	3.883.538.271	10.765.397.439
Jumlah	**45.486.795.081.937**	**36.518.876.440.164**

Peningkatan Beban Pemeliharaan terbesar terdapat pada Beban Persediaan Suku Cadang di Kementerian Pertahanan dan Beban Pemeliharaan Irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Beban Pemeliharaan Irigasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami kenaikan disebabkan adanya penambangan aset BMN Bangunan Air khususnya kelompok bangunan pendukung kegiatan irigasi di periode akuntansi sebelumnya.

E.2.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 2024 mencapai Rp55.492.575.872.049, naik sebesar Rp5.592.187.663.055 atau 11,21 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp49.900.388.208.994. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.007.945.649.495	24.081.321.300.241
Beban Perjalanan Dinas Tetap	63.342.941.942	64.175.497.507
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.933.624.534.372	3.176.157.255.621
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.875.255.734.512	6.671.634.981.166
Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid-19		544.209.488
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.981.373.689.012	10.492.516.276.716
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	2.617.596.830.348	2.638.306.598.148
Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	47.565.510.495	40.012.677.405
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.305.806.473.777	1.223.940.997.462
Beban Barang dan Jasa BLU – Beban Perjalanan	1.660.064.508.096	1.511.778.415.240
Jumlah	**55.492.575.872.049**	**49.900.388.208.994**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dengan nilai terbesar terdapat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum. Secara umum Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan terutama pada komponen Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Kenaikan beban perjalanan dinas diakibatkan karena pelaksanaan kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Direktorat Jenderal khususnya pada saat rapat koordinasi dan sosialisasi serta tahap pendampingan pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dan Program Sekolah Penggerak serta Implementasi Kurikulum Merdeka ke seluruh wilayah Provinsi/Kab/Kota yang terpilih.
3. Bertambahnya program-program inovasi baru diantaranya PGP Daerah Khusus, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan PGP untuk Guru dan Tenaga Kependidikan mata pelajaran Bahasa Inggris dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

E.2.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2024 mencapai Rp84.334.448.261.243, naik sebesar Rp26.025.860.172.778 atau 44,63 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp58.308.588.088.465. Beban Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.567.488.490.719	3.652.347.249.335
Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	-	100.000.000
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	15.790.481.350.897	14.854.895.094.086
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda-Penanganan Covid-19	-	8.987.044.810
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	346.028.000	16.421.132.163
Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	63.976.132.391.627	39.775.837.568.071
Jumlah	**84.334.448.261.243**	**58.308.588.088.465**

Beban Barang Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda umumnya mengalami kenaikan, terutama pada komponen Beban Persediaan untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kegiatan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP).
2. Kegiatan penyaluran bantuan pemerintah berupa uang pada kegiatan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
3. Kegiatan pengadaan alat pengolah pangan lokal;
4. Kegiatan Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS).
5. Terdapat hibah atas jembatan gantung serta jalan dan jembatan kepada Pemerintah Daerah

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2024 dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Badan Pangan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian.

E.2.1.2.7. Beban Pembayaran Kewajiban Utang

Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2024 mencapai Rp524.147.192.364.375, naik sebesar Rp34.499.139.162.325 atau 7,05 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp489.648.053.202.050. Beban Pembayaran Kewajiban Utang tersebut berasal dari Beban Pembayaran Kewajiban Utang pada Bendahara Umum Negara. Rincian Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Bunga Instrumen Pinjaman	**40.599.799.121.201**	**40.686.203.394.415**
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	2.663.444.522.711	1.620.007.929.172
Beban Bunga Pinjaman Program	18.005.009.888.822	21.334.657.919.454
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	190.079.186.734	169.342.160.634
Beban Bunga Pinjaman Proyek	14.786.385.878.614	13.664.992.845.659
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.954.577.536.857	3.896.869.661.421
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	302.107.463	332.878.075
Beban Bunga SBN	**472.553.030.127.324**	**439.326.233.430.912**
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	337.023.131.570.449	313.700.619.979.947
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	231.387.637.000	242.515.144.295
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	43.910.593.062.633	42.205.592.083.000
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.914.760.737	43.726.664.053
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	76.094.504.215.655	70.675.625.816.608
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan SBSN Jangka Panjang	322.740.183.995	307.098.351.120
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	14.862.652.147.419	12.128.812.944.249
Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	25.106.549.436	22.242.447.640
Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga	**10.994.363.115.850**	**9.635.616.376.723**
Jumlah	**524.147.192.364.375**	**489.648.053.202.050**

Secara umum Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun 2024 mengalami kenaikan di komponen Beban Bunga SBN dan Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga. Naiknya Beban Bunga SBN terutama pada bagian Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah karena meningkatnya *outstanding* SBN.

Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara Tahun 2024.

Nilai Beban Diskon yang Menambah Beban Bunga sebesar Rp1.358.746.739.127 atau 14,10 persen dibandingkan dengan Tahun 2023. Sudah termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Berikut merupakan rincian Beban Pembayaran Diskon yang Menambah Beban Bunga.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara	1.300.860.839.000	1.579.023.519.000
Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara	4.433.241.879.600	4.742.202.109.136
Beban Pembayaran *Discount* Obligasi Negara Valas	508.946.497.750	495.683.871.193
Beban Pembayaran *Discount* SBSN - Jangka Panjang	3.306.778.384.300	2.519.164.951.394
Beban Pembayaran *Discount* Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.444.535.515.200	299.541.926.000
Jumlah	**10.994.363.115.850**	**9.635.616.376.723**

E.2.1.2.8. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun 2024 mencapai Rp265.510.751.678.440, naik sebesar Rp23.489.544.114.872 atau 9,71 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp242.021.207.563.568. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Rincian Beban Subsidi Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Subsidi Minyak Solar	17.613.735.502.761	17.561.498.024.249
Beban Subsidi Minyak Tanah	4.398.198.129.038	4.560.105.170.437
Beban Subsidi Elpiji	84.040.315.895.620	73.719.718.440.748
Beban Subsidi Listrik	77.045.334.864.270	68.636.731.031.486
Beban Subsidi Pupuk	36.788.315.401.696	35.533.530.690.953
Beban Subsidi PT KAI	4.442.674.571.005	3.271.612.480.022
Beban Subsidi PT PELNI	3.112.430.319.762	2.661.813.756.015
Beban Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya	176.322.920.000	172.000.950.000
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	816.130.000.000	933.112.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	4.209.495.602.649	4.020.613.823.221
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	32.379.267.156.831	29.492.388.610.110
Beban Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	-	2.015.271.068
Beban Subsidi Kredit Resi Gudang	4.748.993.980	2.142.819.505
Beban Subsidi Estimasi	3.451.526.637	1.322.719.648
Beban Subsidi Bunga/Subsidi Margin Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	114.365.781.222	160.295.082.887
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi Covid-19	365.965.012.969	1.292.306.693.219
Jumlah	**265.510.751.678.440**	**242.021.207.563.568**

Beban Subsidi berasal dari BUN Pengelola Belanja Subsidi dan dilaksanakan oleh beberapa Kementerian Negara/Lembaga. Beban Subsidi terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Kenaikan Beban Subsidi terbesar berasal dari komponen Beban Subsidi Energi.

Perbedaan nilai Beban Subsidi antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh penjurnalan resiprokal Pendapatan Pajak Ditanggung Pemerintah dengan Beban Subsidi Ditanggung Pemerintah.

E.2.1.2.9. Beban Hibah

Beban Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut pada saat terjadinya transaksi. Beban Hibah Tahun 2024 mencapai Rp278.430.938.953, naik Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp59.290.220.176 atau 27,06 persen jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp219.140.718.777. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Beban Hibah	261.734.387	101.163.777
Jumlah	**278.430.938.953**	**219.140.718.777**

Pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing dikelola oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Beberapa negara yang menjadi tujuan hibah LDKPI antara lain Ukraina, Palestina, Afganishtan, Gambia, dan Nigeria.

E.2.1.2.10. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mencapai Rp155.975.985.991.008, turun sebesar Rp365.105.539.974 atau 0,23 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp156.341.091.530.982. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	1.967.021.257.899	948.946.243.436
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	329.653.988.739	71.101.459.333
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	72.515.761.108.288	67.603.711.600.319
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	154.096.066.142	183.194.602.048
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	8.881.484.700	20.702.977.270
Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	74.312.482.348.320	81.386.973.089.291
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	791.850.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	13.430.000.000	20.375.194.249
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	100.281.000.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Uang	1.774.034.792.461	2.781.428.938.007
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang	1.987.738.406.655	670.250.295.611
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Jasa	2.912.886.537.804	2.478.783.638.818
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang-Penanganan Covid-19	-	68.203.825.712
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa-Penanganan Covid-19	-	6.346.816.888
Jumlah	**155.975.985.991.008**	**156.341.091.530.982**

Beban Bantuan Sosial tersebar pada beberapa Kementerian/Lembaga, dengan nilai terbesar berada di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan. Penurunan tersebut terlihat pada komponen Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang. Penyebab penurunan Beban Bantuan Sosial secara umum antara lain:

1. Penurunan anggaran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Sosial tahun 2024.
2. Penurunan target penerima Bantuan Sosial Rumah Sejahtera Terpadu yang semula 5.050 KPM menjadi 1.500 KPM.

Perbedaan nilai Beban Bantuan Sosial antara penyajian pada LRA dan LO antara lain disebabkan oleh perbedaan basis akuntansi, di mana belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat adanya pembelian persediaan dalam rangka bantuan sosial TA 2024, sedangkan beban bantuan sosial digunakan untuk mencatat penggunaan persediaan dalam rangka bantuan sosial.

E.2.1.2.11. Beban Transfer ke Daerah

Beban Transfer Tahun 2024 mencapai Rp902.646.703.693.172, naik sebesar Rp21.256.330.635.368 atau 2,41 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp881.390.373.057.804. Rincian Beban Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Dana Bagi Hasil	192.585.390.373.161	208.351.386.473.005
Beban Dana Alokasi Umum	429.210.611.278.998	398.029.628.594.542
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	50.890.077.113.845	50.334.741.347.305
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.237.567.201.933	125.341.735.389.619
Hibah ke Daerah	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627
Beban Dana Desa	70.846.529.689.674	69.895.828.548.550
Insentif Fiskal	7.001.740.596.500	7.906.031.813.500
Beban Dana Otonomi Khusus	18.271.490.935.000	17.241.263.570.000
Beban Dana Keistimewaan	1.396.134.243.367	1.348.883.261.656
Jumlah	**902.646.703.693.172**	**881.390.373.057.804**

Komposisi Beban Transfer ke Daerah dapat dilihat dalam **Grafik 39** berikut.

Grafik 39
Komposisi Beban Transfer ke Daerah Tahun 2024

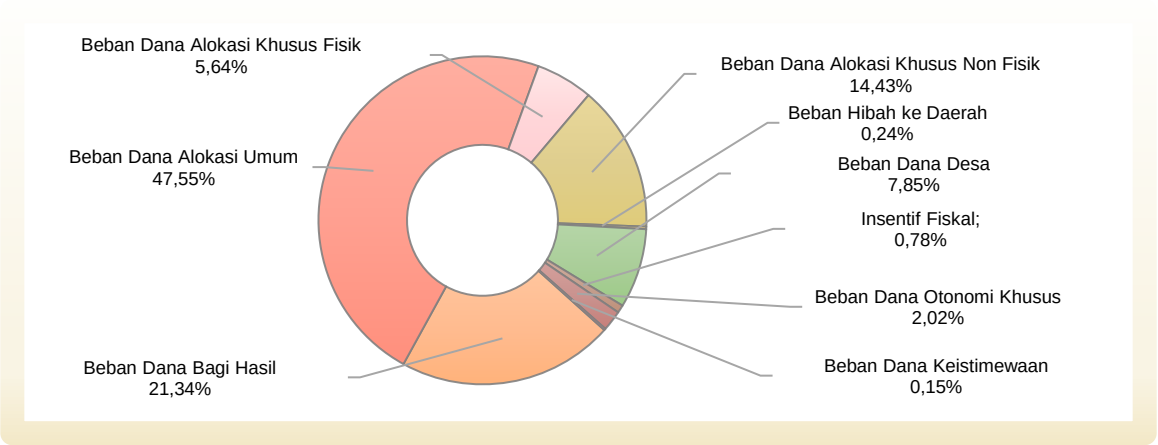

a. Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2024 mencapai Rp192.585.390.373.161, turun sebesar Rp15.765.996.099.844 atau 7,57 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp208.351.386.473.005. Penurunan ini disebabkan terdapat penyaluran tambahan DBH regular dan kurang bayar DBH sampai dengan Tahun 2023 pada akhir Desember 2023.Beban Dana Bagi Hasil Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	48.712.704.840.225	40.068.884.113.422
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	2.879.329.277.668	2.935.803.739.331
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Provinsi	14.935.914.064.732	15.460.957.691.089
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	15.544.395.431.000	15.745.644.170.000
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	11.696.789.361.379	12.541.960.314.124
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0,5%		
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus	387.184.756.000	561.931.814.000
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	8.579.984.964.390	6.972.776.751.298
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.098.679.268.000	1.975.050.200.000
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Iuran Tetap	628.877.889.195	647.415.455.790
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum – Royalti	75.337.904.504.702	99.371.885.899.550
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	2.166.901.895.058	2.155.470.977.614
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	19.820.916.903	29.954.252.617
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi – Iuran Produksi (Royalti)	83.726.236.751	79.524.028.865
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	92.420.923.800	23.229.897.140
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	920.842.041.722	802.185.916.944
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	857.054.674.786	638.971.950.330
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	761.332.477.378	509.514.682.615
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	1.398.300.848.496	1.536.747.285.034
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.483.226.000.976	6.293.477.333.242
Jumlah	**192.585.390.373.161**	**208.351.386.473.005**

b. Beban Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 mencapai Rp429.210.611.278.998, naik sebesar Rp31.180.982.684.456 atau 7,83 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp398.029.628.594.542. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya porsi alokasi DAU *Block Grant*. Pada Tahun 2024 DAU untuk THR dan Gaji Ketigabelas bagi Guru ASN Daerah dialokasikan tersendiri.

c. Beban Dana Alokasi Khusus Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 mencapai Rp50.890.077.113.845, naik sebesar Rp555.335.766.540 atau 1,10 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp50.334.741.347.305.

d. Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 mencapai Rp130.237.567.201.933, naik sebesar Rp5.099.498.348.848 atau 4,07 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp125.341.735.389.619. Hal ini disebabkan oleh adanya penyelesaian piutang DAK Non Fisik s.d. 2023 berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Non Fisik TA 2024

e. Beban Hibah Ke Daerah

Beban Hibah ke Daerah Tahun 2024 mencapai Rp2.207.162.260.694, turun sebesar Rp733.711.798.933 atau 24,95 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp2.940.874.059.627. Mulai Tahun 2023, Beban Hibah ke Daerah menjadi bagian dari Transfer ke Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

f. Beban Dana Otonomi Khusus

Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp18.271.490.935.000, naik sebesar Rp1.030.227.365.000 atau 5,98 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp17.241.263.570.000. Mulai tahun 2023, Dana Otonomi Khusus terbagi menjadi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum, Dana Otsus yang ditentukan penggunaannya, dan Dana Tambahan Infrastruktur.

g. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024 mencapai Rp1.396.134.243.367, naik sebesar Rp47.250.981.711 atau 3,50 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.348.883.261.656.

h. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2024. Insentif Fiskal Tahun 2024 mencapai Rp7.001.740.596.500, turun sebesar Rp904.291.217.000 atau 11,44 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp7.906.031.813.500.

i. Beban Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2024 mencapai Rp70.846.529.689.674, naik sebesar Rp950.701.141.124 atau 1,36 persen dibandingkan Tahun 2023 Rp69.895.828.548.550.

E.2.1.2.12. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mencapai Rp217.330.170.896.748, naik sebesar Rp8.085.850.251.334 atau 3,86 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp209.244.320.645.414. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	85.794.555.348.269	79.102.547.022.483
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.248.483.805.974	14.356.894.059.843
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	38.346.069.282.702	41.542.590.635.359
Beban Penyusutan Irigasi	20.892.245.099.232	20.809.972.910.825
Beban Penyusutan Jaringan	1.354.832.273.514	1.525.707.669.220
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	987.863.822.788	1.057.943.587.839
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	3.199.437.519.672	2.416.563.312.731
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	12.490.517.183.411	11.527.223.612.484
Beban Penyusutan Properti Investasi	332.314.025.545	836.810.594.919
Beban Amortisasi Hak Cipta	391.323.490	778.175.070
Beban Amortisasi Paten	43.873.037.443	19.825.181.333
Beban Amortisasi *Software*	9.165.635.016.730	6.947.988.774.874
Beban Amortisasi Lisensi	768.925.032.401	629.552.743.523
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	321.519.684.609	421.691.084.799
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	81.491.718.196	19.108.452.000
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	136.926.297.323	536.415.116.870
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	217.593.203.239	
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	569.399.702.431	684.697.933.162
Beban Penyusutan Aset Eks BPPN	26.127.720	-
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	26.730.307.675.106	25.787.694.243.907

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	484.017.062	853.625.595
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	73.410.373.792	399.992.628.050
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	567.148.934.086	612.736.199.419
Beban Penyusutan Aset *Idle* yang Sudah Diserahkan ke DJKN	487.669.619	521.759.021
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	6.232.722.394	6.211.322.088
Jumlah	**217.330.170.896.748**	**209.244.320.645.414**

E.2.1.2.13. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 mencapai Rp33.297.587.421.879, naik sebesar Rp31.368.617.212.340 atau 1626,18 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.928.970.209.539. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2023. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - PPh Migas	14.906.599.941	52.056.790.699
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - PPh Non Migas	3.343.479.040.366	3.045.753.399.074
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang PPN	2.675.799.046.342	2.604.924.519.034
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang PPnBM	5.798.868.449	230.044.803
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang PBB dan BPHTB	(334.790.771.218)	854.554.066.397
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Cukai dan Bea Materai	42.751.468.616	(15.365.760.526)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Pajak Lainnya	2.319.109.701.829	571.136.667.412
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	281.476.544.352	(82.968.041.872)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang PNBP	14.125.486.563.580	(2.567.410.976.237)
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Lainnya	9.838.799.464.917	(1.754.856.086.050)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pemberian Pinjaman	570.724.537.649	2.288.790.574.086
Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang kepada Yayasan Supersemar	220.855.080.513	(47.062.433.591)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	37.718.124	286.681.436.749
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Subsidi		6.175.000.000
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	17.284.310	23.937.230
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(797.063.179)	629.822.447
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	699.042	(1.255.559.859)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	273.070.287.574	143.425.846.860
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa BLU	1.422.288.821	2.215.523.277
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Operasional Lainnya BLU	3.249.408.029	24.081.816.359
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(70.471.578.111)	(3.256.377.244.519)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	847.653.559	(4.056.272.751)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR	1.238.460.848	(68.246.059.256)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – TP/TGR BLU	9.855.722	7.435.975
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	20.807.258	(5.603.384.717)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	(15.454.545.454)	(148.514.851.485)
Jumlah	**33.297.587.421.879**	**1.928.970.209.539**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami kenaikan secara signifikan, terutama pada komponen Beban Penyisihan Piutang PNBP dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya yang terjadi di Kejaksaan RI dan BA BUN Pengelola Transaksi Khusus. Besarnya kenaikan tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan kualitas Piutang Uang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi macet dan piutang pengelolaan aset BLBI.

E.2.1.2.14. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun 2024 mencapai Rp262.572.090.481.077, turun sebesar Rp23.113.299.488.711 atau 8,09 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp285.685.389.969.788. Rincian Beban Lain-lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Cadangan Beras Pemerintah		21.907.297.958.895
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	119.748.067.230	121.245.799.637
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	106.854.376.765	99.327.469.278
Beban Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	727.120.009.219	546.650.473.751
Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi	216.276.752.618.467	200.888.732.293.042
Beban Lain-lain Penggunaan PNBP BUN	95.346.558.090	39.534.780.432
Beban Lain-lain	5.388.854.482.581	4.973.362.125.105
Beban Pihak Ketiga Migas	31.730.950.126.874	25.977.643.819.220
Beban Pembayaran *Reimbursement* PPN	30.734.471.326	152.398.856.442
Beban Pembayaran Penggantian Bonus Produksi	81.852.764.970	109.575.132.791
Beban Pihak Ketiga Diestimasi - *Reimbursement* PPN	306.964.375.046	367.101.143.558
Beban Pihak Ketiga Diestimasi – PBB Panas Bumi	375.813.805.470	430.561.669.691
Beban Pihak Ketiga Diestimasi – Penggantian Bonus Produksi	15.954.641.713	
Beban Penyesuaian Nilai Investasi	7.315.144.183.326	30.071.958.447.946
Jumlah	**262.572.090.481.077**	**285.685.389.969.788**

Beban Lain-lain Tahun 2024 hanya terdapat pada Bendahara Umum Negara. Secara umum Beban Lain-lain mengalami penurunan, akan tetapi terdapat komponen yang mengalami kenaikan yaitu Beban Lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi.

No	Uraian Kompensasi	Jumlah (Rp)
A	Beban Dana Kompensasi Listrik	100.202.786.379.526
B	Beban Dana Kompensasi BBM	116.073.966.238.941
	1. JBT Minyak Solar	69.272.025.354.306
	2. JBKP Pertalite	46.801.940.884.635
C	**Jumlah Beban Dana Kompensasi Listrik dan BBM**	**216.276.752.618.467**

Salah satu alasan turunnya Beban Lain-lain adalah Penurunan kerugian BUMN pada klaster infrastruktur dan industri kesehatan. Pada klaster infrastruktur, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan kerugian sebagai imbas restrukturisasi pinjaman, dan PT Waskita Karya yang mengalami penurunan beban pokok pendapatan dan beban keuangan.

Sedangkan pada klaster Industri Kesehatan, penurunan kerugian disebabkan adanya *non-recurring expense* tahun 2023 berkaitan dengan *impairment* produk Covid-19 yang tidak dapat diserap pasar (beban tidak lagi berulang di Tahun 2024), dan adanya kenaikan pendapatan lain-lain yang berasal dari keuntungan kurs dan pembalikan pencadangan kontinjensi Obligasi Wajib Konversi (OWK) di Perusahaan anak PT Bio Farma (Persero).

Selain itu, Beban Lain-lain mengalami penurunan disebabkan oleh seluruh BUMN/Lembaga dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki ekuitas positif tidak membukukan rugi sehingga nilai Beban Penyesuian Nilai Investasi mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E.2.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 mencapai Rp22.678.698.647.688 berasal dari defisit pelepasan aset, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan Surplus Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp59.922.700.862.314, turun sebesar Rp37.244.002.214.626 atau 62,15 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1.Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Defisit Pelepasan Aset Tahun 2024 sebesar Rp12.327.778.657.047, turun sebesar Rp4.982.778.746.272 atau 28,78 persen dibandingkan Defisit Pelepasan Aset Tahun 2023 sebesar Rp17.310.557.403.319. Defisit Pelepasan Aset tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp482.781.785.082 dan Beban Pelepasan Aset sebesar Rp12.810.560.442.129.

E.2.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset

Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2024 mencapai Rp482.781.785.082, turun sebesar Rp66.153.566.219 atau 12,05 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp548.935.351.301.

Pendapatan Pelepasan Aset tersebut berasal dari K/L yaitu ketika pendapatan yang diterima dari pelepasan aset lebih besar dari nilai buku aset yang dilepas. Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	10.592.829.263	14.102.900.933
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	240.363.928.017	229.102.645.818
Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	1.435.226.322	5.146.953.259
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	6.216.198.000	2.518.000
Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	201.009.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	189.497.420.980	291.806.114.989
Pendapatan Pelepasan Aset	34.676.182.500	8.573.209.302
Jumlah	**482.781.785.082**	**548.935.351.301**

Penurunan Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2024 terbesar terdapat pada Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya. Kontribusi Pendapatan Pelepasan Aset terbesar terdapat pada Kementerian Keuangan, Bendahara Umum Negara, dan Kementerian Pertahanan

E.2.2.1.2. Beban Pelepasan Aset

Beban Pelepasan Aset Tahun 2024 sebesar Rp12.810.560.442.129, turun sebesar Rp5.048.932.312.491 atau 28,27 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp17.859.492.754.620. Beban Pelepasan Aset terdapat pada Kementerian/Lembaga sebesar Rp12.060.673.636.686 dan pada Bendahara Umum Negara sebesar Rp749.886.805.443. Beban Pelepasan Aset paling signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perhubungan.

Salah satu penyebab utama turunnya Beban Pelepasan Aset adalah adanya *non recurring expense* sebagai dampak perubahan status lima PTN BLU menjadi PTN-BH di Tahun 2023 yang tidak lagi berulang di Tahun 2024. Lima PTN tersebut yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Terbuka.

E.2.2.2.Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 mencapai Rp129.960.500.000, turun sebesar Rp301.481.910.900 atau 69,88 persen dibandingkan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2023 Rp431.442.410.900. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1. Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 mencapai Rp30.359.000.000, turun sebesar Rp74.852.500.000 atau 71,14 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp105.211.500.000. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2024 mencapai Rp160.319.500.000. Beban ini turun sebesar Rp 376.334.410.900 atau 70,13 persen dibanding Tahun 2023 Rp536.653.910.900. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BUN yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mencapai Rp35.136.437.804.735, turun sebesar Rp42.528.262.871.798 atau 54,76 persen dibandingkan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 yaitu Rp77.664.700.676.533. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp144.444.056.555.641 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp109.307.618.750.906.

E.2.2.3.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mencapai Rp144.444.056.555.641, naik sebesar Rp32.222.966.124.014 atau 28,71 persen dibandingkan Tahun 2023 Rp112.221.090.431.627. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan BLU Lainnya	3.732.088.074.821	220.098.982.560
Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	10.203.980.461	3.895.504.188
Pendapatan dari Selisih Kurs	2.528.930.891.089	938.481.757
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	28.540.088.354	41.347.366.203
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu I	1.431.000.913.546	2.287.879.313.442
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu II	223.806.544.801	199.103.667.209
Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	10.275.269.511	13.909.727.383
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	83.659.852.833.501	50.097.042.023.413
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	13.299.164.760.470	11.234.072.773.005
Pendapatan Perolehan Jasa	1.585.232.800	1.290.017.663
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	38.639.956.066.013	47.123.526.335.086
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	878.651.900.274	997.986.239.718
Jumlah	**144.444.056.555.641**	**112.221.090.431.627**

Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami kenaikan terutama pada Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai tukar rupiah pada mata uang asing pada 31 Desember 2024 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Bendahara Umum Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan.

E.2.2.3.2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mencapai Rp109.307.618.750.906, naik sebesar Rp74.751.228.995.812 atau 216,32 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp34.556.389.755.094. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	699.220.562	406.978.881
Beban Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga	310.325.479.062	2.126.220.934
Beban Selisih Kurs Terealisasi	4.354.241.000	7.623.000.000
Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D	1.498.353.409.648	22.040.706
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	6.554.601.318.106	1.516.387.656.911
Beban Penggunaan Aset Lainnya yang Berkarakteristik Persediaan	9.114.909.917.890	8.594.606.580.783
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	3.458.442.611.008	1.250.397.099.291
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	-	429.763.112
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	88.333.507.677.066	23.145.862.146.753
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	52.251.381	25.492.347.748
Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	10.276.026.469	
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	8.499.157.237	9.373.851.278
Beban Lain-lain pada Kegiatan Non Operasional Lainnya	13.597.441.497	3.662.068.703
Pembulatan	(20)	(6)
Jumlah	**109.307.618.750.906**	**34.556.389.755.094**

Kenaikan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya utamanya disebabkan oleh kenaikan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi. Kenaikan Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi utamanya terjadi pada BA BUN 999.01 karena kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing 31 Desember 2024 apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dengan nilai signifikan antara lain terdapat pada Bendahara Umum Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik, dan Kementerian Pertahanan.

E.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. *Burden Sharing*

Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema *burden sharing* termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. *Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2023	(2.436.044.010.000)	-	(2.436.044.010.000)
2	Januari	1.063.218.760.000	-	1.063.218.760.000
3	Februari	2.311.539.140.000	-	2.311.539.140.000
4	Maret	2.984.585.270.000	-	2.984.585.270.000
5	April	1.108.478.470.000	-	1.108.478.470.000
6	Mei	2.291.361.160.000	-	2.291.361.160.000
7	Juni	2.931.325.430.000	-	2.931.325.430.000
8	Juli	1.093.170.890.000	-	1.093.170.890.000
9	Agustus	2.380.368.360.000	-	2.380.368.360.000
10	September	3.187.289.920.000	-	3.187.289.920.000
11	Oktober	1.189.877.760.000	-	1.189.877.760.000
12	November	2.453.153.280.000	-	2.453.153.280.000
13	Desember	3.101.763.440.000	-	3.101.763.440.000
14	Penyesuaian Akrual 2024	2.536.264.580.000	-	2.536.264.580.000
Subtotal PG		**26.196.352.450.000**	**-**	**26.196.352.450.000**
B. *Non Public Goods*				
1	Penyesuaian Akrual 2023	(24.488.397.350)	(402.442.638.510)	(426.931.035.860)
2	Juni	263.610.395.000	4.757.363.605.000	5.020.974.000.000
3	Desember	45.277.408.000	4.764.264.807.500	4.809.542.215.500
4	Penyesuaian Akrual 2024	11.235.156.175	2.944.521.818.827	2.955.756.975.002
Subtotal NPG		**295.634.561.825**	**12.063.707.592.817**	**12.359.342.154.642**
C. *Cluster* A				
1	Penyesuaian Akrual 2023	(705.612.371.730)	-	(705.612.371.730)
2	Januari	336.453.795.750	-	336.453.795.750
3	Februari	142.229.566.980	-	142.229.566.980
4	Maret	936.062.000.000	-	936.062.000.000
5	April	502.162.768.080	-	502.162.768.080
6	Mei	140.365.183.860	-	140.365.183.860
7	Juni	919.358.000.000	-	919.358.000.000
8	Juli	494.117.329.940	-	494.117.329.940
9	Agustus	145.817.625.060	-	145.817.625.060
10	September	1.158.161.119.840	-	1.158.161.119.840
11	Oktober	378.245.359.200	-	378.245.359.200
12	November	150.276.314.880	-	150.276.314.880
13	Desember	1.144.199.345.630	-	1.144.199.345.630
14	Penyesuaian Akrual 2024	744.277.970.740	-	744.277.970.740
Subtotal *Cluster* A		**6.486.114.008.230**	**-**	**6.486.114.008.230**
Total PG, NPG, dan *Cluster* A		**32.978.101.020.055**	**12.063.707.592.817**	**45.041.808.612.872**

2. Pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan konversi sebanyak 5 *loan* ADB, satu *loan* dengan mata uang USD dan 4 *loan* dengan mata uang JPY yang dikonversi ke mata uang IDR. Rincian *loan* dimaksud adalah sebagai berikut

No	*LOAN* ID LAMA	*LOAN* ID BARU	*CREDITOR* REF	NILAI *LOAN* LAMA	NILAI *LOAN* BARU	TANGGAL KONVERSI	MTU LAMA	MTU BARU	IDR *Fixed Rate*	*Contractual Spread*	*Transaction Fee*
1	21238000	212380A0	2927-INO	32.633.267	497.265.716.756	15-Oct-24	USD	IDR	-0,77%	0,40%	0,02%
2	212360A0	212360B0	2928-INO	4.970.359.570	595.427.194.366	15-Oct-24	JPY	IDR	-0,77%	0,40%	0,02%
3	212410A0	212410B0	3094-INO	809.844.832	118.343.362.049	1-Dec-24	JPY	IDR	-0,35%	0,40%	0,02%
4	212530A0	212530B0	3454-INO	31.928.750.000	4.497.791.667.181	1-Nov-24	JPY	IDR	-0,45%	0,50%	0,02%
5	212620A0	212620B0	3741-INO	48.790.000.000	7.244.066.666.563	15-Nov-24	JPY	IDR	-0,45%	0,50%	0,02%

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 sebesar Rp606.014.272.515.831, merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2023. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Tahun 2023 sebesar Rp536.443.156.881.227, Saldo Awal Kas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.571.115.634.604 atau 12,97 persen. Rincian Saldo Awal Kas sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2024	1 Januari 2023
Kas BUN di BI	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas pada BLU yang telah disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
Saldo Awal Kas	**606.014.272.515.831**	**536.443.156.881.227**

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(154.149.780.567.127)	(34.793.236.369.070)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(414.403.152.941.181)	(391.624.901.747.838)
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	614.280.048.971.953	445.794.317.054.009
Kenaikan (penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	24.391.505.836.682	88.761.873.212.786
Penggunaan SAL	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
Koreksi Pembukuan	9.263.322.996.240	(3.566.936.515.283)
Kenaikan (penurunan) Kas Setelah Koreksi	**23.000.944.296.567**	**69.571.115.634.604**

Penggunaan SAL Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp56.381.000.000.000 dan Rp35.000.000.000.000. Penggunaan Dana SAL sebesar minus Rp56.381.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2024 yang seluruhnya bersumber dari Rek Lain BI SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan anggaran.

Koreksi Pembukuan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp 9.263.322.996.240 dan minus Rp3.566.936.515.283, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
1.	Koreksi SiLPA	2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
2.	Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)*	6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	883.764.180.317	(4.534.436.524.122)
	Total Koreksi Pembukuan	**9.263.322.996.240**	**(3.566.936.515.283)**

1. Koreksi SiLPA sebesar Rp2.052.665.074.805 merupakan penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp2.128.035.811.698 serta pengembalian atas pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar minus Rp75.370.736.893. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA melalui Penerbitan SPM PP senilai minus Rp53.367.852.195 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL senilai minus Rp22.002.884.698.
2. Selisih Kurs Belum Terealisasi *(Unrealized)* sebesar Rp6.326.893.741.118 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp7.436.474.073.826 dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.109.580.332.708 pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.
3. Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp883.764.180.317 terdiri dari:
   a. Koreksi Kas BLU sebesar Rp859.144.688.316 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2024, penyesuaian saldo Kas BLU

akibat likuidasi, koreksi kas BLU akibat kekurangan atau kelebihan setor PNBP TAYL, koreksi kas BLU akibat kesalahan pembukuan, koreksi kas BLU akibat pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang.

b. Koreksi kas Hibah sebesar Rp85.975.723.953 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada Tahun 2024 oleh Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah langsung uang luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp108.425.756.794, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp13.074.500.841, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp6.338.497.000, serta penyesuaian kas hibah sebesar minus Rp3.037.035.000.

c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp61.355.941.239 merupakan koreksi pembukuan atas pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian *(refund)* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL.

d. Koreksi Lain-lain sebesar minus Rp290.713 merupakan koreksi pembulatan atas saldo Kas Rekening Pemerintah Lainnya dan Kas Transitoris

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp429.668.569.721.888 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Saldo Akhir Kas [1)]	629.015.216.812.398	606.014.272.515.831
Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Kas di Bendahara Penerimaan	14.763.197.575	318.602.129.457
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang sudah Disahkan [2)]	2.861.271.218.467	7.604.425.582.862
Kas BLU yang Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU) [3)]	(41.604.232.972.240)	(35.230.294.868.007)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan/Lainnya [4)]	(27.381.369.416)	(38.643.493.231)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) [5)]	(160.823.830.777.318)	(148.155.907.631.641)
Kas Transito (Kiriman Uang)	2.750.411.765	4.930.665.723
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	**429.668.592.676.299**	**430.715.095.759.788**

1) Saldo Akhir Kas sebesar Rp629.015.216.812.398 merupakan saldo awal kas ditambah dengan kenaikan (penurunan) kas setelah koreksi pada Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576
Rekening Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas BLU yang Sudah Disahkan *	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening DDP)	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641
Jumlah Saldo Akhir Kas	**629.015.216.812.398**	**606.014.272.515.831**

**) Kas di BLU yang sudah disahkan pada Tahun 2024 sebesar Rp 96.973.278.750.758 termasuk Kas BLU yang Didepositokan (disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca) sebesar Rp41.604.232.972.240*

2) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.861.271.218.467 berasal dari saldo Kas Lainnya dan Setara Kas menurut neraca sebesar Rp13.413.383.992.003 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp10.552.112.773.536.

3) Kas BLU yang didepositokan merupakan Investasi Jangka Pendek berupa deposito yang berada di BLU sebesar Rp41.604.232.972.240.

4) Kas pada BLU yang Belum Disahkan/Lainnya sebesar minus Rp27.381.369.416 terdiri dari Kas BLU yang belum disahkan Rp95.600.000,00 dan Kas BLU yang direklasifikasi menjadi Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp27.476.969.416.

5) Saldo Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya) sebesar minus Rp160.823.830.777.318 merupakan kumpulan Saldo Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya yang rekeningnya dikelola oleh UAPBUN-AP dan disajikan dalam komponen Aset Lainnya pada Neraca.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

F.2.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar minus Rp154.149.780.567.127 dan minus Rp34.793.236.369.070. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp119.356.544.198.057 atau 343,05 persen dari Tahun 2023. Penerimaan negara TA 2024 mengalami kenaikan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai. Namun demikian diiringi dengan belanja pemerintah yang mengalami peningkatan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Pembayaran Bunga Utang. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	2.850.105.793.777.310	2.783.382.716.269.797
Arus Kas Keluar	3.004.255.574.344.437	2.818.175.952.638.867
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	**(154.149.780.567.127)**	**(34.793.236.369.070)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 sebesar minus Rp154.149.780.567.127 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah.

F.2.1.1.Arus Kas Masuk

F.2.1.1.1. Penerimaan Perpajakan

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang Tahun 2024 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Penerimaan Perpajakan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.231.839.822.879.833 dan Rp2.154.208.219.467.830, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		
Pendapatan Pajak Penghasilan	1.061.940.526.200.605	1.061.234.020.639.596
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	828.436.302.857.826	763.632.668.212.526
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958
Pendapatan Cukai	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725
Pendapatan Pajak Lainnya	8.742.804.515.348	9.729.790.060.612
Jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**2.157.982.145.917.601**	**2.089.718.285.003.417**
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	52.965.349.842.955	50.891.762.896.870
Bea Keluar	20.892.327.119.277	13.598.171.567.543
Jumlah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**73.857.676.962.232**	**64.489.934.464.413**
Penerimaan Perpajakan	**2.231.839.822.879.833**	**2.154.208.219.467.830**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp77.631.603.412.003 atau 3,60 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Penghasilan

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Pajak Penghasilan Non-Migas. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.061.940.526.200.605 dan Rp1.061.234.020.639.596, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPh Migas		
Pendapatan PPh Minyak Bumi	20.941.726.775.617	22.904.493.665.260
Pendapatan PPh Gas Bumi	44.161.588.482.782	45.867.105.436.853
Pendapatan PPh Migas Lainnya	3.039.414.260	1.572.224.727
Jumlah Pendapatan PPh Migas	**65.106.354.672.659**	**68.773.171.326.840**

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPh Non-Migas		
Pendapatan PPh Pasal 21	243.563.524.511.774	200.849.556.208.059
Pendapatan PPh Pasal 22	35.728.588.168.466	33.960.305.154.489
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	73.757.704.583.023	69.528.072.968.512
Pendapatan PPh Pasal 23	64.531.207.939.817	58.168.982.689.674
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.396.646.388.342	12.263.329.558.127
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	332.645.392.712.765	406.296.468.651.423
Pendapatan PPh Pasal 26	82.848.756.083.600	76.957.876.931.724
Pendapatan PPh Final dan Fiskal LN	140.871.919.690.518	125.092.090.364.487
Pendapatan PPh Non-Migas Lainnya	178.789.296.200	152.697.346.952
Jumlah Pendapatan PPh Non-Migas	**988.522.529.374.505**	**983.269.379.873.447**
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	**8.311.642.153.441**	**9.191.469.439.309**
Jumlah	**1.061.940.526.200.605**	**1.061.234.020.639.596**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp706.505.561.009 atau 0,07 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.1.2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp828.436.302.857.826 dan Rp763.632.668.212.526, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	523.708.322.892.063	473.769.779.998.203
Pendapatan PPN Impor	274.211.355.616.518	255.865.218.976.531
Pendapatan PPN Lainnya	10.172.429.011.632	8.010.587.913.149
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.067.551.686.335	16.795.994.592.963
Pendapatan PPnBM Impor	6.471.544.769.937	7.096.362.043.755
Pendapatan PPnBM Lainnya	346.254.121	1.000.783.658
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	666.506.458.627	2.028.573.395.855
Pendapatan PPnBM Ditanggung Pemerintah	138.246.168.593	65.150.508.412
Jumlah	**828.436.302.857.826**	**763.632.668.212.526**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp64.803.634.645.300 atau 8,49 persen dari Tahun 2023

F.2.1.1.1.3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp32.491.020.191.825 dan Rp33.270.661.547.958, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan PBB Perkebunan	3.632.025.365.954	3.241.035.767.076
Pendapatan PBB Kehutanan	785.632.821.820	627.259.722.024
Pendapatan PBB Pertambangan	11.473.212.160.957	11.492.310.087.449
Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	15.867.515.938.594	17.192.838.858.870
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	534.003.914.205	618.223.603.408
Pendapatan PBB Lainnya	198.629.990.295	98.993.509.131
Jumlah	**32.491.020.191.825**	**33.270.661.547.958**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp779.641.356.133 atau 2,34 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.1.4. Pendapatan Cukai

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Cukai Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp226.371.492.151.997 dan Rp221.851.144.542.725, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	216.852.275.618.197	213.497.773.071.725
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	142.764.611.000	127.918.170.000

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	9.227.388.671.300	8.103.897.479.000
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	130.071.298.500	104.242.719.000
Pendapatan Cukai Lainnya	18.991.953.000	17.313.103.000
Jumlah	**226.371.492.151.997**	**221.851.144.542.725**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp4.520.347.609.272 atau 2,04 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.1.5. Pendapatan Pajak Lainnya

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Pajak Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.742.804.515.348 dan Rp9.729.790.060.612, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bea Meterai	1.336.551.323.515	1.223.862.796.089
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	5.466.246.215.122	5.470.840.719.647
Pendapatan PPN Batubara	165.642.195.374	196.395.808.289
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.120.380.574	3.812.341.830
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.363.830.072.245	2.260.155.446.639
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	408.414.328.518	576.930.315.430
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	-	(2.949.314.751)
Pendapatan Denda Penagihan	-	741.947.439
Jumlah	**8.742.804.515.348**	**9.729.790.060.612**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp986.985.545.264 atau 10,14 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.1.6. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp73.857.676.962.232 dan Rp64.489.934.464.413, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bea Masuk		
Pendapatan Bea Masuk	48.565.705.533.208	47.031.645.101.860
Pendapatan Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	5.321.000
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.236.850.519.582	991.256.259.179
Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE	926.951.114.319	402.746.814.511
Pendapatan Pabean Lainnya	5.696.741.960	7.792.099.320
Pendapatan Bea Masuk *Anti Dumping*	357.966.052.000	301.082.959.000
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.872.179.881.886	2.157.234.342.000
Jumlah Pendapatan Bea Masuk	**52.965.349.842.955**	**50.891.762.896.870**
Pendapatan Bea Keluar		
Pendapatan Bea Keluar	20.927.936.260.277	13.597.383.848.543
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	(35.659.410.000)	619.652.000
Pendapatan Bunga Bea Keluar	50.269.000	168.067.000
Jumlah Pendapatan Bea Keluar	**20.892.327.119.277**	**13.598.171.567.543**
Jumlah	**73.857.676.962.232**	**64.489.934.464.413**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp9.367.742.497.819 atau 14,53 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp583.878.607.181.721 dan Rp611.990.337.922.242, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Sumber Daya Alam	228.928.767.532.781	254.203.031.073.614
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870
Pendapatan PNBP Lainnya	163.848.513.738.956	179.868.171.315.795
Pendapatan Badan Layanan Umum	104.716.732.371.421	95.860.392.158.963
Jumlah	**583.878.607.181.721**	**611.990.337.922.242**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp28.111.730.740.521 atau 4,59 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.2.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam. Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp228.928.767.532.781 dan Rp254.203.031.073.614, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	77.961.123.337.930	87.408.885.465.416
Pendapatan Gas Bumi	32.661.085.038.989	28.769.670.492.312
Pendapatan Pertambangan Umum	107.777.558.834.527	129.126.791.868.349
Pendapatan Kehutanan	6.739.119.543.721	5.429.603.320.398
Pendapatan Perikanan	951.819.466.723	636.893.353.269
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.838.061.310.891	2.831.186.573.870
Jumlah	**228.928.767.532.781**	**254.203.031.073.614**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp25.274.263.540.833 atau 9,94 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada perusahaan negara. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp86.384.593.538.563 dan Rp82.058.743.373.870, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	85.572.985.213.463	81.217.243.776.870
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	811.608.325.100	841.499.597.000
Jumlah	**86.384.593.538.563**	**82.058.743.373.870**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp4.325.850.164.693 atau 5,27 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.2.3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp163.848.513.738.956 dan Rp179.868.171.315.795, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	44.894.004.934.622	51.186.655.069.677
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	27.743.265.311.822	28.028.272.839.161
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.693.335.550.852	6.748.502.699.372
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	3.074.841.592.851	3.720.222.791.370
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	31.855.957.320.485	30.028.772.290.804
Pendapatan Jasa Lainnya	2.753.114.727.970	1.308.205.045.864
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	30.278.124.149.439	40.503.003.442.795
Pendapatan Denda	4.525.845.781.493	2.261.698.342.186
Pendapatan Lain-lain	12.030.024.369.422	16.082.838.794.566
Jumlah	**163.848.513.738.956**	**179.868.171.315.795**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp16.019.657.576.839 atau 8,91 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp104.716.732.371.421 dan Rp95.860.392.158.963, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	88.429.003.198.836	86.494.504.584.782
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	775.438.966.691	419.285.384.531
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.685.792.466.002	1.220.147.435.517

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	596.713.515.837	820.701.691.766
Pendapatan BLU Lainnya	13.229.784.224.055	6.905.753.062.367
Jumlah	**104.716.732.371.421**	**95.860.392.158.963**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp8.856.340.212.458 atau 9,24 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.1.3. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk yang berasal dari Pendapatan Hibah pada Laporan Arus Kas merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha, pemerintah daerah, dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, pendapatan hibah pada Laporan Arus Kas juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral, hibah luar negeri lainnya. Penerimaan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp34.387.363.715.756 dan Rp17.184.158.879.725, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung		
Bentuk Uang – Perorangan	60.021.516.260	-
Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	233.933.403.044	137.278.319.260
Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	31.862.055.896.086	15.221.390.183.638
Bentuk Uang – Lainnya	91.185.494.517	2.760.643.874
Jumlah Pendapatan Hibah Dalam Negeri	**32.247.196.309.907**	**15.361.429.146.772**
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana		
Terencana Bilateral	132.463.972.855	181.831.927.857
Terencana Multilateral	408.007.371.258	241.343.042.190
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung		
Langsung Bentuk Uang Perseorangan	1.255.020.666	1.250.430.211
Langsung Bentuk Uang Bilateral	254.332.863.571	523.321.750.393
Langsung Bentuk Uang Multilateral	1.278.685.180.203	850.175.319.681
Langsung Bentuk Uang Lainnya	65.422.997.296	24.807.262.621
Jumlah Pendapatan Hibah Luar Negeri	**2.140.167.405.849**	**1.822.729.732.953**
Jumlah	**34.387.363.715.756**	**17.184.158.879.725**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp17.203.204.836.031 atau 100,11 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2. Arus Kas Keluar

F.2.1.2.1. Belanja Pegawai

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp 464.859.258.914.201 dan Rp412.711.324.466.564, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	94.474.584.839.706	86.439.214.441.661
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	70.478.736.226.243	65.784.325.265.335
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.627.058.251.782	1.445.968.520.506
Belanja Gaji Dokter PTT	-	971.858.800
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	20.450.131.425.466	18.571.148.205.747
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	6.660.298.575.577	1.872.998.267.850
Belanja Honorarium	1.464.038.800.138	1.517.199.173.983
Belanja Lembur	996.994.057.394	906.265.365.184
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	95.600.814.345.942	84.744.625.483.910
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	160.520.141.397.297	140.283.278.472.696
Belanja Asuransi Kesehatan	12.586.460.994.656	11.145.329.410.892
Jumlah	**464.859.258.914.201**	**412.711.324.466.564**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp52.147.934.447.637 atau 12,64 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp523.368.042.639.998 dan Rp432.714.969.865.127, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Barang	182.795.632.669.970	149.975.847.133.255
Belanja Jasa	55.343.968.818.268	50.333.964.148.889
Belanja Pemeliharaan	48.661.531.818.059	48.113.526.685.260
Belanja Perjalanan Dinas	53.891.864.335.902	48.305.891.764.735
Belanja Badan Layanan Umum	91.952.233.291.295	70.780.247.933.038
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	90.675.483.082.944	65.188.725.039.787
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	47.328.623.560	16.767.160.163
Jumlah	**523.368.042.639.998**	**432.714.969.865.127**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp90.653.072.774.871 atau 20,95 persen dari Tahun 2023

F.2.1.2.3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(outstanding principal)*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp488.426.422.143.817 dan Rp439.882.584.341.259. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp48.543.837.802.558 atau 11,04 persen dari Tahun 2023. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri dan Luar Negeri sebesar Rp445.938.629.950.158 dan Rp42.487.792.193.659, dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp445.938.629.950.158 dan Rp409.307.252.804.311, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Bunga Utang Dalam Negeri	**433.475.337.233.308**	**402.273.134.249.689**
Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	2.370.071.124.821	1.276.318.960.139
Bunga Obligasi Negara	341.863.595.020.603	318.954.315.650.029
Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	89.241.671.087.884	82.042.499.639.521
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara	**5.710.276.912.350**	**3.448.731.870.328**
Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.686.875.072.000	1.468.337.011.000
Discount Obligasi Negara	3.392.865.751.600	1.138.430.387.136
Discount Obligasi Negara Valas	630.536.088.750	841.964.472.192
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption*	**160.319.500.000**	**536.653.910.900**
Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara	**6.592.696.304.500**	**3.048.732.773.394**
Discount SBSN – Jangka Panjang	4.435.167.932.300	2.719.227.753.394
Discount SPNS	**2.157.528.372.200**	329.505.020.000
Jumlah	**445.938.629.950.158**	**409.307.252.804.311**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp36.631.377.145.847 atau 8,95 persen dari Tahun 2023.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp42.487.792.193.659 dan Rp30.575.331.536.948, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Bunga Pinjaman Program	21.708.836.497.880	16.041.674.225.787
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	20.778.653.588.316	14.533.324.433.086
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	302.107.463	332.878.075
Jumlah	**42.487.792.193.659**	**30.575.331.536.948**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp11.912.460.656.711 atau 38,96 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.4. Belanja Subsidi

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Belanja Subsidi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp292.692.594.096.846 dan Rp269.592.086.053.747, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - BBM	101.797.951.096.583	95.590.003.271.521
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - Non BBM	132.321.082.328.948	119.346.845.627.560
Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	7.976.011.636.109	5.092.347.517.157
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	**242.095.045.061.640**	**220.029.196.416.238**
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	**47.259.787.524.296**	**45.323.860.034.309**
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	**3.337.761.510.910**	**4.239.029.603.200**
Jumlah	**292.692.594.096.846**	**269.592.086.053.747**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp23.100.508.043.099 atau 8,57 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.5. Belanja Hibah

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Kepada Organisasi Internasional, dan Hibah Lainnya. Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp278.430.938.953 dan Rp219.140.718.777, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937
Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063
Hibah Lainnya (Banking Commision)	261.734.387	101.163.777
Jumlah	**278.430.938.953**	**219.140.718.777**

Kenaikan Belanja Hibah salah satunya karena kenaikan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dengan penerima terbesar antara lain pada Pemerintah Palestina dengan tujuan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang terkena dampak konflik dan Pemerintah Turki dengan tujuan pembangunan “Kampung Indonesia” di daerah terdampak gempa bumi Turki. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp59.290.220.176 atau 27,06 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.6. Belanja Bantuan Sosial

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp 154.949.830.442.829 dan Rp156.601.633.832.214, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	1.928.370.449.382	1.281.281.715.566
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	72.999.290.688.788	67.709.313.222.239
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	193.850.657.286	206.932.779.339
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	75.108.852.688.813	82.368.469.578.565
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	13.438.000.000	20.375.194.249
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	4.706.027.958.560	5.015.261.342.256
Jumlah	**154.949.830.442.829**	**156.601.633.832.214**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp1.651.803.389.385 atau 1,05 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.7. Belanja Lain-Lain

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Belanja Lain-lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp216.138.188.685.429 dan Rp225.023.669.152.725, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	-	12.875.144.605.421
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	119.748.067.230	121.245.799.637
Belanja Lain-lain BUN	210.371.171.227.940	206.775.576.705.309
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	-
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice*/SPP ke SP2D	1.103	694
Belanja Lain-lain Lainnya	5.647.269.389.156	5.251.702.041.664
Jumlah	**216.138.188.685.429**	**225.023.669.152.725**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp8.885.480.467.296 atau 3,95 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.8. Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp54.241.430.203.000 dan Rp63.845.997.623.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	32.733.740.472.000	41.526.659.300.000
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	21.507.689.731.000	22.319.338.323.000
Jumlah	**54.241.430.203.000**	**63.845.997.623.000**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp9.604.567.420.000 atau 15,04 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.9. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil SDA Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp93.845.576.439.722 dan Rp135.944.555.602.100, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Dana Bagi Hasil - SDA Minyak Bumi	8.944.481.225.000	16.491.258.147.000
Dana Bagi Hasil - SDA Gas Bumi	7.006.411.326.000	11.738.041.628.000
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Umum	71.110.816.829.000	99.425.415.550.000
Dana Bagi Hasil - SDA Pertambangan Panas Bumi	1.586.280.291.000	2.005.232.650.000
Dana Bagi Hasil - SDA Kehutanan	1.420.960.624.222	1.984.193.334.100
Dana Bagi Hasil Perikanan	951.698.762.000	1.095.637.785.000
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.824.927.382.500	3.204.776.508.000
Jumlah	**93.845.576.439.722**	**135.944.555.602.100**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp42.098.979.162.378 atau 30,97 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.10. Dana Bagi Hasil Cukai

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp5.087.556.141.540 dan Rp5.876.010.795.530. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp788.454.653.990 atau 13,42 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.11. Dana Alokasi Umum

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp429.210.611.278.998 dan Rp398.029.628.594.542. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp31.180.982.684.456 atau 7,83 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.12. Dana Alokasi Khusus Fisik

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp50.890.077.113.845 dan Rp50.334.741.347.305. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp555.335.766.540 atau 1,10 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.13. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Insentif Fiskal

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insentif Fiskal merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional. Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp26.693.231.531.500 dan Rp26.520.021.192.724, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Dana Otonomi Khusus Aceh	4.276.993.035.000	3.960.000.000.000
Dana Otonomi Khusus Papua	2.370.916.915.000	2.304.092.881.000
Dana Otonomi Khusus Papua Selatan	1.917.322.868.000	1.482.026.161.000
Dana Otonomi Khusus Papua Tengah	2.753.614.656.000	2.426.166.152.000
Dana Otonomi Khusus Papua Pegunungan	3.330.716.236.000	2.592.687.864.000
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	1.752.109.362.000	2.301.179.840.000
Dana Otonomi Khusus Papua Batat Daya	1.869.817.863.000	2.175.110.672.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224
Insentif Fiskal	7.001.740.596.500	7.906.031.813.500
Jumlah	**26.693.231.531.500**	**26.520.021.192.724**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp173.210.338.776 atau 0,65 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.14. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non fisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Khusus Non fisik Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp130.441.233.738.467 dan Rp128.081.946.376.309, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	53.926.075.147.483	51.141.585.255.437
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.495.768.803.108	1.166.575.891.867
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.303.572.819.195	53.094.401.455.075
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	14.779.887.962.430	15.705.734.730.625
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Pelayanan Kepariwisataan	379.208.852.000	380.997.846.500
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan, dan Museum dan Taman Budaya	5.683.327.134.751	5.731.123.396.805
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129.806.000.000	128.562.300.000

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	248.324.714.500	247.386.450.000
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	297.142.612.500	292.704.050.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	198.119.692.500	192.875.000.000
Jumlah	**130.441.233.738.467**	**128.081.946.376.309**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp2.359.287.362.158 atau 1,84 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.15. Dana Desa

Arus kas keluar yang berasal dari Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp70.925.927.774.598 dan Rp69.856.768.617.317. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp1.069.159.157.281 atau 1,53 persen dari Tahun 2023.

F.2.1.2.16. Hibah Kepada Daerah

Arus kas keluar yang berasal dari Hibah Kepada Daerah adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah Kepada Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.207.162.260.694 dan Rp2.940.874.059.627, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	810.103.833.952	1.977.982.930.618
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	101.257.208.226	143.405.713.248
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan	1.295.801.218.516	819.485.415.761
Jumlah	**2.207.162.260.694**	**2.940.874.059.627**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp733.711.798.933 atau 24,95 dari Tahun 2023.

F.2.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar minus Rp414.403.152.941.181 dan minus Rp391.624.901.747.838. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Rincian Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	24.787.984.406.152	28.445.607.957.179
Arus Kas Keluar	439.191.137.347.333	420.070.509.705.017
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	**(414.403.152.941.181)**	**(391.624.901.747.838)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.778.251.193.343 atau 5,82 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.1.Arus Kas Masuk
F.2.2.1.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Arus kas masuk yang berasal dari Pengelolaan dan Penjualan BMN merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap antara lain berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp499.450.401.555 dan Rp546.960.660.401, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	481.919.109.787	543.903.485.394
Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	17.531.291.768	3.057.175.007
Jumlah	**499.450.401.555**	**546.960.660.401**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp47.510.258.846 atau 8,69 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.1.2. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Arus kas masuk yang berasal dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.400.109.062.740 dan Rp1.097.737.606.166, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	1.221.059.570.444	1.030.646.856.018
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	179.049.492.296	67.090.750.148
Jumlah	**1.400.109.062.740**	**1.097.737.606.166**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp302.371.456.574 atau 27,54 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.1.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Dana Bergulir merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT berdasarkan perjanjian antara para BUJT dengan BPJT. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.268.707.260.033 dan Rp359.653.415.387. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp2.909.053.844.646 atau 808,85 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.1.4. Penerimaan Investasi Pemerintah

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Investasi Pemerintah Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp19.619.717.681.824 dan Rp26.441.256.275.225, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah	218.750.000.000	5.285.019.139.000
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	4.406.761.994.787	2.949.153.201.898
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	14.994.205.687.037	18.207.083.934.327
Jumlah	**19.619.717.681.824**	**26.441.256.275.225**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp6.821.538.593.401 atau 25,80 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.2. Arus Kas Keluar

F.2.2.2.1. Belanja Modal

Arus kas keluar yang berasal dari Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023 Rp355.511.133.723.811 dan Rp303.041.293.068.751, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	18.364.728.983.726	21.762.067.765.333
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.399.691.211.787	138.693.504.896.413
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.410.294.553.570	38.664.408.477.682
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	91.974.443.874.034	91.301.385.315.249
Belanja Modal Fisik Lainnya	8.624.510.944.381	5.445.554.835.621
Belanja Modal BLU	8.737.464.156.313	7.174.371.778.453
Jumlah	**355.511.133.723.811**	**303.041.293.068.751**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp52.469.840.655.060 atau 17,31 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.2.2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Arus kas keluar yang berasal dari Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 25,00 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.2.3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Arus kas keluar yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0 dan Rp2.225.200.000.000. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp2.225.200.000.000 atau 100,00 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.2.4. Penyertaan Modal Negara

Arus kas keluar yang berasal dari Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp42.149.731.758.522 dan Rp41.421.985.992.266, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	35.165.229.891.758	39.862.353.463.337
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	1.984.501.866.764	1.559.632.528.929
Penyertaan Modal Negara Lainnya	5.000.000.000.000	-
Jumlah	**42.149.731.758.522**	**41.421.985.992.266**

Kenaikan Penyertaan Modal Negara pada Tahun 2024 salah satunya disebabkan karena adanya PMN Lainnya yang dialokasikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan fasilitas pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspor nasional.

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp727.745.766.256 atau 1,76 persen dari Tahun 2023.

F.2.2.2.5. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Arus kas keluar yang berasal dari Pengeluaran Investasi Pemerintah pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.530.271.865.000 dan Rp53.382.030.644.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Investasi pemerintah	17.058.615.865.000	26.827.519.139.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Aset Negara	7.500.000.000.000	25.424.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPDLH	512.670.000.000	800.000.000.000
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	1.458.986.000.000	330.511.505.000
Jumlah	**26.530.271.865.000**	**53.382.030.644.000**

Penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2024 salah satunya disebabkan karena penurunan Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset-Aset Negara sebesar Rp17.924.000.000.000. Namun demikian terdapat kenaikan Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.128.474.495.000. Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah merupakan pengeluaran dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Proyek percepatan pembangunan infrastruktur antara lain proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp26.851.758.779.000 atau 50,30 persen dari Tahun 2023.

F.2.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp614.280.048.971.953 dan Rp445.794.317.054.009.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp168.485.731.917.944 atau 37,39 persen dari Tahun 2023. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	1.335.783.989.462.128	1.072.010.651.415.779
Arus Kas Keluar	721.503.940.490.175	626.216.334.361.770
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	**614.280.048.971.953**	**445.794.317.054.009**

F.2.3.1.Arus Kas Masuk

F.2.3.1.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.151.979.645.998.052 dan Rp902.837.385.270.107, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	944.123.231.773.300	757.734.589.688.370
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	131.314.145.000.000	90.373.466.054.058
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	56.419.615.865.000	37.225.200.000.000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	**1.151.979.645.998.052**	**902.837.385.270.107**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp249.142.260.727.945 atau 27,60 persen dari Tahun 2023.

a. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp944.123.231.773.300 dan Rp757.734.589.688.370, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	33.504.000.000.000	34.542.000.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	598.760.180.335.000	450.925.819.706.060
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang	224.750.751.438.410	224.088.336.686.968
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	54.213.300.000.000	13.830.000.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dalam Rangka Pembiayaan Proyek Melalui SBSN PBS	32.894.999.999.890	34.348.433.295.342
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara Dalam Negeri	**944.123.231.773.300**	**757.734.589.688.370**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp186.388.642.084.930 atau 24,60 persen dari Tahun 2023.

b. Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing

Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp131.314.145.000.000 dan Rp90.373.466.054.058, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Obligasi Negara Valuta Asing	92.879.895.000.000	58.975.466.054.058
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing – Jangka Panjang	38.434.250.000.000	31.398.000.000.000
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing	**131.314.145.000.000**	**90.373.466.054.058**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp40.940.678.945.942 atau 45,30 persen dari Tahun 2023.

c. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp56.419.615.865.000 dan Rp37.225.200.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	56.381.000.000.000	35.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	-	2.225.200.000.000
Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU	38.615.865.000	-
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing	**56.419.615.865.000**	**37.225.200.000.000**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp19.194.415.865.000 atau 51,56 persen dari Tahun 2023.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp20.122.653.359.752 dan Rp17.504.129.527.679, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	18.649.607.994.305	16.672.197.186.598
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	1.473.045.365.447	831.932.341.081
Jumlah Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara – Valuta Asing	**20.122.653.359.752**	**17.504.129.527.679**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp2.618.523.832.073 atau 14,96 persen dari Tahun 2023

F.2.3.1.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp179.765.350.519.789 dan Rp162.650.352.798.218, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Tunai	60.028.929.576.507	82.990.780.840.684
Penarikan Pinjaman Kegiatan	119.736.420.943.282	79.659.571.957.534
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**179.765.350.519.789**	**162.650.352.798.218**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp17.114.997.721.571 atau 10,52 persen dari Tahun 2023.

F.2.3.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian pemberian pinjaman yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, BUMN, dan nonpemerintah. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.023.538.398.833 dan Rp6.374.398.495.969, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	268.991.443.728	2.041.258.121.405
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.754.546.955.105	4.333.140.374.564
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	**4.023.538.398.833**	**6.374.398.495.969**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp2.350.860.097.136 atau 36,88 persen dari Tahun 2023.

F.2.3.1.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Arus kas masuk yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp15.454.545.454 dan Rp148.514.851.485. Pembiayaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp133.060.306.031 atau 89,59 persen dari Tahun 2023.

F.2.3.2.Arus Kas Keluar

F.2.3.2.1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Arus kas keluar yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam

negeri dan valuta asing. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp629.807.306.465.724 dan Rp542.860.028.458.620, dengan rincian sebagai berikut

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara - Rupiah	526.536.261.326.963	441.536.249.313.377
Pengeluaran Untuk Pelunasan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	98.167.863.026.150	98.378.018.023.089
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	**629.807.306.465.724**	**542.860.028.458.620**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp86.947.278.007.104 atau 16,02 persen dari Tahun 2023.

F.2.3.2.2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Arus kas keluar yang berasal dari Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp87.454.196.251.177 dan Rp81.450.306.790.493, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Tunai	47.109.598.460.079	41.620.171.896.141
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Kegiatan	40.344.597.791.098	39.830.134.894.352
Jumlah	**87.454.196.251.177**	**81.450.306.790.493**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp6.003.889.460.684 atau 7,37 persen dari Tahun 2023.

F.2.3.2.3. Pemberian Pinjaman yang bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement*

Arus kas keluar yang berasal dari Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* merupakan pengeluaran pemerintah atas pemberian pinjaman dalam negeri dan pemberian pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk Pemda/BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.242.437.773.274 dan Rp1.905.999.112.657. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp2.336.438.660.617 atau 122,58 persen dari Tahun 2023.

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp154.149.780.567.127, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp414.403.152.941.181, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp614.280.048.971.953, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp45.727.115.463.645.

F.2.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp24.391.505.836.682 dan Rp88.761.873.212.786. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp64.370.344.396.104 atau 72,52 persen dari Tahun 2023. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Perhitungan Fihak Ketiga (neto)	(215.134.088.039)	620.329.866.094
Transito (neto)	1.581.530.989.101	14.112.089.380.009
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	23.022.929.532.814	74.033.583.845.555
Kiriman Uang antar Rekening Bank (neto)	2.179.402.806	(4.129.878.872)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	**24.391.505.836.682**	**88.761.873.212.786**

F.2.4.1.Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Fihak Ketiga. PFK Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar minus Rp215.134.088.039 dan Rp620.329.866.094, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	29.645.135.369.904	26.362.502.018.784
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.505.498.347	281.475.805.508
Penerimaan PFK 3 % Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah	9.803.358.930.922	9.599.384.497.952
Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	(44.232.021)	(4.132.913.455)
Penerimaan Setoran / Potongan PFK 1% Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	12.538.453.689	5.834.445.783
Penerimaan PFK Lain-lain	586.157.850.977	475.468.203.386
Jumlah Penerimaan PFK	**40.329.651.871.818**	**36.720.532.057.958**
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	21.664.230.159.735	21.216.282.180.842
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	491.306.579	764.851.794
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	736.026.385.000	155.469.306.417
Penerimaan PFK Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	412.514.910.617	393.105.319.168
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	70.925.927.774.598	69.856.768.617.317
Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN	1.500.000.000	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan Dana Otonomi Khusus	1.745.310.844	-
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**93.742.435.847.373**	**91.622.390.275.538**
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 10% Gaji	(24.010.584.471.320)	(22.022.336.757.752)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(2.501.393.206.460)	(2.136.557.552.256)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(282.493.331.283)	(281.484.698.786)
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	(13.094.545.547.212)	(11.674.123.619.963)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1% Gaji	(12.519.651.016)	(6.382.422.812)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(551.219.809.020)	(476.519.434.552)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(40.452.756.016.311)**	**(36.597.404.486.121)**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(21.755.986.558.066)	(20.719.693.394.609)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	(764.851.794)	(151.343.770)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	(736.026.385.000)	(155.469.306.417)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Kontribusi Pajak Rokok untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan	(412.514.910.617)	(393.105.319.168)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	(70.925.927.774.598)	(69.856.768.617.317)
Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Mendukung Program PEN	(1.500.000.000)	-
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan Dana Otonomi Khusus	(1.745.310.844)	-
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga Setoran/Potongan Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	**(93.834.465.790.919)**	**(91.125.187.981.281)**
Jumlah Perhitungan Fihak Ketiga (neto)	**(215.134.088.039)**	**620.329.866.094**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp835.463.954.133 atau 134,68 persen dari Tahun 2023.

F.2.4.2. Transito (Neto)

Transito (neto) merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Transito (neto) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.581.530.989.101 dan Rp14.112.089.380.009, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	7.389.959.711.159	8.273.143.316.477
Penerimaan Dana Dari BLU pada Rekening BUN	306.456.497.170	219.039.555.000
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	7.890.986.181	375.405.222
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	43.755.133.894.202	45.089.190.780.727
Penerimaan Escrow	44.856.854.496.729	44.573.170.856.122
Jumlah Penerimaan Transito	**96.316.295.585.441**	**98.154.919.913.548**
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(7.422.641.003.314)	(8.217.321.050.502)
Pengembalian Penerimaan Surplus BLU pada Rekening Kas Negara ke Rekening Kas BLU	(306.456.497.170)	(219.039.555.000)
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(7.890.986.181)	(375.405.222)
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	(43.729.731.126.229)	(45.107.694.556.983)
Pengeluaran Escrow	(43.268.044.983.446)	(30.498.399.965.832)
Jumlah Pengeluaran Transito	**(94.734.764.596.340)**	**(84.042.830.533.539)**
Jumlah Transito (neto)	**1.581.530.989.101**	**14.112.089.380.009**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp12.530.558.390.908 atau 88,79 persen dari Tahun 2023.

F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga timbul antara lain karena transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yang mana termasuk penerimaan DBH pada rekening TDF-TKD, Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas, dan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp23.022.929.532.814 dan Rp74.033.583.845.555, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	63.810.630.958.302	85.578.399.047.009
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.248.540.286.768.333	1.015.151.541.826.392
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	43.288.138.641	4.432.932.220.347
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga NonMigas	913.587.576.712.203	774.821.766.650.951
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	11.123.038.319.003	14.797.174.012.904
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	215.365.785.806.611	155.068.282.181.648
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	30.644.849.222.042	22.968.090.595.650
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	21.523.200.280	45.350.255.055
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	**2.483.136.979.125.415**	**2.072.863.536.789.956**
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(63.354.669.888.701)	(85.700.490.333.165)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(1.200.232.933.248.118)	(894.226.796.795.500)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(42.309.794.012.363)	(47.446.280.050.848)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non-Migas	(913.417.729.764.351)	(773.583.870.244.984)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(11.123.038.319.003)	(14.793.837.834.010)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(210.365.785.806.611)	(160.068.282.181.648)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(19.288.807.528.777)	(22.965.422.805.274)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(21.291.024.677)	(44.972.698.972)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	**(2.460.114.049.592.601)**	**(1.998.829.952.944.401)**
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto)	**23.022.929.532.814**	**74.033.583.845.555**

Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp51.010.654.312.741 atau 68,90 persen dari Tahun 2023.

F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN. Selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU disebabkan transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas belum sepenuhnya dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang, serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto) Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.179.402.806 dan minus Rp4.129.878.872, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024 (*Audited*)	Tahun 2023 (*Audited*)
Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	23.993.912.119.408.940	21.614.784.151.976.050
Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	(23.993.909.940.006.134)	(21.614.788.281.854.922)
Jumlah Kiriman Uang Antar Rekening Bank (neto)	**2.179.402.806**	**(4.129.878.872)**

Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp6.309.281.678 atau 152,77 persen dari Tahun 2023.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 sebesar Rp3.536.140.446.352.577 dan Rp3.404.893.056.498.959. Nilai Ekuitas Awal tahun 2024 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2023 pada LKPP Tahun 2023 *Audited*.

G.2. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar minus Rp215.659.289.663.223 dan Rp31.626.165.809.863. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit kegiatan operasional, Surplus/Defisit kegiatan non operasional, dan Surplus/Defisit pos luar biasa. Rincian Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

G.3.1. PENYESUAIAN SILPA

Penyesuaian SiLPA pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.074.667.959.503 dan Rp1.498.554.940.209. Nilai tersebut merupakan penyesuaian selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan transaksi pengembalian pendapatan negara Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rincian Penyesuaian SiLPA disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian Akun	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
311211	SiLPA	2.128.035.811.698	1.603.949.124.314
311212	Koreksi Pendapatan Anggaran Yang lalu	(53.367.852.195)	(105.394.184.105)
	Jumlah	**2.074.667.959.503**	**1.498.554.940.209**

G.3.2. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.101.832.764.823 dan Rp5.454.942.591.117. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L dan BUN yang diakibatkan kesalahan dalam pencatatan atau penilaian persediaan. Koreksi Nilai Persediaan seluruhnya berasal dari K/L. Koreksi Nilai Persediaan yang signifikan berasal dari Kementerian Pertahanan sebesar Rp5.041.564.499.012 dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp1.807.033.966.043.

G.3.3. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp38.417.972.696.012 dan Rp56.981.718.247.281. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2024 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang disebabkan selain revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, dan Penyesuaian Konsolidasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.872.378.383.664	62.559.753.652.634
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	23.556.491.665.155	(5.494.721.601.883)
3. Penyesuaian Konsolidasi	(10.897.352.807)	(83.313.803.470)
Jumlah	**38.417.972.696.012**	**56.981.718.247.281**

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp14.167.053.395.780 yang antara lain disebabkan karena pencatatan aset melalui saldo awal, Kementerian Pertahanan sebesar Rp1.875.338.369.415 yang antara lain disebabkan karena pencatatan aset secara gelondongan, dan Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp1.570.381.610.881 yang antara lain disebabkan karena adanya pengembalian belanja modal yang mempengaruhi nilai aset.
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang signifikan terdapat pada BA 999.99 sebesar Rp24.097.104.122.331 yang berasal dari Kontraktor BLBI, PKP2B, BMN *Idle*, KKKS PPBMN, KKKS SKK Migas, KKKS BPMA, dan

KKKS Dit. PKN, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar minus Rp903.539.397.648 yang berasal dari koreksi ATB Lainnya yang telah tercatat sebagai arsip elektronik di ANRI, dan BA 999.03 Rp792.365.999.831 yang berasal dari pengakuan penambahan PI - Eks Pertamina.

3. Penyesuaian konsolidasi sebesar minus Rp10.897.352.807 merupakan koreksi nilai aset non revaluasi akibat penyajian ganda aset tanah antara BPS dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan dan Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan dengan Kemendikbudristek, Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Keuangan, serta penyesuaian atas transaksi TKTM.

G.3.4. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.997.241.878.759 dan Rp2.146.315.181.897. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk atas persediaan dan aset tetap. Koreksi Atas Reklasifikasi yang signifikan terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp2.280.708.659.419, sementara itu Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp716.153.266.380, dan BUN sebesar Rp379.952.960.

G.3.5. MUTASI EKUITAS BERSIH UBL BUKAN SATKER

Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.437.380.985.498 dan Rp229.322.791.975. Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker merupakan mutasi saldo ekuitas pada Neraca Konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan *net* aset satker Unit Badan Lainnya.

G.3.6. KOREKSI LAINNYA

Koreksi Lainnya pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.837.340.294.403 dan Rp33.310.370.291.276. Koreksi Lainnya merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian SiLPA, Koreksi Nilai Persediaan dan Aset, Koreksi atas Reklasifikasi, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang memengaruhi ekuitas. Koreksi Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

Koreksi Lainnya	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1. Koreksi Lainnya pada K/L	(20.020.658.657.385)	(3.231.239.054.169)
2. Koreksi Lainnya pada BUN	69.599.141.158.319	37.762.852.963.389
3. Penyesuaian konsolidasi LKPP	1.258.857.793.469	(1.221.243.617.944)
Jumlah	**50.837.340.294.403**	**33.310.370.291.276**

a. Koreksi Lainnya pada K/L

Koreksi Lainnya pada K/L pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar minus Rp20.020.658.657.385 dan minus Rp3.231.239.054.169. Koreksi Lainnya pada K/L pada 31 Desember 2024 yang paling signifikan antara lain terdapat pada Badan Pangan Nasional sebesar minus Rp12.782.206.289.377 yang antara lain berasal dari penyesuaian utang bantuan pangan, SPHP Beras Triwulan IV, *pending matters* penyaluran bantuan pangan, dan sisa pembayaran bantuan pangan berupa beras dan tunggakan ke Bulog tahun 2023. Selain itu, Koreksi Lainnya yang signifikan terdapat pada Kementerian ESDM sebesar minus Rp3.065.205.266.517 dan Kementerian Keuangan sebesar minus Rp1.483.905.474.462.

b. Koreksi Lainnya pada BUN

Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp69.599.141.158.319 dan Rp37.762.852.963.389. Koreksi Lainnya pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

Bagian Anggaran	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BA BUN 999.00 Kuasa BUN	(54.918.509.819.096)	(34.645.896.571.039)
BA BUN 999.01 Pengelolaan Utang	(4.421.635.392.466)	(348.433.807.838)

Bagian Anggaran	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
BA BUN 999.02 Pengelolaan Hibah	2.628.551.786.158	1.262.041.438.199
BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	69.519.904.203.683	31.588.223.378.734
BA BUN 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman	(9.799.919.288)	(147.939.140.574)
BA BUN 999.05 Transfer ke Daerah	361.495.176.677	8.702.029.740.761
BA BUN 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(10.521.889.415.919)	(3.592.823.821.542)
BA BUN 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain	12.142.936.742.389	(515.642.683.752)
BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	56.177.493.096.493	31.224.446.851.326
Penyesuaian Koreksi Lainnya pada BUN	(1.359.405.300.312)	4.236.847.579.114
Jumlah	**69.599.141.158.319**	**37.762.852.963.389**

Koreksi Lainnya pada BUN pada 31 Desember 2024 yang paling signifikan berasal dari koreksi lainnya pada Kuasa BUN BA 999.03, BA 999.99, dan BA 999.00. Koreksi Lainnya pada BUN BA 999.03 sebesar Rp69.519.904.203.683 dapat dijelaskan sebagai berikut.

No	Nama UAKPA	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
1	KPA DJPK		(36.456.899.772)
2	KPA Dit PNBP DJA	97.264.570.618.578	82.058.488.844.136
3	BLU LPDB KUMKM	1.791.139.472	(13.663.136.300)
4	KPA BLU LMAN	16.490.192.956	238.568.277.058
5	KPA Kementerian BUMN	(34.340.930.319.709)	(89.325.986.290.583)
6	KPA DJKN	(12.447.320.366.079)	11.983.072.486.909
7	KPA Dit SMI	(1.731.723.215.099)	1.230.333.650.980
8	KPA BP Tapera	931.873.817	184.251.838
9	UAIP	19.945.769.590.821	25.288.212.501.603
10	KPA Badan Bank Tanah	809.800.009.715	130.663.791.650
11	KPA BLU BPDLH	459.357.063	1.342.599.199
12	KPA BLU LDKPI	65.322.148	-
13	KPA Set BPJT	1	-
14	KPA Dit. EAS	-	33.463.302.016
Jumlah		**69.519.904.203.684***	**31.588.223.378.734**

**Selisih Rp1 karena pembulatan*

Koreksi Lainnya pada BUN BA 999.99 sebesar Rp56.177.493.096.493 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
UAPBUN TK DJPb	51.274.375.592.196	37.270.922.232.041
UAPBUN TK DJKN	2.049.469.265.196	7.342.838.894.595
UAPBUN TK DJA	2.853.648.239.101	(13.389.316.962.828)
UAPBUN TK BKF	-	2.687.518
Jumlah	**56.177.493.096.493**	**31.224.446.851.326**

Koreksi Lainnya pada BUN BA 999.00 sebesar minus Rp54.918.509.819.096 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akun	Rincian Akun	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
311111	SAL	-	(2.804.406)
311112	Penggunaan SAL	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
391111	Ekuitas	1.462.490.180.904	354.106.233.367
Jumlah		**(54.918.509.819.096)**	**(34.645.896.571.039)**

Sedangkan pada BUN BA 999.08 nilai Koreksi Lainnya adalah sebesar Rp12.142.936.742.389 yang antara lain disebabkan karena terdapat transaksi pengalihan hutang kepada Satker Badan Pangan Nasional yang merupakan kewajiban jangka pendek utang kepada pihak ketiga sebesar Rp12.133.730.565.887 dalam rangka Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801). Satker Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah dilikuidasi berdasarkan penyampaian surat oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan (DCP) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor 20/KU.01.01/B.3/09/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian Laporan Keuangan Likuidasi Satker DCP BA BUN (999801) dan atas kewajiban diestimasi sebesar

Rp12.133.730.565.887 telah dialihkan dari BA 999.08 kepada BA 125 berdasarkan BAST Utang Piutang Nomor 14/KU.01.01/B.3/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024. Selain itu, terdapat nilai Koreksi Lainnya sebesar Rp379.952.960 di BA 999.08 telah disajikan pada pos Koreksi atas Reklasifikasi Aset.

c. Penyesuaian Konsolidasi LKPP

Penyesuaian Koreksi Lainnya pada konsolidasi LKPP pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.258.857.793.469 dan minus Rp1.221.243.617.944. Penyesuaian konsolidasian LKPP antara lain berasal dari eliminasi penyisihan piutang atas Resiprokal Utang-Piutang BHP Frekuensi TVRI dan Kominfo, eliminasi mutasi Kas di BP yang berasal dari transaksi transitoris UP/TUP, dan eliminasi mutasi transitoris *Escrow*.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing bernilai nihil. Transaksi Antar Entitas *Audited* Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2024 (*Audited*)	31 Desember 2023 (*Audited*)
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.225.774.731.274.054	12.667.170.944.867.453
Diterima dari Entitas Lain	(14.271.764.785.271.858)	(12.694.687.653.104.387)
Pengesahan Hibah Langsung	43.886.050.258.776	26.515.826.164.869
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(218.091.549.960)	(42.119.811.134)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	2.628.551.786.158	1.262.041.438.199
Setoran Surplus BLU	(306.456.497.170)	(219.039.555.000)
Transfer Keluar	(284.477.501.473.560)	(289.902.457.955.992)
Transfer Masuk	284.477.501.473.560	289.902.457.955.992
Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	(63.985.813.942)	(3.121.899.799.303)
Transfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	63.985.813.942	3.121.899.799.303
Jumlah	**-**	**-**

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari lima jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu pada K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga. Sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN 999.02.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran surplus kas BLU ke kas negara dari BLU atau pengembalian setoran Surplus BLU dari kas negara ke kas BLU. Transfer Keluar Kas BLU dan Transfer Masuk Kas BLU merupakan transaksi perpindahan Kas BLU dari satu BLU ke BLU lain yang dapat terjadi salah satunya karena likuidasi.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN. Rincian per K/L dan BUN terkait Transfer Keluar dan Transfer Masuk dapat dilihat pada **Lampiran 32.**
5. Transaksi Antar Entitas akibat pembentukan dana lainnya pada Rekening *Escrow* dalam rangka pengadaan Alutsista pada Kementerian Pertahanan dan Rekening RPATA sehubungan dengan pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Dana lainnya pada Rekening *Escrow* dan RPATA dicatat pada BUN dan pada LK Kementerian Pertahanan dan LK tiap-tiap Kementerian/Lembaga.

G.5. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan kenaikan ekuitas untuk periode 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp112.792.853.084.225 dan Rp131.247.389.853.618. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit-LO, Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Transaksi Antar Entitas.

G.6. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.423.347.593.268.352 dan Rp3.536.140.446.352.577. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp3.536.140.446.352.577 dikurang penurunan ekuitas sebesar Rp112.792.853.084.225.

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah LKPP Tahun 2024 (*Audited*) yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Kami berharap, informasi dalam LKPP Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dapat menjadi *feedback* bagi pelaksanaan APBN selanjutnya.

Jakarta, 19 Mei 2025

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA